



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Perwakilan Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi D.I. Yogyakarta

2024

Berencana Itu Keren

Sambutan



Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi di dalam LKIP ini memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu tahun anggaran 2024 dan menyajikan informasi capaian kinerja, proses pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam deskripsi yang tertuang dalam analisis capaian kinerja.

Kami berharap LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif dalam menilai kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai masukan dalam upaya peningkatan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2025
Kepala,



Mohamad Iqbal Apriansyah, SH., M.P.H



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN
Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta

LKIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Tahun Anggaran 2024

DAFTAR ISI

Sambutan.....	i
EXECUTIVE SUMMARY	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Mandat dan Peran Strategis	4
D. Program Reformasi Birokrasi	5
E. Permasalahan, Tantangan dan Peluang	6
F. Isu Strategis.....	8
BAB II	11
PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2024.....	16
C. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2025.....	22
D. Perjanjian Kinerja	28
E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program	29
BAB III	37
AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja BKKBN	37
B. Realisasi Anggaran	107
C. Kinerja dan Capaian Lainnya	118
D. Evaluasi Kinerja.....	158
E. Perbaikan Perencanaan Program dan Anggaran TA 2024.....	166
BAB IV	168
PENUTUP	168
A. Penutup	168
B. LAMPIRAN.....	173

DAFTAR TABEL

Tabel 0-1 Trend pencapaian indikator kinerja 2022-2024	viii
Tabel 3-0-1 Skala Pengukuran Kinerja	37
Tabel 3-0-2 target dan capaian indikator kinerja utama (IKU) DIY 2024	38
Tabel 3-0-3 perbandingan target dan capaian IKU 2024 DIY dan Nasional	39
Tabel 3-0-4 Perbandingan target dan capaian IKK 2024	48
Tabel 3-0-5 Perbandingan target dan capaian IKK 2024 3 Tahun	52
Tabel 3-0-6 Perbandingan capaian.....	56
Tabel 3-0-7 Perbandingan PIK-R dan BKR	57
Tabel 3-0-8 sebaran BKL	58
Tabel 3-0-9 S1 Sekolah Lansia BKL	60
Tabel 3-0-10 S2 Sekolah Lansia BKL	60
Tabel 3-0-11 S3 Sekolah Lansia BKL	61
Tabel 3-0-12 Persentase Pemda GDPK.....	64
Tabel 3-0-13 Pokja Bangsa Kencana yang efektif	67
Tabel 3-0-14.....	78
Tabel 3-0-15 capaian kinerja output ppn dan stunting	88
Tabel 3-0-16 capaian kinerja output ppn dan stunting dalam 3 tahun	90
Tabel 3-0-17 BKL propn.....	94
Tabel 3-0-18.....	95
Tabel 3-0-19 Rumah Dataku Paripurna Lokus Pro PN	97
Tabel 3-0-20 Realisasi anggaran TA. 2024 per Jenis Belanja	108
Tabel 3-0-21 Realisasi Anggaran TA. 2024 per program kegiatan	109
Tabel 3-0-22 Realisasi anggaran Prioritas Nasional tagging stunting (PN Stunting) TA. 2024	109
Tabel 3-0-23 Realisasi anggaran Prioritas Nasional Non Tagging Stunting (PN) TA. 2024	111
Tabel 3-0-24 Realisasi DAK Fisik TA. 2024	114
Tabel 3-0-25 Realisasi DAK BOKB TA. 2024	114
Tabel 3-0-26.....	120
Tabel 3-0-27.....	124
Tabel 3-0-28 Capaian indikator stunting pada Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2024	140
Tabel 3-0-29 Capaian indikator stunting pada Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2024 dalam 3 tahun ..	141
Tabel 3-0-30 Jumlah TPK.....	147
Tabel 3-31 Nilai SAKIP 2 tahun terakhir	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-0-1 Sistem Kerja Perwakilan BKKBN DIY.....	3
Gambar 1-0-2 Sistem Kerja Perwakilan BKKBN DIY Pergantian Pejabat.....	4
Gambar 2-0-1 Pohon Kinerja Perwakilan BKKBN DIY	11
Gambar 1-0-2 Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN DIY	29
Gambar 2-0-3 Kegiatan Radalgram Perwakilan BKKBN DIY.....	31
Gambar 2-0-4 Kegiatan Rakerda Tahun 2024	32
Gambar 2-0-5 Monev RAPK Tahun 2024.....	33
Gambar 2-0-6 Kegiatan Rapat Internal Perwakilan BKKBN DIY	36
Gambar 3-0-1 Trend Capaian TFR	40
Gambar 3-0-2 Trend Capaian mCPR.....	42
Gambar 3-0-3 Trend Capaian Unmet Need.....	43
Gambar 3-0-4 Trend Capaian ASFR.....	44
Gambar 3-0-5 Trend Capaian iBangga	46
Gambar 3-0-6 Trend Capaian MUKP	47
Gambar 3-0-7 Grafik Capaian Jumlah Keluarga yang Mengakses PPKS 3 Tahun Terakhir.....	62
Gambar 3-0-8 Grafik Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Ekonomi Keluarga 3 Tahun Terakhir	63
Gambar 3-0-9 Perbandingan Capaian Kinerja Penyuluh KB Tahun 2022-2024	76
Gambar 3-0-10 Grafik Perkembangan 1000 HPK	91
Gambar 3-0-11 Grafik PIK R dan BKR yang mendapatkan fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	92
Gambar 3-0-12 Grafik Capaian Rumah DataKu Paripurna Pro PN Tahun 2021-2024.....	96
Gambar 3-0-13 Grafik Realisasi Anggaran TA 2020-2024	112
Gambar 3-0-14 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024.....	113
Gambar 3-0-15 Grafik Realisasi DAK Fisik 2020-2024	115
Gambar 3-0-16 Grafik Realisasi DAK BOKB 2020-2024	115
Gambar 3-0-17 Diagram Komposisi Pegawai Perwakilan BKKBN DIY.....	116
Gambar 3-0-18 Diagram Komposisi Jabatan Pegawai Perwakilan BKKBN DIY	116
Gambar 3-0-19 Diagram Status PKB Perwakilan BKKBN DIY	117
Gambar 3-0-20 Diagram Sebaran Jabatan PKB Perwakilan BKKBN DIY.....	117
Gambar 3-0-21 Kegiatan Duta Lansia Istimewa 2024	121
Gambar 3-0-22 Kegiatan Rehab Rumah Keluarga Risiko Stunting (Baznas)	123
Gambar 3-0-23 Perolehan Predikat ZI WBK	126
Gambar 3-0-24 Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berpredikat Sangat Baik	127
Gambar 3-0-25 Penghargaan Terbaik Pertama K/L Berdasarkan IKPA.....	127
Gambar 3-0-26 Penghargaan Bupati Bantul	128
Gambar 3-0-27 Penghargaan sebagai Juara I Pengelolaan Keuangan dan BMN Terbaik	129
Gambar 3-0-28 Apresiasi Kinerja Baik.....	129
Gambar 3-0-29 Peringkat 2 Evaluasi Kinerja Semester II Tahun 2024	130
Gambar 3-0-30 Piagam Penghargaan Penyebarluasan SiBima	131

Gambar 3-0-31 Piagam Penghargaan TPK Penyaji Analisa dan Tata Laksana Kasus Pembelajaran Berbasis Masalah pada Kelas TPK Hebat Seri II Tahun 2024	132
Gambar 3-0-32 Piagam Penghargaan GDPK Award 2024	133
Gambar 3-0-33 Penghargaan Rumah DataKu Kategori Konvensional.....	134
Gambar 3-0-34 Penghargaan Pencapaian 100% Target Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas	135
Gambar 3-0-35 Tren Prevalensi Stunting 2013-2023	136
Gambar 3-0-36 Tren Prevalensi Stunting 2018-2023	136
Gambar 3-0-37 Tren Prevalensi Stunting Berdasarkan Surveilans Status Gizi.....	137
Gambar 3-0-38 Persentase Keluarga Risiko Stunting	138
Gambar 3-0-39 Indikator Percepatan Penurunan Stunting.....	139
Gambar 3-0-40 Cakupan Keluarga Berisiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	143
Gambar 3-0-41 Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kelas BKB Tentang Pengasuhan 1000 HPK	144
Gambar 3-0-42 Tren Capaian Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	145
Gambar 3-0-43 Tren Capaian Persentase Desa/Kelurahan yang TPKnya Melakukan KIE Kelompok Minimal 1 Kali Per Bulan	150
Gambar 3-0-44 Tren Capaian Persentase Baduta 0-23 Bulan yang Dipantau Perkembangannya Sesuai Standard	152
Gambar 3-0-45 Tren Capaian Persentase Balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar.....	153
Gambar 3-0-46 Tren Capaian Cakupan Catin/CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah	154
Gambar 3-47 Tren Capaian Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD).....	155

EXECUTIVE SUMMARY

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat. Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berisi sasaran strategis dan sasaran program dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024.

Renstra tersebut memuat Visi BKKBN yaitu **“terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”**, dengan misi:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai wujud komitmen Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan Renstra. Pada Perjanjian Kinerja ditetapkan 6 sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (*TFR*)

2. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (*CPR*) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
4. Menurunnya Angka Kelahiran remaja
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*)
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (*MUKP*)

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdapat 91 (sembilan puluh satu) indikator kinerja yang terdiri atas 6 (enam) Indikator Kinerja Utama [IKU], 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan [IKK], 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Rincian Output [RO], dan 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Stunting. Semua IKU dapat dicapai dengan skala sangat baik (hijau) dengan persentase capaian sebesar 92,64% - 125%. Terdapat dua IKK yang dicapai dengan baik (biru) yaitu Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter dengan capaian 81,10% dan Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*) dengan capaian 87,05%. Semua indikator kinerja RO baik kegiatan reguler, tagging ProPN, tagging prioritas K/L maupun tagging stunting dapat dicapai sebesar 100% (sangat baik). Terdapat satu indikator kinerja tambahan berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang pencapaiannya kurang (merah) sebesar 32,46% yaitu Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan.

Trend pencapaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 0-1 Trend pencapaian indikator kinerja 2022-2024

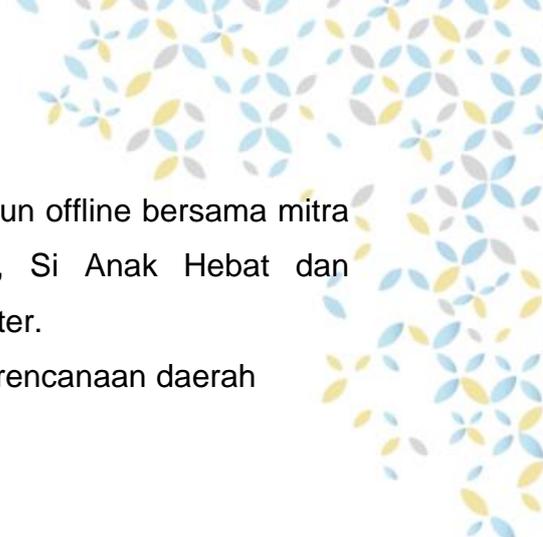
NO	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun)	1,82	1,93	93,96%	1,89	1,81	104,23%	1,82	1,83	99,45%
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	57,18	57,10	99,86%	56,01	58,2	103,91%	58,20%	63,10%	108,42%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	14,5	19,30	66,90%	19,55	14,2	127,37%	15,20%	11,40%	125,00%
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	14	9,60	131,43%	13	6,7	148,46%	9,6	9	106,25%

5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,36	59,42	90,91%	67,66	64,12	94,77%	69,95%	64,80%	92,64%
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23	23,20	100,87%	23	23,5	102,17%	23,5	23	97,87%

Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 99,42%. Realisasi anggaran tersebut sebesar Rp 64.269.394.749 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 64.641.680.000. Selama periode tahun 2024, alokasi anggaran terealisasi dengan baik meskipun belum 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran cukup efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan memenuhi target Renstra adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Teknologi Informasi seperti media sosial (instagram, tiktok, facebook, youtube, whatsapp).
2. Menggiatkan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok (capaian programnya rendah).
4. Pelibatan Generasi Z menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan karena mobilitasnya yang tinggi dan paham dalam hal Teknologi Informasi.
5. Mengoptimalkan peran mitra pentahelix (perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta, masyarakat/komunitas, media massa) dalam mendukung program
6. Mengadakan program parenting bersama sekolah untuk meningkatkan keterlibatan orang tua.
7. Mempromosikan konten-konten inspiratif di media sosial tentang pentingnya peran keluarga dalam pembentukan karakter.

- 
8. Menyelenggarakan seminar baik secara online maupun offline bersama mitra strategis (Himpisi, IDAI, Lingkar Ayah Indonesia, Si Anak Hebat dan IPPI) dengan tema pengasuhan anak berbasis karakter.
 9. Peningkatan pemanfaatan GDPK dalam dokumen perencanaan daerah



L 2
K 0
I 2
P 4

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi:

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- c. Mandat dan Peran Strategis
- d. Program Reformasi Birokrasi
- e. Permasalahan, Tantangan, dan Peluang

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perwakilan BKKBN DIY berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, BKKBN berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020 – 2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” dan mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana BKKBN di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat untuk mendukung agenda prioritas tersebut.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Perka BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 (pasal 2), Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan

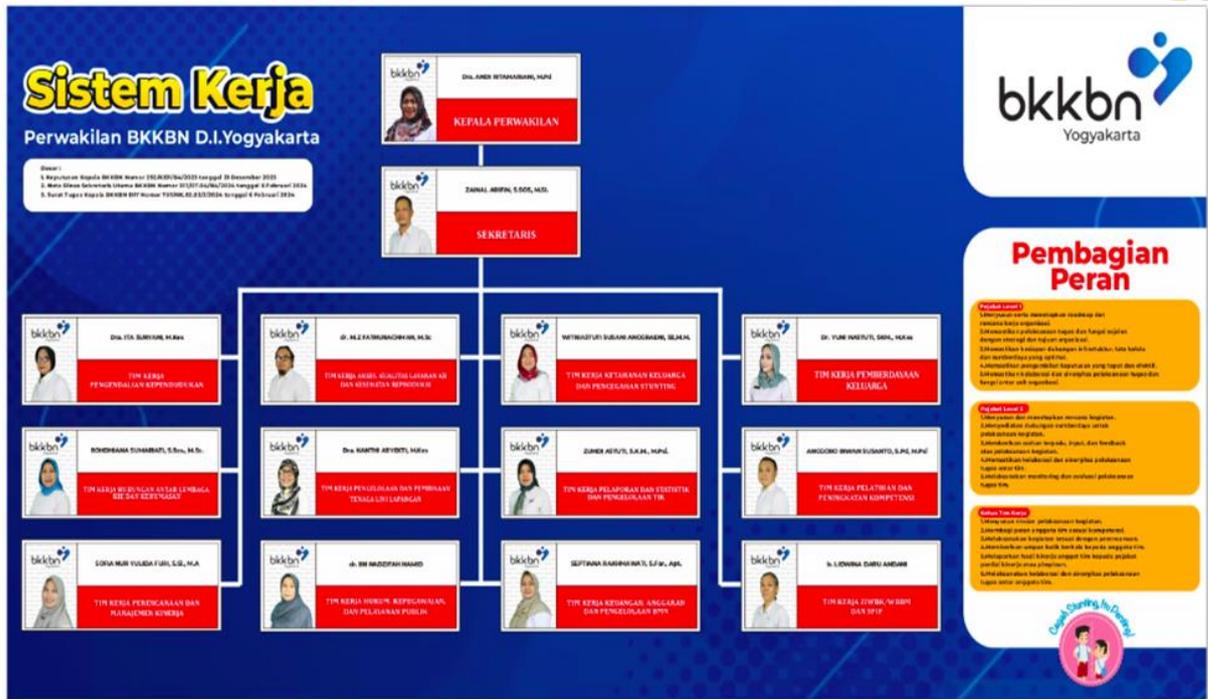
tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Berpedoman pada Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 292/KEP/B4/2023 Tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Nota Dinas Sekretaris Utama BKKBN Nomor 317/OT.04/B4/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Rekomendasi Tim Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi DIY, diterbitkanlah Surat Tugas Kepala Perwakilan BKKBN DIY Nomor: 797/HK.02.02/J/2024 tanggal 6 Februari 2024. Sistem Kerja Perwakilan BKKBN DIY dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yakni Dra. Andi Rita Mariani,

M.Pd. dan membawahi 1 (satu) Sekretaris serta 12 (Dua Belas) Tim Kerja. Adapun bagan organisasi Perwakilan BKKBN DIY digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1-0-1 Sistem Kerja Perwakilan BKKBN DIY



Tanggal 1 Juni 2024, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Dra. Andi Rita Mariani, M.Pd, memasuki purna tugas. Sebagai penggantinya, Kepala BKKBN menunjuk Mohamad Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H selaku Plt. Kepala Perwakilan BKKBN DIY melalui Surat Perintah Nomor: 38/KP.06.01/B2/2024 tanggal 27 Mei 2024. Setelah melalui berbagai tahapan dalam proses Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan BKKBN, Mohamad Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H terpilih sebagai Kepala Perwakilan BKKBN DIY definitif berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 17/KP.05.01/PEG/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama tanggal 15 Agustus 2024 dan kemudian dilantik oleh Kepala BKKBN pada tanggal 19 Agustus 2024. Selain itu, Mohammad Iqbal, S.H., M.P.H juga dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BKKBN DIY oleh Gubernur DIY pada tanggal 7 Oktober 2024.

Di samping terjadi pergantian pejabat level 1 (Kepala Perwakilan), pada tahun 2024 di Lingkungan Perwakilan BKKBN DIY juga mengalami pergantian pejabat level 2 (Sekretaris) dikarenakan Zainal Arifin S.Sos., M.Si selaku sekretaris saat itu ditetapkan sebagai Kepala UPT Balai Pendidikan dan

Pelatihan Kependudukan dan KB Ambarawa berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 25/KP.05.01/PEG/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan BKKBN tanggal 4 September 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris, Kepala Perwakilan BKKBN DIY mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 5266/KP.06.01/J/2024 tanggal 6 September 2024 dan Surat Perintah Nomor: 6172/KP.06.01/J/2024 tanggal 1 November 2024 yang menunjuk Rohdhiana Sumariati, S.Sos., M.Sc, sebagai Plt. Sekretaris. Berikut ini bagan organisasi Perwakilan BKKBN DIY setelah adanya pergantian pejabat level 1 dan level 2 :

Gambar 1-0-2 Sistem Kerja Perwakilan BKKBN DIY Pergantian Pejabat



C. Mandat dan Peran Strategis

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN). Dalam Prioritas Nasional “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” BKKBN berperan dalam Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, Penguatan

Pelaksanaan Perlindungan Sosial, serta Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan pada Prioritas Nasional “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” BKKBN memiliki peran pada Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit pelaksana BKKBN di daerah diberi mandat untuk melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang terkait dengan Prioritas Nasional tersebut yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Program Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya dalam rangka memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan bersih dan baik sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. BKKBN telah menyusun *road map* Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020-2024.

Melalui Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam Road Map RB BKKBN 2020 – 2024 terdapat 3 (tiga) sasaran, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta pelayanan publik yang prima.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari hal-hal berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan penyederhanaan birokrasi agar lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif serta mampu bekerja efektif dan efisien, Kementerian PAN-RB menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. BKKBN selaku instansi pemerintah mendukung penerapan Peraturan tersebut melalui Surat Keputusan

Kepala BKKBN Nomor: 292/KEP/B4/2023 Tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Berdasar peraturan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta mengajukan usulan penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta dan disetujui dengan Nota Dinas Sekretaris Utama BKKBN Nomor 317/OT.04/B4/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Rekomendasi Tim Kerja Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta. Sebagai tindaklanjut atas nota dinas tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BKKBN DIY Nomor: 797/HK.02.02/J/2024 tanggal 6 Februari 2024 yang menetapkan sistem kerja di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12 (dua belas) tim kerja.

2. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 telah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian PAN-RB. Predikat ini diberikan kepada unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan.

E. Permasalahan, Tantangan dan Peluang

E.1. Permasalahan dan Tantangan

Beberapa permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

- a. Potensi penurunan capaian angka kebutuhan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terpenuhi (*unmet need*) sampai pada angka satu digit. Berdasarkan data Pemutakhiran PK-24, *unmet need* DIY tahun 2024 sebesar 11,40%.
- b. Peningkatan kesertaan KB Pasca Persalinan di DIY. Berdasarkan data capaian pelayanan KB Pasca Persalinan pada SIGA dibandingkan dengan

- data persalinan dari Dinas Kesehatan DIY tahun 2024, maka capaian KB Pasca Persalinan di DIY tahun 2024 sebesar 53,17%.
- c. Capaian TFR DIY berdasarkan data Pemutakhiran PK-24 sebesar 1,83. Di satu sisi, DIY telah berhasil melampaui capaian TFR nasional sebesar 2,11 akan tetapi hal ini juga bisa menjadi ancaman bagi keadaan penduduk tumbuh seimbang. Tantangan yang ada adalah bagaimana kita dapat menjaga TFR ini pada kisaran ideal tanpa membiarkan angka TFR ini turun terlalu rendah. TFR yang terlalu rendah jika dibiarkan maka akan mencapai *point of no return*, dimana TFR akan sangat sulit untuk dinaikkan kembali sehingga proporsi penduduk di masa depan akan didominasi oleh lansia dan pralansia, serta kekurangan generasi muda dan usia produktif.
 - d. Angka prevalensi stunting di Yogyakarta pada tahun 2022 berada pada angka 16,4 persen dan mengalami kenaikan sebesar 1,6 persen menjadi 18 persen pada tahun 2023 (SKI 2023). Pemerintah Indonesia menargetkan prevalensi Stunting sebesar 14% di tahun 2024 yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024.
 - e. Era digitalisasi menuntut kita berinovasi terutama dalam pencatatan dan pelaporan sehingga proses RR (*Recording Reporting*) dapat dilakukan secara cepat dan informasi program bangga kencana mudah dijangkau oleh masyarakat.

E.2. Peluang

Peluang yang dimiliki Perwakilan BKKBN DIY dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di DIY antara lain :

- a. Adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi landasan komitmen sinergi dalam mewujudkan ketahanan keluarga di DIY.
- b. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk penurunan stunting.
- c. Surat Edaran Gubernur Nomor: 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KB PP) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai regulasi dari Pemerintah Daerah DIY untuk mendukung

- tercapainya peningkatan pelayanan KB PP di seluruh Faskes di DIY dan m-CPR.
- d. Ketersediaan Penyuluh KB, kelompok kegiatan dan tenaga lini lapangan yang mampu bertugas kolaboratif dengan melakukan adaptasi.
 - e. Adanya dukungan mitra kerja dan komitmen lintas sektor (pemerintah daerah, swasta, lembaga non pemerintah, masyarakat) dalam mensukseskan Program Bangga Kencana.
 - f. Adanya alokon jenis baru berupa Implan 1 Batang dan Minipil/ *Progestine Only Pil* yang dapat menjadi alternatif Pelayanan KB Pascapersalinan.
 - g. Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non-Fisik (Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana/BOKB) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
 - h. Pelaksanaan PPK-24 dan verval KRS 100% menggunakan smartphone sehingga waktu pelaksanaan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - i. Adanya komitmen yang kuat dari OPD KB Kabupaten/kota untuk mengembangkan kerjasama pendidikan kependudukan di jalur formal, khususnya pembentukan SSK di tingkat SMP dan SMA.
 - j. Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan Pendidikan kependudukan di jalur nonformal, yaitu implementasi kependudukan di kegiatan pramuka sekolah siaga kependudukan.

F. Isu Strategis

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk yang harus mendapat perhatian khusus adalah :

- a. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) di DIY telah berada pada nilai TFR ideal sejak tahun 1991 (2,04) dan kondisi ini bertahan sampai sekarang di tahun 2024 (1,83). Dari data tersebut tampak adanya tren penurunan angka TFR di DIY. Jika hal ini terus dibiarkan, maka di masa depan TFR di DIY akan semakin turun di bawah angka ideal (<1.80), padahal kondisi DIY telah melewati bonus

demografi. Hal tersebut akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yang sudah rendah, piramida penduduk dengan proporsi besar di usia tua yang akan membawa DIY mengalami aged population, dan angkatan kerja yang rendah sehingga produktivitas kerja di DIY rendah.

b. Jumlah Penduduk Usia Lanjut

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan persentase penduduk lansia paling tinggi di Indonesia pada 2024, yakni 16,8%. Penambahan penduduk lansia di DIY juga diikuti usia harapan hidup yang tinggi yaitu mencapai 75,36 tahun atau tertinggi secara nasional. Dengan jumlah penduduk lansia ini maka harus ada program pemerintah yang mendukung para lansia menjadi lansia yang mandiri dan tangguh sehingga para lansia tidak menjadi beban pembangunan, tetapi bisa menjadi salah satu nilai tambah atau potensi bagi pembangunan di DIY. Pemerintah DIY diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang ramah lansia sehingga para lansia tetap dapat melakukan aktivitas dengan baik. Sedangkan untuk program kegiatan yang memfokuskan kepada lansia dapat dilakukan dengan kolaborasi antar instansi sehingga tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

c. Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 1,6%, menjadi 18,0% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 16,4%. Upaya strategis dan kolaboratif diperlukan untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Pemerintah Indonesia menargetkan prevalensi Stunting sebesar 14% di tahun 2024 yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Untuk tahun 2023, Prevalensi Stunting di Indonesia sebesar 21,5% (SKI 2023). Artinya secara nasional prevalensi stunting harus diturunkan sebesar 7,5%, sedangkan di DIY di tahun 2024 prevalensi stunting yang harus diturunkan sebesar 4%.

d. iBangga

Indeks Pembangunan keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan

fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data PK2024, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada nilai 64,80, dengan rincian nilai untuk dimensi ketentraman 66,1, dimensi kemandirian 56,4 dan dimensi kebahagiaan 71,9. Pencapaian iBangga ini melebihi nilai iBangga Nasional yaitu 62,4. Meskipun nilai iBangga DIY berada pada peringkat ke-5 tertinggi Nasional, namun capaian tersebut masih di bawah target yang diberikan yaitu sebesar 69,95. Untuk itu diperlukan upaya komprehensif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta.



L
K
I
P

2
0
2
4

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

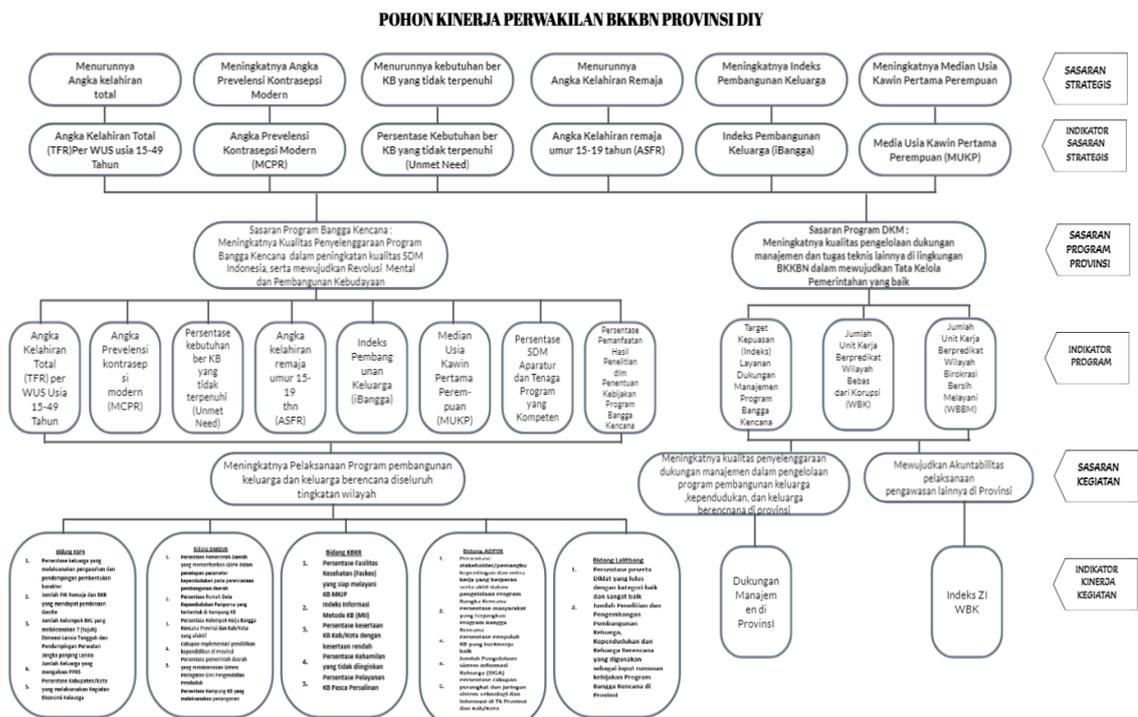
Bab 2 Berisi:

- Rencana Strategis
- Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2024
- Program Prioritas dan Rencana Kerja tahun 2025
- Perjanjian Kinerja
- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program

A. Rencana Strategis

A.1. Pohon Kinerja Unit Kerja

Pohon kinerja dibuat berdasarkan Permen PANRB No. 89 tahun 2021 tentang Penjejaran Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja memuat sasaran strategis dan indikator kinerja. Pohon kinerja Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta sesuai Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 2-0-1 Pohon Kinerja Perwakilan BKKBN DIY

A.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

Visi BKKBN adalah **“terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.”** Visi BKKBN mengandung pengertian:

- a. Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2,26 pada tahun 2020 sampai dengan 2,1 pada tahun 2024.
- b. Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB KR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KB KR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- d. Pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

BKKBN mempunyai misi untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu:

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Tujuan BKKBN dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yaitu:

- a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sasaran strategis tahun 2020-2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR).
2. Meningkatnya angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR).
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).
4. Menurunnya Angka Kelahiran Remaja.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP).

Sasaran Program Tahun 2020-2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Terwujudnya sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk.
2. Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Tercapainya sasaran program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas.
4. Meningkatnya persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik.
5. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.

A.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada arah kebijakan BKKBN yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2020-2024. Lima arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi :
 - Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 - Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 - Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 - Peningkatan kemandirian ekonomi bagi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB mandiri di wilayah Kampung KB.
 - Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 - Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
 - Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi :
 - Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi :

- Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - Penguatan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan KBKR.
 - Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - Peningkatan KB pria.
 - Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 - Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program Bangga Kencana sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi :
- Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub-PPKBD.
- e. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi :
- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah.
 - Pengembangan *smart technology/smart program* untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, perlu mendapatkan dukungan dari :

- a. Aspek Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Program Bangga Kencana Bidang Pelatihan dan Pengembangan bertugas untuk meningkatkan kualitas SDM, memanfaatkan hasil penelitian, dan pengembangan inovasi, yang dapat diwujudkan melalui strategi :
- Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi.

- Peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan inovasi Program Bangga Kencana sebagai input/masukan bagi perumusan kebijakan.
- b. Aspek Dukungan Manajemen
- Sekretariat memberikan dukungan manajemen terhadap Program Bangga Kencana melalui strategi :
- Sosialisasi landasan hukum kependudukan dan KB, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
 - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN
 - Penguatan perencanaan program dan anggaran.
 - Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur.
 - Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang berkualitas.
- c. Aspek Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui strategi :
- Pembinaan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efektif, dan efisien.
 - Pembinaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) secara efektif dan efisien di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Monitoring terhadap kebijakan Kepala BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta agar dilaksanakan secara konsisten.
 - Pemantauan pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan efisien.

B. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2024

B.1. Dukungan BKKBN pada Prioritas Nasional Tahun 2024

Program prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target 2024
Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah		
1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	46.256 keluarga
	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	316 PIK Remaja & 172 BKR
	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	143 BKL
	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	959 keluarga
	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	100%
	Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	100% Prov & 100% Kab/Kota
	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	80%
	Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 prov & 3 kab/kota
	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)
	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	100% prov & 50% kab/kota

	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	60%
	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	85%
	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	78,35
	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	57,49%
	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	22,30%
	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	29,41%
	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	24 stakeholders/ mitra
	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	75%
	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	90%
	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5
	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%
Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi		
	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	80%
Penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi		

	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12 bulan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 (Skala 1-4)
Akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi		
	Indeks ZI WBK/WBBM	85

B.2. Rencana Kerja Tahunan pada Tahun 2024

Tabel 2-2 Rencana Kerja Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target 2024
Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah		
1	Jumlah pemerintah daerah kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	5 Kab/kota
2	Jumlah pemerintah daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2 Pemda
3	Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	473 Faskes
4	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus	5 Pemda
5	Jumlah pemerintah daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders) KIE dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat	1 Pemda

	serta penyediaan data dan informasi dalam sistem informasi keluarga	
6	Jumlah keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	56.722 keluarga
7	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	316 PIK Remaja & 172 BKR
8	Jumlah kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143 BKL
9	Jumlah Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	10 UPPKA
10	Jumlah rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan	79 Rumah data kependudukan paripurna
11	Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana	5 Kampung KB
12	Jumlah faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon	473 Faskes
13	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	5 Kampung KB
14	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil studi kasus stunting provinsi	1 Rekomendasi

15	Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting	473 Faskes
16	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan	5 Pemda
17	Jumlah sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting yang berkualitas	1 Sistem Data
18	Jumlah kampanye percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	3 kegiatan
19	Jumlah penyelenggaraan koordinasi satgas percepatan penurunan stunting provinsi dan kab/kota	6 kegiatan
20	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi TPK TPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	1 laporan
21	Jumlah Layanan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI)	1 layanan
Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi		
1	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab/Kota	85 orang
2	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan dan refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	5.576 orang
Penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi		

1	Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal yang dilaksanakan	1 layanan
2	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan	2 layanan
3	Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi	1 kegiatan
4	Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi	1 layanan
Akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi		
1	Jumlah laporan pengawasan internal	1 laporan
2	Jumlah laporan hasil pengawasan kegiatan percepatan penurunan stunting provinsi	1 laporan

C. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2025

C.1. Dukungan BKKBN pada Prioritas Nasional Tahun 2025

Tabel 2-3 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target 2025
Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah		
1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	46.256 keluarga
2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	316 PIK Remaja & 172 BKR
3	Jumlah kelompok BKL yang melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia	143 BKL

4	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	959 keluarga
5	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	100%
6	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	100% Prov & 100% Kab/Kota
7	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	80%
8	Jumlah kelompok kerja Bangga Kencana provinsi dan kab/kota yang efektif	1 prov & 3 kab/kota
9	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)
10	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	100% prov & 50% kab/kota
11	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	60%
12	Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP	85%
13	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	78,35
14	Persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dengan kesertaan rendah	57,49%
15	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	22,30%
16	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	29,41%

17	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	24 stakeholders/mitra
18	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	75%
19	Persentase penyuluh KB yang berkinerja baik	90%
20	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5
21	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem teknologi dan informasi di Tk. provinsi dan kabupaten/kota	100%
Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi		
1	Persentase peserta diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	80%
Penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi		
1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12 bulan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 (Skala 1-4)
Akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi		
1	Indeks ZI WBK/WBBM	85

C.2. Rencana Kerja Tahunan 2025

Tabel 2-4 Rencana Kerja Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target 2025
-----	-------------------------------------	-------------

Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah		
1	Jumlah pemerintah daerah kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam bidang pembangunan keluarga	5 Kab/kota
2	Jumlah pemerintah daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2 Pemda
3	Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	473 Faskes
4	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus	5 Pemda
5	Jumlah Pemda yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders) KIE dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta penyediaan data dan informasi dalam sistem informasi keluarga	1 Pemda
6	Jumlah keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	56.722 keluarga
7	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan edukasi Kespro dan Gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	316 PIK Remaja & 172 BKR

8	Jumlah kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143 BKL
9	Jumlah kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	10 UPPKA
10	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan	79 Rumah data kependudukan paripurna
11	Kampung KB yang mendapat fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana	5 Kampung KB
12	Jumlah faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	473 Faskes
13	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	5 Kampung KB
14	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil studi kasus stunting provinsi	1 Rekomendasi
15	Jumlah faskes yang mendapat fasilitasi intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting	473 Faskes
16	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan	5 Pemda
17	Jumlah Sistem Data Keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting yang berkualitas	1 Sistem Data

18	Jumlah kampanye percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	3 kegiatan
19	Jumlah penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting provinsi dan kab/kota	6 kegiatan
20	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi TPK TPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	1 laporan
21	Jumlah layanan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI)	1 layanan
Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi		
1	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab/Kota	85 orang
2	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan dan refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	5.576 orang
Penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi		
1	Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal yang dilaksanakan	1 layanan
2	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan	2 layanan
3	Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi	1 kegiatan
4	Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi	1 layanan
Akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi		

1	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	1 laporan
2	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting provinsi	1 laporan

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja akan digunakan pimpinan BKKBN untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN No.104/KEP/B1/2019 tentang Perjanjian Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 memuat sasaran kinerja, indikator kinerja dan target indikator kinerja dengan rincian terlampir pada laporan ini.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,82 rata-rata anak per wanita
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	58,20 %
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	15,20 %
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	9,6 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	69,95 %
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23,50 Tahun
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	46256 Keluarga
		2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	316 PIK Remaja & 172 BKR
		3	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	143 Kelompok BKL
		4	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	959 Keluarga
		5	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	100%
		6	Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	100% Prov & 100% Kab/Kota
		7	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	80%
		8	Jumlah Kelompok Kerja Bangsa Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 prov & 3 kab/kota
		9	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal dan informal)
		10	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	100% Prov & 50% Kab/Kota
		11	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	60%

Gambar 1-0-2 Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN DIY

E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program

E.1. Rapat Pengendalian Program (RADALGRAM)

Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program dilaksanakan setiap bulan sekali dengan tatap muka dan virtual meeting serta dilakukan secara bergiliran ke kabupaten kota serta di kantor Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta kegiatan Rapat Pengendalian Program adalah seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, perwakilan dari OPD KB kabupaten kota dan juga perwakilan dari PKB/PLKB secara tatap muka dan diikuti oleh OPD KB kabupaten kota serta PKB/PLKB secara daring.

Tujuan kegiatan radalgram ini adalah untuk mengevaluasi secara berkala program yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota, sehingga

dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan pelaksanaan program, serta menentukan solusi untuk mengatasi permasalahan. Dengan adanya Radalgram ini dapat meningkatkan cakupan serta kualitas Program Bangga Kencana secara berjenjang. Diharapkan dengan adanya Radalgram Bangga Kencana yang dilaksanakan secara rutin akan menjadi sebuah komitmen bersama untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan.

Pada kegiatan rapat pengendalian program dilaporkan hasil pelaksanaan kinerja setiap bulannya, baik tentang capaian program maupun anggaran dan ketersediaan Alkon. Sumber data yang digunakan antara lain berasal dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sub sistem Pelaporan Pengendalian Lapangan (Dalap) dan Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon); Sistem Pelaporan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi (Morena) DAK; serta sistem monitoring ketersediaan alkon.

Melalui kegiatan rapat pengendalian program ini diketahui perkembangan capaian kinerja masing-masing kabupaten/kota bahkan sampai level kecamatan sehingga dapat diketahui hambatan yang dialami di setiap wilayah untuk kemudian dapat menentukan upaya atau langkah yang harus dilakukan agar dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam rapat pengendalian program ini juga dilakukan diskusi langsung dengan PKB/PLKB pengampu masing-masing wilayah untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.





Gambar 2-0-3 Kegiatan Radalgram Perwakilan BKKBN DIY

E.2. Rapat Kerja Daerah Tahun 2024

Rapat Kerja Daerah diadakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan program secara tahunan. Rapat ini melibatkan seluruh mitra kerja/*stakeholder* baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya forum ini dapat mewujudkan penguatan Program Bangga Kencana terutama dalam penentuan sasaran program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah.

Selain itu juga dapat menjalin sinergitas komitmen, dukungan dan kerjasama antara BKKBN, pemerintah daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah sehingga manfaat program KKBPK dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh tingkatan wilayah.

Rapat Kerja Daerah Perwakilan BKKBN DIY tahun 2024 dilaksanakan pada triwulan I dengan mengangkat tema "Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2024". Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Rencana Kerja/Rencana Aksi dalam pencapaian kegiatan prioritas Bangga Kencana dan tercapainya sinergitas program dalam pemanfaatan bonus demografi untuk peningkatan SDM. Materi Rapat Kerja

Daerah Perwakilan BKKBN DIY tahun 2024 dapat diakses di link <https://bit.ly/rakerdabkkbndiy24>.



Gambar 2-0-4 Kegiatan Rakerda Tahun 2024

E.3. Monitoring dan Evaluasi RAPK

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja (RAPK) memiliki peran penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja dan sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang baik, dilihat dari tingkat keberhasilan capaian dan ada tidaknya permasalahan/ hambatan yang timbul. Monitoring dan evaluasi RAPK bulanan perlu dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja. Selain itu, monev RAPK diperlukan untuk menganalisis perkembangan dan perubahan kegiatan serta permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi RAPK Perwakilan BKKBN DIY dapat dilihat pada link https://bit.ly/Monev_RAPK_DIY_2024.

Gambar 2-0-5 Monev RAPK Tahun 2024

E.4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program Bangga Kencana Melalui e-Monev Bappenas dan SMART Kementerian Keuangan

E-monev adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Bappenas. Aplikasi ini mempermudah unit kerja untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil capaian dari kegiatan Program Bangga Kencana yang telah dilakukan. Unit kerja melakukan input capaian melalui aplikasi ini setiap bulannya. Data isian capaian E-monev Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat di link https://drive.google.com/drive/folders/1qRK7vim2te_R2UO9CNg8ee2o_4aDI_2HZ?usp=sharing. Melalui aplikasi ini, Bappenas juga dapat ikut memantau pencapaian Program Bangga Kencana terutama kegiatan proyek Pro PN. Hal ini diperlukan agar Bappenas dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan proyek Pro PN dan juga mengambil langkah-langkah apabila terjadi keterlambatan/kendala.

SMART adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. SMART dibangun sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Melalui aplikasi ini, Kementerian Keuangan dapat ikut memantau apakah anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan oleh Perwakilan BKKBN DIY mampu menghasilkan output dan

income yang telah ditargetkan. Hal ini diperlukan agar Kementerian Keuangan dapat mengukur, menilai, dan menganalisa kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Sejak tahun 2023, pengisian data SMART sudah tidak diinput secara manual karena sudah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI milik Kementerian Keuangan.

E.5. Pemutakhiran Pendataan Keluarga

Pendataan keluarga merupakan kegiatan yang krusial karena menyediakan basis data keluarga sebagai bahan intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya di Indonesia. Selain data keluarga juga menghasilkan data individu *by name by address* yang menjadi peta sasaran intervensi program yang meliputi indikator demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta keluarga berisiko *stunting* dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, sampai dengan tingkat RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil.

Data hasil Pendataan Keluarga juga digunakan sebagai evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP BKKBN. Pemanfaatan data hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 telah banyak digunakan oleh banyak pihak, baik kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan mitra kerja lain seperti Kementerian PMK, Kementerian PUPR, Sekretariat Wakil Presiden dan Badan Informasi Geospasial. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dan informasi keluarga terkini sesuai kondisi di lapangan baik untuk kepentingan program Bangga Kencana maupun program pembangunan lainnya, maka data tersebut harus dimutakhirkan, melalui Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (Pemutakhiran PK-24). Pemutakhiran PK-24 merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil Pendataan Keluarga melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga.

E.6. Evaluasi Kinerja Kabupaten dan Kota (DAK)

Monitoring dan evaluasi penggunaan dana DAK dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke PD-KB kabupaten dan kota oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan provinsi. Evaluasi secara umum merupakan proses identifikasi atau mengumpulkan informasi mengenai kinerja untuk mengukur/menilai apakah kinerja kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi (informasi yang didapat dari proses evaluasi) DAK dapat dipergunakan sebagai kajian dalam upaya peningkatan kinerja dikemudian hari dan sebagai acuan dalam mengembangkan alternatif strategi.

Evaluasi yang dilaksanakan antara lain meliputi kesesuaian kegiatan (menu dan sub menu) yang direncanakan dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan kesesuaian kegiatan dari sisi kewenangan Pemerintah Daerah, kesesuaian pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) dengan kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pelaporan DAK, terutama terkait dengan ketepatan dan kelengkapan pelaporan baik melalui Aplikasi Morena maupun Aplikasi ALADIN.

Selama periode tahun 2024, evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui Radalgram, evaluasi triwulanan, monitoring ke kabupaten/Kota baik secara langsung maupun virtual. Selain itu, Perwakilan BKKBN DIY juga menyediakan wadah diskusi melalui grup Whatsapp ForDisc DAK YO, dan media pendukung melalui <https://bit.ly/ForDiscDAKYO>.

Perwakilan BKKBN DIY juga memiliki gerakan untuk bersama melakukan pengendalian dengan melaksanakan pemantauan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus subbidang KB di D.I Yogyakarta sehingga kebermanfaatannya sesuai dengan tujuan Dana Alokasi Khusus subbidang KB melalui Pandawa DAK (Pantau, Dampingi, Awasi Dana Alokasi Khusus). Kegiatan ini tidak hanya tertumpu pada Tim Kerja tertentu tetapi semua pegawai khususnya Tim Pengendali DAK diharapkan dapat berpartisipasi aktif.

E.7. Rapat Internal

Rapat internal Perwakilan BKKBN DIY merupakan wadah pertemuan pimpinan (Kepala dan Sekretaris) dengan ketua tim kerja di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY guna membahas capaian program dan anggaran, evaluasi kinerja dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada rapat internal, setiap ketua tim kerja memaparkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut, bagaimana hasil kinerja program pada bulan sebelumnya, dan sejauh mana perkembangan kegiatan berjalan. Rapat ini dilaksanakan setiap awal bulan dan menjelang kegiatan momentum.

Melalui pertemuan ini, pimpinan dapat memantau langsung program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh seluruh tim kerja, sehingga dapat diketahui hambatan dan permasalahan yang ada. Pimpinan juga dapat memberikan arahan dan masukan yang strategis bagi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, rapat internal juga dapat menjadi sarana pengendalian internal bagi pimpinan sehingga dapat melakukan evaluasi dan mitigasi bersama atas risiko/kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi.



Gambar 2-0-6 Kegiatan Rapat Internal Perwakilan BKKBN DIY



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

L
K
I
P

2
0
2
4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Bab 3 Berisi :*
- a. *Capaian Kinerja BKKBN*
 - b. *Realisasi Anggaran*
 - c. *Kinerja dan Capaian Lainnya*
 - d. *Evaluasi Kinerja*
 - e. *Perbaikan Perencanaan Program dan Anggaran TA 2024*

A. Capaian Kinerja BKKBN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi/ pencapaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada bab ini akan dibahas capaian dan upaya yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja 2024. Dengan

No	Nilai Capaian (Persen)	Skala Pengukuran	Status Capaian
1	≥ 90	Sangat Baik	Hijau 
2	80 – 89	Baik	Biru 
3	70 – 79	Cukup	Kuning 
4	< 70	Kurang	Merah 

membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian. Penghitungan indeks capaian perlu memperhitungkan skala pengukuran kinerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui Surat Sekretaris Utama Nomor 458/RC.06/B1/2019 sebagai berikut :

Tabel 3-0-1 Skala Pengukuran Kinerja

A.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perhitungan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024, capaian indikator kinerja utama (IKU) Perwakilan BKKBN DIY sebagai berikut :

Tabel3-0-2 target dan capaian indikator kinerja utama (IKU) DIY 2024

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,82	1,83	99,45%	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	58,2%	63,10%	108,42%	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	15,20%	11,40%	125,00%	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	9,6	9,00	106,25%	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	69,95%	64,80%	92,64%	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23,50	23	97,87%	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024

Capaian 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2024 lebih dari 90% dalam kategori sangat baik (hijau). Keberhasilan

pencapaian kinerja ini merupakan hasil kerja bersama Perwakilan BKKBN DIY dengan stakeholder, mitra kerja yang mempunyai komitmen dalam menjalankan program bangga kencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nasional, dari 6 (enam) indikator hanya 1 (satu) indikator yang belum tercapai, yaitu indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) dengan target 7,4 dan capaian 11,1. Untuk tabel perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 antara DIY dan Nasional sebagai berikut :

Tabel 3-0-3 perbandingan target dan capaian IKU 2024 DIY dan Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	DIY 2024			NASIONAL 2024		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun)	1,82	1,83	99,45%	2,1	2,11	99,52 %
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	58,20%	63,10%	108,42%	63,4	61,7	97,32 %
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	15,20%	11,40%	125,00%	7,4	11,1	50,00 %
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	9,6	9	106,25%	18	18	100,0 %
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	69,95%	64,80%	92,64%	61,0	62,4	102,3 %
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23,5	23	97,87%	22,1	22,3	100,9 %

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, ada 4 (empat) indikator capaian DIY diatas capaian nasional untuk tahun 2024, sedangkan 2 (dua) indikator capaian DIY dibawah capaian nasional, yaitu indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun.

A.1.1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun)

Pada indikator Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun) di DIY tercapai sebesar 99,45% dari target TFR yang ditetapkan dalam KKP Tahun 2024 sebesar 1,82. Berdasarkan Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024, angka TFR di DIY adalah 1,83.



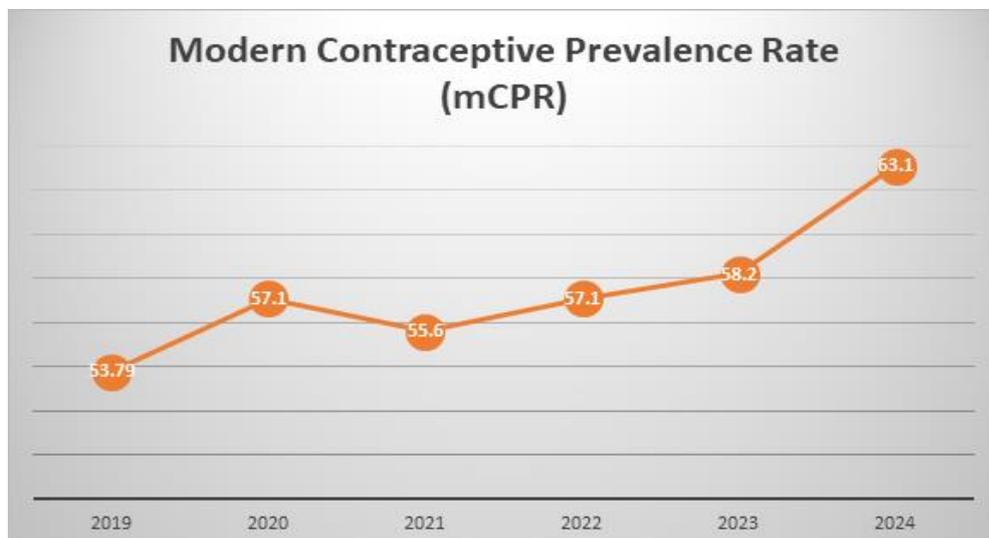
Gambar 3-0-1 Trend Capaian TFR

Jika melihat trend TFR di DIY dari tahun ke tahun, sebenarnya capaian TFR DIY masih berada pada rentang 1,8 sampai 1,93. Artinya walaupun terjadi kenaikan dan penurunan, namun capaian tahun 2024 masih berada di bawah angka 2. Menurut Buku Penentuan Nilai Ideal dan Ambang Batas Parameter Keluarga Berencana Tahun 2017, nilai ambang batas TFR yang ditoleransi adalah antara 1,8 sampai 2,2. Berdasarkan nilai ambang batas ini, DIY telah berada pada nilai TFR ideal sejak tahun 1991 (nilai TFR 2,04). Bahkan, kondisi ideal ini telah berjalan sampai dengan tahun 2024 dengan nilai TFR tahun ini sebesar 1,83. Ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 33 tahun kondisi TFR di DIY telah ideal. Hal tersebut juga menunjukkan Program Bangga Kencana mampu diimplementasikan dengan baik di DIY sehingga TFR berhasil dipertahankan pada angka ideal. Meskipun demikian, tetap perlu diwaspadai adanya trend kenaikan angka capaian TFR.

Selain menunjukkan capaian yang baik dalam implementasi Program Bangga Kencana, kondisi tersebut dapat menjadi ancaman bagi keadaan penduduk tumbuh seimbang. Tantangan yang ada adalah bagaimana kita dapat menjaga TFR pada kisaran ideal tanpa membiarkan angka TFR turun terlalu rendah. TFR yang terlalu rendah jika dibiarkan maka akan mencapai *point of no return*, di mana TFR akan sangat sulit untuk dinaikkan kembali sehingga proporsi penduduk di masa depan akan didominasi oleh lansia dan pra lansia serta kekurangan generasi muda dan penduduk usia produktif. Angka TFR saat ini masih dalam kondisi ideal, namun tetap harus diwaspadai terjadinya kenaikan kembali berdasarkan trend sebelumnya. Melihat kondisi tersebut, perlu adanya upaya yang lebih untuk menjaga TFR tetap pada kondisi ideal. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya mempertajam sasaran program terutama pada PUS usia muda yang masih memiliki masa reproduksi panjang serta meningkatkan kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

A.1.2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)

Berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2024, Perwakilan BKKBN DIY telah mampu mencapai persentase mCPR sebesar 63,1% dari total PUS yang ada. Pencapaian mCPR ini telah memenuhi target KKP yang ditetapkan sebesar 58,2%. Dengan kata lain, DIY berhasil mencapai 108,42% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2024.



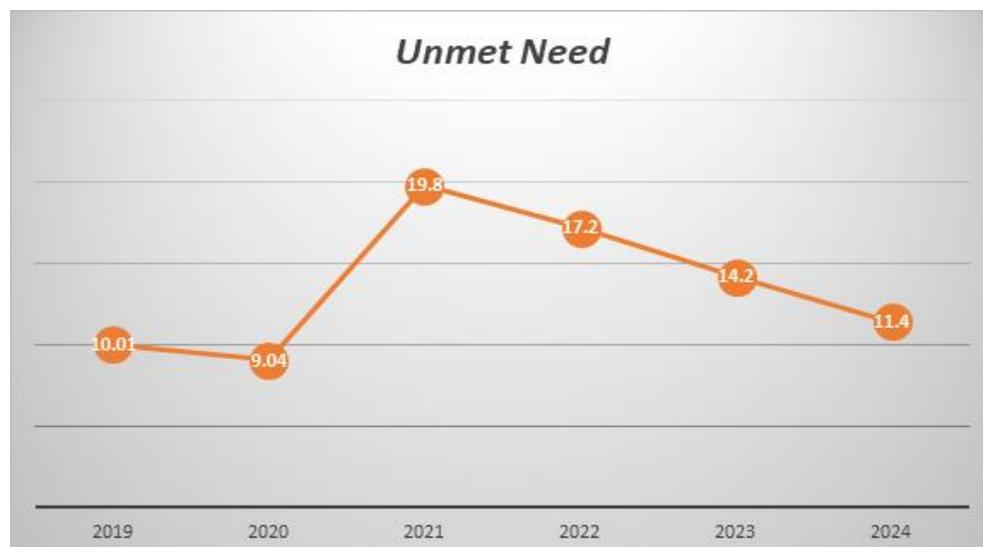
Gambar 3-0-2 Trend Capaian mCPR

Persentase mCPR di DIY mengalami penurunan dari 57,1% pada tahun 2020 menjadi 55,6% pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2024 naik menjadi 57,1% pada tahun 2022, 58,2% pada tahun 2023, dan 63,1% pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2024 ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian nasional yaitu sebesar 61,7%. Kondisi ini berbeda dengan capaian tahun lalu, di mana capaian mCPR DIY lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional.

Meskipun capaian tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu dan berada di atas capaian nasional, perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, diantaranya melalui penetapan fokus kegiatan lebih diarahkan pada WUS usia muda dengan pendidikan tinggi, dan perlunya pengembangan metode Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang berbeda dan terfokus pada sasaran. Selain itu, perlunya meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dengan implementasi kebijakan daerah tentang pelayanan KB Pasca Persalinan, dan penyediaan alternatif KB Pascapersalinan yang lebih variatif seperti adanya Implan 1 Batang, Pil *Progestin Only* (POP), dan IUD *Post Placenta*.

A.1.3. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*)

Pada tahun 2024 berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2024, persentase *unmet need* di DIY sebesar 11,4%



atau tercapai sebesar 125% dari KKP tahun 2024 yang ditetapkan yaitu sebesar 15,2%. Capaian *unmet need* DIY masih sedikit lebih tinggi daripada capaian *unmet need* nasional (11,1%).

Gambar 3-0-3 Trend Capaian Unmet Need

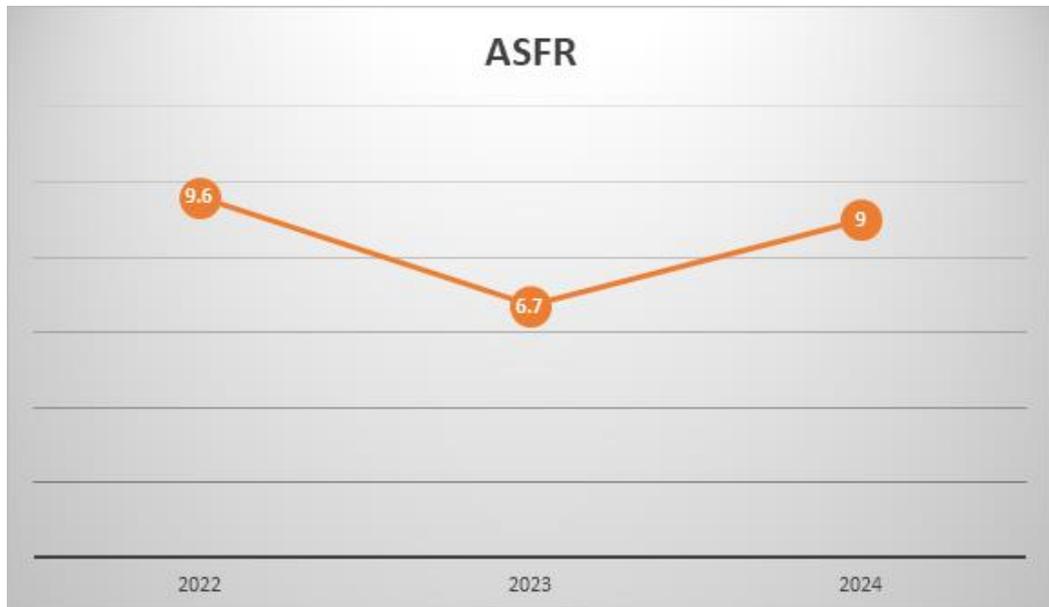
Berdasarkan grafik perkembangan *unmet need* di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (*unmet need*). Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 10,76%. Setelah mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2021, *unmet need* di DIY menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 sampai 2024 yaitu sebesar 8,4%.

Fenomena *unmet need* KB bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur ibu, pendidikan, preferensi gender anak, pendapatan, pekerjaan, agama, pengetahuan mengenai kontrasepsi, komunikasi dengan pasangan, akses terhadap media dan tempat tinggal. Selain itu karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang erat kaitannya dengan capaian *unmet need* KB. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping serta komunikasi dengan pasangan. Oleh sebab itu, upaya penurunan *unmet need* KB harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Informasi tentang pelayanan KB yang tidak terpenuhi digunakan untuk menilai sejauh mana program KB telah dapat memenuhi kebutuhan KB di kalangan PUS yang menginginkan untuk ber KB. Apabila program dapat memenuhi kebutuhan KB, diharapkan angka prevalensi KB dapat meningkat dan kelompok *unmet need* KB akan semakin berkurang.

A.1.4. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)

Berdasarkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024, ASFR 15-19 tahun di DIY adalah 9,0. Angka ini 0,6 poin lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 9,6 atau tercapai sebesar 106,25%. Hal tersebut menunjukkan Perwakilan BKKBN DIY telah berhasil bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Meskipun mengalami kenaikan

sebesar 2,3 poin dari tahun sebelumnya, capaian ini merupakan capaian kedua terbaik nasional setelah DKI Jakarta (7,8). Hanya DKI Jakarta dan DIY yang berhasil mencapai *single digit* ASFR di seluruh Indonesia selama beberapa tahun terakhir.



Gambar 3-0-4 Trend Capaian ASFR

Hal tersebut menggambarkan bahwa Program Genre sudah berjalan baik di DIY sehingga dapat menekan angka kelahiran pada usia remaja. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu dengan pembinaan kelompok PIK secara berkala, baik pada jalur masyarakat maupun jalur pendidikan. ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) 15-19, atau Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun di DIY tercapai pada 9,0 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun tergolong sangat baik untuk ukuran nasional. Capaian nasional ASFR 15-19 tahun 2024 di angka 18,0, jauh di bawah capaian DIY.

Perwakilan BKKBN DIY dalam upayanya menurunkan ASFR juga menggiatkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Kampanye tentang kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) dengan usia ideal menikah minimal 21 tahun bagi perempuan dan minimal 25 tahun bagi laki-laki. Rendahnya ASFR 15-19 tahun mencerminkan rendahnya kehamilan yang tidak diinginkan, rendahnya

perkawinan dini maupun kehamilan yang diakibatkan hubungan seksual bebas pada rentang usia tersebut.

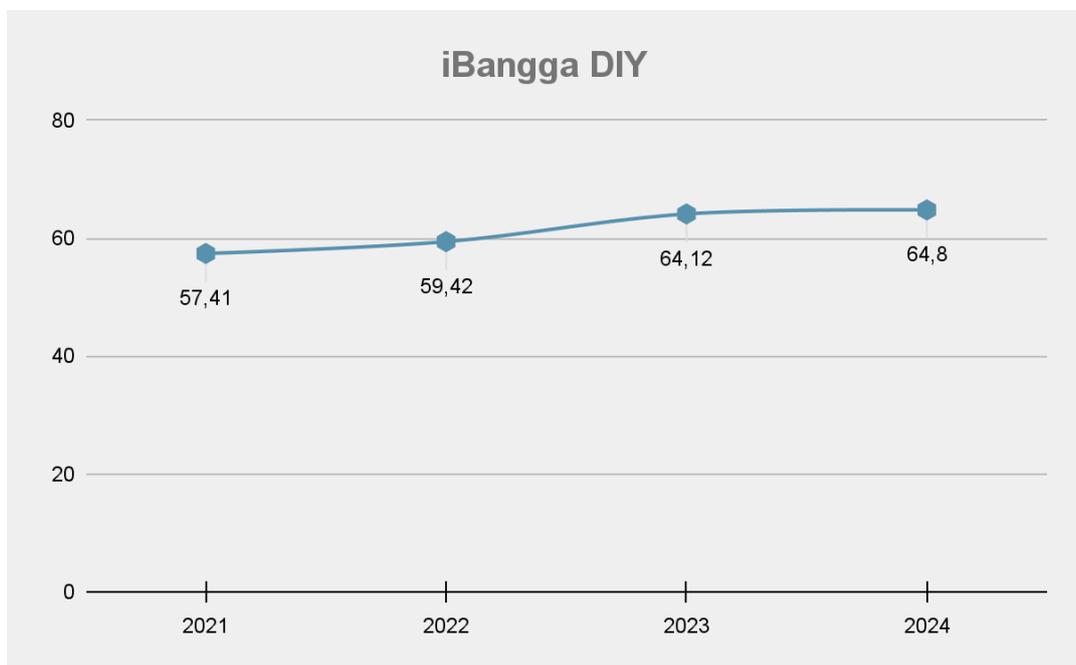
A.1.5. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2024 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) DIY tahun 2024 adalah sebesar 64,80. Angka tersebut menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 92,64% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 69,95. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, capaian iBangga tahun 2024 mengalami peningkatan, yaitu dari 64,12 menjadi 64,80. Meskipun peningkatannya belum begitu signifikan namun capaian DIY sudah diatas target nasional yaitu 61,00 dan capaian nasional yaitu 62, 40. Apabila diperhatikan capaian iBangga DIY dari tahun 2021 hingga 2024 konsisten naik. Tren capaian tersebut mengindikasikan bahwa ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan di DIY terus meningkat.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan dimensi ketentraman, kebahagiaan dan kemandirian mempunyai 17 indikator, membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai lintas sektor dalam pencapaian target. Perwakilan BKKBN DIY telah melaksanakan berbagai program dalam mendukung peningkatan iBangga antara lain, membina kerjasama dengan mitra/stakeholder terkait di antaranya Bappeda, OPD KB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan DIY maupun kabupaten/kota, serta sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya 8 fungsi keluarga kepada masyarakat. Sebagai upaya motivasi bagi kabupaten/kota dalam meningkatkan capaian iBangga, pada tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY juga melaksanakan apresiasi iBangga tingkat DIY. Peningkatan advokasi dan KIE Program Bangga Kencana kepada lintas sektor dan masyarakat akan terus ditingkatkan demi tercapainya target di masa yang akan datang.

Perwakilan BKKBN DIY berkomitmen untuk *concern* mendukung peningkatan pembangunan keluarga yang dilaksanakan dengan

pendekatan kearifan lokal (*local wisdom*). Pembangunan keluarga dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu untuk memastikan akses keluarga terhadap pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi dan lingkungan yang layak, ketersediaan air bersih, makanan beragam, serta layanan konseling keluarga benar-benar terjamin. Upaya ini perlu kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, swasta, organisasi profesi, organisasi masyarakat, maupun keluarga dan individu anggota keluarga. Capaian iBangga DIY selama empat tahun terakhir (2021-2024) tergambar pada grafik di bawah ini :



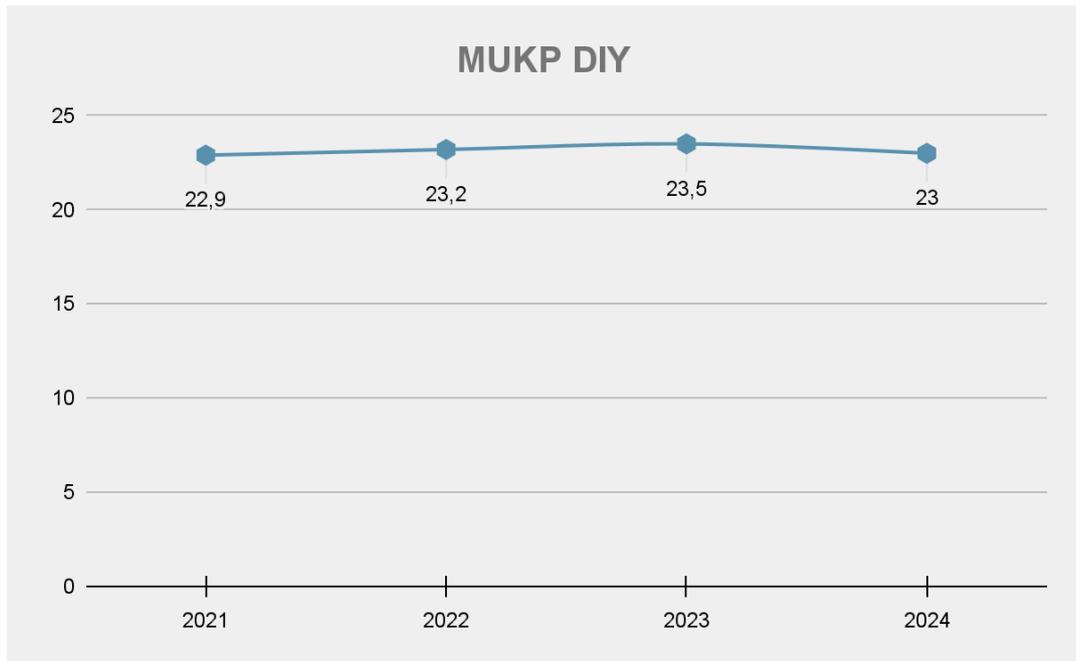
Gambar 3-0-5 Trend Capaian iBangga

A.1.6. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

Median Usia Kawin Pertama (MUKP) merupakan usia dimana 50% dari seluruh perempuan dalam kelompok umur tertentu sudah menikah. MUKP menunjukkan tren usia kawin pertama perempuan yang pernah menikah atau berstatus kawin. Peningkatan MUKP menjadi upaya meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup generasi bangsa. Dalam upaya meningkatkan MUKP, generasi Z menjadi fokus sasaran Program Bangga Kencana.

Tahun 2024 MUKP DIY berada pada angka 23,0 tahun yang berarti mencapai 97,87% dari target yang ditetapkan yaitu 23,50 tahun.

Meskipun mengalami penurunan 0,50 namun tetap berada di atas target nasional yaitu 22,1 tahun. Capaian MUKP di DIY dari tahun 2021 mempunyai trend naik, yang artinya MUKP di DIY semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk capaian tahun 2021 di angka 22,9 tahun sedangkan capaian tahun 2024 menjadi 23,0 tahun.



Gambar 3-0-6 Trend Capaian MUKP

Upaya yang terus dilakukan melalui Program Generasi Berencana (GenRe) yaitu kampanye tentang kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) dengan usia ideal menikah minimal 21 tahun bagi perempuan dan minimal 25 tahun bagi laki-laki. Dengan demikian MUKP perempuan di DIY telah memenuhi usia kawin ideal. Salah satu kegiatannya dengan pembinaan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) secara berkala, baik pada jalur masyarakat maupun jalur pendidikan, serta pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan sasaran keluarga yang memiliki anak usia remaja.

Strategi pencapaian target untuk tahun depan, Program GenRe dilaksanakan melalui kolaborasi dengan mitra-mitra strategis diantaranya perguruan tinggi (kampus), Pramuka Saka Kencana, Forum Anak, media,

dan para pelaku usaha. Selain itu akan dilaksanakan promosi tentang Kesehatan Reproduksi yang bersifat inklusif bagi remaja dengan risiko tinggi seperti anak/remaja yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak, remaja di rumah singgah, dan remaja dengan disabilitas.

A.2. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

Dari 25 indikator Kinerja Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2024, terdapat 2 indikator dengan capaian antara 80-89, predikat Baik (Biru), indikator tersebut tersebut adalah Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter dan Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII). Meskipun capaian belum sampai pada 90% keatas, capaian Perwakilan BKKBN DIY untuk 2 (dua) indikator tersebut tetap berada diatas rata-rata nasional. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 untuk Perwakilan BKKBN DIY terangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3-0-4 Perbandingan target dan capaian IKK 2024

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	46.256	37.515	81,10%	Capaian Ditbalnak 2024
		2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	316 PIK Remaja & 172 BKR	316 PIK R dan 172 BKR	100,00%	SIGA (dalap)
				488	488		
3	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan	143	143,00	100,00%	SIGA (dalap)		

			Jangka Panjang Bagi Lansia				
		4	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	959	5.047	526,28%	SIGA (dalam)
		5	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	100%	100,00%	100,00%	SIGA (dalam)
		6	Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	100% Prov & 100% Kab/Kota	100% Prov & 100% Kab/Kota	100,00%	Hasil Evaluasi Ditrenduk BKKBN
		7	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	80%	81,74%	102,17%	SIGA
		8	Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 prov & 3 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	150,00%	Hasil Monev Pokja Bangga Kencana yang Efektif
		9	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)	100,00%	Simonev Penduk

		10	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	100% prov & 50% kab/kota	100% prov dan 100% kab/Kota	150,00%	Website SiPerindu
		11	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	60%	84,47%	140,78%	Laporan Kampung KB Online
		12	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	85%	85,24%	100,28%	SIGA BKKBN
		13	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	78,35	68,20	87,05%	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024
		14	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	57,49%	64,08%	111,46%	SIGA BKKBN
		15	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	22,30%	11,80%	147,09%	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024
		16	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	29,41%	53,17%	180,79%	SIGA BKKBN, Webkesga DIY

		17	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	24	24,00	100,00%	SIGA
		18	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	75%	80,60%	107,47%	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024
		19	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	90%	97,27%	108,08%	EVSUM dan SIPP
		20	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5	5	100,00%	SIGA
		21	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100,00%	100,00%	
8	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	1	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	80%	96,46%	120,58%	LMS

9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12	12	100,00%	E- Monev
	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Skala 1-4)	3	3,59	119,67%	Laporan Hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik Perwakilan BKKBN DIY 2024
10	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1	Indeks ZI WBK/WBBM	85	89,00	104,71%	LHE TPI BKKBN Pusat

Untuk capaian indikator kinerja kegiatan Perwakilan BKKBN DIY selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3-0-5 Perbandingan target dan capaian IKK 2024 3 Tahun

NO	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
		TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN
1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	45.056,00	40.580,00	90,07%	45.656	45.656	100,00%	46.256	37.515	81,10%
2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat	292 & 151	292 & 151	100,00%	304 & 161	304 & 161	100,00%	316 PIK Remaja	316 PIK R dan 172 BKR	100,00%

	pembinaan GenRe							& 172 BKR		
3	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	926	1.804,00	194,82%	942	3.985	423,04%	959	5.047	526,28%
4	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	80	100	125,00%	90	90	100,00%	100%	100,00%	100,00%
5	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 & 5	1 & 5	100,00%	1 Prov & 5 Kab/Kota	1 Prov & 5 Kab/Kota	100,00%	100% Prov & 100% Kab/Kota	100% Prov & 100% Kab/Kota	100,00%
6	Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 & 2	1 & 5	200,00%	1 Prov & 2 Kab/Kota	1 Prov & 2 Kab/Kota	100,00%	1 prov & 3 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	150,00%
7	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3	3	100,00%	3	3	100,00%	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)	100,00%
8	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	71,93	99,15	137,84%	78,47	80,68	102,82%	85%	85,24%	100,28%

9	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	74,69	54,94	73,56%	76,52	55,53	72,57%	78,35	68,2	87,05%
10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	57,17	58,81	102,87%	57,33	63,33	110,47%	57,49%	64,08%	111,46%
11	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	23,3	11,8	149,36%	22,8	11,09	151,36%	22,30%	11,80%	147,09%
12	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	24,41	20,25	82,96%	27,4	48,08	175,47%	29,41%	53,17%	180,79%
13	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	22	22	100,00%	23	23	100,00%	24	24	100,00%
14	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	65	65	100,00%	70	70	100,00%	75%	80,60%	107,47%
15	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	75	75	100,00%	80	80	100,00%	90%	97,27%	108,08%
16	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi	5	5	100,00%	5	5	100,00%	5	5	100,00%

	Keluarga (SIGA)									
17	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	84,62	84,62%	100	100	100,00%	100%	100,00%	100,00%
18	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	65	93,69	144,14%	75	97,55	130,07%	80%	96,46%	120,58%
19	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12	12	100,00%	12	12	100,00%	3	3,59	119,67%
20	Indeks ZI WBK	79	84,52	106,99%	82	96,59	117,79%	85	89	104,71%

A.2.1. Persentase Keluarga yang Melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter

Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter oleh Perwakilan BKKBN DIY salah satunya dilakukan melalui pendampingan di Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan pemantauan perkembangan melalui Kartu Kembang Anak (KKA). Kegiatan tersebut untuk meningkatkan cakupan keluarga dengan anak usia 0-6 tahun yang hadir pada pertemuan BKB dan dipantau perkembangannya menggunakan KKA. Berdasarkan data SIGA, capaian Pendampingan Pembentukan Karakter Perwakilan BKKBN DIY sebesar 81,10%, angka ini berada

diatas target nasional (42,68%). Apabila dibandingkan dengan capaian dalam 3 tahun terakhir, capaian tahun 2024 sedikit mengalami penurunan. Namun angka-angka ini tidak dapat dibandingkan secara langsung sebab, meskipun menggunakan sumber data yang sama namun menggunakan cara penghitungan yang berbeda. Berikut tren capaian Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter di Perwakilan BKKBN DIY :

Tabel 3-0-6 Perbandingan capaian

TAHUN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN
2022"	45.056	40.580	90,07 %
2023'	45.656	45.656	100,00 %
2024*	46.256	37.515	81,10 %

"Sumber data : SIGA 2022 capaian kumulatif Keluarga yang hadir BKB setiap bulan Januari-Desember

'Sumber data : SIGA 2023 capaian kumulatif Keluarga yang hadir BKB setiap bulan Januari-Desember

*Sumber data : SIGA 2024 capaian jumlah keluarga yang mendapatkan materi menjadi ortu hebat dan menggunakan KKA

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian tersebut yaitu praktek penggunaan KKA di Kelompok BKB dan Posyandu serta sosialisasi langsung oleh PKB dan Kader Kelompok BKB di Wilayah. Selain itu juga dilakukan Kerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada untuk pelatihan pengembangan keterampilan sosioemosional pada anak sebagai salah satu aspek yang diukur dalam KKA yang dilakukan pada kelompok BKB terbaik di Kabupaten/Kota se-DIY.

Beberapa kendala yang dialami adalah belum tersedianya KKA sesuai jumlah peserta BKB. Tidak semua wilayah mampu menggandakan KKA secara mandiri, selain itu Perwakilan BKKBN DIY juga hanya dapat melakukan penggandaan KKA sebanyak 1250 lembar di tahun 2024, jumlah ini belum bisa memenuhi kebutuhan. Kader juga masih perlu mendapatkan pembinaan yang lebih intensif dalam penggunaan KKA khususnya KKA versi terbaru yang ada dalam perangkat BKB Kit. Tingkat keaktifan kelompok BKB di wilayah juga mengalami penurunan karena

kurangnya daya dukung termasuk belum adanya penganggaran kegiatan BKB dari dana desa. Selain itu masih ditemukan tingkat pelaporan SIGA yang tidak rutin sehingga dapat menyebabkan pelaporan data lebih rendah dari kegiatan yang terlaksana.

A.2.2. Jumlah PIK Remaja dan BKR yang Mendapat Pembinaan GenRe

Pembinaan GenRe yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN DIY salah satunya melalui penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja. Cakupan PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri calon ibu berdasarkan hasil SIGA yang dilaporkan juga di eMonev Bappenas, Perwakilan BKKBN DIY telah mencapai 488 kelompok yang terdiri dari 316 PIK Remaja dan 172 BKR. Berikut tren capaian jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan GenRe di Perwakilan BKKBN DIY :

Tabel 3-0-7 Perbandingan PIK-R dan BKR

TAHUN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN
2022	292 PIK R & 151 BKR	292 PIK R & 151 BKR	100 %
2023	304 PIK R & 161 BKR	304 PIK R & 161 BKR	100 %
2024	316 PIK R dan 172 BKR	316 PIK R dan 172 BKR	100 %

Dari Tahun 2022 Perwakilan BKKBN DIY telah melakukan pembinaan GenRe kepada 292 PIK R dan 151 BKR, jumlah kelompok tersebut terus mengalami kenaikan target dan juga selaras dengan pencapaian target yang selalu mencapai 100% disetiap tahunnya. Fasilitas yang telah dilakukan Perwakilan BKKBN DIY dalam mencapai target PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan GenRe antara lain :

- a. Melakukan fasilitasi pertemuan Forum Genre tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi Program Genre serta edukasi PKBR di sekolah, universitas, komunitas serta tempat KKN.
- c. Melaksanakan Program Genre Goes To School di 5 Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan FK-KMK UGM.
- d. Melakukan sosialisasi Genre ke Forum Anak melalui kegiatan Jambore Ajang Kreativitas Genre.
- e. Melaksanakan Pemilihan Duta Genre DIY Tahun 2024 yang bertujuan menciptakan roll model guna menyebarluaskan program Genre maupun Bangga Kencana di kalangan remaja Yogyakarta.
- f. Memberikan apresiasi kepada PIK Remaja dan BKR yang telah mengimplementasikan Modul Tentang Kita dan 1001 Cara Bicara dengan tujuan meningkatkan motivasi pengelola PIK Remaja dan BKR.

A.2.3. Jumlah Kelompok BKL yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia

Pada Tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY telah memfasilitasi pendampingan dalam kegiatan Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh & Orientasi Pendampingan Jangka Panjang bagi Lansia pada 143 Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL). Adapun sebaran jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang menjadi sasaran sebagai berikut :

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah BKL ProPN
1	Kulon Progo	22
2	Bantul	31
3	Gunungkidul	34
4	Sleman	31
5	Yogyakarta	25
Jumlah DIY		143

Tabel 3-0-8 sebaran BKL

Kegiatan Sosialisasi dan Orientasi tentang 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Jangka Panjang bagi Lansia kepada kelompok BKL sasaran juga terselenggara atas kerjasama dan kolaborasi Perwakilan BKKBN DIY dengan Indonesia Ramah Lansia (IRL) dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Selain itu Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan Pengembangan Kelompok BKL yang berkualitas dan mandiri melalui fasilitasi kegiatan Sekolah Lansia BKL. Sekolah Lansia BKL ini bertujuan mewujudkan Lansia yang SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif dan Bermartabat) dalam 7 Dimensi Lansia Tangguh secara utuh yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

Atas komitmen dari berbagai pihak dalam mendukung program kelanjutusiaan, khususnya kegiatan sekolah lansia BKL, pada Tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY telah memfasilitasi dan melakukan pendampingan kepada 16 (enam belas) sekolah lansia BKL di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah lansia tersebut tidak hanya didanai oleh APBN saja, tetapi sebagian juga didanai melalui Dana APBD dan Swadaya masyarakat/ kelompok. Adapun rincian Sekolah Lansia BKL yang dilakukan pendampingan adalah sebagai berikut :

1. STANDAR SATU (S1)

No	Nama BKL	Alamat	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Sumber Waras	Ngunut Playen Gunungkidul	50	Dibiayai oleh BKKBN/ APBN
2	Cempaka	Sribit Sendangtirta Berbah Sleman	45	Dibiayai oleh BKKBN/ APBN
3	Sabda Ayu	Kayunan Donoharjo Ngaglik Sleman	50	Dibiayai oleh BKKBN/ APBN
4	Sekar Melati	Condongcatur Depok Sleman	42	Dibiayai oleh APBD Sleman
5	Melati	Banyurejo Tempel Sleman	39	Dibiayai oleh APBD Sleman
6	Cemara	<u>Pondokrejo</u> Tempel Sleman	50	Dibiayai oleh APBD Sleman
7	<u>Banyu</u> <u>Manunggal</u>	Banyuraden Gamping, Sleman	25	Dibiayai oleh APBD Sleman
8	Lentera	Tegaltirta Berbah Sleman	45	Dibiayai oleh APBD Sleman
9	Apel	Gayamharjo, Prambanan Sleman	25	Dibiayai oleh APBD Sleman
10	Al Afiah	Potorono Banguntapan Bantul	58	Dibiayai secara Mandiri
11	Gemati	Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta	37	Dibiayai secara Mandiri

Tabel 3-0-9 S1 Sekolah Lansia BKL

2. STANDAR DUA (S2)

No	Nama BKL	Alamat	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Sumber Waras	Ngunut Playen Gunungkidul	50	Dibiayai oleh BKKBN/ APBN
2	Cempaka	Sribit Sendangtirta Berbah Sleman	45	Dibiayai oleh BKKBN/ APBN

Tabel 3-0-10 S2 Sekolah Lansia BKL

3. STANDAR TIGA (S3)

No	Nama BKL	Alamat	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Delima 123	Purbayan Kotagede Yogyakarta	50	Dibiayai oleh BKKBN/ APBN
2	Mekar Indah	Kedungsari Pengasih Kulon Progo	50	Dibiayai oleh BKKBN/ APBN
3	Mugi Waras	Sumbersari Moyudan Sleman	50	Dibiayai oleh BKKBN/ APBN

Tabel 3-0-11 S3 Sekolah Lansia BKL

Pencapaian pembentukan Sekolah Lansia BKL Baru (Standar Satu) di Tahun 2024 jauh melampaui target dari Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan BKKBN dengan target pembentukan 1 (satu) sekolah Lansia BKL baru.

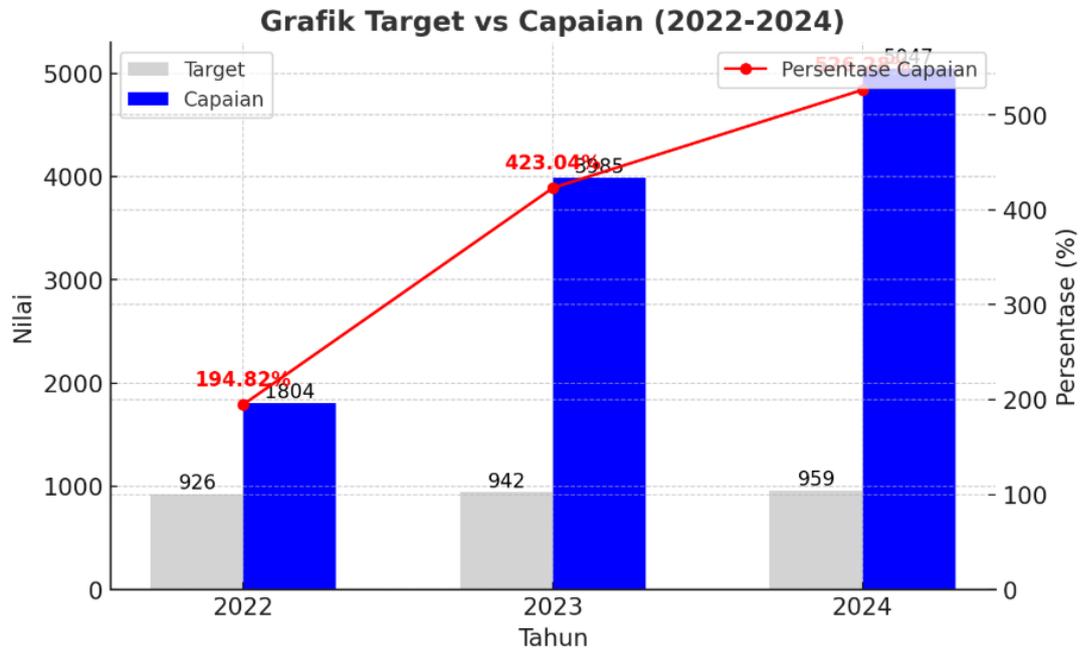
Perwakilan BKKBN DIY telah berhasil memfasilitasi pembentukan 11 (sebelas) Sekolah Lansia BKL baru, yang disupport tidak hanya dari biaya APBN saja, tetapi juga buah dari hasil advokasi Perwakilan BKKBN DIY dengan OPD KB Kabupaten Sleman yang telah membiayai 6 (enam) Sekolah Lansia dan Kelompok Swadaya masyarakat yang peduli lansia yang dengan swadaya membiayai 2 (dua) Sekolah Lansia BKL.

A.2.4. Jumlah Keluarga yang Mengakses PPKS

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) DIY mendapat target sebanyak 959 keluarga yang mengakses PPKS. Perwakilan BKKBN DIY berhasil mencapai angka 5.047 keluarga yang mengakses PPKS (526,28%). Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu orientasi pengelola dan pelaksana PPKS di Provinsi maupun Balai Penyuluhan. Selanjutnya untuk memberikan apresiasi kepada Satyagraha unggulan dilaksanakan Praktek Baik PPKS di Balai Penyuluhan. Khusus untuk Satyagraha Kencana, yang merupakan PPKS Rujukan, dilakukan Program Satyagraha Kencana Menyapa.

Melihat tren yang terjadi selama 3 tahun terakhir maka jumlah keluarga yang mengakses PPKS mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2022, persentase capaiannya sebanyak

194,82%. Tahun 2023, persentase capaiannya sebanyak 423,04 %, sedangkan pada tahun 2024, persentase capaiannya sebanyak 526,28 %, seperti di grafik berikut ini :



Gambar 3-0-7 Grafik Capaian Jumlah Keluarga yang Mengakses PPKS 3 Tahun Terakhir

Meskipun pencapaian target sudah melebihi dari yang ditentukan, PPKS Provinsi maupun Balai Penyuluhan akan terus mengembangkan 8 (delapan) layanan keluarga kepada masyarakat termasuk merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah dengan meningkatkan Advokasi dan KIE tentang PPKS kepada masyarakat serta berkolaborasi dengan stakeholder/mitra terkait untuk mendukung 8 (delapan) fungsi dan ketahanan keluarga.

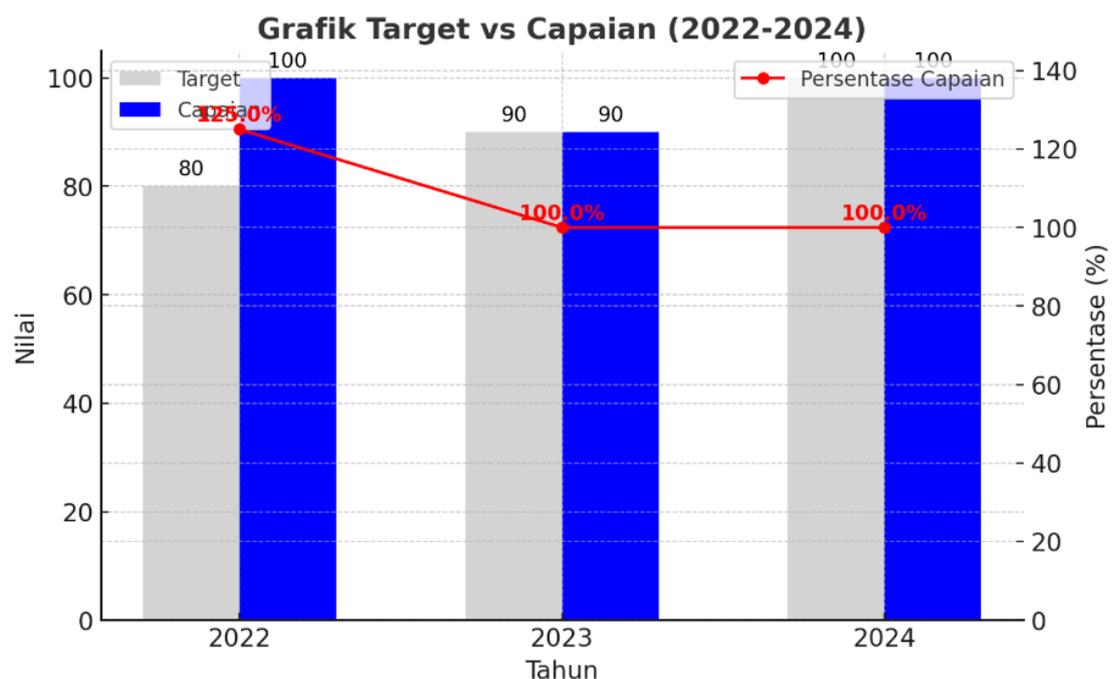
A.2.5. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Ekonomi Keluarga

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga dengan target 100%, Perwakilan BKKBN DIY berhasil mencapai angka 100% untuk Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga. Target tersebut dicapai melalui kegiatan antara lain: Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;

Implementasi Kebijakan PEK; Pemetaan Poktan UPPKA dan Monitoring Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Pencapaian Target tersebut juga didukung oleh Fasilitas ATTG dan dukungan Pameran untuk Kelompok UPPKA.

Pencapaian Target juga didukung oleh pelaksana Program pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat Kabupaten/Kota dan mitra strategis, seperti Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui Program si BAKUL Yogyakarta. Strategi yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah dengan meningkatkan kolaborasi berbagai lintas sektor, meningkatkan persentase kepemilikan legalitas usaha dan memperluas sasaran bukan hanya kepada keluarga akseptor, tetapi juga kepada keluarga risiko stunting dan kelompok rentan agar ketahanan ekonomi keluarga dapat tercapai.

Capaian dari tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan angka keberhasilan, dimana tahun 2022, dengan target 80% tercapai 100% (persentase capaian 125%). Tahun 2023, dari target 90% telah tercapai sebanyak 90 % (persentase capaian 100 %). Sedangkan pada tahun 2024, dari target 100 % telah berhasil tercapai 100% (persentase capaian 100 %).



Gambar 3-0-8 Grafik Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Ekonomi Keluarga 3 Tahun Terakhir

A.2.6. Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar mempunyai peranan penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014. Pemerintah daerah di DIY baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah menyusun GDPK sejak tahun 2018 dan sebagai tindak lanjut untuk GDPK Provinsi DIY, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta telah direview pada tahun 2022 dan 2023 untuk penyesuaian proyeksi hingga tahun 2045. Berdasarkan Hasil Penyampaian Evaluasi RPJMD dari Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN terlihat bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun 5 (lima) Kabupaten/Kota di DIY telah memasukkan indikator/parameter kependudukan yang ada di GDPK ke dalam dokumen RPJMD masing-masing. Hal tersebut menjelaskan bahwa Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai target 100% untuk indikator kinerja Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah. Indikator / parameter kependudukan yang tercantum dalam RPJMD di masing-masing Pemerintah Daerah di DIY seperti yang tertulis pada tabel berikut :

Tabel 3-0-12 Persentase Pemda GDPK

Provinsi & Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	LPP	TFR	Unmet Need	mCPR	MUKP	iBangga	ASFR	Stunting	MKJP	Peserta KB Aktif
Prov. D.I. Yogyakarta										
Kab. Kulon Progo										
Kab. Bantul										
Kab. Gunung Kidul										
Kab. Sleman										
Kota Yogyakarta										

Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari dukungan lintas sektoral yang ada di Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, utamanya dari Bappeda dan OPD KB yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk tingkat provinsi didukung dengan adanya Pokja GDPK yang beranggotakan instansi-instansi yang berkaitan dengan kependudukan. Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2024 berhasil mendapatkan Juara 2 Nasional pada GDPK Award. Sedangkan tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Sleman pada tahun 2023 berhasil mendapatkan Juara 1 Nasional GDPK Award tersebut. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi kepada Pemerintah Daerah dalam mengawal pelaksanaan pemanfaatan GDPK dalam perencanaan pembangunan kependudukan di DIY.

Sebagai legalitas GDPK yang telah disusun diperlukan dasar hukum berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Pimpinan Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dari 6 (enam) Dokumen GDPK di DIY ada 3 (tiga) GDPK yang sudah mempunyai legalitas, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2024 untuk GDPK DIY, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 untuk GDPK Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 53 Tahun 2018 untuk GDPK Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan untuk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 dalam tahap pembahasan Peraturan Walikota (Perwal) dan Peraturan Bupati (Perbup).

Langkah selanjutnya dalam rangka penguatan pemanfaatan GDPK yang telah disusun, Perwakilan BKKBN DIY akan melakukan fasilitasi review untuk dokumen GDPK di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul agar data proyeksi dapat menggambarkan perkembangan kependudukan di wilayah tersebut sampai dengan tahun 2045 sesuai dengan periode RPJPN. Selain itu juga akan dilakukan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota yang belum memiliki legalitas/dasar hukum dokumen GDPK, yaitu Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta agar GDPK yang ada memiliki legalitas untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya pada bidang kependudukan.

A.2.7. Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB

Rumah Data Kependudukan (RDK) biasa juga disebut dengan Rumah DataKu merupakan kelompok kegiatan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi kependudukan di tingkat mikro. Berdasarkan Laporan Dallap pada SIGA BKKBN, Rumah DataKu di DIY sudah terbentuk sebanyak 81,74% dari 438 jumlah kampung KB yang ada. Total RDK yang ada sebanyak 358 dan yang telah menjadi RDK klasifikasi paripurna sebanyak 288.

Pada tahun 2024, terdapat 79 Rumah DataKu yang masuk dalam Proyek Prioritas Nasional (ProPN) untuk menjadi Rumah DataKu paripurna. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi Rumah DataKu paripurna antara lain, adanya orientasi kader RDK, sarana prasarana yang memadai, ketersediaan data, penyajian data yang bisa berupa manual atau digital, serta pemanfaatan data baik oleh pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat umum, dalam melaksanakan kegiatan atau intervensi.

Keberadaan Rumah DataKu penting untuk didirikan di seluruh desa untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan data yang akan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, pola kegiatan Rumah DataKu yang berbasis pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data akan meningkatkan kepedulian dan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi kependudukan bagi pembangunan, serta data-data yang dihasilkan merupakan artikulasi kepentingan masyarakat secara lebih luas.

A.2.8. Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif

Salah satu strategi untuk memadukan kebijakan kependudukan dalam pembangunan khususnya bagi Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) adalah dengan membentuk Kelompok Kerja Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Pokja Bangga Kencana). Efektivitas Pokja Bangga Kencana tersebut diukur dengan melihat beberapa indikator diantaranya memiliki regulasi pembentukan pokja yang ditandatangani oleh pimpinan daerah, keanggotaan pokja terdiri dari lintas sektor baik dari pemerintah maupun non pemerintah, memiliki rencana kerja yang mendukung pencapaian indikator program bangga kencana dan RPJMD, adanya alokasi anggaran baik dari APBN, APBD maupun sumber lainnya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pencatatan pelaporan.

Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja) Bangga Kencana, yaitu Pokja GDPK, Pokja Kampung KB, Pokja Advokasi dan Pokja / Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Adapun sebaran Pokja Bangga Kencana tersebut seperti yang tertulis dalam tabel berikut :

Tabel 3-0-13 Pokja Bangga Kencana yang efektif

Provinsi & Kabupaten/Kota	Pokja Bangga Kencana yang Efektif			
	GDPK	Kampung KB	Advokasi	TPPS
Prov. DI. Yogyakarta	✓	✓	✓	✓
Kab. Kulon Progo				✓
Kab. Bantul				✓
Kab. Gunung Kidul				✓
Kab. Sleman		✓		✓
Kota Yogyakarta				✓

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pokja Bangga Kencana Efektif Tahun 2024 terlihat bahwa Pokja Bangga Kencana yang ada di Provinsi dan 5 (lima) Kabupaten/Kota merupakan Pokja Bangga Kencana yang Efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 150% dari target yang diberikan yaitu sebanyak 1 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota pada indikator kinerja Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang Efektif. Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh lintas sektor baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan juga partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya untuk memperkuat Program Bangga Kencana di DIY, Perwakilan BKKBN DIY akan mengadvokasi Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk Pokja Bangga Kencana yang belum ada di wilayah masing-masing. Selain itu juga akan melakukan koordinasi intensif dengan anggota Pokja Bangga Kencana terkait pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun oleh masing-masing Pokja Bangga Kencana yang ada.

A.2.9. Cakupan Implementasi Pendidikan Kependudukan di Provinsi

Implementasi Pendidikan Kependudukan di DIY sudah mencakup 3 jalur, yaitu formal, non formal dan informal. Berdasarkan laporan di web simonevpenduk.org untuk jalur formal, DIY sudah memiliki 99 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), yang terdiri dari 90 SSK tingkat SMP dan 9 SSK tingkat SMA.

Sedangkan implementasi pendidikan kependudukan jalur nonformal, pada bulan Juli 2024 bekerja sama dengan BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN DIY melaksanakan pramuka peduli kependudukan di Benteng Vredeburg dengan mengundang sebanyak 58 sekolah untuk berpartisipasi secara aktif. Pada Tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY juga bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY untuk penyelenggaraan pelatihan atau non pelatihan bidang kesehatan.

Implementasi pendidikan kependudukan di jalur informal, terdapat 105 kegiatan Pojok Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat (PESAT) yang tercatat dalam website simpnevpenduk.org dan telah

melaksanakan Diskusi Asyik Pendidikan Kependudukan (Dakdikduk) di Pojok Kependudukan, baik yang terdapat di Rumah DataKu maupun yang terdapat di Kampung KB.

Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD KB, Dinas Pendidikan, dan mitra terkait membuat implementasi pendidikan kependudukan yang dilaksanakan di DIY bisa memenuhi target yang ditentukan.

A.2.10. Persentase Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk merupakan alat bantu bagi Pemerintah Daerah berdasarkan data dan informasi tentang kerentanan kondisi kependudukan sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada Pengambil kebijakan dalam pengelolaan pembangunan kependudukan di suatu daerah.

Pada tahun 2024, Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SiPerindu) telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Kabupaten/Kota se-DIY sehingga capaian pelaksanaan SiPerindu sebesar 150% dari target 1 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk yang telah dilaksanakan oleh OPD Pengendalian Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi Pengukuran Indikator Kerentanan Pengendalian Penduduk, Sosialisasi SiPerindu, Advokasi tindak lanjut SiPerindu dan Model Tindak Lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk. Sasaran kegiatan tersebut antara lain mitra kerja pemerintah dan mitra kerja swasta di wilayah masing-masing. Kegiatan tersebut dirangkum dalam laporan kegiatan Tahun 2024 dan Rencana aksi kegiatan SiPerindu tahun 2025 yang dilaporkan secara online melalui laman siperindu.online.

Selain itu sebagai salah satu pengembangan SiPerindu adalah Jam Kependudukan atau *Population Clock* yang menjadi satu bagian aplikasi SiPerindu. *Population Clock* Daerah Istimewa Yogyakarta telah

diluncurkan secara resmi bersama Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

A.2.11. Persentase Kampung KB yang Melaksanakan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan

Berdasarkan laporan website kampungkb.bkkbn.go.id, 84,47% Kampung Keluarga Berkualitas (370 Kampung KB dari 438 Kampung KB) telah melaksanakan kegiatan penanganan terpadu isu kependudukan atau tercapai 140,78% dari target sebesar 60%.

Penilaian indikator Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan Penanganan terpadu isu kependudukan diperoleh dari laporan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas yang telah melibatkan Dinas/Instansi lainnya dengan melibatkan lebih dari 7 lintas sektor.

Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang telah melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan paling tinggi di Kota Yogyakarta (95,56%) dan terendah di Kabupaten Gunungkidul (77,78%) pada 112 Kampung KB.

A.2.12. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP

DIY berhasil mencapai 100,28% dari target persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Siap Melayani KB MKJP di DIY Tahun 2024. Dari KKP yang ditetapkan sebesar 85%, DIY berhasil mencapai angka 85,24%.

Menurut Keputusan Kepala BKKBN Nomor 273/KEP/E1/2023 tentang Panduan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, terdapat tiga indikator Penguatan Fasyankes dalam Pelayanan KB. Salah satu diantaranya adalah Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Siap Melayani KB MKJP. Target dalam indikator ini adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari :

- a. Puskesmas atau yang setara
- b. Praktik dokter

- c. Klinik pratama atau yang setara
- d. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara

Target pada indikator ini memang dikhususkan pada FKTP yang teregistrasi di BKKBN, melayani IUD dan atau Implan. Hal ini karena FKTP sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer harus mampu melayani pelayanan KB lengkap.

FKTP dinyatakan siap melayani KB MKJP jika memenuhi tiga hal yaitu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kewenangan dan atau kompetensi dalam melayani IUD dan atau Implan di FKTP, adanya sarana prasarana minimal satu IUD Kit dan atau Implan Removal Kit, serta adanya alokon untuk menunjang pelayanan KB MKJP IUD dan atau Implan baik yang disediakan oleh pemerintah, swasta, maupun mandiri.

A.2.13. Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)

DIY berhasil mencapai 87,05% dari target Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*) di DIY tahun 2024. Dari KKP yang ditetapkan sebesar 78,35%, DIY berhasil mencapai angka 68,2%. Meskipun DIY belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun DIY merupakan provinsi dengan capaian MII terbaik se-Indonesia (rata-rata capaian nasional 48.0%).

Target MII dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan untuk nasional dan masing-masing provinsi dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan *base line*. Target tersebut sedianya akan direvisi oleh Direktorat Kualitas Pelayanan KB BKKBN, akan tetapi sudah terlanjur tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2020-2024 dan tidak bisa dilakukan perubahan kembali.

MII dinilai dari PUS yang pernah/sedang menggunakan kontrasepsi dan mendapatkan informasi mengenai alat/obat/cara KB, informasi mengenai efek samping dari alat/obat/cara KB, serta tindakan yang perlu dilakukan jika terjadi efek samping. Jika dilihat dari capaian ketiga aspek tersebut, aspek terendah ada pada informasi tindakan jika terjadi efek samping (54,4%). Sedangkan kedua aspek lainnya sudah

mencapai angka 70% lebih. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penetrasi KIE yang lebih luas dan mendalam khususnya untuk aspek informasi mengenai tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi efek samping dalam rangka meningkatkan capaian MII.

A.2.14. Persentase Kesertaan KB di Kabupaten/Kota Dengan Kesertaan Rendah

Persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dengan kesertaan rendah merupakan persentase kesertaan KB di kabupaten/kota yang capaiannya lebih rendah dari persentase kesertaan KB di provinsi. Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN yang diakses tanggal 17 Januari 2025 didapatkan informasi bahwa capaian kesertaan KB di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 66,12%. Terdapat tiga kabupaten/kota dengan kesertaan KB rendah yaitu Kabupaten Bantul (65,74%), Kabupaten Sleman (62,8%), dan Kota Yogyakarta (62,8%). Dengan demikian, persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dengan kesertaan rendah yaitu sebesar 64,08%.

Capaian tersebut telah melampaui target KKP yang ditetapkan sebesar 57,49%. Selain itu, berdasarkan Pedoman Penggarapan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Wilayah Khusus, di DIY tidak terdapat kabupaten/kota yang masuk dalam daftar 100 kabupaten/kota se-Indonesia yang memiliki persentase kesertaan KB rendah. Hal ini disebabkan karena capaian kesertaan KB di DIY secara keseluruhan sudah melampaui target yang ditentukan.

A.2.15. Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan

DIY berhasil mencapai 147,09% dari target persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) di DIY tahun 2024. Dari KKP yang ditetapkan yaitu sebesar 22,3%, DIY berhasil mencapai 11,8%. Angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian KTD tahun lalu. Harapannya semua kehamilan merupakan kehamilan yang terencana dan dikehendaki. Untuk itu, keberhasilan Program Genre dan KB menjadi kunci menekan angka KTD di DIY. Program KB yang

mendukung penurunan KTD diantaranya rendahnya ASFR 15-19 tahun dan meningkatnya kesertaan KB Pasca Persalinan di DIY.

A.2.16. Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan

KB Pasca Persalinan merupakan pelayanan KB yang diberikan kepada ibu bersalin dalam kurun waktu 0-42 hari setelah melahirkan. Data yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase pelayanan KB Pasca Persalinan adalah data riil jumlah ibu bersalin di DIY yang bersumber dari kesgadiy.web.id, sedangkan data pelayanan KB pasca salin menggunakan data SIGA BKKBN. Dari data tersebut diperoleh jumlah ibu bersalin tahun 2024 sebanyak 32.465 ibu bersalin, data pelayanan KB pasca persalinan sebanyak 17.262 akseptor KB pasca salin. Dengan demikian, persentase pelayanan KB pasca persalinan di DIY tahun 2024 sebesar 53,17%.

Target KB pasca persalinan di DIY tahun 2024 dalam Renstra Perwakilan BKKBN DIY tahun 2020-2024 adalah sebesar 29,4%. Sedangkan target KB Pasca Persalinan DIY dari BKKBN Pusat sebesar 52%. Dengan demikian capaian KB pasca persalinan di DIY telah mencapai target.

DIY berhasil mencapai 180,28% dari target persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan tahun 2024 dari KKP yang ditetapkan yaitu sebesar 29,4%, sedangkan jika dibandingkan dengan target pusat sebesar 52% maka DIY berhasil mencapai 102,25%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target tersebut diantaranya :

- a. Pembentukan SE Gubernur Nomor 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan KB pasca persalinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Adanya alokon jenis baru sebagai alternatif pilihan penggunaan metode kontrasepsi pasca persalinan berupa implant 1 batang dan progesterin *only pil*.

KB Pasca persalinan ini memiliki peranan dalam mendukung upaya Program Percepatan Penurunan Stunting, Penurunan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

A.2.17. Persentase Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra kerja yang Berperan Serta Aktif Dalam Pengelolaan Program Bangga Kencana

Keberhasilan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting terlaksana dengan baik berkat dukungan dan peran serta aktif dari seluruh pihak baik internal maupun stakeholder atau mitra kerja. Pada tahun 2024 ini terdapat 24 mitra kerja yang telah memberikan dukungan secara optimal terhadap program BKKBN diantaranya DP3AP2, OPD KB Kabupaten, Kota DIY, IpeKB DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY, Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Kemenag DIY, FAPSEDU, KOREM/ KODIM, POLDA/ POLRES, LDII DIY, HIMPSI DIY, Universitas atau Perguruan Tinggi (Universitas Teknologi Yogyakarta, Universitas Jendral Ahmad Yani, Poltekes Kemenkes, Universitas Respati Yogyakarta, UGM, UNY, UII, UMBY, UNU, Universitas Proklamasi 45), Forum IMP DIY, IBI DIY, LAZIZMU DIY dan PW Aisyiyah, TP PKK DIY, Lembaga Penyiaran (TVRI, RRI, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, Jogja TV, Yasika Radio), Baznas DIY, Persatuan Juang Kencana (PJK), Saka Kencana, BKOW, Kadin DIY, Rumah Zakat DIY.

Capaian sejumlah 24 mitra kerja ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal tahun 2024 sejumlah 24 mitra kerja/ Stakeholders yang berarti capaian target sudah memenuhi 100%. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya :

- 1) Konsisten melakukan advokasi dan pendekatan kepada Stakeholder dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan komitmen dan dukungannya terhadap pencapaian program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
- 2) Melibatkan Mitra kerja strategis dalam setiap kegiatan dalam rangka optimalisasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

A.2.18. Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana

Pada tahun 2024, Perwakilan BKKBN DIY menetapkan target capaian Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana sebesar 75%. Melalui berbagai strategi dan upaya optimal dalam pelaksanaan program, target tersebut berhasil terlampaui, dengan realisasi mencapai 80,60%. Hal tersebut berdasarkan hasil pemutakhiran PK-24, dengan rincian Kabupaten Bantul 77,3%, Gunungkidul 83,8%, Kota Yogyakarta 83,2%, Kulon Progo 78,5%, dan Kabupaten Sleman sebesar 81,4%.

Capaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 107,47% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara Perwakilan BKKBN DIY dengan mitra kerja, pemerintah daerah, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung program Bangga Kencana. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara Perwakilan BKKBN DIY dengan berbagai mitra kerja, baik dari instansi pemerintah, swasta, maupun media. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah produksi iklan layanan masyarakat serta penyebarluasan informasi melalui berbagai kanal media, baik televisi, radio, media sosial, maupun media cetak. Langkah ini terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat luas, meningkatkan kesadaran akan pentingnya program Bangga Kencana, serta mendorong partisipasi aktif dalam program yang dijalankan.

Berbagai inovasi dan pendekatan yang dilakukan, seperti penguatan advokasi dan komunikasi, peningkatan kualitas layanan KB dan kesehatan reproduksi, serta optimalisasi peran Kampung KB, turut berkontribusi dalam pencapaian target ini. Dengan capaian yang melampaui target, diharapkan Program Bangga Kencana semakin berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

A.2.19. Persentase Penyuluh KB yang Berkinerja Baik

Capaian Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik di Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2024 mencapai 108,08% atau

97,27% dari target yang telah ditentukan yakni 90%, data yang diambil bersumber dari Aplikasi Evisum dan Aplikasi SIPP. Data Evisum menggambarkan capaian kinerja penyuluh KB setiap bulannya yang terdiri dari kegiatan penyuluhan dan non penyuluhan, data yang ditarik dari aplikasi Evisum adalah data yang menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja penyuluh KB sebesar 80% berdasarkan kinerja Penyuluh KB di wilayah binaan. Sedangkan Aplikasi SIPP dipergunakan untuk mengkonversikan persentase data kinerja penyuluh KB ke dalam nominal rupiah yang harus dibayarkan.



Gambar 3-0-9 Perbandingan Capaian Kinerja Penyuluh KB Tahun 2022-2024

Apabila memperhatikan capaian kinerja Penyuluh KB dari tahun 2022-2023 meskipun target telah terpenuhi akan tetapi tidak mengalami kenaikan, dan di tahun 2024 dengan target yang semakin tinggi capaian kinerja penyuluh KB dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 108,08% atau 97,27% dari target 90%.

Persentase Capaian Kinerja Penyuluh KB selain sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja juga sebagai tolak ukur capaian target kinerja penyuluh KB selama periode 01 Januari - 31 Desember 2024 yang akan menjadi salah satu indikator penilaian rating kerja penyuluh KB di akhir tahun 2024. Rata-rata persentase capaian kinerja penyuluh KB perbulan >90%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluh KB telah melakukan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah

ditargetkan pada awal tahun untuk mendukung program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

A.2.20. Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)

Data hasil pelayanan KB dan Pengendalian lapangan sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. Hasil input data rutin pelayanan KB dan Pengendalian Lapangan diharapkan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh program Bangga Kencana, yaitu dapat ditelusuri melalui *by name by address*, sehingga dapat memberikan kepastian terhadap kondisi saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah.

Seluruh Kabupaten dan Kota baik kecamatan maupun faskes telah menginput laporan pelayanan KB dan pengendalian lapangan kedalam aplikasi SIGA dan dilaporkan secara rutin tiap bulan.

A.2.21. Persentase Cakupan Perangkat dan Jaringan Sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota

Capaian terkait cakupan perangkat dan jaringan Sistem teknologi dan informasi tingkat provinsi dan kabupaten kota sudah mencapai 100%. Bentuk dukungan ini merupakan suatu upaya dalam melaksanakan Sistem Informasi Keluarga berupa seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga. Dukungan ini berupa pembiayaan paket data komunikasi atau pembiayaan sewa internet menggunakan broadband di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.

A.2.22. Persentase Peserta Diklat yang Lulus Dengan Kategori Baik dan

Sangat Baik

Tahun 2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta harus memenuhi target Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus dengan kriteria baik dan sangat baik sebesar 80%. Berdasarkan target tersebut tercapai hasil sebesar 96,46% peserta pelatihan yang dinyatakan lulus dengan kriteria baik dan sangat baik. Berdasarkan target dan hasil yang diperoleh maka besaran capaian target peserta pelatihan yang lulus dengan kriteria baik dan sangat baik adalah sebesar 120,58%.

Tabel 3-0-14

TAHUN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN
2022	65%	93,69%	144,14%
2023	75%	97,55%	130,07%
2024	80%	96,46%	120,58%

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 target peserta pelatihan yang dinyatakan lulus dengan kriteria baik dan sangat baik mengalami peningkatan yakni pada tahun 2022 sebesar 65%, tahun 2023 sebesar 75% dan tahun 2024 sebesar 80%. Berdasarkan target tersebut tercapai hasil pada tahun 2022 sebesar 93,69%, tahun 2023 sebesar 97,55% dan tahun 2024 sebesar 96,46%. Berdasarkan target dan hasil yang diperoleh maka besaran capaian target peserta pelatihan yang lulus dengan kriteria baik dan sangat baik pada tahun 2022 sebesar 144,14%, tahun 2023 sebesar 130,07% dan tahun 2024 sebesar 120,58%. Dengan demikian dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 Perwakilan BKKBN DIY telah berhasil mencapai target.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target tersebut diantaranya :

- a. Pengembangan Model *Flexible Learning* bagi TPK, dimana TPK dapat memilih orientasi secara mandiri agar TPK dapat mengikuti orientasi sesuai dengan kebutuhan waktu dan lokasi (kapan dan

- dimana saja). Dengan metode belajar ini, TPK dapat memilih bagaimana mereka akan mempelajari materi (tersedia pilihan media pembelajaran, yaitu video dan teks/modul) serta adanya pilihan bagi TPK untuk berinteraksi secara *ansynchronous* dengan fasilitator.
- b. Pengembangan pelatihan Daring BKKBN Jogja adalah sebuah upaya menjadikan pelatihan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga terbuka untuk siapa saja, dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Pelatihan merupakan fungsi yang perlu mendapatkan perhatian karena menyangkut dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pelatihan pada tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor, yaitu : 1. Tersedianya tenaga fasilitator (widyaiswara dan non widyaiswara) yang kompeten sesuai dengan bidangnya, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. 2. Pengembangan Materi dan Media Pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal, serta dengan mengakomodir berbagai gaya belajar, sehingga peserta pelatihan dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan. 3. Pengembangan Platform Pembelajaran Berupa Learning Management System yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran bagi peserta pelatihan.

Agar pelatihan dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sehingga memberikan dampak yang optimal bagi peserta pelatihan, maka untuk mempertahankan capaian yang telah diraih dilakukan dengan tetap konsisten melaksanakan siklus pelatihan sebagai berikut :

1. Melakukan analisis kebutuhan diklat baik di level makro maupun mikro, sehingga kebutuhan organisasi maupun kebutuhan individu untuk pengembangan kompetensi dapat terakomodir;
2. Desain Pengembangan Kurikulum Pelatihan mengakomodir kebutuhan dari organisasi maupun peserta pelatihan, sehingga materi pelatihan yang disampaikan dapat memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan ekspektasi dari peserta pelatihan serta dengan memperhatikan gaya belajar orang dewasa;

3. Pengembangan Materi dan Media pembelajaran dilakukan dengan mengakomodir berbagai gaya belajar peserta pelatihan, yaitu : visual, auditori dan kinestetik. Sehingga peserta pelatihan dapat belajar dengan lebih optimal;
4. Penyelenggaraan pelatihan dengan mematuhi Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan melibatkan Komite Penjamin Mutu untuk melakukan monitoring pelaksanaan pelatihan;
5. Evaluasi pelatihan, khususnya terkait dengan aspek pengetahuan disesuaikan dengan tujuan pelatihan yang ingin dicapai dengan tetap memperhatikan target keluaran kompetensi yang ingin dicapai;
6. Melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, baik evaluasi selama pelatihan maupun evaluasi pasca pelatihan.

A.2.23. Dukungan Manajemen di Provinsi (Termasuk Gaji/001 dan Pemeliharaan Rutin/002)

Program Dukungan Manajemen di perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta memiliki sasaran yaitu “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi”. Dalam melaksanakan dukungan manajemen di provinsi terdapat sinergi antara 3 Tim Kerja yaitu Hukum, Kepegawaian dan Pelayanan Publik; Perencanaan dan Manajemen Kinerja; serta Keuangan, Anggaran dan Pengelolaan BMN. Layanan manajemen di Provinsi tahun 2024 telah tercapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan, pembayaran gaji dan kegiatan layanan perkantoran dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian kinerja Dukungan Manajemen melibatkan semua pihak yang bersinergi sesuai dengan komitmen pelayanan terbaik yang menjadi nilai utama dalam setiap layanan sesuai dengan arahan Kepala Perwakilan serta komitmen bersama setiap Pegawai.

A.2.24. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Salah satu dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi adalah pelayanan publik. Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik yaitu pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk dapat mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta adalah melalui survei dan evaluasi. Adapun unsur-unsur penyelenggaraan pelayanan publik yang disurvei, meliputi : 1. Kemudahan persyaratan, 2. Prosedur, 3. Waktu, 4. Biaya, 5. Kompetensi, 6. Sarana dan prasarana, dan 8. Pengaduan dan saran.

Survei Kepuasan Masyarakat bulanan sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei bertujuan untuk mendapatkan persepsi masyarakat/pengguna layanan/mitra kerja atas kepuasan layanan dan persepsi anti korupsi, selain itu untuk memberikan gambaran persepsi anti korupsi secara umum pada setiap Unit Kerja yang membangun Zona Integritas melalui Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) serta memberikan gambaran persepsi pengguna layanan kepuasan pelayanan publik secara umum melalui Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (IPKP). Perwakilan BKKBN DIY memperoleh rata-rata IPAK sebesar 3.84/4.00 dan rata-rata IPKP sebesar 3.59/4.00.

A.2.25. Indeks ZI WBK

Dalam upaya mempercepat terwujudnya pemerintah berkelas dunia dan diarahkan pada birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima, maka dilaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja terutama yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Zona Integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang disertai dengan Surat Keputusan Bersama dengan lima pimpinan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, maka perlu dibangun ZI pada kawasan-kawasan strategis. Unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang ditunjuk untuk membangun ZI wajib membangun ZI di internal unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan. Sehingga pembangunan ZI akan semakin banyak dilakukan di kawasan dan unit-unit kerja/satuan kerjanya.

Upaya ini juga sebagai tindak lanjut atas paradigma masyarakat tentang penilaian terhadap pemerintahan yang tidak bersih. Masyarakat berpendapat bahwa jalannya pemerintah: 1) tidak transparan dan akuntabel, 2) tingkat korupsi tinggi, 3) kualitas pelayanan publik yang buruk, dan 4) Penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga pemerintah melaksanakan agenda besar Reformasi Birokrasi untuk menuju pemerintahan yang lebih baik dan menghadirkan inovasi-inovasi layanan kepada masyarakat dan berkelanjutan.

Pembangunan zona integritas terinspirasi dari konsep "*island of integrity*" yang merupakan praktek lebih jauh dari eksistensi pengembangan keilmuan administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. *Island of integrity* merupakan suatu kondisi dimana unit kerja instansi pemerintah yang "imun" dan mampu memberikan tata

kelola yang terbaik meskipun instansi pemerintah di sekitarnya didominasi oleh manajemen dan tata kelola yang buruk. “*Island of integrity*” juga diberi istilah yang berbeda seperti “*islands of excellence*” (Therkildsen 2008), “*islands of effectiveness*” (Crook 2012)”, “*pockets of effectiveness*” (Leonard 2008; Roll 2011a) dan “*pockets of efficiency*” (Geddes 1994). Seluruh istilah dan maksud tersebut mengarah kepada bagaimana membangun tata kelola instansi pemerintah yang berintegritas, lebih baik dan terus menerus.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional D.I. Yogyakarta adalah salah satu unit/satuan kerja pemerintah yang menjadi unit percontohan Pembangunan ZI WBK lebih dari 5 tahun terakhir ini (2019 s.d 2023). Hal ini terbukti dari diperolehnya nilai indeks pembangunan ZI WBK diatas target 85,00% (Skala 1-100) dari Tim Penilai Internal yaitu BKKBN RI/Pusat, dimana didalamnya terdiri dari berbagai parameter antara lain :

1. Perhitungan hasil survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
2. Terpenuhinya nilai pembangunan pada perubahan pada komponen *Pengungkit* (penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit) dan *Hasil* (Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel; serta Kualitas Pelayanan Publik yang prima).

Konsekuensi dengan adanya pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah seluruh jajaran dari Pimpinan sampai dengan seluruh bawahan yang tergabung dalam pembangunan tersebut untuk dapat benar-benar melaksanakan Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan. Adapun tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengkaji hal-hal apa saja yang bisa dilaksanakan melalui Pencanangan Zona Integritas sehingga mampu diperolehnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada lingkungan BKKBN DIY.

Perwakilan BKKBN DIY melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) dengan parameter pembangunan pada komponen *Pengungkit* dan *Hasil*, komponen Pengungkit terdiri dari enam komponen yang harus dibangun yaitu :

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

2. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM

3. Penataan Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing- masing instansi pemerintah.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada

masing- masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Komponen *Hasil* merupakan sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel diukur dengan indikator :

- a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal)
- b. Capaian Kinerja lebih baik

2. Kualitas Pelayanan Publik yang prima

Sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Pelaksanaan Survei persepsi kualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait survei kepuasan masyarakat (SKM) yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB.

Dalam upaya pembangunan yang telah dilakukan tersebut berdasar hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Satker Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta tahun 2024 memperoleh nilai indeks Pembangunan ZI WBK sebesar 89,00 dan setelah dilakukan berbagai tahap penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta mendapatkan anugerah sebagai Unit Kerja berpredikat ZI WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2024.

Dalam mencapai target tersebut, beberapa upaya pembangunan ZI WBK yang telah dilakukan diantaranya :

1. Survei Kepuasan Masyarakat bulanan sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei bertujuan untuk mendapatkan persepsi masyarakat/pengguna layanan/mitra kerja atas kepuasan layanan dan persepsi anti korupsi, selain itu untuk memberikan gambaran persepsi anti korupsi secara umum pada setiap Unit Kerja yang membangun ZI melalui Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) serta memberikan gambaran persepsi pengguna layanan kepuasan pelayanan publik secara umum Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (IPKP). Perwakilan BKKBN DIY memperoleh rata-rata IPKP sebesar 3.59/4.00 dan rata-rata IPAK sebesar 3.84/4.00

2. Pembentukan Tim Pembangunan ZI WBK, sosialisasi dan internalisasi program ZI WBK kepada seluruh pegawai dan Petugas Lapangan KB
3. Proaktif melaksanakan rekomendasi sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sehingga pada Temuan pada Laporan Pemutakhiran Data Atas Hasil Pengawasan s.d Triwulan IV Tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY dengan status NIHIL atas saldo temuan hasil audit internal dan saldo temuan hasil joint audit DAK sub bidang KB.
4. Penyusunan dan monitoring evaluasi SOP pada seluruh kegiatan.
5. Refreshing dan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh Auditor Pusat.
6. Penguatan pengawasan melalui kegiatan public campaign acara momentum strategis seperti Harganas, kegiatan e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi kepada seluruh ASN Perwakilan BKKBN DIY.
7. Melaksanakan Surveillance SMAP ISO 37001:2016 dengan status "Dipertahankan Status Sertifikasi" sesuai sertifikat SNI ISO 37001:2016 Nomor G.05-ID0762-XII-2022.
8. Melaksanakan monitoring kegiatan program Banggakencana melalui pengecekan SPJ kegiatan pada Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2023.
9. Memfasilitasi kegiatan Joint Audit DAK Sub bidang KB oleh BKKBN Pusat dan Kemendagri.

10. Sosialisasi saluran pengaduan secara aktif melalui website dan media sosial resmi.
11. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan Peningkatan Pemahaman Gratifikasi oleh KPK.
12. Melaksanakan Tindak Lanjut Pemantauan Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama BKKBN atas Rekomendasi Hasil Pemantauan Semester I 2024.
13. Sosialisasi penerapan Manajemen Risiko oleh Perwakilan BPKP DIY.
14. Pembangunan Sistem Integritas (SI) yang mencakup Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System.
15. Memfasilitasi evaluasi Percepatan Penurunan Stunting periode 2023 dan semester I 2024 oleh BPKP.
16. Memfasilitasi Penilaian Maturitas SPIP oleh BKKBN Pusat.

Dengan hasil evaluasi masih belum mencapai target namun tetap masih ada yang dapat ditingkatkan yaitu :

- Meningkatkan budaya kinerja sehingga pencapaian target bisa sampai dengan 100%.
- Meningkatkan identifikasi pengaduan yang disampaikan di luar kanal pengaduan resmi.
- Penanganan benturan kepentingan untuk lebih mengarah kepada penciptaan sistem yang dapat meminimalisir potensi benturan kepentingan secara berkelanjutan.
- Mengembangkan inovasi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholder.

A.3. Capaian Kinerja Output Proyek Prioritas Nasional dan Stunting

Tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY masih mempunyai target kinerja output Proyek Prioritas Nasional dan stunting dengan capaian kinerja masing-masing indikator disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3-0-15 capaian kinerja output ppn dan stunting

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas pembinaan 1000 HPK	Tagging RPJMN/ProPN	56.722	56.722	100,00%
		Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Tagging RPJMN/ProPN	488	488	100,00%
		Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitas pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	Tagging RPJMN/ProPN	143	143	100,00%
		Jumlah Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitas pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Tagging RPJMN/ProPN	10	10	100,00%
		Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitas pembinaan	Tagging RPJMN/ProPN	79	79	100,00%
		Kampung KB yang mendapat fasilitas Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana	Tagging RPJMN/ProPN	5	5	100,00%
		Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon	Tagging RPJMN/ProPN	473	473	100,00%
		Kampung KB yang mendapat fasilitas pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	Tagging Stunting	5	5	100,00%
		Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	Tagging Stunting	1	1	100,00%
		Jumlah faskes yang mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting	Tagging Stunting	473	473	100,00%
		Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	Tagging Stunting	5	5	100,00%
		Jumlah Sistem Data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting yang berkualitas	Tagging Stunting	1	1	100,00%

		Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	Tagging Stunting	3	3	100,00%
		Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	Tagging Stunting	6	6	100,00%
		Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTTPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	Tagging Stunting	1	1	100,00%
2	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	Tagging Stunting	5.576	5.581	100,09%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi	Tagging Stunting	1	1	100,00%
		Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi	Tagging Stunting	1	1	100,00%
4	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting provinsi	Tagging Stunting	1	1	100,00%

Untuk tren capaian indikator Kinerja Output Proyek Prioritas Nasional dan Stunting dalam 3 (tiga) tahun terakhir diuraikan dalam tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024			CAPAIAN NASIONAL 2024		
		TARGET	CAPAIAN	PERSentase CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	PERSentase CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	PERSentase CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	PERSentase CAPAIAN
1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	45.056,00	40.580,00	90,07%	45.656	45.656	100,00%	46.256	37.515	81,10%	42,68%	63,75%	
2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	292 & 151	292 & 151	100,00%	304 & 161	304 & 161	100,00%	316 PIK Remaja & 172 BKR	316 PIK R dan 172 BKR	100,00%			100,00%
3	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	926	1.804,00	194,82%	942	3.985	423,04%	959	5.047	526,28%			526,28%
4	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	80	100	125,00%	90	90	100,00%	100%	100,00%	100,00%			100,00%
5	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 & 5	1 & 5	100,00%	1 Prov & 5 Kab/Kota	1 Prov & 5 Kab/Kota	100,00%	100% Prov & 100% Kab/Kota	100% Prov & 100% Kab/Kota	100,00%			100,00%
6	Jumlah Kelompok Kerja Bangsa Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 & 2	1 & 5	200,00%	1 Prov & 2 Kab/Kota	1 Prov & 2 Kab/Kota	100,00%	1 prov & 3 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	150,00%			150,00%
7	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3	3	100,00%	3	3	100,00%	3 jalur (formal, nonformal, dan informal)	3 jalur (formal, nonformal, dan informal)	100,00%			100,00%
8	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	71,93	99,15	137,84%	78,47	80,68	102,82%	85%	85,24%	100,28%			100,28%
9	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	74,69	54,94	73,56%	76,52	55,53	72,57%	78,35	68,2	87,05%		48	87,05%
10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	57,17	58,81	102,87%	57,33	63,33	110,47%	57,49%	64,08%	111,46%			111,46%
11	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	23,3	11,8	149,36%	22,8	11,09	151,36%	22,30%	11,80%	147,09%		13,20%	147,09%
12	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	24,41	20,25	82,96%	27,4	48,08	175,47%	29,41%	53,17%	180,79%		48,90%	180,79%
13	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangsa Kencana	22	22	100,00%	23	23	100,00%	24	24	100,00%			100,00%
14	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangsa Kencana	65	65	100,00%	70	70	100,00%	75%	80,60%	107,47%			107,47%
15	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	75	75	100,00%	80	80	100,00%	90%	97,27%	108,08%			108,08%
16	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5	5	100,00%	5	5	100,00%	5	5	100,00%			100,00%
17	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	84,62	84,62%	100	100	100,00%	100%	100,00%	100,00%			100,00%
18	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	65	93,69	144,14%	75	97,55	130,07%	80%	96,46%	120,58%			120,58%
19	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12	12	100,00%	12	12	100,00%	3	3,59	119,67%			119,67%
20	Indeks ZI WBK	79	84,52	106,99%	82	96,59	117,79%	85	89	104,71%			104,71%

Tabel 3-0-16 capaian kinerja output ppn dan stunting dalam 3 tahun

A.3.1. Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK

Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) bertujuan memastikan tumbuh kembang anak optimal sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Periode emas ini menjadi pondasi penting

untuk mencegah stunting, meningkatkan kualitas kesehatan, dan membangun generasi unggul di masa depan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perwakilan BKKBN DIY telah melaksanakan kegiatan Internalisasi Pengasuhan 1000 HPK melalui Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT) serta pendampingan oleh PKB dan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di wilayah masing-masing dengan capaian 56.722 keluarga atau 100% dari target yang diberikan. Kurun waktu 3 tahun terakhir, target ini telah berhasil tercapai 100% setiap tahunnya dengan berbagai strategi dan kegiatan yang dilakukan. Diawali dengan kegiatan advokasi dan promosi 1000 HPK kepada pemangku kebijakan serta menggandeng Universitas untuk menguatkan komitmen dalam internalisasi 1000 HPK. Perwakilan BKKBN DIY juga menyelenggarakan KERABAT 2024 total sebanyak 11 series dengan rincian secara luring (5 kali) dan daring (6 kali) yang diikuti oleh lebih dari 1600 peserta. Akhir dari kegiatan KERABAT 2024 dilaksanakan wisuda KERABAT kepada 25 peserta dari 5 kabupaten/kota.

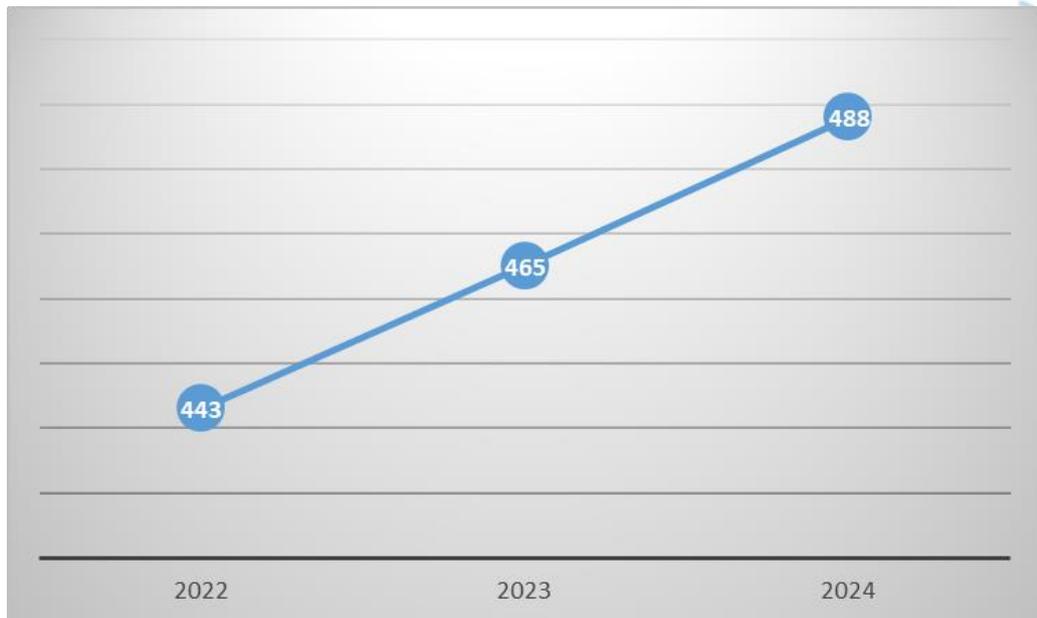


Gambar 3-0-10 Grafik Perkembangan 1000 HPK

A.3.2. Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu

Cakupan PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri calon ibu berdasarkan hasil SIGA, Perwakilan BKKBN DIY telah mencapai 488 kelompok. Realisasi jumlah

kelompok tersebut menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY telah berhasil mencapai target 100%.



Gambar 3-0-11 Grafik PIK R dan BKR yang mendapatkan fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu

Dari Tahun 2022 hingga 2024, Perwakilan BKKBN DIY telah melakukan fasilitasi pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri dengan target di tahun 2022 sebanyak 443 kelompok, tahun 2023 465 kelompok dan di tahun 2024 sebanyak 488 kelompok. Setiap tahunnya Perwakilan BKKBN DIY selalu mendapat kenaikan target kelompok dan mampu mencapai 100% target yang telah ditetapkan. Dengan semakin banyaknya kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di DIY. Kegiatan yang telah dilakukan Perwakilan BKKBN DIY dalam mencapai target PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu antara lain :

- a. Melaksanakan *Workshop* Tentang Kita untuk Duta Genre Desa/Kelurahan.
- b. Melaksanakan *Workshop Upgrade* Tentang Kita kepada PIK Remaja dan Pengelola Program Remaja di Kabupaten/Kota.

- c. Melaksanakan *Workshop* Edukasi Gizi dan Pencegahan Anemia kepada Forum Genre, PIK Remaja dan Pengelola Program Remaja di Kabupaten/Kota serta Duta Genre DIY Tahun 2024.
- d. Melaksanakan *Workshop Parenting* 1001 Cara Bicara kepada Kader BKR di Kabupaten/Kota.

Faktor keberhasilan dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah dukungan dan keterlibatan aktif dari *stakeholder* dan mitra kerja dari berbagai sektor terkait dan tingkatan wilayah dalam mendukung pembinaan edukasi kespro dan gizi serta adanya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program yang telah dilakukan. Meskipun mampu mencapai target yang ditetapkan, namun masih ditemukan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain : Keterbatasan anggaran dikarenakan *refocusing* sehingga pemberian pembinaan seperti kegiatan workshop dilaksanakan secara daring yang mengakibatkan kurang optimal. Strategi untuk tahun berikutnya yaitu dengan mengintensifkan peran Duta Genre, kader BKR, dan penggiat keluarga yang telah mengikuti pelatihan untuk memfasilitasi ke kelompok-kelompok PIK R dan BKR agar jangkauannya lebih luas. Selain itu memperluas kemitraan dengan *stakeholders* dan mitra strategis yang potensial.

A.3.3. Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan

Pelayanan Ramah Lansia

Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia dengan target Pro PN sebanyak 143 Kelompok BKL, Perwakilan BKKBN DIY berhasil mencapai angka 100%. Adapun fasilitasi yang diberikan berupa pendampingan dalam Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh & Orientasi Pendampingan Jangka Panjang bagi Lansia. Adapun sebaran jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang menjadi sasaran sebagai berikut :

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah BKL ProPN
1	Kulon Progo	22
2	Bantul	31
3	Gunungkidul	34
4	Sleman	31
5	Yogyakarta	25
Jumlah DIY		143

Tabel 3-0-17 BKL propn

Kegiatan Sosialisasi dan Orientasi tentang 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Jangka Panjang bagi Lansia kepada kelompok BKL sasaran juga terselenggara atas kerjasama dan kolaborasi Perwakilan BKKBN DIY dengan Indonesia Ramah Lansia (IRL) dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Selain itu Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan Pengembangan Kelompok BKL yang berkualitas dan mandiri melalui fasilitasi kegiatan Sekolah Lansia BKL. Sekolah Lansia BKL ini bertujuan mewujudkan Lansia yang SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif dan Bermartabat) dalam 7 Dimensi Lansia Tangguh secara utuh yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

Atas komitmen dari berbagai pihak dalam mendukung program kelanjutusiaan, khususnya kegiatan sekolah lansia BKL, pada Tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY telah memfasilitasi dan melakukan pendampingan kepada 16 (enam belas) sekolah lansia BKL di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah lansia tersebut tidak hanya didanai oleh APBN saja, tetapi sebagian juga didanai melalui Dana APBD dan Swadaya masyarakat/ kelompok.

Pencapaian pembentukan Sekolah Lansia BKL Baru (Standar Satu) di Tahun 2024 jauh melampaui target dari Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan BKKBN dengan target pembentukan 1 (satu) sekolah Lansia BKL baru.

Perwakilan BKKBN DIY memfasilitasi membuka 11 (sebelas) Sekolah Lansia BKL baru, yang disupport tidak hanya dari biaya APBN

saja, tetapi juga buah dari hasil advokasi Perwakilan BKKBN dengan OPD KB Kabupaten Sleman yang telah membiayai 6 (enam) Sekolah Lansia dan Kelompok Swadaya masyarakat yang peduli lansia yang dengan swadaya membiayai 2 (dua) Sekolah Lansia BKL.

A.3.4. Jumlah Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat Fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan target lokus sebanyak 10 kelompok UPPKA, Perwakilan BKKBN DIY berhasil mencapai angka 100 %. Adapun Kelompok UPPKA tersebut tersebar di 5 Kabupaten/ Kota, yaitu :

Tabel 3-0-18

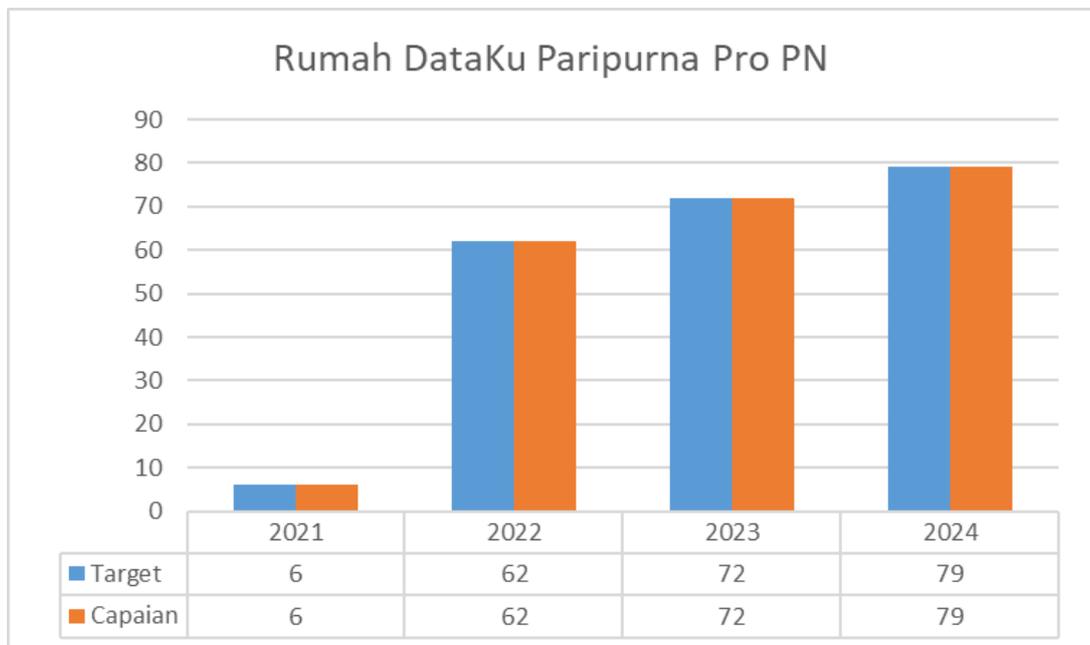
No	Kabupaten/ Kota	Nama Kampung KB	Nama Kelompok <u>UPPKA</u>
1	Bantul	1. Baros	1. Mawar
		2. Terong	2. Ngudi Rejeki
2	Sleman	1. Margo Agung	1. Barokah
		2. Tambak Rejo	2. Melati
3	Gunung Kidul	1. Kayu Gerit	1. Kayu Gerit
		2. Sambirejo	2. Rahayu
4	Kulon Progo	1. Giripurwo	1. Wadas Mandiri
		2. Tanjungharjo	2. Ngudi Lestari
5	Yogyakarta	1. Gedong Kiwo	1. Cempaka
		2. Mergangsan	2. Permata Bunda 8

10 kelompok UPPKA Sasaran Pro PN Tahun 2024 diberikan fasilitasi berupa kegiatan, antara lain: Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Implementasi Kebijakan PEK, Pemetaan Poktan UPPKA, dan Monitoring Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Kelompok UPPKA Sasaran Pro PN juga mendapat fasilitasi ATTG dan dukungan Pameran di Hari Keluarga Nasional, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Nasional. Selain itu 10 Kelompok UPPKA tersebut juga mendapat

fasilitasi dari mitra strategis Perwakilan BKKBN DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY berupa Pelatihan Wirausaha Baru.

A.3.5. Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan

Rumah Data Kependudukan (Rumah DataKu) menjadi salah satu Proyek Prioritas Nasional di BKKBN sejak tahun 2021 dikarenakan peran dari Rumah DataKu yang sangat strategis yaitu sebagai pusat data dan informasi kependudukan di level desa (level mikro) dengan basis partisipasi masyarakat. Perkembangan Rumah DataKu Paripurna yang menjadi lokus Pro PN di DIY tahun 2021 s.d. 2024 seperti pada grafik berikut :



Gambar 3-0-12 Grafik Capaian Rumah DataKu Paripurna Pro PN Tahun 2021-2024

Pada tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY mendapatkan target sebanyak 79 Rumah DataKu Paripurna yang mendapatkan fasilitasi. Berdasarkan Laporan dari website Rumah DataKu, Perwakilan BKKBN DIY berhasil mencapai target Pro PN tersebut sebesar 100%, dengan sebaran Rumah DataKu Paripurna sebagai berikut :

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah DataKu Paripurna <u>Lokus Pro PN Tahun 2024</u>
Kab. Kulon Progo	23
Kab. Bantul	8
Kab. Gunung Kidul	30
Kab. Sleman	11
Kota Yogyakarta	7
Jumlah	79

Tabel 3-0-19 Rumah DataKu Paripurna Lokus Pro PN

Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi Rumah DataKu paripurna antara lain, adanya orientasi kader RDK, sarana prasarana yang memadai, ketersediaan data, penyajian data yang bisa berupa manual atau digital, serta pemanfaatan data baik oleh pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat umum, dalam melaksanakan kegiatan atau intervensi. Dalam mencapai target tersebut Perwakilan BKKBN DIY melakukan Orientasi Pengelolaan Rumah DataKu untuk pengelola Rumah DataKu yang menjadi lokus Pro PN pada tanggal 28 s.d. 29 Februari 2024 di Sahid Raya Hotel and Convention. Dalam orientasi tersebut disampaikan materi terkait Pengelolaan Rumah DataKu, Manajemen Data Rumah DataKu dan Sistem Informasi Rumah DataKu.

Selanjutnya setelah orientasi dilakukan fasilitasi untuk 79 Rumah DataKu Lokus Pro PN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei dan Juli Kegiatan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di Rumah DataKu mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga pemanfaatan data. Langkah berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi pada Rumah DataKu yang menjadi lokus tersebut sehingga dapat diketahui perkembangannya serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

Keberhasilan Perwakilan BKKBN DIY dalam mencapai target kinerja ini tentu saja atas dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat terutama pengelola Rumah DataKu dan Kampung KB serta dari

pemerintah desa setempat. Selain itu juga dukungan dari OPD KB Kabupaten/Kota terutama dengan optimalisasi dana DAK Sub Bidang KB (BOKB) untuk mendukung pengelolaan Rumah DataKu. Langkah selanjutnya untuk pengelolaan Rumah DataKu yang ada di DIY, Perwakilan BKKBN DIY akan melakukan koordinasi intensif dengan OPD KB Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa terutama dalam kaitannya optimalisasi penggunaan/dukungan anggaran dari BOKB maupun Dana Desa. Sehingga kegiatan di Rumah DataKu bisa tetap berjalan dan klasifikasi Rumah DataKu yang sudah terbentuk di DIY dapat menjadi Rumah DataKu Paripurna.

A.3.6. Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangsa Kencana

Kampung Keluarga Berkualitas berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas adalah suatu adalah satuan wilayah setingkat kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Dalam Pengelolaan Kampung KB ditunjuk penanggung jawab atau kader yang dikukuhkan sebagai Pokja Kampung KB.

Dengan terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (438 Desa) pada tahun 2023 maka dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada kelompok kerja kampung KB yang sudah terbentuk. Pada Tahun 2024 ini telah dilaksanakan Orientasi Kampung Keluarga Berkualitas di 5 (lima) Kabupaten/Kota (persentase capaian 100%) dengan total jumlah 105 Kampung KB yang mendapatkan orientasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembekalan atau pemberian materi kepada perwakilan pokja Kampung KB yang terundang.

Selain orientasi juga dilaksanakan kegiatan lainnya sebagai upaya peningkatan laporan Kampung KB secara *online* antara lain Apresiasi Penguatan Kampung KB, *live report* pelaporan Kampung KB dan Monitoring serta pembinaan teknis Kampung KB. Dari kegiatan

fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi diharapkan kegiatan di Kampung KB dapat dilaksanakan oleh Pokja dengan baik dan dilaporkan kegiatannya dalam *website* Kampung KB secara *online*.

A.3.7. Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon

DIY berhasil mencapai 100% dari target Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon di DIY Tahun 2024. Dari KKP yang ditetapkan sebanyak 473 Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon, DIY berhasil mencapai target secara penuh yaitu 473 Faskes yang telah mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon pada tahun 2024.

Pemenuhan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang ada di fasilitas kesehatan sangat penting untuk mencegah terjadinya *missed opportunity* pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menggunakan alat dan obat kontrasepsi. Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang tidak sebanding dengan jumlah calon akseptor KB sangat berpotensi untuk meningkatkan jumlah PUS *unmet need* (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi). Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi PUS dalam Pelayanan KB meliputi beberapa tahapan, yaitu: seleksi alat dan obat kontrasepsi; perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; penyediaan dan pengadaan alat dan obat kontrasepsi; penyaluran alat dan obat kontrasepsi; serta monitoring dan evaluasi.

A.3.8. Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting

Sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting, salah satu upayanya melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung KB. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik bagi Pokja Kampung KB, Kader TPK dan Kader Dashat dalam melaksanakan pemantauan pola konsumsi sesuai dengan menu gizi seimbang pada Keluarga Resiko Stunting di wilayahnya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan antara lain sosialisasi dan edukasi kepada kader, sosialisasi menu gizi seimbang kepada keluarga risiko stunting, pemantauan

konsumsi gizi seimbang pada 10 keluarga sasaran oleh masing-masing kader dan Monitoring dan Evaluasi. Pemantauan gizi sekaligus pemantauan kesehatan bagi Keluarga Risiko Stunting secara berkala diharapkan menjadi langkah penguatan dalam menurunkan resiko terjadinya stunting di Kampung KB.

Pada tahun 2024, kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penurunan stunting telah dilaksanakan di 5 (lima)/ Kabupaten/Kota dan masing-masing Kabupaten/Kota pada 2 lokus Kampung KB dengan capaian 100%. Lokus kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Kulon Progo	Wates	Giripeni
2	Kulon Progo	Kalibawang	Banjararum
3	Bantul	Banguntapan	Potorono
4	Bantul	Bambanglipuro	Sumbermulyo
5	Gunungkidul	Semanu	Pacarejo
6	Gunungkidul	Girisubo	Tileng
7	Sleman	Depok	Maguwoharjo
8	Sleman	Prambanan	Gayamharjo
9	Yogyakarta	Gondomanan	Prawirodirjan
10	Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron

A.3.9. Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi

Berdasarkan hasil kajian studi kasus yang dilaksanakan oleh Direktorat Analisis Dampak Kependudukan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, kita bisa melihat bahwa kegiatan yang dianggap efektif dalam mempercepat penurunan stunting adalah intervensi gizi, baik yang dilaksanakan melalui PMT, edukasi gizi dan pembiasaan makan gizi seimbang melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), dan kegiatan sejenis yang berdampak langsung pada keluarga berisiko *stunting*. Memasuki tahun keempat kajian studi kasus praktik baik percepatan penurunan *stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas, terdapat intervensi khusus yang akan dilaksanakan sebagai sebuah inovasi baru dalam

penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, yang disebut Model *Best Practice* Kampung Keluarga Berkualitas.

Model best practice Kampung KB merupakan program yang mengintegrasikan berbagai intervensi meliputi cuci tangan pakai sabun, posyandu, edukasi DASHAT, GERMAS dan BKB Emas, menyuapi aktif, dan permainan edukatif yang bertujuan pada perubahan perilaku ibu/pengasuh. Perwakilan BKKBN DIY bekerjasama dengan Pusat Studi Kesehatan dan Gizi Manusia FKMK Universitas Gadjah Mada melaksanakan kajian implementasi program model best practice Kampung KB yang dilaksanakan di Kampung KB Condongcatur, Depok, Sleman, DIY. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan mengevaluasi implementasi program model best practice Kampung KB. Dari kegiatan tersebut diperoleh hasil berupa laporan dan rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief sebagai acuan dan evaluasi penerapan Model Best Practice tersebut sebagai masukan dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan kata lain berhasil menghasilkan satu rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi (persentase capaian 100%).

A.3.10. Jumlah Faskes yang Mendapat Fasilitas Intensifikasi Pelayanan KB dalam Percepatan Penurunan Stunting

Intensifikasi pelayanan KB di faskes merupakan salah satu upaya dalam mendukung program percepatan penurunan stunting melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB. DIY berhasil mencapai 100% dari target Jumlah faskes yang mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting Tahun 2024. Dari KKP yang ditetapkan sebanyak 473 faskes yang mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting, pada tahun 2024 sebanyak 473 faskes di DIY telah berhasil mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting (persentase capaian 100%).

Program KB merupakan salah satu program spesifik dalam upaya penurunan angka stunting. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka stunting antara lain melalui peningkatan

kesertaan KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting melalui intensifikasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan.

A.3.11. Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan

Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2024 memiliki target 5 pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan. Dari target tersebut tercapai 100%. Fasilitas dan pembinaan dilakukan pada masing-masing Kabupaten/Kota dengan peserta anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya penurunan angka stunting melalui pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan oleh TPK.

Sementara, tugas khusus Tim Pendamping Keluarga, mencakup :

- a. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
- b. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
- c. Melakukan pendampingan pasca salin dengan melakukan promosi dan KIE KB pasca persalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pasca persalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
- d. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MPASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- e. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

Dengan demikian diharapkan TPK melakukan pendampingan pada seluruh ibu hamil dan ibu pasca persalinan pada wilayah binaan dan memberikan pendampingan secara berkualitas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing yang nantinya akan berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.

A.3.12. Jumlah Sistem Data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting yang berkualitas

Pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga beresiko stunting (Verval KRS) pada Tahun 2024 dilaksanakan serentak tanggal 23 April sampai dengan 31 Mei 2024 dengan jumlah desa 438 desa di seluruh kapanewon/kemantren. Dalam pelaksanaan verval KRS 100% menggunakan smartphone. Pada saat pelaksanaan verval KRS ditemukan beberapa permasalahan antara lain aplikasi yang digunakan kadang mengalami kendala, kemampuan SDM kader yang bervariasi dalam hal pemahaman aplikasi dan terkait besarnya honor yang hanya dibayarkan per desa 1 orang.

A.3.13. Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan

Pada tahun 2024, Perwakilan BKKBN DIY telah melaksanakan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 3 kali, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 3 kegiatan. Dengan demikian, capaian realisasi mencapai 100 persen. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada laporan rutin yang dikumpulkan dan dianalisis secara berkala untuk memastikan efektivitas serta keterjangkauan sasaran kampanye.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Perwakilan BKKBN DIY dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting, sejalan dengan target pembangunan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

A.3.14. Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota

Target Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota pada Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 6 kegiatan, Dan untuk tahun 2024 tercapai 100% yang menggambarkan kegiatan di Provinsi DI. Yogyakarta dan 5 Kabupaten/ Kota se DI. Yogyakarta sesuai dengan data capaian Output pada aplikasi Data SMART Kemenkeu.

A.3.15. Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi TPK TPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota

Untuk Laporan monitoring dan evaluasi TPK, TPPS, dan SATGAS Percepatan Stunting meskipun anggaran dilakukan efisiensi dapat tercapai 100% dengan dukungan anggaran dari APBD masing-masing Kabupaten/ Kota ataupun DAK BOKB. Kegiatan ini mencerminkan bertujuan untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja dalam rangka Percepatan Penurunan stunting baik di Kabupaten/ Kota maupun Provinsi.

A.3.16. Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting

Target kinerja jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan dan refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting sebanyak 5.576 orang. Orientasi untuk Kader Tim Pendamping Keluarga sejumlah 5.556 kader dan tercapai 100% kader lulus dengan kategori baik dan sangat baik, persentase capaiannya adalah 125% dari target 80%. Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan target 20 orang, yang berhasil melatih 25 orang Bidan atau 125% sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dari 25 orang tersebut 80% harus lulus dengan kriteria baik dan baik sekali, dan untuk Tahun 2024 sebanyak 18 orang dengan predikat baik dan 6 orang sangat baik sehingga prosentase capaian

predikat kelulusan baik dan sangat baik adalah 96%, sehingga persentase capaiannya adalah 120% dari target 80% yang ditetapkan.

A.3.17. Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi

Perwakilan BKKBN DIY mencapai 100% target jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi. Pada kegiatan ini dilaksanakan forum koordinasi percepatan penurunan stunting Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kegiatan ini sasaran atau peserta adalah seluruh anggota TPPS DIY yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/TIM/2023 dan perwakilan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kota serta beberapa instansi yang terkait. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguatkan komitmen pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga sehingga dapat mencapai target 14% pada tahun 2024.

A.3.18. Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi

Humas percepatan penurunan stunting adalah salah satu target kinerja yang ditetapkan dalam rangka mempercepat penurunan stunting. Adapun strategi dalam pelaksanaannya adalah dengan menyebarkan informasi ke seluruh sasaran terkait program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN DIY dalam kurun waktu 2024. Bentuk penyebaran informasi mengenai program dan kegiatan dilakukan melalui kerjasama dengan media cetak, online dan elektronik dengan menghasilkan berita dan informasi untuk disebarluaskan.

Pada tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY menggandeng Harian Jogja sebagai media partner untuk menyebarkan informasi program Bangga Kencana dan PPS. Selain itu penyebaran informasi terkait program juga dengan mengoptimalkan Forum Koordinasi Jurnalis sebagai wadah komunikasi antara Perwakilan BKKBN DIY dengan Media sehingga tidak hanya terpancang pada satu media dalam

penyebarluasan informasi. Untuk pencapaian target selanjutnya dalam rangka percepatan penurunan stunting kerja sama dengan media akan tetap dikembangkan demi mengoptimalkan penyebaran informasi, program dan kegiatan.

A.3.19. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi

Pengawasan kegiatan percepatan penurunan stunting dilaksanakan sebagai komitmen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting berjalan sesuai dengan arah dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun pengawasan yang dilakukan dalam bentuk evaluasi atas akselerasi penurunan stunting. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Adapun arah dan tujuan evaluasi tersebut adalah (1) Menilai ketepatan dan konvergensi kebijakan untuk Percepatan Penurunan Stunting, (2) Menilai keselarasan kebijakan Percepatan Penurunan Stunting antar K/L/D, (3) Menilai implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting melalui pemenuhan intervensi spesifik & intervensi sensitif, (4) Menganalisis efektivitas program dalam penurunan prevalensi stunting, (5) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan program, (6) Memberikan rekomendasi/atensi atas permasalahan yang ditemukan.

Pada tahun 2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta telah memfasilitasi pengawasan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kegiatan Evaluasi Akselerasi Penurunan Stunting Tahun 2024, dengan lokasi evaluasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Melalui kegiatan evaluasi tersebut telah menghasilkan satu laporan hasil pengawasan

kegiatan percepatan penurunan stunting serta rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu satu laporan (persentase capaian 100%).

B. Realisasi Anggaran

B.1. Realisasi Anggaran Unit Kerja

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta mengalami perubahan pagu anggaran sebanyak 4 kali. Perubahan pagu anggaran yang pertama dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor 453/KU.01/B3/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Perihal Usulan Revisi dan Realokasi Anggaran Kemitraan Tahun Anggaran 2024. Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY yang semula Rp69.654.830.000,00 menjadi Rp69.522.330.000,00. Selain itu, berdasarkan Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor 0130/RC.04/B1/2024 Tanggal 12 Januari 2024 Perihal *Automatic Adjustment* Belanja BKKBN dan Pembukaan Blokir Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau TA 2024 Perwakilan BKKBN DIY harus menyisihkan anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp4.088.821.000,00.

Perubahan pagu anggaran yang kedua dilakukan berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama BKKBN Nomor 1428/KU.01/B/2024 Tanggal 3 Juli 2024 Perihal Revisi Realokasi Anggaran Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) Tahun Anggaran 2024. Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY yang semula Rp69.522.330.000,00 menjadi Rp68.152.693.000,00.

Perubahan pagu anggaran yang ketiga dilakukan berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama BKKBN Nomor 2118/RC.04/B1/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Perihal Revisi Anggaran Blokir yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* pada BKKBN Tahun Anggaran 2024. Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY yang semula Rp68.152.693.000,00 menjadi Rp64.377.150.000,00. Selain itu, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor:2657/KU.01/B3/2024 Tanggal 8 November 2024 Perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga/BKKBN TA 2024, Perwakilan BKKBN DIY menyisihkan anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp94.427.000,00.

Perubahan pagu anggaran yang keempat dilakukan berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor 2796/KU.01/B3/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Penyampaian Informasi Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (BA 068) untuk Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN TA 2024. Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY yang semula Rp64.377.150.000,00 menjadi Rp64.641.680,00. Sampai dengan akhir tahun masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp94.427.000,00.

Realisasi penyerapan DIPA Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta TA 2024 adalah sebesar Rp64.269.394.749 atau 99,42% dari pagu anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta TA. 2024 sebesar Rp64.641.680.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3-0-20 Realisasi anggaran TA. 2024 per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	48.125.241.000	47.860.755.190	99,45
2.	Belanja Barang	16.132.815.000	16.025.749.559	99,34
3.	Belanja Modal	383.624.000	382.890.000	99,81
	Total	64.641.680.000	64.269.394.749	99,42

sumber: OMSPAN

Adapun realisasi anggaran per program dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	3331 Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	13.109.216.000	13.022.793.070	99,34
2	5297 Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	51.532.464.000	51.246.601.679	99,45
	Total	64.641.680.000	64.269.394.749	99,42

Sumber: OMSPAN

Tabel 3-0-21 Realisasi Anggaran TA. 2024 per program kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Perwakilan BKKBN DIY memiliki alokasi anggaran untuk Program Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III (meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing). Alokasi anggaran Prioritas Nasional terdiri dari PN tagging stunting (PN stunting) dan non tagging stunting (PN). Realisasi anggaran Program Prioritas Nasional tahun 2024 adalah sebesar Rp12.492.147.145,- atau 99,57 % dari total Pagu Program Prioritas Nasional sebesar Rp12.545.930.000,- yang terdiri dari Program Prioritas Nasional tagging stunting sebesar Rp5.337.073.007,- atau 99,44 % dari Pagu PN stunting sebesar Rp5.367.068.000,- dan Program Prioritas Non tagging stunting sebesar Rp7.155.074.138 atau 99,67 % dari total pagu PN sebesar Rp7.178.862.000,-.

Adapun rincian realisasi anggaran Program Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3-0-22 Realisasi anggaran Prioritas Nasional tagging stunting (PN Stunting) TA. 2024

No	KRO/RO	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	3331. PBG.001	Rekomendasi kebijakan hasil Studi	100.770.000	100.379.600	99,61

		Kasus Stunting provinsi			
2.	3331. PEA.001	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	774.680.000	774.400.000	99,96
3.	3331. QDB.001	Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI	137.271.000	135.417.500	98,65
4.	3331. QMA.002	Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting	338.351.000	334.399.900	98,83
5.	3331. QMB.001	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	1.631.924.000	1.626.424.507	99,66
6.	3331. SCM.001	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	1.907.940.000	1.897.360.000	99,45
7.	3331. UAE.001	Laporan Monitoring dan evaluasi TPK TPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	167.941.000	160.910.800	95,81
8.	3331. UBA.002	Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting	84.042.000	83.652.000	99,54
9.	5297. PEA.001	Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	122.786.000	122.785.700	100
10.	5297. QAH.001	Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	65.638.000	65.638.000	100
11.	5297. QIF.001	Layanan Pengawasan Kegiatan	35.725.000	35.705.000	99,94

		Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi			
		Total	5.367.068.000	5.337.073.007	99,44

Tabel 3-0-23 Realisasi anggaran Prioritas Nasional Non Tagging Stunting (PN) TA. 2024

No	KRO/RO	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	3331. QDD. 001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	454.828.000	450.250.646	98,99
2.	3331. QDD. 002	Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	218.107.000	217.595.000	99,77
3.	3331. QDD. 004	Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	85.690.000	84.451.900	98,56
4.	3331. QDD. 006	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB	408.702.000	407.231.500	99,64
5.	3331. QDE. 001	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	166.641.000	166.340.300	99,82
6.	3331. QEI. 001	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	3.579.109.000	3.570.821.270	99,77
7.	3331. QMA. 001	Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	1.625.416.000	1.622.764.800	99,84

8.	3331. UBA. 001	Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	199.850.000	196.617.722	98,38
9.	3331. UBA. 005	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan	65.164.000	64.314.000	98,70
10.	3331. UBA. 006	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus	375.355.000	374.687.000	99,82
		Total	7.178.862.000	7.155.074.138	99,57

Tren realisasi anggaran pada Perwakilan BKKBN DIY selama kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:



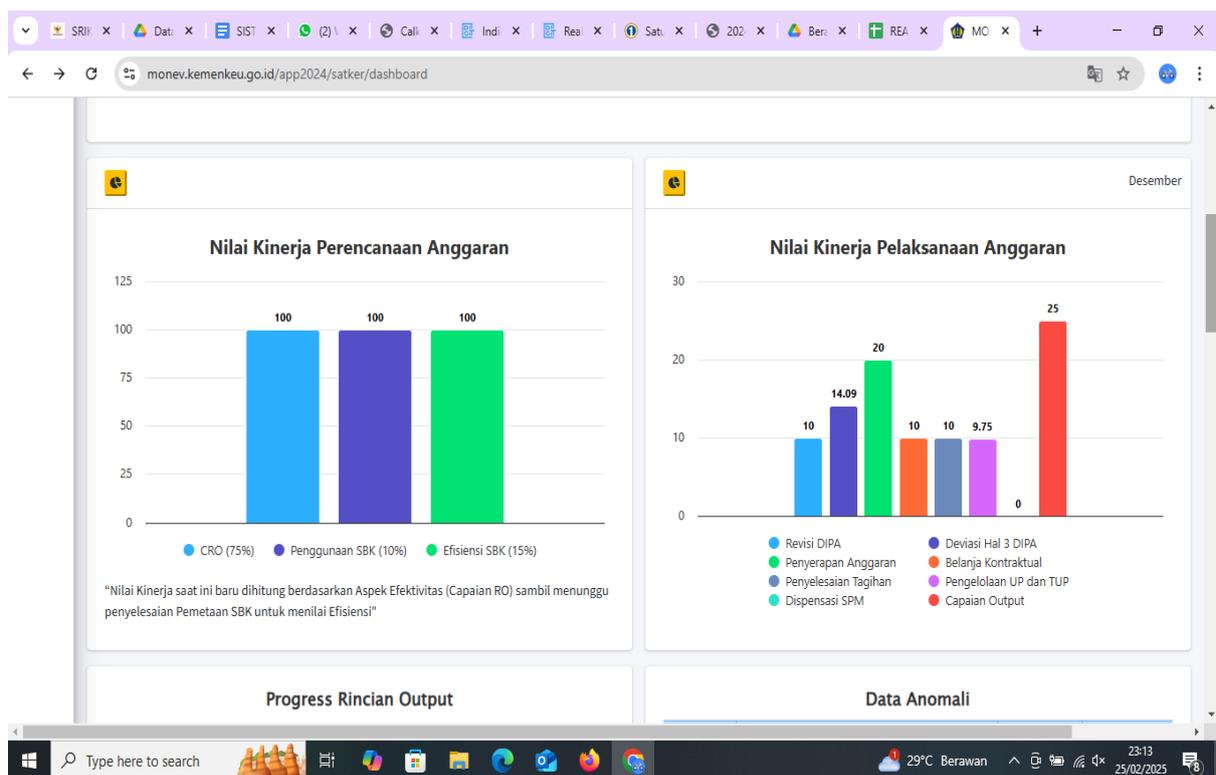
Gambar 3-0-13 Grafik Realisasi Anggaran TA 2020-2024

Realisasi anggaran TA. 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2023 akan tetapi jika dilihat tren capaian realisasi anggaran

selama 5 tahun, cenderung mengalami kenaikan. Penurunan realisasi anggaran TA. 2024 sangat dipengaruhi oleh realisasi anggaran belanja pegawai. Perwakilan BKKBN DIY mendapatkan tambahan alokasi belanja pegawai dari BA BUN di akhir tahun anggaran tetapi mendapat pengurangan jumlah pegawai melalui mekanisme mutasi wilayah kerja sehingga menyebabkan alokasi belanja pegawai tidak terserap optimal. Selain itu adanya penghematan anggaran perjalanan dinas juga mengurangi persentase realisasi anggaran.

B.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Monev.kinerja kemenkeu, Nilai Kinerja Anggaran Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2024 pada kategori sangat baik. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 3-0-14 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran cukup efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2020-2024 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Selain menggunakan dana APBN yang tertuang dalam DIPA Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta, pelaksanaan program Banggakencana menggunakan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB melalui Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Bidang KB dan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Sub Bidang KB (BOKB). Realisasi DAK Fisik tahun 2024 adalah sebesar Rp3.710.072.999 atau 98,67 dari total pagu Rp3.759.905.000,- sedangkan realisasi DAK BOKB adalah sebesar Rp30.273.167.020 atau 96,7 % dari total pagu sebesar Rp31.305.702.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-0-24 Realisasi DAK Fisik TA. 2024

No	Kabupaten/Kota	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Bantul	1.799.955.000	1.788.500.000	99,36
2.	Sleman	939.976.000	937.225.999	99,71
3.	Kota Yogyakarta	1.019.974.000	984.347.000	96,51
	DIY	3.759.905.000	3.710.072.999	98,67

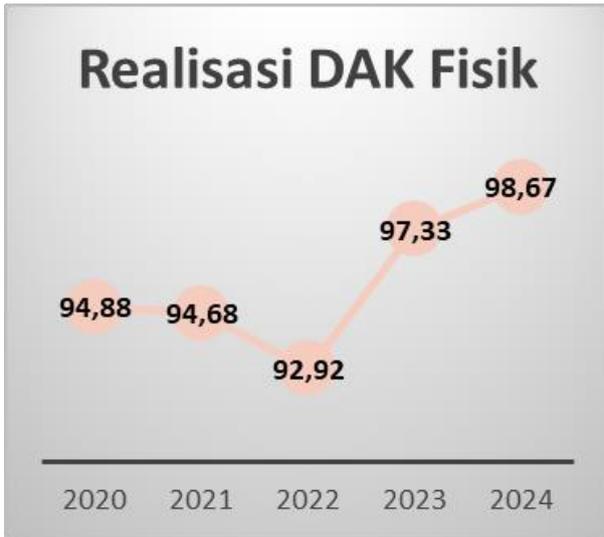
sumber: morena

Tabel 3-0-25 Realisasi DAK BOKB TA. 2024

No	Kabupaten/Kota	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Kulonprogo	5.101.631.000	5.080.092.338	99,58
2.	Bantul	7.431.682.000	7.173.642.450	96,53
3.	Gunungkidul	6.635.333.000	6.269.527.624	94,49
4.	Sleman	8.210.305.000	8.029.427.139	97,8
5.	Kota Yogyakarta	3.926.751.000	3.720.477.469	94,75
	DIY	31.305.702.000	30.273.167.020	96,7

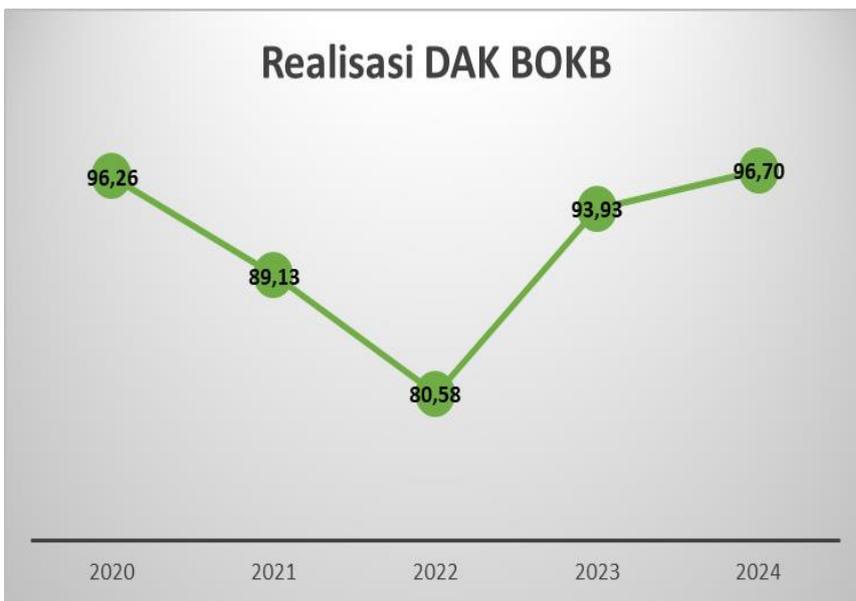
sumber: morena

Berdasarkan tren realisasi DAK fisik dan BOKB, secara umum realisasi DAK subbidang KB terus mengalami kenaikan. Realisasi DAK Fisik selama kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:



Gambar 3-0-15 Grafik Realisasi DAK Fisik 2020-2024

Realisasi DAK BOKB selama kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:



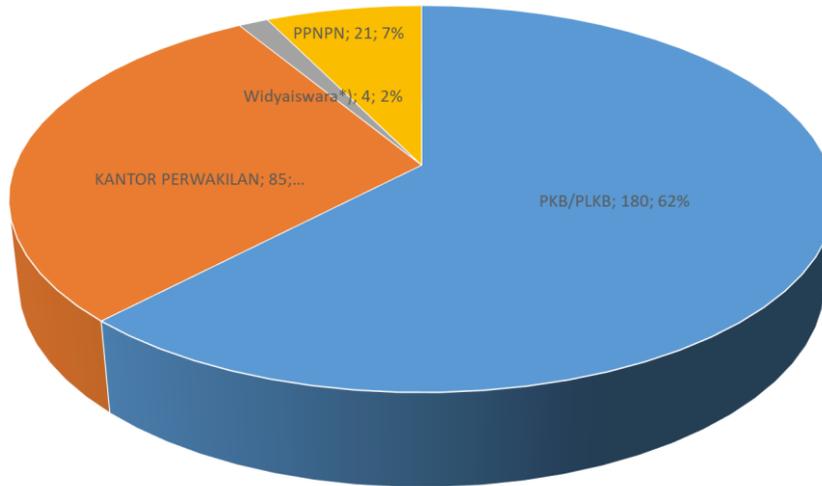
Gambar 3-0-16 Grafik Realisasi DAK BOKB 2020-2024

Dengan adanya dukungan dari DAK Sub Bidang KB tersebut sangat membantu dalam pencapaian target kinerja di D.I. Yogyakarta.

Selain dukungan anggaran, pencapaian Program Bangga Kencana juga didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang ada di DIY baik ASN yang ada di Perwakilan BKKBN DIY maupun Penyuluh Keluarga Berencana.

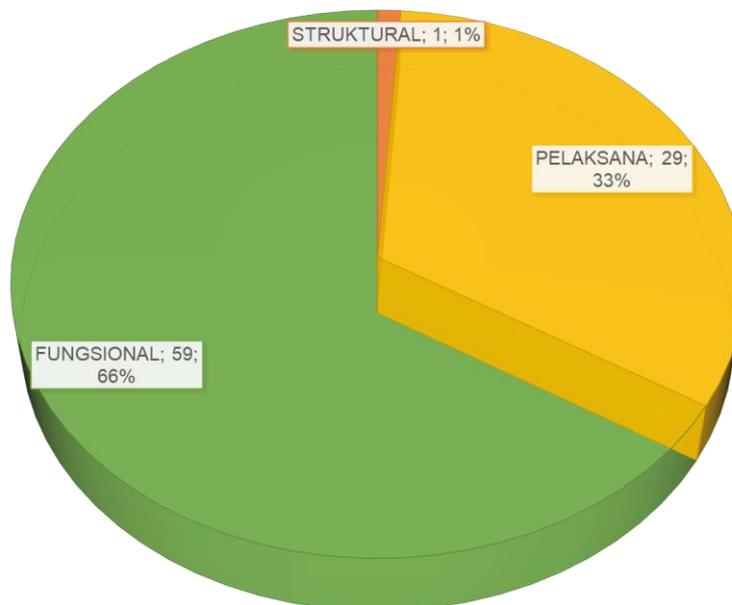
Potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Perwakilan BKKBN DIY bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY ada 269 ASN dan 21 PPNPN dengan rincian 89 pegawai dalam kantor dengan 4 pegawai merupakan pegawai penugasan dan 180 pegawai di lini lapangan seperti diagram berikut:



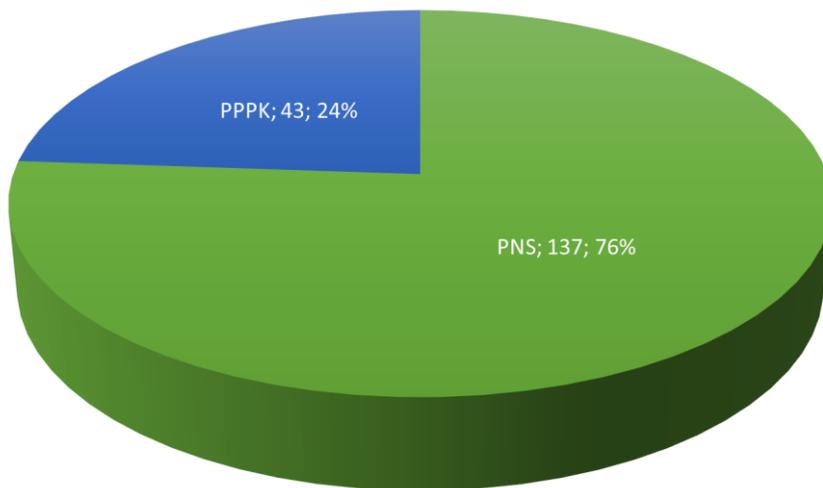
Gambar 3-0-17 Diagram Komposisi Pegawai Perwakilan BKKBN DIY

2. Untuk pegawai dalam kantor, dilihat dari jabatan terdapat 1 orang pejabat struktural, 59 pejabat fungsional dan 29 pejabat pelaksana sebagaimana terlihat dalam diagram berikut:



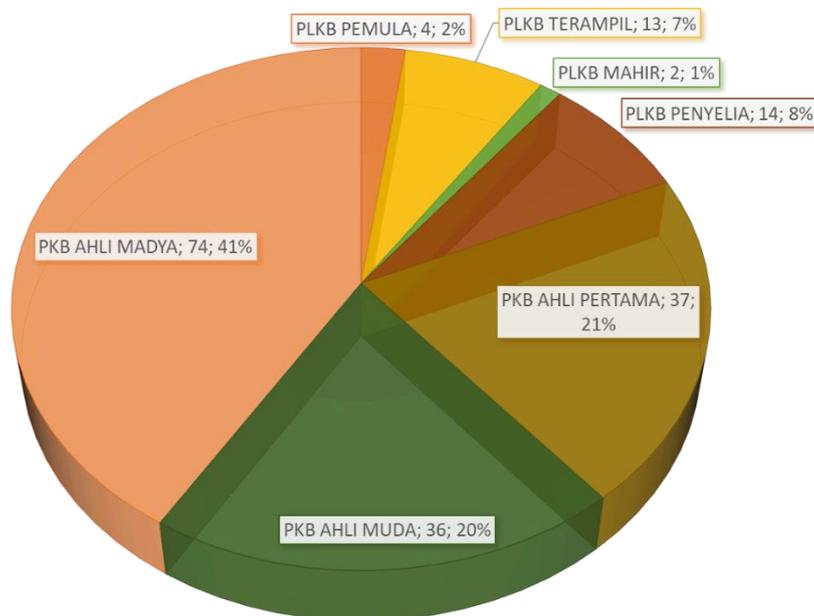
Gambar 3-0-18 Diagram Komposisi Jabatan Pegawai Perwakilan BKKBN DIY

3. Tenaga di lini lapangan atau Penyuluh KB (PKB) berjumlah 180 pegawai terdiri dari PKB dengan status PNS ada 137 pegawai, PPPK PKB sebanyak 43 pegawai seperti terlihat dalam diagram berikut:



Gambar 3-0-19 Diagram Status PKB Perwakilan BKKBN DIY

4. Untuk tenaga lini lapangan jika diklasifikasikan berdasar jabatan terdapat 147 PKB yang terdiri dari 37 PKB Ahli Pertama, 36 PKB Ahli Muda dan 74 PKB Ahli Madya. Sedangkan untuk PLKB berjumlah 33 orang terdiri dari 4 PLKB Pemula, 13 PLKB Terampil, 2 PLKB Mahir dan 14 PLKB Penyelia. Klasifikasi tersebut terlihat dalam diagram berikut:



Gambar 3-0-20 Diagram Sebaran Jabatan PKB Perwakilan BKKBN DIY

(Sumber data : Tim Kerja Hukum, Kepegawaian dan Pelayanan Publik per Desember 2024)

C. Kinerja dan Capaian Lainnya

C.1. Inovasi dan Penghargaan yang dicapai di tahun 2024

C.1.1. Inovasi

Pada tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY melaksanakan inovasi-inovasi dalam mencapai target kinerja, antara lain:

1. **E-Learning KPK**

Peningkatan pemahaman tentang gratifikasi yang diadakan oleh KPK telah diikuti oleh semua ASN Perwakilan BKKBN DIY (di atas 98%).

2. **Jaga BMN**

Gerakan membiasakan pegawai untuk peduli menjaga Barang Milik Negara termasuk administrasinya. Barang Milik Negara digunakan untuk membantu kelancaran ketugasan kantor sehingga sudah sewajarnya untuk dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Meskipun administrasi ada di Pengelola BMN tetapi partisipasi aktif pegawai untuk melaporkan kepada pengelola BMN apabila terjadi sesuatu dengan BMN tersebut sangat diharapkan, misal memindahkan BMN ke tempat lain harus melaporkan ke pengelola BMN sehingga tercatat dan meminimalisir kehilangan.

3. **MonAlisa (Monitoring Analisa)**

Gerakan membiasakan pegawai untuk melakukan *review* atas kegiatan yang telah dilaksanakan serta pencapaian yang telah diraih sampai saat ini sebagai bahan untuk peningkatan kualitas pencapaian target selanjutnya.

4. **Pandawa DAK (Pantau, Dampingi, Awasi Dana Alokasi Khusus)**

Gerakan untuk bersama melakukan pengendalian dengan melaksanakan pemantauan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus subbidang KB di D.I Yogyakarta sehingga kebermanfaatannya sesuai dengan tujuan Dana Alokasi Khusus subbidang KB. Meskipun Dana Alokasi Khusus

dilaksanakan di Kabupaten/Kota tetapi sesuai dengan ketugasan, Instansi di Provinsi memiliki peran dalam mensukseskan pengelolaan DAK. Kegiatan ini tidak hanya tertumpu pada Tim Kerja tertentu tetapi semua pegawai khususnya Tim Pengendali DAK diharapkan dapat berpartisipasi aktif.

5. **Live Report**

Koordinasi dengan pelaksana program bangga kencana di Kabupaten dan Kota serta penyuluh KB dan Pengelola Kampung KB melalui live report secara online melalui zoom meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap laporan kampung KB dan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan serta mengatasi hambatan permasalahan di lapangan.

6. **Program 2 Telur Sehari bagi Keluarga Risiko Stunting**

Perwakilan BKKBN DIY berhasil bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pencegahan penurunan stunting di DIY. Melalui Dana Keistimewaan pada Dinas Koperasi UKM, Pemda DIY berkomitmen untuk membantu percepatan penurunan Stunting dengan intervensi spesifik, yaitu melalui penyediaan bahan makanan berprotein hewani berupa telur kepada keluarga risiko stunting (KRS) di DIY.

Cara yang dilakukan adalah dengan pemberdayaan Koperasi yang menangani peternak telur ayam untuk mensupport kebutuhan asupan gizi bagi sasaran yang masuk dalam kategori keluarga risiko stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program yang dilaksanakan adalah Pemberian 2 (dua) telur sehari bagi keluarga risiko stunting (KRS) selama 6 (enam) Bulan dari Bulan Juli s.d. November 2024 dengan sasaran sebanyak 4.863 Keluarga Risiko Stunting di 143 Kelurahan pada 20 Kapanewon/ Kemantren Daerah Istimewa Yogyakarta.

No	Kabupaten	Kapanewon	JUMLAH KALURAHAN	JUMLAH SASARAN
1	KULON PROGO	SENTOLO	8	222
2	KULON PROGO	PENGASIH	7	189
3	KULON PROGO	KOKAP	5	240
4	KULON PROGO	SAMIGALUH	7	323
5	KULON PROGO	KALIBAWANG	4	163
6	BANTUL	IMOGIRI	8	211
7	BANTUL	DLINGO	6	150
8	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	7	157
9	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	13	370
10	GUNUNGKIDUL	TEPUS	5	389
11	GUNUNGKIDUL	SEMANU	5	293
12	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	9	244
13	GUNUNGKIDUL	PONJONG	11	287
14	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	7	308
15	GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	7	542
16	SLEMAN	SEYEGAN	5	137
17	SLEMAN	PRAMBANAN	6	156
18	SLEMAN	TEMPEL	8	185
19	SLEMAN	PAKEM	5	167
20	YOGYAKARTA	TEGALREJO	4	130
JUMLAH			137	4863

Tabel 3-0-26

7. Duta Lansia Istimewa

Bekerjasama dengan *Center for Life-Span Development (CLSD)* Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan didukung oleh Bank Mandiri, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Program “Duta Lansia Istimewa”.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa keberhargaan terhadap keaktifan kader lansia pada kegiatan-kegiatan yang telah mereka fasilitasi dengan melibatkan lansia di lingkungan masyarakat, khususnya di kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL). Program Duta Lansia Istimewa diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi para lansia, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar terutama generasi muda, dengan adanya contoh teladan Duta Lansia Istimewa yang sehat, aktif, dan berkontribusi untuk masyarakat.

Proses seleksi dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, dengan tahapan penerimaan usulan duta lansia, seleksi administrasi dan seleksi wawancara dan penilaian video profil.

Adapun Duta Lansia Istimewa yang terpilih di Tahun 2024 yaitu:

1) Juara 1

- Duta Lansia Kakung: Bapak Eddy Muhammad (BKL Wredha Utama, Yogyakarta)
- Duta Lansia Putri: Ibu Sukijah (BKL Durian, Bantul)

2) Juara 2

- Duta Lansia Kakung: Bapak Sajiyono (BKL Wredha Cemara, Sleman)
- Duta Lansia Putri: Ibu Henny Bidjaksani (BKL Keji Beling 07, Yogyakarta)

3) Juara 3

- Duta Lansia Kakung: Bapak Suryono (BKL Melati, Kulon Progo)
- Duta Lansia Putri: Ibu Utami Wulandari (BKL Aji Yuswo, Yogyakarta)

Pemberian Penghargaan Duta Lansia Istimewa dilakukan oleh, Bapak Nopian Andusti, S.E., M.T. selaku Deputi KSPK BKKBN, Bapak Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Psikologi UGM dan Ibu Dra. Andi Ritamariani, MPd. selaku Kepala Perwakilan BKKBN DIY pada tanggal 27 Mei 2024.



Gambar 3-0-21 Kegiatan Duta Lansia Istimewa 2024

8. Rehab Rumah Keluarga Risiko Stunting (Baznas)

Dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta, Perwakilan BKKBN DIY bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY dan TNI Angkatan Darat dalam hal ini Koramil pada tahun 2024 telah memfasilitasi kegiatan rehab rumah keluarga risiko stunting sejumlah 8 (delapan) unit.

Kegiatan ini sebagai salah satu intervensi sensitif dalam pencegahan stunting guna memberikan fasilitas perumahan dan sanitasi yang sehat bagi keluarga beresiko. Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya perumahan yang layak dan sehat, dengan rincian :

- 1) Lantai rumah sudah permanen minimal diplester sehingga kebersihan terjaga
- 2) Tersedianya dapur yang layak untuk mendukung pemenuhan gizi yang sehat, yang dibutuhkan pada masa 1000 Hari pertama Kehidupan
- 3) Tersediannya sarana jamban yang sehat, dengan dilengkapi *septic tank* (pembuangan) sesuai rekomendasi kesehatan
- 4) Tersedianya sumber air minum yang layak bagi keluarga risiko Stunting





Gambar 3-0-22 Kegiatan Rehab Rumah Keluarga Risiko Stunting (Baznas)

9. Pembentukan Sekolah Lansia dengan menggunakan APBD dan Swadaya Masyarakat

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengadvokasi program kelanjutusiaan dan rentan kepada Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman dan komunitas masyarakat. Pada tahun 2024 telah terbentuk sekolah lansia yang dibiayai dari DP3AP2KB Kabupaten Sleman sebanyak 6 (enam) Sekolah Lansia dan 2 (dua) Sekolah Lansia yang dibiayai dari Kelompok Swadaya masyarakat yang peduli lansia. Adapun rincian sekolah lansia yang dimaksud, sebagai berikut :

No	Sekolah Lansia	Alamat	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Sekar Melati	Condongcatur, Depok, Sleman	42	Dibiayai oleh APBD Sleman
2	Melati	Banyurejo, Tempel, Sleman	39	Dibiayai oleh APBD Sleman
3	Cemara	<u>Pondokrejo</u> , Tempel, Sleman	50	Dibiayai oleh APBD Sleman
4	<u>Banyu Manunggal</u>	Banyuraden, Gamping, Sleman	25	Dibiayai oleh APBD Sleman
5	Lentera	Tegaltirto, Berbah, Sleman	45	Dibiayai oleh APBD Sleman
6	Apel	Gayamharjo, Prambanan, Sleman	25	Dibiayai oleh APBD Sleman
7	Al Afiah	Potorono, Banguntapan, Bantul	58	Dibiayai secara Mandiri
8	Gemati	Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta	37	Dibiayai secara Mandiri

Tabel 3-0-27

C.1.2. Penghargaan

Perwakilan BKKBN DIY memperoleh beberapa penghargaan/apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran, antara lain:

1. Perolehan Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)

Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI WBK/WBBM (diubah terakhir dengan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2024, predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Predikat WBK ini merupakan pengakuan kepada unit kerja yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam

pelayanan kepada stakeholders serta berhasil menerapkan manajemen anti korupsi di unit kerjanya.

Selama lebih dari lima tahun terakhir, Perwakilan BKKBN DIY telah berupaya keras memenuhi seluruh enam area perubahan yang dipersyaratkan. Sejumlah kriteria ZI WBK juga telah dicapai, diantaranya seluruh ASN telah melaporkan LHKASN, seluruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah dipenuhi, mencapai nilai survei IPAK 3.82 dan IPKP 3.61 serta terpenuhinya nilai AKIP.

Perwakilan BKKBN DIY memiliki banyak inovasi program yang telah berjalan dan tidak sedikit yang kemudian diadopsi menjadi program di tingkat nasional, salah satunya adalah Program Sekolah Lansia. Jajaran pimpinan Perwakilan BKKBN DIY juga dinilai mampu menjadi role model serta agent of change dalam upaya pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat serta pembangunan *good governance*. Dengan diraihnya predikat WBK, selanjutnya Perwakilan BKKBN DIY akan terus melakukan perbaikan dan melanjutkan upaya untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).





Gambar 3-0-23 Perolehan Predikat ZI WBK

2. Penghargaan/Apresiasi atas Pelaksanaan Kinerja Anggaran Tahun 2024

Perwakilan BKKBN DIY memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai:

- a) Satuan kerja dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berpredikat Sangat Baik dengan Nilai Sempurna (100) Periode Semester I tahun 2024 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.



Gambar 3-0-24 Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berpredikat Sangat Baik

- b) Terbaik Pertama kategori kementerian Negara/Lembaga Berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) satuan Kerja dari Kanwil DJPB DIY



Gambar 3-0-25 Penghargaan Terbaik Pertama K/L Berdasarkan IKPA

3. Penghargaan dari Bupati Bantul sebagai Produsen Data Terbaik

Perwakilan BKKBN DIY merupakan salah satu produsen data terbaik kategori instansi vertikal/BUMN/BUMD/Otoritas dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul sejak Tahun 2022 yang setiap triwulan data harus di-*update*. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id). Data yang telah dikumpulkan digunakan untuk berbagai keperluan perencanaan dan pengendalian pembangunan, antara lain penyusunan dokumen perencanaan tahunan, dan kebutuhan proyeksi data sosial dan makro ekonomi untuk perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.



Gambar 3-0-26 Penghargaan Bupati Bantul

4. Penghargaan atas Pengelolaan Keuangan dan BMN

Perwakilan BKKBN DIY memperoleh penghargaan dalam pengelolaan Keuangan BMN Tahun 2024 dari BKKBN, sebagai berikut:

- a) Penghargaan sebagai Juara I Pengelolaan Keuangan dan BMN Terbaik Tingkat Satuan Kerja di Lingkup BKKBN



Gambar 3-0-27 Penghargaan sebagai Juara I Pengelolaan Keuangan dan BMN Terbaik

- b) Apresiasi dari Pengguna Barang /Kepala BKKBN atas Kinerja yang baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023 sebagai Juara Kedua pemindahtanganan Barang Milik Negara



Gambar 3-0-28 Apresiasi Kinerja Baik

5. Peringkat 2 Penilaian Kinerja Semester II Tahun 2024 Pada Unit Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi

Perwakilan BKKBN DIY memperoleh peringkat kedua pada penilaian kinerja Semester II Tahun 2024 pada unit kerja Perwakilan BKKBN Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 267/KEP/B1/2024 Tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Semester II Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Penilaian tersebut berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan target, sasaran dan kualitas pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Terdapat 7 unsur penilaian yaitu capaian RO, tingkat kedisiplinan karyawan, pengelolaan kearsipan, tindak lanjut audit internal, pengelolaan BMN, SAKIP dan nilai tambah. Perwakilan BKKBN DIY memperoleh predikat Istimewa dengan nilai 93,17



Gambar 3-0-29 Peringkat 2 Evaluasi Kinerja Semester II Tahun 2024

6. Capaian dalam Fasilitasi Penyebarluasan SiBima Kelas Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Anak Stunting (BKB EMAS) dengan Kategori Sangat Baik

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh Kategori Sangat Baik dalam Penyebarluasan SiBima Kelas Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Anak Stunting (BKB EMAS) dengan capaian lebih dari 90%



Gambar 3-0-30 Piagam Penghargaan Penyebarluasan SiBima

7. TPK Penyaji Analisa dan Tata Laksana Kasus Pembelajaran Berbasis Masalah

Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kelurahan Bausasran, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta menerima penghargaan Terbaik I TPK Penyaji Analisa dan Tata Laksanaan Kasus Pembelajaran Berbasis Masalah pada Kelas TPK Hebat Seri II Tahun 2024.



Gambar 3-0-31 Piagam Penghargaan TPK Penyaji Analisa dan Tata Laksana Kasus Pembelajaran Berbasis Masalah Berbasis Masalah pada Kelas TPK Hebat Seri II Tahun 2024

8. Juara II Nasional GDPK Award Tingkat Provinsi

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mendapatkan piagam penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award Tahun 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penghargaan tersebut diperoleh Pemda DIY berkat melahirkan peraturan pelaksana rencana induk pembangunan kependudukan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 20 Tahun 2024 tentang GDPK DIY Tahun 2024 – 2045.

Piagam penghargaan GDPK Award Tahun 2024 diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo yang diterima Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Sukamto mewakili Gubernur DIY di PO Hotel Semarang, Rabu sore (26/06). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Apresiasi dan Penghargaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 yang dipusatkan di Semarang Jawa Tengah (Jateng). Dalam ajang GDPK Award 2024 bagi Pemda tingkat Provinsi tersebut, Pemda DIY meraih

peringkat terbaik kedua setelah Provinsi Jambi. Sedangkan terbaik ketiga diraih Provinsi Jateng.



Gambar 3-0-32 Piagam Penghargaan GDPK Award 2024

9. Juara III Nasional Rumah DataKu Kategori Konvensional

Pemerintah Kabupaten Sleman DIY, khususnya kepada Kalurahan Wedomartani meraih Juara 3 Nasional Lomba Rumah Data Kependudukan (Rumah DataKu) dalam kategori Konvensional. Penyerahan penghargaan oleh Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dilaksanakan ditengah kegiatan Seminar Nasional “Peningkatan Kualitas Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan melalui Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045” Kamis, 27 Juni 2024 di Hotel Tentrem Semarang. Penghargaan diterima oleh wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dan Kaur Pangripta Kalurahan Wedomartani, Akhid Istain Mubarak.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengapresiasi pengelola Rumah DataKu karena dengan adanya data yang akurat maka Kepala Desa

hingga Wakil Bupati selaku ketua TPPS jadi bisa tahu detail data jumlah dan lokasi pasangan usia subur dan ibu hamil di wilayahnya. Data mikro ini penting untuk perencanaan pembangunan di wilayah.

Rumah Dataku merupakan tempat atau rumah yang difungsikan menjadi pusat data untuk intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistim pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, menverifikasi, menganalisis data yang bersumber dari dan oleh masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di kampung KB dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Rumah DataKu tidak bisa di lepaskan dari kampung KB. Peran Rumah DataKu sangatlah strategis karena merupakan pusat semua penyajian data pembangunan di Kampung KB baik fisik maupun non fisik.



Gambar 3-0-33 Penghargaan Rumah DataKu Kategori Konvensional

10. Provinsi dengan Pencapaian 100% Target Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas

Dengan telah terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh Kelurahan/Kalurahan se DIY, Perwakilan BKKBN DIY mendapatkan penghargaan dari Kedeputusan Bidang Penduduk BKKBN. Penghargaan ini merupakan wujud kerja keras bersama antara Perwakilan BKKBN DIY, OPD KB Kabupaten/Kota, Camat,

Lurah, Penyuluh KB, Pokja Kampung KB dan masyarakat sehingga target 100% Kampung KB di semua Desa dapat dipenuhi.



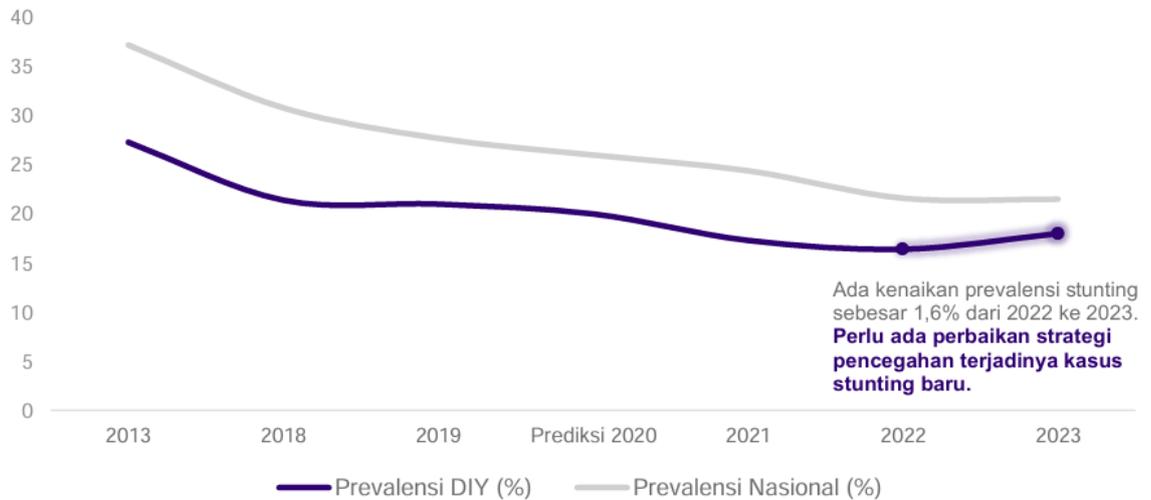
CS Scanned with CamScanner

Gambar 3-0-34 Penghargaan Pencapaian 100% Target Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas

C.2. Pencapaian kinerja Percepatan Penurunan Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan survei kesehatan dalam 10 tahun terakhir, terdapat penurunan prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 9,3%. Akan tetapi, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2023, DIY mengalami peningkatan prevalensi stunting dari 2022 ke 2023 sebesar 1,6% yaitu dari 16,4% menjadi 18%.

Terjadi penurunan prevalensi stunting di DIY dalam 10 tahun terakhir



Gambar 3-0-35 Tren Prevalensi Stunting 2013-2023

Terdapat 2 (dua) kabupaten yang mengalami penurunan prevalensi dari 2022 ke 2023 yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman. Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan sebesar 1,3% dari 23,5% menjadi 22%. Sedangkan Kabupaten Sleman mengalami penurunan sebesar 2,6% dari 15% menjadi 12,4%. Tiga wilayah lain yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta mengalami kenaikan prevalensi. Tren prevalensi stunting dalam 10 tahun terakhir per wilayah dapat dilihat pada Gambar 2

Terjadi penurunan prevalensi stunting di seluruh kabupaten/kota dalam 5 tahun terakhir



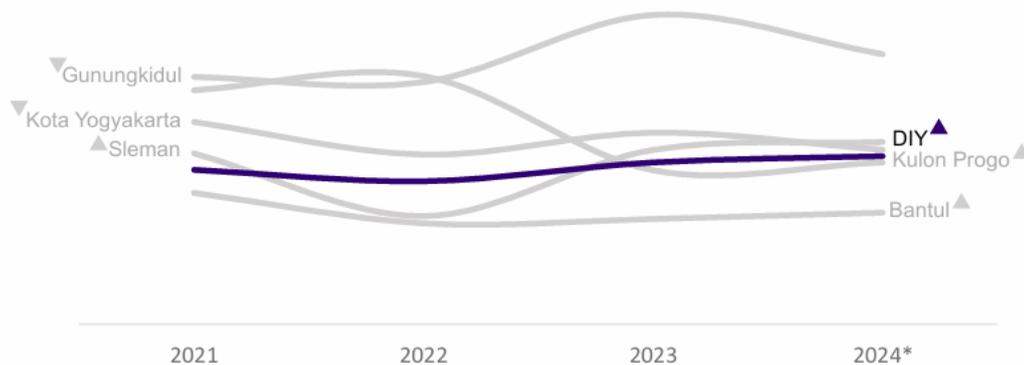
(Sumber: RISKESDAS 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021, SSGI 2022, dan SKI 2023)

Gambar 3-0-36 Tren Prevalensi Stunting 2018-2023

Berdasarkan data surveilans gizi tahun 2021 – 2023 dan ISPS bulan Juni 2024, tren prevalensi stunting di DIY terlihat mengalami peningkatan. Dengan cakupan D/S sebesar 99,84%, prevalensi stunting di DIY Juni 2024 sebesar 10,9% atau meningkat sebesar 0,6% dari tahun 2023. Tren peningkatan prevalensi stunting mulai terjadi pada tahun 2022. Jika dilihat per kabupaten/kota, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta mengalami penurunan prevalensi dari tahun 2023 ke Juni 2024. Sedangkan, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan pelaksanaan ISPS Juni 2024 dibandingkan data EPPGBM 2023, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,7%, 0,3%, dan 2,1%. Sedangkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan.

Terjadi tren kenaikan prevalensi stunting berdasarkan surveilans status gizi (EPPGBM)

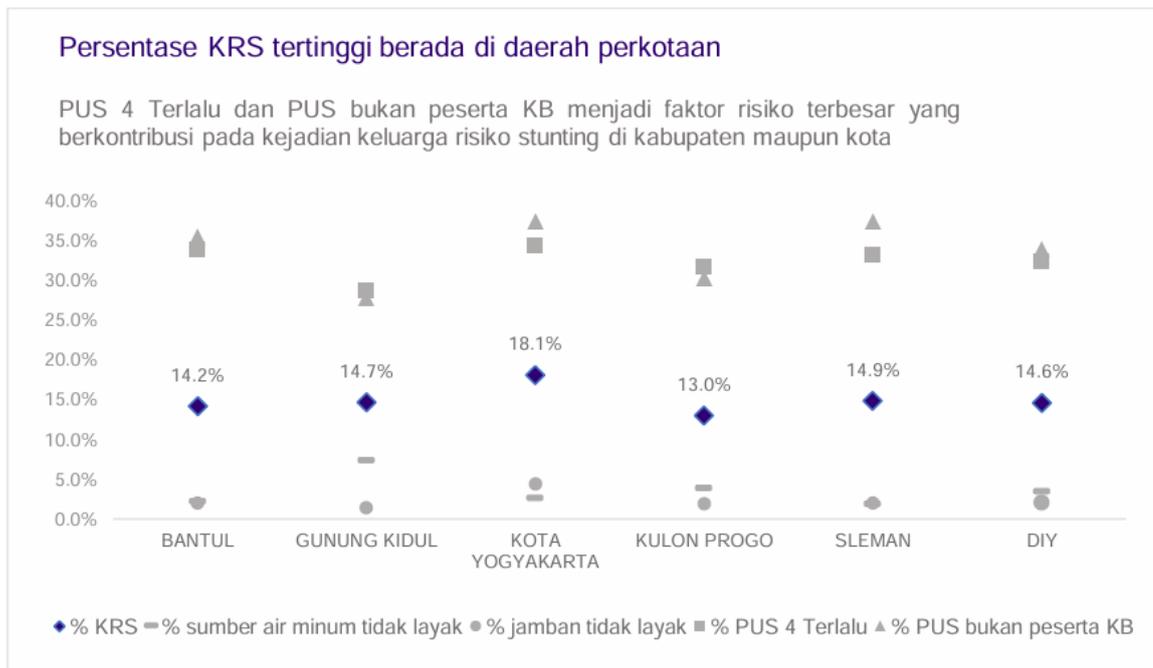
Kenaikan persentase balita stunting dari tahun 2022 sampai dengan Juni tahun 2024 menunjukkan kurang efektifnya intervensi yang sudah dilaksanakan



Gambar 3-0-37 Tren Prevalensi Stunting Berdasarkan Surveilans Status Gizi

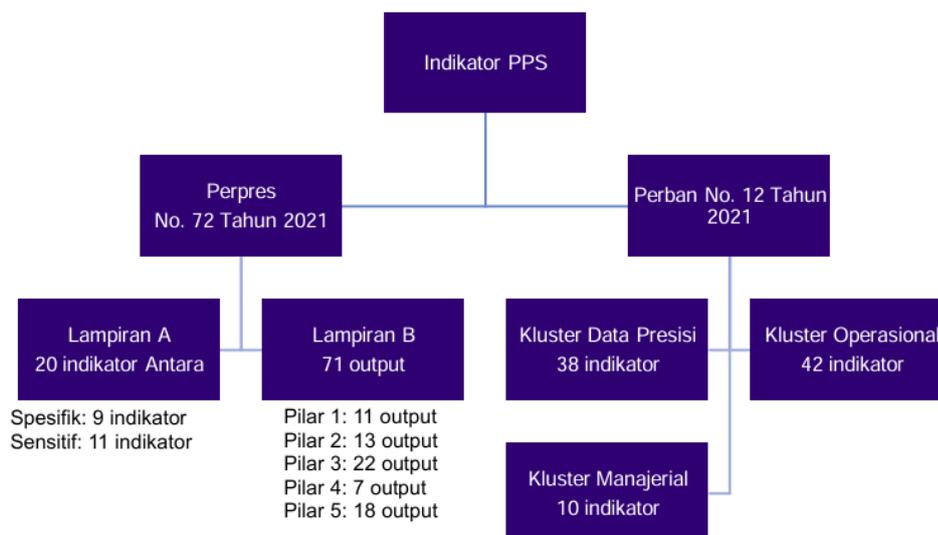
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Keluarga Risiko Stunting tahun 2024, sebanyak 79.189 keluarga di DIY merupakan keluarga berisiko stunting atau 14,6% dari keluarga sasaran. Persentase Keluarga Risiko Stunting tahun 2024 menurun sebesar 6% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 20,6%. Hal ini mungkin dipengaruhi karena jumlah sasaran verval KRS mengalami penurunan di 2024. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan persentase

KRS tertinggi (18,1%), sedangkan Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah dengan persentase KRS terendah (13,0%). PUS bukan peserta KB menjadi faktor risiko tertinggi yang berkontribusi pada kejadian keluarga risiko stunting.



Gambar 3-0-38 Persentase Keluarga Risiko Stunting

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dengan menetapkan target antara prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Ketercapaian Target Antara akan menjadi dasar evaluasi target nasional pada tahun 2025 – 2030. Indikator Target Antara disajikan pada Lampiran A Perpres No. 72 Tahun 2021. Untuk mewujudkan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, perlu pelaksanaan 5 (lima) pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting. Adapun uraian 5 pilar disajikan pada Lampiran B Perpres No. 72 Tahun 2021. Di samping itu, terdapat indikator RAN PASTI yang diatur dalam Peraturan BKKBN RI No. 12 Tahun 2021.



Gambar 3-0-39 Indikator Percepatan Penurunan Stunting

Berdasarkan Gambar 5, terdapat 2 (dua) dokumen yang mengatur indikator PPS yaitu Perpres No. 72 Tahun 2021 dan Perban No. 12 Tahun 2021. Adapun jumlah indikator dari masing-masing sumber adalah sebagai berikut: a. Perpres No. 72 Tahun 2021 terdiri dari 91 indikator meliputi 20 indikator lampiran A (9 indikator layanan intervensi spesifik dan 11 indikator layanan intervensi sensitif) dan 71 output lampiran B (11 output pilar 1, 13 output pilar 2, 22 output pilar 3, 7 output pilar 4, 18 output pilar 5). b. Perban No. 12 Tahun 2021 terdiri dari 90 indikator meliputi 38 indikator kluster data presisi, 42 indikator kluster operasional, dan 10 indikator kluster manajerial. Berdasarkan Gambar 5, terdapat 9 (sembilan) indikator Perpres No. 72 Tahun 2021 yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, yang terdiri dari: 2 (dua) indikator Pilar 1, 1 (satu) indikator Pilar 2, 4 (empat) indikator Pilar 3, dan 2 (dua) indikator Pilar 5.

Capaian indikator stunting pada Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2024 terangkum pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya Prevalensi Stunting	1	Prevalensi Stunting	Indikator Kinerja Tambahan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting	10,72%	11,96%	88,43%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT, SETDA DIY, CAPAIAN 2024
2	Tersedianya layanan intervensi sensitif	1	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.		52,00%	53,17%	102,25%	Jumlah Persalinan (kesgadiy.web.id), Jumlah Pelayanan KBPP (SIGA BKKBN)
		2	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.		22,30%	11,80%	147,09%	DITKESPRO
		3	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah		90,00%	84,10%	93,44%	DITHANREM
		4	Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan		90,00%	90,56%	100,62%	DITBINLAP
		5	Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi		100,00%	100,00%	100,00%	DITPENDUK
		6	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)		90,00%	345,00%	383,33%	DITBALNAK
		7	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja		100,00%	100,00%	100,00%	DITHANREM
		8	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah		70,00%	77,00%	110,00%	SIGA BKKBN
		9	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000		3,20%	n/a	#VALUE!	DITKESPRO
10	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan stunting	3 kanal/metode per bulan	3	100,00%	DITRANMAS			
3	Terwujudnya percepatan penurunan stunting di Indonesia	1	Persentase desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK di Indonesia	Indikator Kinerja Tambahan Berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024	100,00%	100,00%	100,00%	DITBINLAP
		2	Persentase TPK yang mendapatkan orientasi		100,00%	100,00%	100,00%	PUSBANG SDM
		3	Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan		90,00%	80,00%	88,89%	DITBINLAP
		4	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar.		50,00%	79,80%	159,60%	DITRANMAS
		5	Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan		90,00%	29,21%	32,46%	DITKESPRO
		6	Persentase baduta 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar		90,00%	98,84%	109,82%	DITBALNAK
		7	Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar		90,00%	97,76%	108,62%	DITBALNAK
		8	Cakupan keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan sosial		85,00%	n/a	#VALUE!	PUSDATIN
		9	Cakupan keluarga prasejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur		85,00%	n/a	#VALUE!	PUSDATIN
		10	Cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat		85,00%	n/a	#VALUE!	PUSDATIN
		11	Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan nontunai		85,00%	n/a	#VALUE!	PUSDATIN
		12	Cakupan PUS miskin yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI)		85,00%	n/a	#VALUE!	PUSDATIN
		13	Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal		70,00%	990,00%	1414,29%	DITDAMDUK
		14	Cakupan Catin/caPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah		90,00%	84,10%	93,44%	DITHANREM
		15	Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)		100,00%	277,00%	277,00%	SIGA BKKBN (CATIN-ELSIMIL)
		16	Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting		100,00%	100,00%	100,00%	DITBALNAK
		17	Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.		100,00%	100,00%	100,00%	DITBALNAK
		18	Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.		100,00%	100,00%	100,00%	DITBALNAK
		19	Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.		100,00%	100,00%	100,00%	DITBALNAK

Tabel 3-0-28 Capaian indikator stunting pada Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2024

Sedangkan capaian indikator stunting dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	2022			2023			2024		
					TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN
1	Tersedianya layanan intervensi sensitif	1	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Indikator Kinerja Tambahan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting	50,00%	12,00%	24,00%	41,97%	48,08%	114,56%	52,00%	53,17%	102,25%
		2	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah		60,00%	86,66%	144,43%	80,00%	100,00%	125,00%	90,00%	84,10%	93,44%
		3	Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan		30,00%	23,00%	76,67%	60,00%	60,00%	100,00%	90,00%	90,56%	100,62%
		4	Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi		50,00%	100,00%	200,00%	75%	100,00%	133,33%	100,00%	100,00%	100,00%
		5	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)		70,00%	140,91%	201,30%	80%	98,40%	123,00%	90,00%	345,00%	383,33%
		6	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja		70,00%	100,00%	142,86%	100%	97,57%	97,57%	100,00%	100,00%	100,00%
		7	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah		70,00%	85,73%	122,47%	70%	73,52%	105,03%	70,00%	77,00%	110,00%
		8	Terlaksananya kampanye nasional pecegahan stunting		3 kanal/metode per bulan	3	100,00%	3 kanal/metode per bulan	3	100,00%	3 kanal/metode per bulan	3	100,00%
2	Terwujudnya percepatan penurunan stunting di Indonesia	1	Persentase desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK	Indikator Kinerja Tambahan Berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		2	Persentase TPK yang mendapatkan orientasi		100,00%	96,47%	96,47%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3	Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan		80,00%	59,82%	74,78%	85%	59,82%	70,38%	90,00%	80,00%	88,89%
		4	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar.		30,00%	71,00%	236,67%	40%	71,00%	177,50%	50,00%	79,80%	159,60%
		5	Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan		80,00%	2,00%	2,50%	85%	79,93%	94,04%	90,00%	29,21%	32,46%
		6	Persentase baduta 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar		70,00%	100,00%	142,86%	80%	100,00%	125,00%	90,00%	98,84%	109,82%
		7	Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar		70,00%	96,38%	137,69%	80%	96,38%	120,48%	90,00%	97,76%	108,62%
		8	Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal		50,00%	44,44%	88,88%	60%	44,44%	74,07%	70,00%	990,00%	1414,29%
		9	Cakupan Catin/CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah		70,00%	87,00%	124,29%	80%	100,00%	125,00%	90,00%	84,10%	93,44%
		10	Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)		100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	277,00%	277,00%
		11	Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting		100,00%	80,00%	80,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		12	Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.		100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		13	Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.		100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		14	Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.		100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel 3-0-29 Capaian indikator stunting pada Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2024 dalam 3 tahun

Untuk Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN memiliki Indikator Kinerja tambahan untuk Layanan Intervensi Sensitif sebanyak 10 Indikator yang terdapat di Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan, target 52,00 %, realisasi 53,17 %
2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan. (Target KTD 2023 untuk Provinsi : Jumlah Kab/Kota yang dilakukan promosi dan konseling kespro dalam rangka penurunan KTD), dari rencana target 22,8%, terealisasi 11,80% (semakin turun angka dari target, semakin baik untuk persentase kehamilan yang tidak diinginkan)
3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah, dari rencana target 90%, terealisasi 84,10%.

Berdasarkan sumber data dari DITHANREM, capaian calon Pasangan Usia Subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah sebesar 84,10% atau persentase capaian sebanyak 93,44%. Realisasi tersebut mencerminkan pencapaian yang sangat baik dan menunjukkan efektivitas serta keberhasilan dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan bagi calon Pasangan Usia Subur. Faktor-faktor seperti edukasi yang efektif, aksesibilitas layanan kesehatan, dukungan pemerintah, peran tokoh masyarakat, dan kebijakan yang mendukung telah berkontribusi dalam pencapaian hasil yang melebihi target.

4. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan, target 90 %, terealisasi 90,56%

Berdasarkan data capaian pembinaan terhadap Keluarga Resiko Stunting (KRS) dari SIGA selama bulan Januari-Desember 2024, diperoleh data masing-masing sebagai berikut :

- a. Jumlah pendampingan catin : 8.317 (90%)
- b. Jumlah pendampingan bumil : 7.442 (74%)
- c. Jumlah pendampingan pascasalin : 1.226 (99%)
- d. Jumlah pendampingan baduta : 2.744 (99)

Sehingga total pendampingan KRS dari Januari-Desember 2024 sebesar 19.729 sama dengan 90,56%. Berdasarkan data tersebut, maka capaian kinerja Daerah Istimewa Yogyakarta untuk indikator cakupan

keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan adalah 100,62%

No.	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		TARGET	CAPAIAN	PERSENTA SE CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTA SE CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTA SE CAPAIAN
1.	Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	30,00%	23,00%	76,67%	60,00%	60,00%	100,00%	90,00%	90,56%	100,62%

Sumber : SIGA

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa target dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 2022 capaian belum memenuhi target yakni sebesar 23% atau 76,67% dari target yang ditentukan, selanjutnya di tahun 2023 capaian meningkat menjadi 60% atau 100% dari target yang ditentukan. Dan pada tahun 2024 ini, capaian 90,56% atau 100,62% dari target yang ditentukan.

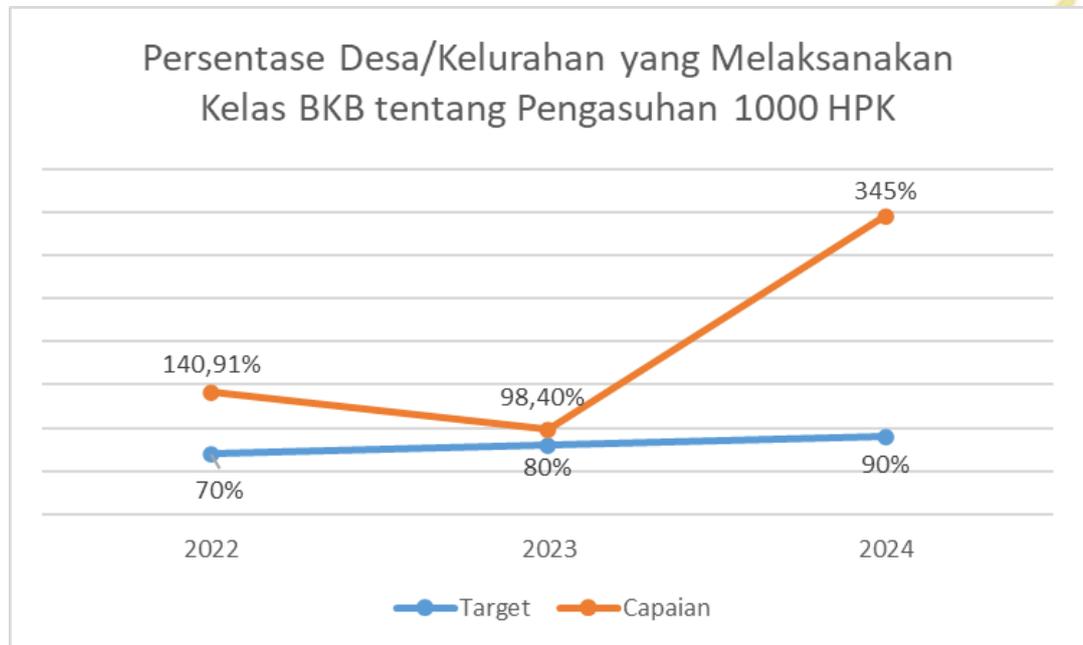


Gambar 3-0-40 Cakupan Keluarga Berisiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan

Berdasarkan grafik cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan di atas, bahwa setiap tahun terjadi peningkatan capaian pendampingan yang telah dilakukan oleh TPK, dengan kata lain terjadi peningkatan kinerja pendampingan yang telah dilakukan oleh TPK DIY.

5. Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi, dari rencana target 100%, terealisasi 100%.

6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dari target 90%, terealisasi 345,00%.



Gambar 3-0-41 Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kelas BKB Tentang Pengasuhan 1000 HPK

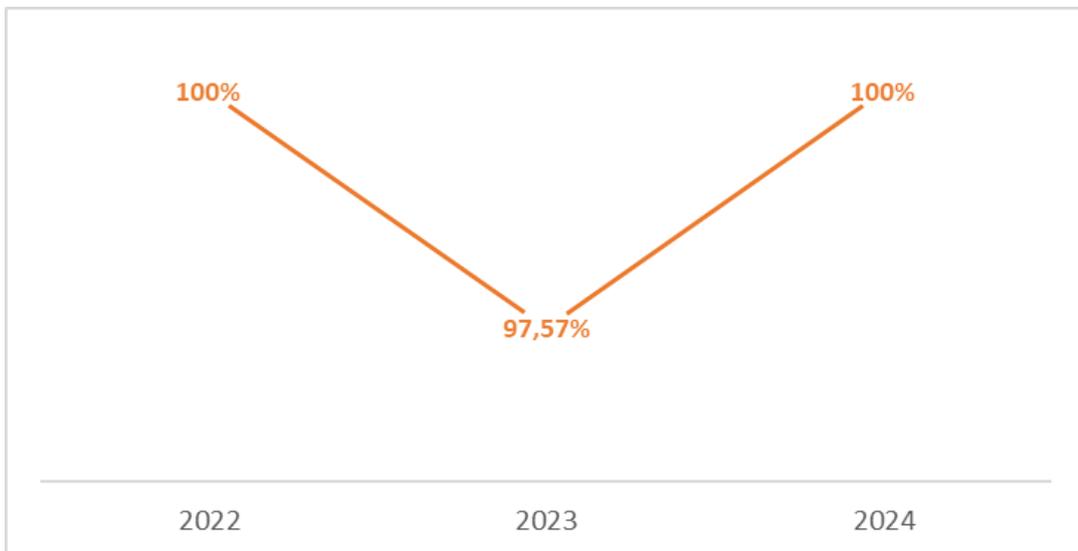
Pada tahun 2024, Perwakilan BKKBN DIY telah melaksanakan program Bina Keluarga Balita (BKB) yang berfokus pada pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di desa/kelurahan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan orang tua dalam mengasuh balita mereka selama 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Berdasarkan sumber data dari DITBALNAK, capaian desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebesar 345,00% dari target 90%. Hasil capaian ini didukung oleh kegiatan intervensi atau sosialisasi tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) di wilayah masing-masing.

Perwakilan BKKBN DIY juga melaksanakan secara konsisten Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT) Series di Tahun 2024 sebanyak 11 kali pertemuan, diakhiri dengan Apresiasi KERABAT pada 19 Desember 2024.

7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, dari target 100%, terealisasi 100%.

Berdasarkan sumber data dari DITHANREM, capaian PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai target sebesar 100%. Hasil capaian ini menunjukkan bahwa telah tersampainya substansi materi kesehatan reproduksi dan gizi pada PIK R dan BKR melalui kegiatan rutin di kelompok dan kegiatan lainnya, baik secara offline maupun online



Gambar 3-0-42 Tren Capaian Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja

Capaian PIK R dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja di Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya bisa mencapai 97,57% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian di tahun ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah, Forum Genre di masing-masing Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai pembina wilayah di masing-masing PIK Remaja dan BKR yang ada.

8. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah, target 70 %, terealisasi 77 %

Berdasarkan sumber data dari DITHANREM, realisasi cakupan caPUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 77%. Realisasi sebesar 77% menunjukkan bahwa program pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi berjalan dengan baik dan bahkan berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 70%. Pencapaian ini tidak lepas dari peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menjangkau dan memberikan edukasi kepada pasangan usia subur mengenai kesehatan reproduksi dan gizi yang mereka perlukan dalam persiapan pernikahan dan kehamilan serta memfasilitasi caPUS yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut Berdasarkan sumber data dari DITHANREM, realisasi cakupan caPUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 77%. Realisasi sebesar 77% menunjukkan bahwa program pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi berjalan dengan baik dan bahkan berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 70%. Pencapaian ini tidak lepas dari peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menjangkau dan memberikan edukasi kepada pasangan usia subur mengenai kesehatan reproduksi dan gizi yang mereka perlukan dalam persiapan pernikahan dan kehamilan serta memfasilitasi caPUS yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut.

9. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan stunting, target 3 kanal/metode per bulan, terealisasi 3 kanal/metode per tahun.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja yang belum ada data tersedia adalah indikator Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.

Strategi untuk meningkatkan Capaian Intervensi Sensitif yang belum mencapai target antara lain untuk Indikator Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting agar lebih optimal adalah mengoptimalkan Peran Tim Pendamping Keluarga. Tugas

utama dalam kegiatan Pendampingan Keluarga adalah penyuluhan, Fasilitasi pelayanan rujukan, Fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga berisiko stunting serta surveilans terhadap kelompok sasaran di tingkat desa/kelurahan. Dalam optimalisasi pendampingan Keluarga Berisiko Stunting ini, pentingnya TPK mempunyai data Keluarga Berisiko Stunting untuk memastikan pendampingan kepada sasaran Keluarga Berisiko Stunting. Jenis pendampingan yang dapat diberikan kepada keluarga berisiko stunting antara lain pendampingan KIE, Bansos, Elsimil, Rujukan, EPPGBM, PMT dan BAAS. Dengan dijadikannya keluarga berisiko stunting menjadi peta kerja bagi kader TPK diharapkan jangkauan pendampingan akan menjadi lebih banyak.

Untuk Terwujudnya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, BKKBN memiliki Indikator Kinerja tambahan sebanyak 19 Indikator yang terdapat dalam RAN PASTI PERBAN 12/2021.

1. Persentase desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK, target 100%, terealisasi 100%

Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta telah memiliki minimal 1 Kelompok TPK, Jumlah TPK yakni 1852 Kelompok dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3-0-30 Jumlah TPK

No	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa per Kecamatan	Jumlah TPK Per Kecamatan
1	Bantul	Pundong	3	15
		Sewon	4	25
		Piyungan	3	15
		Banguntapan	8	47
		Kasih	4	27
		Bantul	5	30
		Jetis	4	20
		Dlingo	6	30
		Bambanglipuro	3	15
		Srandakan	2	10

		Pandak	4	20
		Pleret	5	25
		Sanden	4	20
		Imogiri	8	47
		Pajangan	3	15
		Kretek	5	25
		Sedayu	4	20
Jumlah Bantul			75	406
2	Gunungkidul	Rongkop	8	15
		Gedangsari	7	19
		Patuk	11	16
		Semanu	5	30
		Tanjungsari	5	14
		Wonosari	14	40
		Tepus	5	19
		Karangmojo	9	26
		Ponjong	11	26
		Semin	10	26
		Nglipar	7	15
		Ngawen	6	17
		Girisubo	8	11
		Paliyan	7	15
		Playen	13	28
		Saptosari	7	17
		Purwosari	5	9
		Panggung	6	13
Jumlah Gunungkidul			144	356
3	Kulon Progo	Pengasih	7	26
		Temon	15	15
		Wates	8	24
		Galur	7	17
		Girimulyo	4	14

		Kalibawang	4	15
		Kokap	5	17
		Lendah	6	22
		Nanggulan	6	17
		Panjatan	11	21
		Samigaluh	7	16
		Sentolo	8	25
Jumlah Kulon Progo			88	229
4	Sleman	Seyegan	5	38
		Depok	3	39
		Sleman	5	45
		Minggir	5	31
		Ngemplak	5	38
		Ngaglik	6	58
		Melati	5	50
		Godean	7	52
		Prambanan	6	42
		Berbah	4	37
		Tempel	8	50
		Gamping	5	54
		Pakem	5	32
		Moyudan	4	27
		Kalasan	4	42
		Turi	4	29
		Cangkringan	5	32
Jumlah Sleman			86	696
5	Kota Yogyakarta	Umbulharjo	7	30
		Kotagede	3	16
		Danurejan	3	8
		Mergangsan	3	12
		Mantrijeron	3	15

	Gedongtengen	2	6
	Gondokusuman	5	15
	Ngampilan	2	7
	Kraton	3	9
	Gondomanan	2	6
	Jetis	3	9
	Pakualaman	2	4
	Tegalrejo	4	17
	Wirobrajan	3	11
Jumlah Kota Yogyakarta		45	165
Total DIY		438	1852

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan dalam satu desa/kalurahan kabupaten/Kota D.I Yogyakarta memiliki lebih dari satu kelompok TPK. Jumlah TPK yang terbentuk lebih dari jumlah Desa/Kalurahan di D.I Yogyakarta

2. Persentase TPK yang mendapatkan orientasi, target 100 %, terealisasi 100%
3. Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan, target 90%, terealisasi 80%



Gambar 3-0-43 Tren Capaian Persentase Desa/Kelurahan yang TPKnya Melakukan KIE Kelompok Minimal 1 Kali Per Bulan

Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan tercapai 81% dari target yang ditetapkan 90%, Kegiatan KIE kelompok yang dilakukan berkala minimal 1 bulan sekali untuk memberikan pembinaan kepada sasaran keluarga berisiko stunting secara bersamaan yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin dan ibu menyusui serta keluarga yang memiliki anak baduta. Data dukung kegiatan tersebut dapat dilihat dari capaian MORENA (Aplikasi Monitoring Evaluasi Anggaran DAK).

4. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar, target 50%, terealisasi 79,80%
5. Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan, target 90%, terealisasi 29,21% (Sumber Data : DITKESPRO)

Terkait dengan Program Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan Indikator Kinerja Tambahan Berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, DIY ditargetkan agar 90% ibu hamil menerima pendampingan oleh TPK. Akan tetapi berdasarkan data SIGA diperoleh bahwa hanya sebanyak 29,21% ibu hamil yang mendapat pendampingan oleh TPK dan melaporkan ke dalam Aplikasi Elsimil (32,46%).

Rendahnya persentase ibu hamil menerima pendampingan disebabkan oleh beberapa hal:

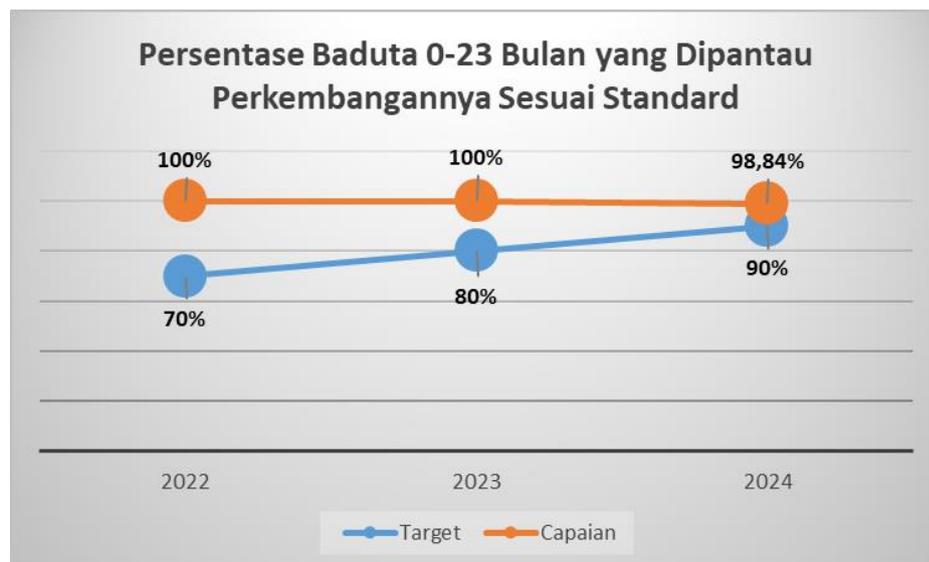
1. Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdiri atas 3 unsur, yaitu bidan, kader PKK, dan kader KB. Akan tetapi, karena keterbatasan jumlah bidan di suatu daerah menyebabkan TPK harus melibatkan bidan dari luar daerah (domisili bidan dan ibu hamil berbeda). Hal ini menyebabkan kurang intensifnya pendampingan yang dilakukan, sedangkan pemeriksaan ibu hamil meliputi umur kehamilan, berat badan, tinggi badan, LILA, tinggi fundus uteri, HB, Indeks Massa Tubuh, tafsiran berat janin, riwayat penyakit bumil (hipertensi, diabetes, tiroid, penyakit jantung, TBC, asma, dan lain-lain) yang hanya dapat dilakukan oleh bidan.
2. Tidak semua bidan yang tergabung dalam TPK merupakan Praktik Mandiri Bidan di wilayah setempat, sehingga pada jam-jam kerja bidan banyak melakukan ketugasan di tempat lain. Sehingga tidak semua pendampingan

terhadap ibu hamil dapat dilakukan dengan intensif. Selain itu, hal tersebut menyebabkan kendala dalam hal kesepakatan penyesuaian waktu kunjungan dan pendampingan antar kader TPK.

3. Aplikasi Elsimil merupakan aplikasi pencatatan dan pelaporan terhadap pendampingan yang dilakukan terhadap calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan Baduta. Meskipun pendampingan tersebut dilaporkan dalam aplikasi yang sama, akan tetapi pada menu pelaporan pendampingan ibu hamil di aplikasi Elsimil cenderung lebih sulit diakses (lebih sering *under maintenance*) dibanding menu pencatatan pelaporan yg lain.

6. Persentase baduta 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard, target 90%, terealisasi 98,84%

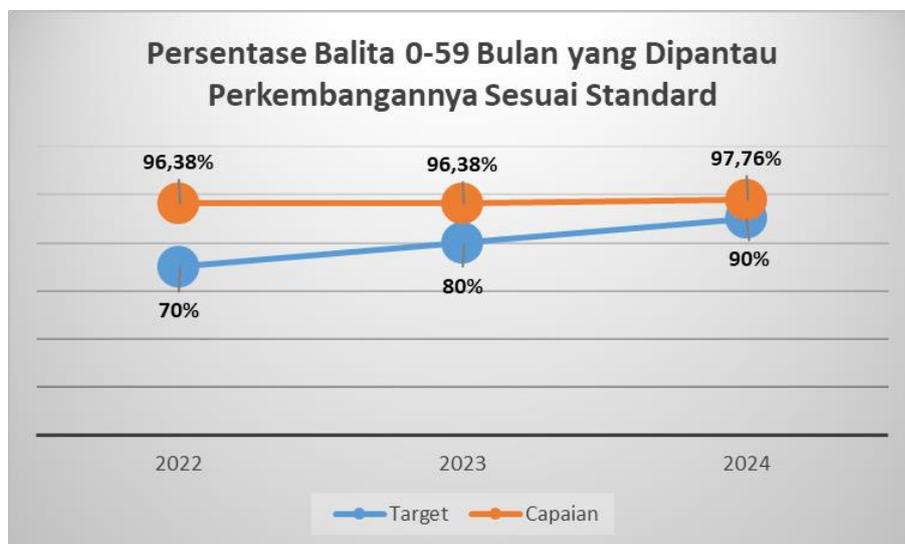
Pada tahun 2024, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pemantauan perkembangan baduta 0-23 bulan di wilayah melalui SIGA. Program ini bertujuan untuk memantau dan memastikan bahwa perkembangan baduta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah 90% baduta yang dipantau perkembangannya sesuai standar. Berdasarkan data, capaian pemantauan perkembangan baduta mencapai 98,84% dari target yang telah ditentukan.



Gambar 3-0-44 Tren Capaian Persentase Baduta 0-23 Bulan yang Dipantau Perkembangannya Sesuai Standard

7. Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard, target 90%, terealisasi 97,76%.

Pada tahun 2024, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pemantauan perkembangan balita 0-59 bulan di wilayah melalui SIGA. Program ini bertujuan untuk memantau dan memastikan bahwa perkembangan balita sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah 90% balita yang dipantau perkembangannya sesuai standar. Tahun 2024 capaian pemantauan perkembangan balita mencapai 97,76% dari target yang telah ditentukan serta mengalami kenaikan dari capaian tahun 2023 sebesar 96,38%.



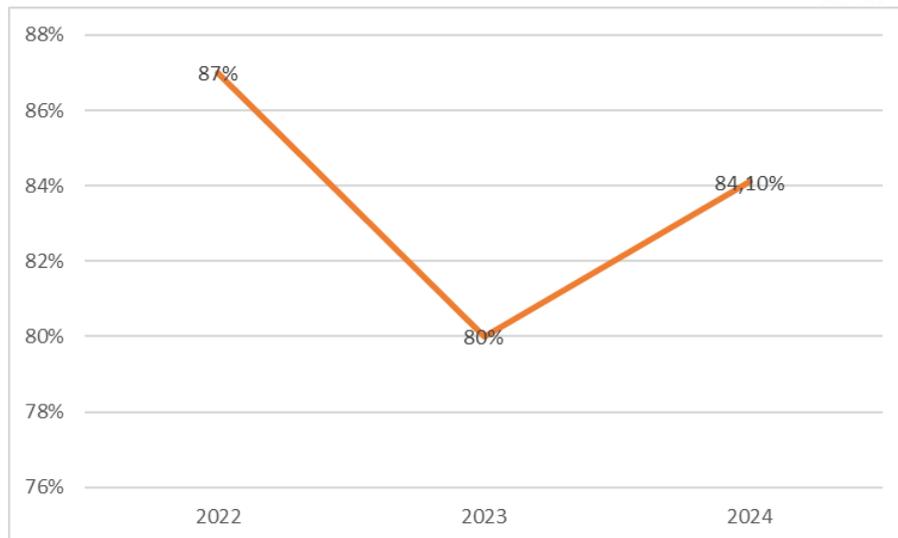
Gambar 3-0-45 Tren Capaian Persentase Balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar

8. Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal, target 70%, realisasi 990,00%

Capaian dihitung berdasarkan jumlah laporan kegiatan Dashat dalam laporan kampung kb secara online

9. Cakupan Catin/CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah, target 90%, realisasi 84,10%

Berdasarkan sumber data dari DITHANREM, capaian Catin/CaPUS Subur yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3(tiga) bulan sebelum menikah sebesar 84,10% atau persentase capaian sebanyak 93,44%



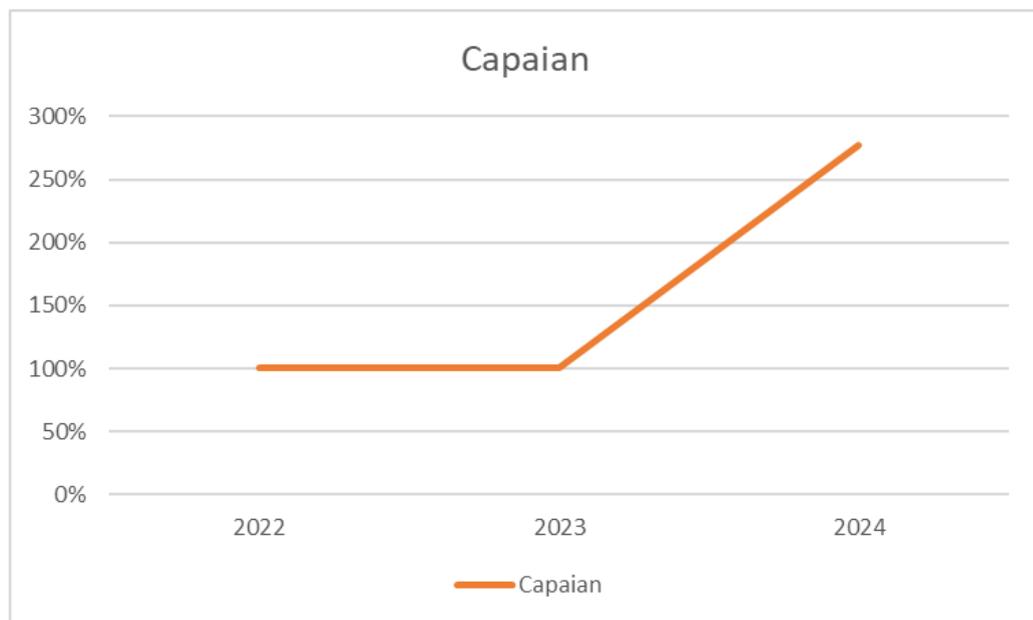
Gambar 3-0-46 Tren Capaian Catin/CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah

Realisasi capaian tersebut mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi dan kesadaran Catin/CaPUS yang akan menikah tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan pra-nikah. Pencapaian ini tidak hanya bermanfaat untuk mempersiapkan kesehatan pasangan yang akan menikah, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap penurunan angka stunting. Faktor yang mendukung dalam mencapai target ini adalah adanya dukungan dan kolaborasi dari pemerintah dan mitra terkait dalam memberikan kemudahan akses pemeriksaan kesehatan serta sosialisasi yang efektif melalui berbagai media yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat pemeriksaan kesehatan pra-nikah.

10. Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD), target 100%, terealisasi 277,00%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari SIGA BKKBN (Elsimil-Catin), persentase capaian konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada Catin (Calon Pengantin) dan CaPUS (Calon Pengantin Usia Subur) yang mengalami anemia di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 277,00%.

Angka ini menunjukkan bahwa capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan adanya upaya yang intensif dan optimal dalam pemberian Tablet Tambah Darah kepada catin/caPUS yang mengalami anemia.



Gambar 3-47 Tren Capaian Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)

Capaian yang lebih dari 100% ini menggambarkan bahwa Catin dan CaPUS yang mengalami anemia memiliki kesadaran untuk mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), yang berperan penting dalam mempersiapkan tubuh ibu untuk kehamilan yang sehat, mengurangi risiko kelahiran prematur, dan meningkatkan berat badan lahir bayi. Semua faktor ini berkontribusi pada pengurangan risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Capaian lebih dari 100% ini juga mencerminkan upaya kolaboratif antara pemerintah, instansi terkait, serta tenaga kesehatan dalam menjalankan program ini.

11. Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting, target 100%, terealisasi 100%
12. Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun., target 100%, terealisasi 100%
13. Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun, target 100%, terealisasi 100%

Sedangkan data capaian yang belum tersedia ada pada indikator :

1. Cakupan keluarga prasejahtera beresiko Stunting penerima bantuan sosial, target 85%
2. cakupan keluarga prasejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur, target 85%
3. Cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat, target 85%
4. Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan nontunai, target 85%
5. Cakupan PUS miskin yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI),target 85%

Strategi untuk meningkatkan Terwujudnya Percepatan Penurunan Stunting, antara lain :

1. Strategi melalui Penguatan Konvergensi : dilakukan peningkatan peningkatan dan kolaborasi antar lintas sektor untuk meningkatkan capaian indikator dalam RAN PASTI dan PERPRES 72/2021, Strategi Konvergensi ini sangat penting karena Percepatan Penurunan Stunting merupakan Program yang kegiatannya banyak di Lintas Sektor, sehingga butuh kerja keras dari semua pihak untuk akselerasi percepatan penurunan stunting.
2. Strategi melalui Penguatan Data. Adapun sumber data yang bisa dipakai dalam Percepatan Penurunan Stunting antara lain: E-PPGBM merupakan data rujukan untuk memantau hasil pengukuran status gizi (PJ: Dinas Kesehatan) , SIMKIA/ WEB KESGA merupakan rujukan data untuk memantau sasaran riil, khususnya ibu hamil dan ibu pascasalin (PJ: Dinas Kesehatan), SIMKAH merupakan rujukan data untuk memantau calon pengantin muslim (PJ: Kementerian Agama), ELSIMIL merupakan rujukan data untuk memantau jumlah sasaran yang didampingi oleh TPK (PJ: OPD KB/ BKKBN), Pendataan

Keluarga/ SIGA merupakan basis data keluarga berisiko stunting (PJ: OPD KB/ BKKBN), E-HDW merupakan basis data populasi tingkat desa/kelurahan (PJ:Dinas PMK/PMD) . Dari Capaian RAN PASTI banyak data yang merupakan kolaborasi dengan lintas sektor , contoh : Capaian PUS yang mengkonsumsi Tablet tambah Darah (Dinas Kesehatan), Cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Dinas Sosial). Diharapkan dengan Penguatan Data antar lintas sektor bisa menjadikan intervensi lebih tepat kepada sasaran.

3. Strategi dalam hal Penguatan Kampanye Perubahan Perilaku, Contohnya: Edukasi terkait Kesehatan lingkungan, Edukasi Pentingnya mengkonsumsi Tablet tambah darah bagi remaja putri, Edukasi Pentingnya Memahami Siklus Hidup 1000 Hari Pertama Kehidupan, Edukasi Pentingnya ASI dan Pola Makan.
4. Strategi dalam Optimalisasi Pendampingan yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya optimalisasi dalam pendampingan oleh TPK antara lain:

- a. Refreshing bagi kader TPK terkait dengan tugas dan fungsi serta mekanisme dalam pelaksanaan pendampingan, bagi anggota TPK baru maupun lama
- b. Koordinasi dan kolaborasi, karena anggota TPK terdiri dari beberapa unsur maka perlu dilakukan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan melaksanakan koordinasi serta mengevaluasi hasil pendampingan. Selain itu juga perlunya menjalin hubungan baik dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan akses ibu hamil terhadap perawatan medis yang berkualitas.
- c. Promosi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendampingan ibu hamil oleh kader TPK yang dapat dilakukan melalui media sosial, poster, dan acara komunitas. Selain itu, bekerja sama dengan lurah atau tokoh masyarakat lainnya untuk mendukung program pendampingan ibu hamil.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan kader TPK dapat melakukan pendampingan ibu hamil yang efektif, sehingga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

5. Strategi Melalui Penguatan Kemitraan dan BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting). Dengan penguatan Kemitraan, diharapkan Program BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) akan lebih berjalan lebih optimal. Program BAAS ini merupakan salah satu Program yang diluncurkan oleh BKKBN dalam percepatan penurunan stunting. BAAS merupakan Gerakan gotong royong oleh seluruh elemen bangsa dan mempercepat penurunan stunting terhadap sasaran keluarga beresiko stunting. Dengan BAAS ini, diharapkan akan muncul donator baru yang mempunyai komitmen dan berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting. Melalui Program BAAS diharapkan bisa tersinergi dengan keberadaan Kampung KB, dimana dalam Kampung KB ada Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting. Dengan munculnya donatur di Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting diharapkan penanganan keluarga beresiko stunting akan lebih optimal.

D. Evaluasi Kinerja

D.1. Review Rencana Strategis

Di dalam Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan dalam Program Bangga Kencana. Penetapan sasaran, indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun sudah berdasarkan sasaran kinerja BKKBN Pusat Tahun 2020-2024 yang ada pada Renstra BKKBN Pusat karena Perwakilan BKKBN DIY sebagai unit pelaksana program Bangga Kencana di daerah. Penetapan target tahun 2020-2024 tersebut sudah menyesuaikan kondisi DIY dengan berdasarkan data dan capaian program Bangga Kencana di tahun 2019.

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 perlu dilakukan review Renstra Perwakilan BKKBN DIY secara berkala. Akan tetap review Renstra belum dilakukan karena menunggu review Renstra BKKBN yang sampai saat ini belum dilaksanakan juga. Dengan adanya kebijakan untuk fungsional peneliti yang dipindah tugaskan ke instansi lain (BRIN) pada awal tahun 2022 maka beberapa target yang ada pada Renstra Tahun 2020 - 2024

sudah tidak relevan lagi, seperti Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi dan output Layanan Penelitian dan Pengembangan.

D.2. Review Pengelolaan Kinerja

Pada tahun 2024 kinerja Perwakilan BKKBN DIY berdasarkan pada Perjanjian Kinerja 2024 dan juga Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BKKBN DIY. Review pengelolaan kinerja dilakukan pada 4 aspek, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Dari indikator kinerja yang ada pada Renstra kemudian disusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Dimana Rencana Kerja Tahunan tersebut digunakan sebagai Struktur Program dan Anggaran (SPA) untuk menyusun program dan anggaran serta kegiatan tahun 2024 yang tertuang dalam DIPA Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2024. Perwakilan BKKBN juga telah menyusun Matrik Keselarasan Kegiatan dan Anggaran (MKKA) tahun 2024 serta Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja (RAPK) tahun 2024 berdasarkan pada DIPA yang telah disusun.

2. Perjanjian Kinerja

Perwakilan BKKBN DIY mendapat indikator dan target kinerja dari BKKBN Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut mengalami penyesuaian dikarenakan adanya realokasi anggaran

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2024 dengan target tahun 2024 baik yang terdapat pada Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Renstra. Selain itu juga pengukuran trend capaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Data capaian yang digunakan untuk pengukuran bersumber dari Data PK-24, SIGA, E Monev, SMART, website Kampung KB, SAKTI serta laporan tim penilai internal. Dari pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan analisis hasil capaian kinerja, ada 1 (satu) indikator yang masih dalam capaian kurang (merah) yaitu

indikator jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter.

4. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Perwakilan BKKBN DIY dilakukan melalui aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu. E-Monev merupakan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO, serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Dari 30 RO yang dilaporkan pada e- Monev Perwakilan BKKBN DIY Tahun Anggaran 2024 capaian realisasinya mencapai 100%. SMART Kemenkeu adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Mulai tahun 2023, aplikasi SMART Kemenkeu telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kemenkeu, sehingga untuk pelaporan di SMART Kemenkeu tidak bisa diinput secara manual lagi. SMART Kemenkeu berfokus pada hasil atas anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan. Apakah anggaran mampu menghasilkan output dan outcome yang telah ditargetkan. Nilai Kinerja Anggaran pada SMART Kemenkeu terdiri dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran SMART Perwakilan BKKBN DIY tahun 2024 adalah 99,42 dengan kategori Sangat Baik.

D.3. Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas

perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti rekomendasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan upaya perbaikan yaitu: a. Melakukan perbaikan penjabaran kinerja secara berjenjang dari Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga ke individu pegawai yang berorientasi hasil sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan CSF. b. Melakukan rapat komponen (rapat internal) secara rutin tiap bulan. Mengumpulkan dokumentasi rapat komponen secara lengkap.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai 71,15 dengan predikat “BB” dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023 Dilihat dari LHE 2023 pada aplikasi SIZUKA	2024 Dilihat dari LKE manual final 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22,80	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30	18,9	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15	10,65	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,75	16,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,1	71,15
	Predikat		B	BB

Tabel 3-31 Nilai SAKIP 2 tahun terakhir

Capaian Perwakilan BKKBN DIY antara lain :

- Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja (rencana strategis, perjanjian

kinerja dan rencana aksi pencapaian kinerja) serta memiliki crosscutting kinerja dengan Perwakilan BKKBN Provinsi

- Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pemantauan dan pengukuran secara berjenjang dan berkala melalui monev RAPK, e-monev Bappenas dan SMART Kemenkeu setiap bulannya
- Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun laporan kinerja dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, menyajikan informasi perbandingan kinerja yang memadai dan melibatkan perwakilan pegawai sesuai dengan bidangnya. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan, serta disampaikan tepat waktu.
- Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan evaluasi internal melalui Monev RAPK dengan dilaksanakan oleh SDM yang telah mendapatkan sosialisasi dari Biro Perencanaan.

Beberapa rekomendasi yang sudah di tindak lanjuti oleh Perwakilan BKKBN DIY :

- Seluruh pegawai Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendapatkan persetujuan Rencana SKP 2024 pada aplikasi e kinerja,
- Memperbaiki SOP Monev RAPK, e-Monev Bappenas dan SOP SMART Kemenkeu yang berlaku di internal unit kerja dengan memperhatikan kriteria pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
- Meningkatkan kualitas rapat internal Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta periode sd Desember 2024 dengan dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, yang membahas pengukuran kinerja lampiran I Perjanjian Kinerja 2024 dan mengidentifikasi rencana aksi untuk pencapaian kinerja tersebut
- Melaksanakan Monev RAPK secara berkala (bulanan) periode sd Desember 2024 dan meningkatkan kualitasnya dengan: 1) mengukur realisasi indikator kinerja yang ditetapkan pada Lampiran I Perjanjian Kinerja 2024 dan menguraikan data kinerja yang relevan dan mendukung realisasi kinerja. 2) mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian Organisasi, Strategi, Kebijakan, Aktivitas, Anggaran dan Efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
- Mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam Pengumpulan data kinerja pada indikator kinerja lampiran I Perjanjian Kinerja 2024, dengan menggunakan link sehingga semua orang dapat mengakses

- Pengumpulan data kinerja pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah memanfaatkan Teknologi Informasi
- Melakukan pemantauan pengisian visum kinerja (SIVIKA) pegawai periode Juli sd Desember 2024 telah memenuhi kategori SKP (minimal 1 bulan 1 aktivitas berkategori SKP), sehingga menunjukkan pegawai memahami dan peduli atas pengukuran kinerja
- Melakukan perbaikan penyusunan laporan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 dengan 1) melibatkan perwakilan seluruh tim kerja, yang dibuktikan dengan SK Tim Penyusun LKIP 2024 yang beranggotakan perwakilan dari semua tim kerja. 2) menyajikan informasi: a) perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Mengimplementasikan core value ASN BerAKHLAK dan KRN secara spesifik yang menunjukkan adanya perubahan budaya kinerja organisasi dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan (dokumen terlampir).

D.4. Evaluasi Manajemen Risiko

Sebagai upaya dukungan BKKBN terhadap pencapaian Visi dan Misi serta Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN, BKKBN memiliki tujuan untuk 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia dan 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan. Penetapan sasaran strategis dan sasaran kinerja agar dapat dilakukan pengukuran keberhasilan program dan kegiatan prioritas.

Dalam menjalankan berbagai program kerja dan kegiatan, BKKBN akan menghadapi berbagai tantangan baik faktor eksternal maupun internal yang bisa secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kondisi ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran inilah yang disebut risiko. Berbagai upaya dilakukan dalam mengelola risiko, BKKBN berusaha melakukan antisipasi dan mitigasi segala risiko secara terintegrasi melalui

pendekatan Manajemen risiko pada seluruh satuan kerja di seluruh area program dan kegiatan. Manajemen Risiko sebagai pendekatan yang tepat untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran.

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Di BKKBN telah menetapkan beberapa peraturan terkait tata kelola manajemen risiko yaitu: 1) Peraturan Inspektur Utama no 2 tahun 2022 tentang Tentang Pelaksanaan Reviu Proses Manajemen Risiko Di Lingkungan Bkkbn; 2) Peraturan BKKBN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BKKBN dan 3) Keputusan Sekretaris Utama BKKBN Nomor 39/KEP.SES/B1/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan BKKBN.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta akan menghadapi berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat tujuan dan sasaran organisasi. Ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran inilah yang disebut dengan risiko. Jika Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat mengelola risiko tersebut, maka BKKBN tidak akan mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka antisipasi dan mitigasi risiko terhadap kondisi ketidakpastian di masa yang akan datang, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dituntut untuk dapat mengelola risiko yang ada secara terintegrasi melalui pendekatan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan cara pendekatan yang tepat untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Manajemen risiko dapat diterapkan ke seluruh satuan kerja pada keseluruhan area program/kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan manajemen risiko.

Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, pimpinan/manajemen menerapkan manajemen risiko untuk memperoleh keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada tingkatan yang dapat diterima. Terkait penerapan manajemen risiko, BKKBN telah mengeluarkan Peraturan BKKBN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BKKBN. Peraturan tersebut mengatur prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko, budaya risiko, struktur manajemen risiko, proses manajemen risiko, serta sumber daya dan pengembangan manajemen risiko. Peraturan BKKBN Nomor 2 tahun 2023 selanjutnya diimplementasikan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor 39/KEP.SES/B1/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan BKKBN sebagai acuan bagi para penyelenggaraan manajemen risiko dalam melaksanakan seluruh lingkup penyelenggaraan manajemen risiko.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan bertujuan untuk memastikan implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi perbaikan/pengembangan Manajemen Risiko. Pemantauan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala terhadap:

- 1) Realisasi kegiatan pengendalian dan peristiwa Risiko, untuk mengetahui level Risiko aktual, efektivitas kegiatan pengendalian, ada atau tidaknya Risiko residual dan/atau Risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian; dan
- 2) Hambatan/kendala dan peluang dalam pelaksanaan keseluruhan proses Manajemen Risiko.

Pemantauan yang dilaksanakan oleh UPR dan UP Manajemen Risiko di sampaikan hasilnya kepada para pihak. Hasil pemantauan memuat kesimpulan dan rencana tindak lanjut atau rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan para Pemilik Risiko di tiap tingkatan dan UP Manajemen Risiko dalam melaksanakan perbaikan/pengembangan Manajemen Risiko.

Pemantauan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pemantauan oleh UPR dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan; dan
- 2) Pemantauan oleh UP Manajemen Risiko dilakukan berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi adalah bagian dari Kerangka Kerja Manajemen Risiko khususnya untuk mengenali kebutuhan aktivitas perbaikan dan pengembangan.

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan proses pemantauan atau monitoring dan evaluasi secara berkala. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan per tiga bulan dengan menelaah pelaksanaan dari rencana mitigasi risiko yang sudah disusun sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan secara berkala minimal satu tahun sekali oleh UPR dan UP Manajemen Risiko sesuai lingkup kerjanya, dimulai pada awal tahun anggaran terhadap kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel pemantauan terdapat hasil evaluasi efektifitas penyelenggaraan MR di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- Pernyataan Risiko disusun berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024.
- Pengendalian yang dimiliki Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu memitigasi segala risiko yang akan muncul
- Tidak terdapat kendala pada pelaksanaan kegiatan pengendalian
- Rencana kegiatan pengendalian terus dilakukan dalam satu tahun
- Terdapat revisi anggaran namun pernyataan risiko tidak mengalami perubahan.

E. Perbaikan Perencanaan Program dan Anggaran TA 2024

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan memenuhi target jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan dengan berbasis usulan atau kebutuhan sesuai dengan prioritas, tanggung jawab dan kewenangan;
2. Sistem Pelaporan menggunakan IT yang terintegrasi agar mendapatkan data basis yang valid dan update sebagai bahan perencanaan dan perbaikan program dan anggaran;

3. Melakukan sosialisasi yang bersifat koordinasi, dengan melibatkan mitra kerja terkait, menyampaikan agenda rencana kegiatan yang harus dilaksanakan serta jadwal kegiatan agar kegiatan berjalan sesuai tujuan dan sasaran sehingga dapat mencapai output dan outcome yang diharapkan;
4. Mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan program;
5. Koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, mulai dari pimpinan s.d. pelaksana teknis kegiatan untuk membangun komitmen bersama dengan semua stakeholder sehingga pada akhirnya akan mewujudkan pemahaman unit kerja akan pentingnya perencanaan program dan anggaran.



L 2
K 0
I 2
P 4

BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Penutup

Bab 4 Berisi :

- a. Penutup*
- b. Lampiran*

Pelaksanaan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, menyajikan informasi realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, disertai analisis capaian serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya sehingga dapat mencapai keberhasilan pencapaian program yang lebih tinggi dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pencapaian tujuan/ sasaran strategis Renstra BKKBN periode tahun 2024.

A.1. Kesimpulan

- a. Capaian IKU dan IKK Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 yang masuk dalam kategori **Sangat Baik {Hijau}** dengan rentang pencapaian antara 92,64% s.d. 526,28% adalah:
 - 1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun.
 - 2. Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR).
 - 3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
 - 4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

5. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
6. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
7. Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe
8. Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
9. Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS
10. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga
11. Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah
12. Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB
13. Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
14. Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi
15. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk
16. Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan
17. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP
18. Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah
19. Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan
20. Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan
21. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana
22. Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana
23. Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik
24. Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
25. Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota
26. Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik

27. Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)
28. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Skala 1-4)
29. Indeks ZI WBK/WBBM
- b. Capaian IKK Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 yang masuk dalam kategori **Baik {Biru}** adalah Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter dengan pencapaian sebesar 81,10% dan Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*) dengan pencapaian sebesar 87,05%.
- c. Semua capaian indikator kinerja RO Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 masuk dalam kategori **Sangat Baik {Hijau}** dengan pencapaian sebesar 100%.
- d. Capaian indikator kinerja stunting Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 yang masuk dalam kategori **Sangat Baik {Hijau}** dengan rentang pencapaian antara 93,44% s.d. 1414,29% adalah:
1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan
 2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan
 3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah
 4. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan
 5. Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi
 6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
 7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja
 8. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah
 9. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan stunting
 10. Persentase desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK
 11. Persentase TPK yang mendapatkan orientasi

12. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar
 13. Persentase baduta 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard
 14. Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard
 15. Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal
 16. Cakupan Catin/CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah
 17. Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)
 18. Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting
 19. Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun
 20. Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun
 21. Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun
- e. Capaian indikator kinerja stunting Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 yang masuk dalam kategori **Baik {Biru}** adalah Prevalensi Stunting dengan pencapaian sebesar 88,43% dan Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan dengan pencapaian sebesar 88,89%.
- f. Capaian indikator kinerja stunting Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 masuk dalam kategori **Kurang (Merah)** adalah Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan dengan pencapaian sebesar 32,46%.

A.2. Langkah-Langkah ke Depan

Berdasarkan capaian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Teknologi Informasi seperti media sosial (instagram, tiktok, facebook, youtube, whatsapp).
2. Menggiatkan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok (capaian programnya rendah).
4. Pelibatan Generasi Z menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan karena mobilitasnya yang tinggi dan paham dalam hal Teknologi Informasi.
5. Mengoptimalkan peran mitra pentahelix (perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta, masyarakat/komunitas, media massa) dalam mendukung program
6. Mengadakan program parenting bersama sekolah untuk meningkatkan keterlibatan orang tua.
7. Mempromosikan konten-konten inspiratif di media sosial tentang pentingnya peran keluarga dalam pembentukan karakter.
8. Menyenggarakan seminar baik secara online maupun offline bersama mitra strategis (Himpsi, IDAI, Lingkar Ayah Indonesia, Si Anak Hebat dan IPPI) dengan tema pengasuhan anak berbasis karakter.
9. Peningkatan pemanfaatan GDPK dalam dokumen perencanaan daerah.

B. LAMPIRAN

STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI TA 2024

017972. Perwakilan BKKBN Provinsi : DI Yogyakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	PAGU PERWAKILAN BKKBN PROVINSI			68,158,905,000	
068.DJ	Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana			18,248,155,000	
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			18,248,155,000	
	Bidang KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi			4,688,588,000	
3331.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
3331.BDB.001	Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	473	Lembaga	271,720,000	
	1.1 Jumlah Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan				
	260 Pengelolaan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan KB di fasyankes	473	Faskes	24,480,000	
	a Perencanaan Kebutuhan dan Monitoring MIM Tools Alat dan Obat Kontrasepsi				
	b Apresiasi Peran Klinik Swasta dalam Peningkatan Pelayanan KB				
	c Optimalisasi Pelayanan KB di TPMB				
	261 Penyediaan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi Tenaga Kesehatan KB	313	Tenaga Kesehatan (Kumulatif)	43,100,000	
	a Workshop Penguatan Kapasitas Pelayanan KB di Fakultas Kedokteran atau Akademi Kebidanan				
	b Forum Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja				
	c Implementasi Strategi Peningkatan Indeks Informasi Metode KB				
	d Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Pelayanan KB bagi Tenaga Kesehatan				
	262 Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria	2	Kegiatan	23,400,000	
	a Penyediaan Tim Vasektomi di tiap Kabupaten dan Kota melalui Refreshing Dokter Terlatih MOP				
	b Peningkatan Peran Kelompok dan Motivator KB Pria melalui Pemberian Apresiasi				
	263 Bimbingan dan Fasilitasi Ayoman Komplikasi dan Kegagalan KB MKJP serta koordinasi penggerakan KB MKJP di Kab/Kota	5	Kabupaten/Kota	38,000,000	
	a Koordinasi dan evaluasi penggerakan pelayanan KB MKJP serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan KB MKJP				
	b Fasilitasi dan pembinaan penggerakan Pelayanan KB MKJP				
	264 Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja di Wilayah Khusus	2	Laporan	47,400,000	
	a Analisis dan evaluasi program pelayanan KB wilayah khusus di kabupaten/kota				
	265 Penurunan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) Melalui Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	4	Kab/Kota	47,670,000	
	a Pembinaan kesehatan reproduksi bagi kelompok risiko tinggi				
	b Workshop fasilitator kesehatan reproduksi kelompok risiko tinggi				
	c Penguatan promosi kesehatan reproduksi bagi generasi muda (AKUKAMU)				
	d Perbanyak materi Alat Permainan Edukatif (APE) pembinaan kesehatan reproduksi bagi kelompok risiko tinggi				
	266 Pembinaan kesertaan KB pascapersalinan di fasilitas kesehatan	6,639	Peserta	47,670,000	
	a Apresiasi Penguatan Pencapaian KB Pascapersalinan dalam meningkatkan kesertaan KB (ASIK KBPP)				
	b Workshop penguatan kebijakan dan strategi KB Pascapersalinan				
	c Penyelarasan peningkatan kapasitas pengelola kesehatan reproduksi				
3331.QEI	Bantuan Lembaga				
3331.QEI.001	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	473	Lembaga	3,579,109,000	
	2.1 Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon				
	267 Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi faskes yang teregister (termasuk pembinaan evaluasi dan ketersediaan alokon)	473	Faskes	3,579,109,000	
	a Pengadaan Alokon	473	Faskes	3,579,109,000	
	IUD	20,325	set	264,225,000	
	Implan 2 Batang	10,300	set	1,555,300,000	
	Implan 1 Batang	1,240	set	296,360,000	
	Suntikan Tiga Bulanan Progestin	135,000	vial	783,000,000	
	Suntikan Tiga Bulanan Kombinasi	-	vial	-	
	Syringe	135,000	buah	202,500,000	
	Pil Progestin	-	cycle	-	
	Pil KB Kombinasi	-	cycle	-	
	Kondom	-	lusin	-	
	BMHP	-		309,734,000	
	Administrasi Pengadaan	-		167,990,000	
3331.QDB	Fasilitasi dan pembinaan lembaga				

017972. Perwakilan BKKBN Provinsi : DI Yogyakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
3331.QDB.001	Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI		473	Faskes	204,334,000	
	3.1	Jumlah faskes yang mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting				
		268 Intensifikasi pelayanan KB di fasyankes	473	Faskes	204,334,000	
		a Penguatan Intensifikasi Pelayanan KB di Fasyankes				
		b Fasilitas Peningkatan Perluasan Akses Pelayanan KB di Fasyankes Tingkat Provinsi dan Kab/Kota				
		c Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB di Fasyankes Jaringan dan Jejaring				
		d Fasilitas Dukungan Operasional PKBRS termasuk Pelayanan KB Pascapersalinan untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting				
		e Orientasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan KB bagi Tenaga Kesehatan di Fasyankes Jaringan dan Jejaring				
		f Monitoring Evaluasi Pembinaan dan Bimbingan Teknis Intensifikasi Pelayanan KB di Fasyankes				
3331.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah					
3331.UBA.005	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan		5	Kab/Kota	97,000,000	
	4.1	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan				
		269 Penguatan peran pemerintah daerah dalam pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	5	Kab/Kota	97,000,000	
		a Penguatan koordinasi pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan dalam rangka penurunan stunting				
		b Penguatan pencatatan dan pelaporan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan				
		c Monitoring dan evaluasi intensifikasi pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan				
3331.UBA.006	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitas intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus		5	Kab/Kota	536,425,000	
	5.1	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitas intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus				
		402 intensifikasi Pelayanan KBKR di wilayah khusus	5	Kab/Kota	536,425,000	
		a Fasilitas intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus				
Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi						1,608,429,000
3331.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah					
3331.FBA.001	Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga		5	kab / kota	286,120,000	
	1.1	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga				
		233 Fasilitas Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter	5	kab / kota	98,500,000	
		a Koordinasi lintas sektor percepatan penurunan stunting di Provinsi melalui sistem pemantauan tumbuh kembang anak (KMS dan KKA)				
		b Fasilitas pembinaan kelompok BKB HI (peningkatan persentase BKB ke BKB HI sebesar 25% dari baseline data)				
		c Apresiasi Kelompok BKB Terbaik Tingkat Provinsi	1	Provinsi	-	
		d Kelas pengasuhan kelompok BKB di tingkat desa	5	kab / kota	-	
		234 Pengelolaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitas PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan)	1	PPKS	187,620,000	
		a Pengelolaan PPKS Provinsi sebagai pusat Rujukan				
		b Penguatan PPKS di Balai Penyuluhan				
		c Praktek Baik PPKS di Balai Penyuluhan				
3331.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga					
3331.QDE.001	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK		56,722	Keluarga	238,149,000	
	2.1	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas pembinaan 1000 HPK				
		235 Promosi dan KIE 1000 HPK	56,722	Keluarga	202,209,000	
		a Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting untuk mitra kerja dan pemangku kebijakan daerah				
		b Peningkatan kapasitas pelaksana program percepatan penurunan stunting bagi kader BKB				
		c Internalisasi Pengasuhan balita dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada masyarakat (KERABAT)				
		236 Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE 1000 HPK	1	Provinsi	15,728,000	
		a Pendampingan Keluarga dengan Anak Bawah Dua Tahun (Baduta) melalui Aplikasi Elsimil di Tingkat Kab/Kota				
		b Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui SIGA dan SMART				
		237 Peningkatan komitmen dengan pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting	1	Provinsi	20,212,000	
		a Promosi dan KIE pengasuhan balita dalam rangka Percepatan penurunan Stunting				
3331.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat					

017972. Perwakilan BKKBN Provinsi : DI Yogyakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
3331.QDD.001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu		488	Kelompok Masyarakat	650,000,000	
	3.1	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu				
		238 Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	488	Kelompok PIK Remaja dan BKR	650,000,000	
		a Workshop Tentang Kita untuk Duta Genre Desa/Kelurahan				
		b Workshop Upgrade "Tentang Kita" (Life Skill dan Kekerasan Seksual) bagi Pengelola PIK Remaja tingkat Kab/Kota dan PS/KS				
		c Workshop Edukasi Pencegahan Anemia Bagi Fasilitator Sebaya (selain 12 Provinsi Stunting)				
		d Apresiasi BKR dan PIK R Percontohan Segmentasi Usia (Berani Beraksi dan Berkolaborasi)				
		e Workshop Parenting 1001 Cara Bicara tingkat Provinsi				
		f Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreatifitas Genre				
		g Promosi dan Pelembagaan GenRe Melalui Berbagai Media dan Momentum Strategis (sakan Kencana hari remaja sumpah pemuda dan harganas)				
		h Fasilitasi Forum GenRe tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota				
		i Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR				
		j Rakortek KSPK Tk. Nasional				
3331.QDD.002	Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia		143	Kelompok BKL	311,700,000	
	4.1	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia				
		239 Penguatan Pelaksanaan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di Kelompok BKL	143	Kelompok BKL	311,700,000	
		a Pengembangan dan Perbanyak Materi dan Media Kelanjutusiaan				
		b Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh				
		c Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia				
		d Pengembangan BKL yang berkualitas & Mandiri	1	Sekolah	-	
3331.QDD.004	Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		10	Kelompok Masyarakat	122,460,000	
	6.1	Jumlah Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				
		241 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan Stunting di Kampung KB	10	Kelompok UPPKA	122,460,000	
		a Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				
		b Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				
		c Pemetaan Poktan UPPKA				
		d Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				
3331.QDD.005	Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam mendukung percepatan penurunan stunting		-	Kelompok Masyarakat	-	
	7.1	Jumlah kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam mendukung percepatan penurunan stunting				
		242 fasilitasi pembinaan percepatan penurunan stunting melalui kelompok BKB	-	Kelompok Masyarakat	-	
		a Orientasi penggunaan KKA di kelompok BKB (orientasi 1 hari)	-	Kelompok BKB (di 12 Provinsi)	-	
		b Pengembangan BKB Holistik Integratif Unggulan	-	Kab/Kota (12 Prov)	-	
		c Orientasi BKB Kit	-	Kab/Kota (12 Prov)	-	
3331.QDC	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat					
3331.QDC.001	Remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia dalam mendukung percepatan penurunan stunting		-	Orang	-	
	8.1	Jumlah remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia				
		243 Edukasi Gizi dan Anemia kepada Remaja Usia 15-19 Tahun	-	Remaja/Orang	-	
		a Pengadaan materi/media Edukasi				
		b Workshop untuk Forum GenRe dan PIK R di Tk. Provinsi				
		c Edukasi Oleh Forum GenRe dan PIK R di 12 Provinsi				
		d Apresiasi Forum GenRe dan PIK R terbaik di 12 Provinsi				
Bidang DALDUK Perwakilan BKKBN Provinsi					1,477,551,000	
3331FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah					
3331.FBA.002	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk		2	Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	332,762,000	
	1.1	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk				

017972. Perwakilan BKKBN Provinsi : DI Yogyakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	244 Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter proyeksi penduduk serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	5	Kab/Kota	24,000,000	
	a Pendampingan penyusunan GDPK 5 Pilar (pembentukan tim koordinasi penyusunan dan pelaksanaan GDPK 5 Pilar penyusunan rencana anggaran dan kegiatan penyusunan GDPK)				
	b Pendampingan pengolahan data dan analisis pengembangan kebijakan dalam GDPK 5 Pilar				
	245 Koordinasi pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	5	Kab/Kota	27,970,000	
	a Fasilitasi penetapan data parameter kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan) dalam kerangka Satu Data Indonesia				
	b Penyusunan Profil Kampung KB				
	246 Peningkatan kualitas bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah	5	Kab/Kota	21,530,000	
	a Pendampingan penyusunan target indikator program Bangga Kencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan)				
	b Telaah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan)				
	c Sosialisasi hasil review dokumen perencanaan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/ Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan)				
	247 Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan	350	Rumah DataKu di Kampung Keluarga Berkualitas	31,850,000	
	a Sosialisasi Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan				
	248 Penguatan Tata kelola Rumah Data Kependudukan	96	Rumah DataKu di Kampung Keluarga Berkualitas	24,000,000	
	a Fasilitasi teknis manajemen data pada Rumah Data Kependudukan				
	b Fasilitasi teknis tata kelola Rumah Data Kependudukan berbasis aplikasi				
	249 Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif	4	Kelompok Kerja Bangga Kencana	30,000,000	
	a Pengembangan bahan pembinaan Kelompok Kerja Bangga Kencana				
	b Pengelolaan Forum Komunikasi Kelompok Kerja Bangga Kencana				
	c Implementasi sistem monitoring dan evaluasi Kelompok Kerja Bangga Kencana yang efektif				
	d Fasilitasi Pembinaan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan				
	250 Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan kab/kota (formal non formal dan informal)	5	Kab/ Kota	45,000,000	
	a Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota		Kab/ Kota		
	b Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		Kab/ Kota		
	c Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Balai Diklat/ASN Peduli Kependudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		Kab/ Kota		
	d Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pramuka Peduli Kependudukan di tingkat Provinsi		Kab/ Kota		
	e Fasilitasi dan Pembinaan PESAT (PojoK Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat) dan Dakdikduk (Diskusi Asyik Pendidikan Kependudukan) di Kampung KB		Kab/ Kota		
	f Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penata Kependudukan dan KB		Kab/ Kota		
	g Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pendampingan Perguruan Tinggi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penurunan stunting		Kab/ Kota		
	251 Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota	3	Kab/ Kota	79,412,000	
	a Penyusunan Laporan Kependudukan Provinsi				
	b Fasilitasi Pembinaan Pelaporan dan Evaluasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk untuk OPD Kab/Kota				
	c Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Dampak Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota				
	d Pengembangan Model Tindak Lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk				
	252 Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan	5	Kab/ Kota	49,000,000	
	a Workshop Penanganan Terpadu Isu Kependudukan di Kampung KB				
	b Penguatan Program Bangga Kencana di Kampung KB				
	c Penguatan Data Capaian Kampung KB				

017972. Perwakilan BKKBN Provinsi : DI Yogyakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN			TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
				Target	Satuan		
		d	Momentum Hari Kependudukan Dunia di Provinsi Bersama Mitra Kerja				
3331.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat						
3331.QDD.006	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB			79	Kelompok Masyarakat	537,689,000	
	2.1	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan					
		253	Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna	79	Rumah Data Kependudukan Paripurna	537,689,000	
		a	Orientasi Pengelola Rumah Data Kependudukan				
		b	Fasilitasi Pengumpulan dan Updating Data di rumah data kependudukan				
3331.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah						
3331.UBA.001	Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)			5	Kab/Kota	332,000,000	
	3.1	Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana					
		254	Fasilitasi Intensifikasi Kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB	95	Kampung KB	233,000,000	
		a	Konsolidasi Nasional Pengelolaan Kampung KB				
		b	Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB				
		c	Penguatan Kampung KB				
		255	Fasilitasi Ekstensifikasi Kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB	86	Kampung KB	99,000,000	
		a	Orientasi Pengelolaan Kampung KB				
3331.UBA.002	Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting			5	Kab/Kota	125,100,000	
	4.1	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting					
		256	Kegiatan Pemberdayaan Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB	5	Kab/Kota	125,100,000	
		a	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting				
3331.UBA.003	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pengembangan DASHAT di kampung KB pada 12 Provinsi prioritas			-	Kab/Kota	-	
	5.1	Jumlah kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas stunting yang mendapatkan fasilitasi pengembangan DASHAT di kampung KB					
		257	fasilitasi pengembangan DASHAT di kampung KB	-	Kab/Kota	-	
		a	Penguatan Penyelenggaraan DASHAT di Kampung KB				
3331.UBA.004	Fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda pemprov kab/kota			-	Kab/Kota	-	
	6.1	Jumlah pemerintah daerah yang mendapat fasilitasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda pemprov kab/kota					
		258	Pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda pemprov kab/kota	-	Kab/ Kota	-	
		a	Fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi kepada 12 provinsi prioritas stunting				
3331.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan						
3331.PBG.001	Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi			1	Rekomendasi Kebijakan	150,000,000	
	7.1	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi					
		259	Studi kasus dan pembelajaran (provinsi)	1	Laporan	150,000,000	
		a	Implementasi model kebijakan hasil studi kasus stunting provinsi di Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan				
Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi						7,467,673,000	
3331.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah						
3331.FBA.003	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders) KIE serta penyediaan data dan informasi keluarga			1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	180,586,000	
	1.1	Jumlah Pemda yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders) KIE dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta penyediaan data dan informasi dalam sistem informasi keluarga					
		270	Peningkatan Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Pergerakan Program Bangga Kencana	5	Jumlah mitra aktif	28,790,000	
		a	Penilaian Penghargaan Bidang Bangga Kencana bagi Mitra Kerja dalam momentum daerah dan nasional				
		b	Fasilitasi Kunjungan Kerja Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Daerah				
		c	Temu Kerja stakeholder dan dinas pengendalian penduduk dan KB Tk Provinsi dalam konvergensi Pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting				
		d	Fasilitasi naskah kerja sama di Daerah				
		271	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pergerakan Program Bangga Kencana	10	jumlah mitra aktif	17,374,000	
		a	Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan di Daerah				
		b	Fasilitasi Pelaksanaan konvergensi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja di Daerah				
		272	Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	1	Provinsi	15,790,000	

017972. Perwakilan BKKBN Provinsi : DI Yogyakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
	a	Pengembangan Desain Materi Promosi KIE Program Bangga Kencana Berdasarkan Segmentasi Sasaran dan Wilayah				
	273	Peningkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak Media Elektronik Media Online serta Media Luar Ruang	5	Frekuensi	15,584,000	
	a	Promosi KIE Program Bangga Kencana Melalui Berbagai Media				
	b	Sosialisasi Program Bangga Kencana Melalui Kegiatan Momentum Strategis				
	274	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	4	Tim Advokasi provinsi dan Kab/Kota	9,585,000	
	a	Fasilitasi dan penguatan Pokja Advokasi dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting				
	275	Pembinaan dan evaluasi Kinerja Penyuluh KB/PLKB serta Penguatan Kinerja IPeKB	1	Provinsi	28,755,000	
	a	Fasilitasi Penyelenggaraan Sertifikasi/Uji Kompetensi Penyuluh KB				
	b	Penilaian Kinerja Penyuluh KB dan PLKB				
	c	Fasilitasi Koordinasi dan Penguatan kinerja IPeKB dalam penurunan AKI DO UN dan stunting				
	276	Pembinaan Peningkatan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD)	1	Provinsi	15,375,000	
	a	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Penilaian Teladan Tenaga Lini Lapangan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting				
	b	Penguatan Revitalisasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD)				
	277	Pembinaan Penguatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional	1	Provinsi	15,375,000	
	a	Penguatan pelaksanaan Mekanisme operasional lini lapangan				
	b	Fasilitasi pelaksanaan Mekanisme operasional lini lapangan dalam penurunan Unmet Need dan DO				
	279	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana	1	Provinsi	14,790,000	
	a	Monitoring dan evaluasi sosialisai promosi KIE Program Bangga Kencana				
	280	Peningkatan Kualitas layanan STIK dan Pengelolaan PPID	2	Laporan (Kaltara 1 Masuk Kaltim)	19,168,000	1. Laporan Penguatan sarana dan prasarana TI/ Pengelolaan Sarana IT 2. Laporan pengelolaan PPID dan Pengelolaan Perpustakaan
	a	Penguatan Sarana dan prasarana pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi				
	b	Koordinasi Teknis Pengelolaan PPID Program Bangga Kencana				
	c	Penyebarluasan Informasi Program Bangga Kencana				
	d	Pengelolaan Perpustakaan				
3331.QMA	Data dan Informasi Publik					
3331.QMA.001	Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)		1	layanan	3,733,437,000	
	2.1	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)				
	281	Peningkatan kualitas cakupan pengelolaan serta pemanfaatan basis data keluarga Indonesia	5	Kab/Kota	3,733,437,000	
	a	Cetak Formulir Pemutakhiran PK-24	-	keluarga	-	
	b	Operasional Pencatatan dan Pelaporan Pemutakhiran PK-24	442,736	keluarga	2,966,331,000	
	c	Monitoring /Pengamatan Pelaksanaan Pemutakhiran PK-24	5	kab/kota	2,954,000	
	d	Posko Pemutakhiran PK-24 tk. Kab/kota	5	Kab/Kota	17,200,000	
	e	Posko Pemutakhiran PK-24 tk. Kecamatan	18	Kecamatan	7,200,000	
	f	Pengumpulan dan Verifikasi Hasil Pemutakhiran PK-24	5	Desa	750,000	
	g	Operasional Supervisor	49	desa	12,250,000	
	h	Operasional Manajer	18	kecamatan sampel	18,000,000	
	i	Workshop Pemutakhiran PK-24 Tk. Kab/Kota	5	Kab/Kota	7,000,000	
	j	Workshop Pemutakhiran PK-24 bagi Kader	2,952	kader	367,344,000	
	k	Workshop PPK-24 bagi Supervisor	49	Desa	6,088,000	
	l	Workshop PPK-24 bagi Manajer	18	kecamatan sampel	3,600,000	
	m	Pemutakhiran PK-24 Kit	2,952	kader	324,720,000	
3331.QMA.002	Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting		1	layanan	503,650,000	
	3.1	Jumlah Sistem Data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting yang berkualitas				
	282	Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting	1	layanan	503,650,000	
	a	Register	438	Desa	51,300,000	
	b	Dukungan ATK Kecamatan	78	Kecamatan	15,600,000	
	c	Verifikasi Kecamatan	78	Kecamatan	11,700,000	

017972. Perwakilan BKKBN Provinsi : DI Yogyakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
		d	Pemutakhiran data Keluarga Resiko Stunting di desa/kelurahan			
			- Pengolahan Data di Tk. Kecamatan	78	Kecamatan	27,300,000
			- Pengumpulan Data Desa	438	Desa	262,800,000
		e	Workshop/orientasi verifikasi dan validasi			
			- Tk. Provinsi	5	Kab/Kota	11,000,000
			- Tk. Kabupaten/Kota	78	Kecamatan	23,400,000
		f	Verifikasi Provinsi	3	Kab/Kota	7,200,000
		g	Verifikasi Kabupaten/Kota	59	Kecamatan	8,850,000
		h	Diseminasi Kel Beresiko Stunting (Lintas Sektor)			
			- Tk. Provinsi	1	Provinsi	15,000,000
			- Tk. Kabupaten/Kota	1	Kab/Kota	15,000,000
		i	Rekonsiliasi Data SIGA-VERVAL tk. Prov	5	Kab/Kota	7,500,000
		j	Rekonsiliasi Data SIGA-VERVAL tk. Kab/Kota	5	Kab/Kota	6,000,000
		k	Monitoring SIGA - VERVAL	5	Kab/Kota	11,000,000
		l	Regional Data Dan Informasi - SIGA - VERVAL	1	Provinsi	24,000,000
		m	Pelaporan data Umpan Balik	1	Laporan	6,000,000
3331.QMA.003			verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi	-	layanan	-
	4.1		Jumlah Data keluarga sasaran konvergensi di 12 Provinsi			
		283	verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi	-	layanan	-
			Operasional Verivali di 12 Provinsi			
		a	Register	-	Desa/Kel	-
		b	Pemutakhiran data Keluarga Resiko Stunting di desa/kelurahan			
			- Pengolahan Data di Tk. Kecamatan	-	Kecamatan	-
			- Pengumpulan Data Desa	-	Desa/Kel	-
		d	Forum Data Stunting Tingkat Pusat	-	Provinsi	-
3331.QMB			Komunikasi publik			
3331.QMB.001			Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	3	Layanan / Provinsi	2,025,000,000
	5.1		Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan			
		284	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting	15	layanan	2,025,000,000
		a	Kampanye tingkat provinsi	3	kegiatan	-
			>> KIE Pencegahan Stunting Lini Atas			
			- Penayangan TV Lokal (PSA/Talkshow/Built In Segmen)			
			- Penayangan Radio Lokal (PSA/Talkshow/Adlibs/Airtime)			
			>> KIE Pencegahan Stunting Lini Tengah			
			- KIE melalui Media Online			
			- KIE melalui Media Sosial			
			>> KIE Pencegahan Stunting Lini Bawah			
			- Produksi Multimedia Pencegahan Stunting			
			- Momentum strategis / KIE Interpersonal kepada Kelompok/ Komunitas			
			- Media Luar Ruang (Billboard/Videotron)			
			- Public Figure / Influencer			
		b	Kampanye PPS melalui Kegiatan Momentum Bersama TNI/POLRI/Mitra Strategis lainnya	-		-
		c	Kampanye tingkat kab/kota	-	kegiatan	-
			>> KIE Pencegahan Stunting Lini Atas			
			- Penayangan TV Lokal (PSA/Talkshow/Built In Segmen)			
			- Penayangan Radio Lokal (PSA/Talkshow/Adlibs/Airtime)			
			>> KIE Pencegahan Stunting Lini Tengah			
			- KIE melalui Media Online			
			- KIE melalui Media Sosial			
			>> KIE Pencegahan Stunting Lini Bawah			
			- Produksi Multimedia Pencegahan Stunting			
			- Momentum strategis / KIE Interpersonal kepada Kelompok/ Komunitas			
			- Media Luar Ruang (Billboard/Videotron)			
			- Public Figure / Influencer			
		d	Promosi & KIE Program Percepatan Penurunan Stunting Di Wilayah Khusus	11	kegiatan	1,650,000,000
			- Promosi & KIE kepada masyarakat di wilayah khusus			
		e	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1	kegiatan	-
3331.PEA			Koordinasi			
3331.PEA.001			Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	6	Kegiatan	825,000,000
	6.1		Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota			
		285	Koordinasi SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	6	provinsi/ kab/kota	825,000,000
		a	SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi			
		b	SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Kab/kota			
3331.PEA.002			Penyelenggaraan koordinasi intensifikasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota pada 12 Provinsi Prioritas	-	kab/kota	-
	7.1		Jumlah koordinasi Intensifikasi SATGAS PPS pada 12 Provinsi prioritas			
		286	Intensifikasi SATGAS PPS pada 12 Provinsi prioritas			
		a	fasilitasi dan koordinasi satgas percepatan penurunan stunting kepada 12 provinsi prioritas stunting			
			- Forum Rapat Koordinasi Teknis			

017972. Perwakilan BKKBN Provinsi : DI Yogyakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN			TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
				Target	Satuan		
			- Fasilitasi Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting				
3331.UAE	Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan						
3331.UAE.001	Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTTPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota			1	Laporan	200,000,000	
	8.1	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTTPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota					
		287	Monitoring dan Evaluasi TPKTTPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	1	provinsi	200,000,000	
			a Monitoring dan evaluasi TPK				
			b Monitoring dan evaluasi TPPS				
			c Monitoring dan evaluasi SATGAS				
			d Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi				
Bidang LALITBANG Perwakilan BKKBN Provinsi						3,005,914,000	
3331.DCJ	Pelatihan Bidang Sosial						
3331.DCJ.001	SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab/Kota			85	Orang	165,860,000	
	1.1	Jumlah SDM Eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab/Kota					
		288	Pelatihan Teknis Program Bangga Kencana	85	Orang	165,860,000	
			a Pelatihan Teknis Bangga Kencana bagi PKB	25	Orang	-	
			b Pelatihan Teknis bagi P3K	60	Orang	-	
			c Penjaminan Mutu Diklat	1	kegiatan	-	
			d Orientasi Teknis bagi Toma Toga Toda dan Mitra Kerja				
			e Identifikasi Kebutuhan Diklat				
			f Pengembangan Materi dan Media Pembelajaran				
			g Penyusunan Tata Laksana Diklat				
			h Fasilitasi Visitasi Penilaian Akreditasi Balatbang				
			i Pembinaan SDM Provinsi				
			j Fasilitasi Evaluasi Pasca Diklat				
3331.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan						
3331.SCM.001	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting			20	orang	2,840,054,000	
	2.1	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting					
		290	Pelatihan pelayanan kontrasepsi dan orientasi TPK	20	orang	732,850,000	
			a Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		orang		
		401	Pelatihan/Orientasi Tim Pendamping Keluarga	5,556	orang	2,107,204,000	
			a Pelatihan/Orientasi Tim Pendamping Keluarga		orang		
3331.SCM.002	Pelatihan bagi tenaga pelaksana dalam percepatan penurunan stunting			-	Orang	-	
	3.1	Jumlah Pelatihan bagi tenaga pelaksana dalam percepatan penurunan stunting					
		291	Pelatihan bagi Tenaga Program	-	orang	-	
			a Pelatihan bagi tenaga pelaksana dalam percepatan penurunan stunting		orang		
068.WA	Program Dukungan Manajemen					49,910,750,000	
5297	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi					49,910,750,000	
Bidang Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi						49,754,313,000	
5297.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
5297.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1	Layanan	371,000,000	
	1.1	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yang dilaksanakan					
		293	Pengelolaan Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1	Kegiatan	54,000,000	
			a Fasilitasi Bantuan Hukum				
			b Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat				
		294	Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	Kegiatan	139,000,000	
			a Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I dan II (Tk Pusat dan provinsi)				
			b Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan anggaran thd pejabat perbendaharaan pengelola BMN dan petugas SAI Tk Prov dg Mitra Kerja Terkait				
			c Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)				
			d Monitoring dan Evaluasi DAK				
			e Pelaksanaan Sosialisasi DAK Regional				
			f Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMN				
			g Penatakelolaan barang persediaan dan pengelolaan gudang alkon serta Stock Opname alkon gudang provinsi				
			h Distribusi Alokasi ke Gudang Kab/Kota (distribusi dinamis dan buffer)				
			i Pengelolaan BMN berupa sarana kerja (Labelisasi BMN existing dan manajemen daftar barang ruangan)				
			j Pengelolaan BMN dalam kondisi Rusak Berat (manajemen penghapusan Barang Milik Negara)				
			k Penyusunan Dokumen RKBMN satuan Kerja				
			l Penyelenggaraan SPIP				
			m Pengendalian BMN dalam proses hukum dalam proses pembuatan dokumen kepemilikan (IMB Sertifikat tanah) serta dalam sengketa yang belum masuk ke ranah hukum				

017972. Perwakilan BKKBN Provinsi : DI Yogyakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN			TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
				Target	Satuan		
		n	Manajemen pengendalian atas BMN yang berpotensi Idle				
		o	Evaluasi pengelolaan BMN pengendalian atas data hasil Revaluasi BMN				
		p	tindak lanjut hasil inventarisasi BMN BKKBN				
	295		Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	1	Kegiatan	71,000,000	
		a	Pengadaan ASN di lingkungan BKKBN				
		b	Asesmen ASN				
		c	Orientasi CASN				
	296		Pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran	1	Kegiatan	107,000,000	
		a	Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tk Provinsi dan Kab/Kota (Korenda)				
		b	Fasilitasi sinkronisasi program dalam forum Rakortek/Musrenbangda Provinsi				
		c	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan DAK Sub Bidang KB - (termasuk fasilitasi melalui aplikasi Krisna DAK)				
		d	Penyusunan data basis perencanaan program dan anggaran Provinsi dan Kab/Kota				
		e	Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (e-KOREN I / KOREN II)				
		f	Forum sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran (koordinasi lintas Bidang dan lintas sektor - Prov dan Kab/Kota)				
		g	Rapat Koordinasi Teknis pembahasan usulan DAK subbidang KB Kab Kota				
		h	Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				
5297.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
5297.EBA.994	Layanan Perkantoran			1	Layanan	48,622,914,000	
	2.1	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan					
		001	Gaji dan Tunjangan perwakilan BKKBN Provinsi	1	Layanan	46,051,508,000	
		a	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				
		002	Operasional dan pemeliharaan kantor	1	Layanan	2,571,406,000	
		a	Langganan Daya dan Jasa (Listrik telp dan air PDAM) Kantor BKKBN Pusat Rumah Jabatan Gudang dan Mess				
		b	Layanan Jasa Sewa Mesin Fotocopy				
		c	Langganan Koran Majalah Air Minum dan TV Kabel				
		d	Pembayaran PBB/Pembuatan Sertifikat				
		e	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 4 dan 6				
		f	Honorarium Jasa Perorangan Kontraktual				
		g	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
		h	Pemeliharaan Kendaraan				
		i	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
		j	Honor Pengelola Anggaran Satuan Kerja				
		k	Dukungan layanan Persuratan dan Paket Kedinasan				
		l	Dukungan Layanan Kearsipan				
		m	Pembelian ATK				
		n	Layanan Jamuan Tamu dan Mitra kerja				
		o	Layanan Rapat Pengendalian Program tingkat provinsi				
		p	Dukungan layanan Keamanan Peningkatan Kinerja dan Daya Tahan Tubuh				
		q	Dukungan Layanan Keprotokolan dan pendampingan				
		r	Konsultasi dan Koordinasi teknis dengan mitra kerja				
		s	Sewa jasa internet (bandwidth)	-		417,228,000	
5297.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
5297.EBB.951	Layanan Sarana Internal Provinsi			1	unit	383,624,000	
	3.1	Jumlah sarana Internal yang diadakan					
		297	Pengadaan Sarana Fasilitas Perkantoran	1	unit	383,624,000	
		a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (kendaraan bermotor roda dua/empat)				
		b	Fasilitasi Pengadaan Sarana Kantor dan Rumah Jabatan				
		c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				
		d	Pengadaan Sarana dan Prasarana 8 Balai Diklat				
		e	Dukungan dan fasilitasi pengadaan Barang/jasa				
5297.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
5297.EBB.971	Layanan Prasarana Internal			-	unit	-	
	4.1	Jumlah prasana Internal yang diadakan/direnovasi					
		298	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	-	Unit	-	
		a	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan				
		b	Dukungan dan Fasilitas Kantor/Rumah Dinas/Diklat				
		c	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5297.PEA	Koordinasi						
5297.PEA.001	Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi			1	Kegiatan	245,525,000	
	5.1	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi					
		299	Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	1	Kegiatan	245,525,000	
		a	Forum Koordinasi Stunting TK Provinsi				
		b	Forum Koordinasi Stunting TK Kab/Kota				
		c	Operasional Sekretariat Stunting Tk Provinsi				
5297.QAH	Pelayanan Publik Lainnya						
5297.QAH.001	Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi			1	Layanan	131,250,000	

017972. Perwakilan BKKBN Provinsi : DI Yogyakarta

No	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
	6.1	Jumlah Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi				
		300 Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	1	Layanan	131,250,000	
		a Liputan Kegiatan Penanganan Stunting				
		b Media Publikasi:				
		Advetorial PSA/Banner/ Display Media Cetak				
		Advetorial PSA Media Online				
		c Forum Koordinasi Jurnalis				
5297.CAN	SARANA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
5297.CAN.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana TIK Provinsi		-	unit	-	
	7.1	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang diadakan				
		301 Pengadaan sarana dan prasarana TIK Provinsi	-	unit	-	
		a Pengadaan sarana dan prasarana TIK di Balai Diklat				
Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi					156,437,000	
5297.EBD	Layanan Audit Internal					
5297.EBD.965	Laporan Audit Internal		1	Laporan	85,000,000	
	1.1	Jumlah Laporan Pengawasan Internal				
		302 Pelaksanaan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi	1	Dokumen	85,000,000	
		a Evaluasi Pelaksanaan SPIP				
		b Evaluasi Penerapan ZI WBK dan PMPRB				
		c Penerapan SMAP ISO 37001:2016				
		d Fasilitasi Pengawasan Mitra Kerja				
		e TLHP Internal dan Eksternal				
5297.QIF	Pengawasan dan pengendalian layanan					
5297.QIF.001	Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi		1	Laporan	71,437,000	
	2.1	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting provinsi				
		303 Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Tk Provinsi	1	dokumen	71,437,000	
		a Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi dan Kab/Kota				

Catatan: Kegiatan yang mendukung ProPN, Percepatan Penurunan Stunting, dan kegiatan prioritas K/L (PBDKI) mengacu pada panduan/RAB dan berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon-II (UKE 2) Pengampu

Sekretaris Utama,

 Tavip Agus Rayanto

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Iqbal Apriansyah

Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wihaji

Jabatan : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 5 Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Wihaji



Mohamad Iqbal Apriansyah

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,82 rata-rata anak per wanita
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	58,20 %
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	15,20 %
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate:ASFR 15-19)	9,6 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	69,95 %
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23,50 Tahun
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	46256 Keluarga
		2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	316 PIK Remaja & 172 BKR
		3	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	143 Kelompok BKL
		4	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	959 Keluarga
		5	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	100%
		6	Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	100% Prov & 100% Kab/Kota
		7	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	80%
		8	Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 prov & 3 kab/kota
		9	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal dan informal)
		10	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	100% Prov & 50% Kab/Kota
		11	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	60%
		12	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	85,00 %
		13	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	78,35 (Skala 0-100)
		14	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	57,49 %
		15	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	22,30 %
		16	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	29,41 %
		17	Jumlah stakeholders/pemangku kepinglingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	24 Stakeholder/Mitra
		18	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	75 %
		19	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	90 %
		20	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5 Kab/Kota
		21	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	1	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	80 %
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12 Bulan
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 (skala 1-4)
10	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1	Indeks ZI WBK/WBBM	85 (Skala 1-100)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	13.109.216.000
2	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	51.532.464.000
TOTAL ANGGARAN		64.641.680.000

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/
Kepala BKKBN,

Yogyakarta, 5 Desember 2024
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Wihaji

Mohamad Iqbal Apriansyah

REVISI



LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	182.128.000	Reguler
		2	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2 Daerah (Prov/Kab/Kota)	211.617.000	Reguler
		3	Jumlah Faskes yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	473 faskes	172.962.000	Reguler
		4	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitas intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus	5 Kab/Kota	375.355.000	Tagging RPJMN/ProPN
		5	Jumlah Pemda yang mendapat fasilitas pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders) KIE dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta penyediaan data dan informasi dalam sistem informasi keluarga	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	114.951.000	Reguler
		6	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas pembinaan 1000 HPK	56.722 Keluarga	166.641.000	Tagging RPJMN/ProPN
		7	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	488 PIK Remaja dan BKR	454.828.000	Tagging RPJMN/ProPN
		8	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitas pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143 Kelompok BKL	218.107.000	Tagging RPJMN/ProPN
		9	Jumlah Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitas pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	10 Kelompok UPPKA	85.690.000	Tagging RPJMN/ProPN
		10	Jumlah Rumah data kependudukan papirna di kampung KB yang mendapat fasilitas pembinaan	79 Kampung KB	408.702.000	Tagging RPJMN/ProPN
		11	Kampung KB yang mendapat fasilitas Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana	5 Kab/Kota	199.850.000	Tagging RPJMN/ProPN
		12	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Atokan	473 faskes	3.579.109.000	Tagging RPJMN/ProPN
		13	Kampung KB yang mendapat fasilitas pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	5 Kab/Kota	64.642.000	Tagging Stunting
		14	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	1 Rekomendasi kebijakan	100.770.000	Tagging Stunting
		15	Jumlah faskes yang mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting	473 faskes	137.271.000	Tagging Stunting
		16	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	5 Kab/Kota	65.164.000	Tagging Stunting
		17	Jumlah Sistem Data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting yang berkualitas	1 Layanan	338.351.000	Tagging Stunting
		18	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	3 Layanan	1.631.924.000	Tagging Stunting
		19	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	6 Kegiatan	774.680.000	Tagging Stunting
		20	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	1 Layanan	167.941.000	Tagging Stunting
		21	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	1 Layanan	1.625.416.000	Tagging Prioritas K/L

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
2	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	1	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab.Kota	85 Orang	105.577.000	Reguler
		2	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	5576 Orang	1.907.940.000	Tagging Stunting
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi	1	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yang dilaksanakan	1 Layanan	185.536.000	Reguler
		2	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan	2 Layanan	50.696.647.000	Reguler
		4	Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi	1 Kegiatan	122.786.000	Tagging Stunting
		5	Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi	1 Layanan	65.638.000	Tagging Stunting
4	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	1 Dokumen	42.508.000	Reguler
		2	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting provinsi	1 Layanan	35.725.000	Tagging Stunting

Yogyakarta, 5 Desember 2024
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/
Kepala BKKBN,



Mohamad Iqbal Apriansyah

Wihaji

MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN (MKKA)

PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024				RKA K/L (POK) Tahun 2023										
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Output RKA K/L	Target Output	Anggaran (Rp)	Komponen	Anggaran (Rp)	Sub Komponen	Anggaran (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Menurunnya angka kelahiran total	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,82 rata-rata anak per wanita	Faskes yang mendapatkan intensifikasi pelayanan KB dalam Percepatan Penurunan Stunting dan Mendukung Penurunan AKI	473 Lembaga	16.321.000	Intensifikasi Pelayanan KB di Fasyankes	16.321.000	Fasilitasi Peningkatan Perluasan Akses Pelayanan KB di Fasyankes Tingkat Provinsi	16.321.000				
				Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	5 Kabupaten/Kota	15.899.000	Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	15.899.000	Penguatan Koordinasi Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan dalam rangka Penurunan Stunting	15.899.000				
				Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE serta penyediaan data dan informasi keluarga	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	44.580.000	Peningkatan Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Penggerakan Program Bangsa Kencana	28.790.000	Penilaian Penghargaan Bidang Bangsa Kencana bg Mitra Kerja dlm momentum daerah dan nasional	15.750.000				
									Fasilitasi Kunjungan Kerja Lembaga Eksekutif dan Legislatif Prov Kabkot ke Perwakilan BKKBN Provinsi	840.000				
									Fasilitasi naskah kerjasama di daerah	1.736.000				
									Dukungan Automatic Adjustment	10.464.000				
				Pengembangan Kebijakan dan Dukungan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	15.790.000	Pengembangan Desain Materi Promosi Kie Program Bangsa Kencana Berdasarkan Segmentasi Sasaran Dan Wilayah	10.051.000							
Dukungan Automatic Adjustment	5.739.000													
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	58,20%	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	473 Lembaga	3.579.109.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi faskes yang teregister (termasuk pembinaan, evaluasi dan ketersediaan alokon)	3.579.109.000	Pemenuhan/Pengadaan IUD	266.039.000				
				Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE , serta penyediaan data dan informasi keluarga	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	27.160.000	Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan dlm penggerakan Program Bangsa Kencana	17.374.000	Rapat koordinasi teknis kerjasama kemitraan tingkat daerah Provinsi	11.059.000				
									Dukungan Automatic Adjustment	6.315.000				
									Pembinaan Peningkatan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD)	9.786.000	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Penilaian Teladan Tenaga Lini Lapangan Program Banggakencana dan PPS	9.786.000		
											Pengelolaan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan KB di fasyankes	43.100.000	Sosialisasi Penguatan Kapasitas Pelayanan KB di Fakultas Kedokteran atau Akademi Kebidanan	26.806.000
													Forum Peningkatan Kualitas Pelayanan KB	16.294.000
													Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja di Wilayah Khusus	47.400.000
Dukungan Automatic Adjustment	36.060.000													
Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE , serta penyediaan data dan informasi keluarga	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	31.414.000	Pembinaan Penguatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional	31.414.000	Penguatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	9.787.000								
					Dukungan Automatic Adjustment	21.627.000								
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	15,20%	Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	473 Lembaga	90.500.000	Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja di Wilayah Khusus	47.400.000	Penguatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	9.787.000				
											Dukungan Automatic Adjustment	21.627.000		

Perjanjian Kinerja Tahun 2024				RKA K/L (POK) Tahun 2023											
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Output RKA K/L	Target Output	Anggaran (Rp)	Komponen	Anggaran (Rp)	Sub Komponen	Anggaran (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	10 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	488 kelompok	11.400.000	Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	11.400.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR	11.400.000					
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	69,95%	Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia	143 kelompok	163.860.000	Penguatan pelaksanaan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok BKL	163.860.000	Pembinaan Sekolah Lansia BKL	163.860.000					
				Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	19.200.000	Pengelolaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan)	19.200.000	Praktek Baik PPKS di Balai penyuluhan	19.200.000					
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23,50 Tahun	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	488 kelompok	19.145.000	Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	19.145.000	Workshop Parenting 1001 Cara Bicara Tingkat Provinsi	19.145.000					
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	46.256 Keluarga	Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	98.500.000	Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter	98.500.000	Koordinasi lintas sektor percepatan penurunan stunting di provinsi melalui sistem pemantauan tumbuh kembang anak (KMS dan KKA)	24.710.000					
									Fasilitasi pembinaan kelompok BKB HI (peningkatan persentase BKB ke BKB HI sebesar 25% dari baseline data)	15.200.000					
									Apresiasi Kelompok BKB Terbaik Tingkat Provinsi	20.090.000					
									Kelas Pengasuhan Kelompok BKB di tingkat desa	2.700.000					
									Dukungan Automatic Adjustment	35.800.000					
									Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	56.722 keluarga	238.149.000	Promosi dan KIE 1000 HPK	202.209.000	Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting untuk mitra kerja dan pemangku kebijakan daerah	26.682.000
				Peningkatan kapasitas pelaksana program percepatan penurunan stunting bagi kader BKB	32.939.000										
				Internalisasi Pengasuhan balita dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada masyarakat (KERABAT)	71.080.000										
				Dukungan Automatic Adjustment	71.508.000										
				Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE 1000HPK	15.728.000	15.728.000	Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE 1000HPK	15.728.000						Pendampingan Keluarga dengan Anak Bawah Dua Tahun (Baduta) melalui Aplikasi Elsimil di Tk Kab/Kota	9.656.000
														Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui SIGA dan SMART	6.072.000
				Peningkatan komitmen dengan pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting	20.212.000	20.212.000	Peningkatan komitmen dengan pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting	20.212.000	Promosi dan KIE Pengasuhan Balita Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting	20.212.000					
Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	316 PIK Remaja & 172 BKR	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	488 kelompok						619.455.000	Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	619.455.000	Workshop Tentang Kita Untuk Duta Genre Desa/Kelurahan	5.850.000		
				Workshop Upgrade "Tentang Kita" (Life Skill Dan Kekerasan Seksual) Bagi Pengelola PIK Remaja Tingkat Kab/Kota dan	3.900.000										
				Workshop Edukasi Pencegahan Anemia Bagi Fasilitator Sebaya (Selain 12 Provinsi Stunting)	42.107.000										
				APRESIASI BKR dan PIK R Percontohan Segmentasi Usia (Berani, Beraksi dan Berkolaborasi)	77.390.000										
				Apresiasi Duta Dan Jambore Ajang Kreatifitas Genre	255.290.000										
				Fasilitasi Forum Genre Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota	13.960.000										

Perjanjian Kinerja Tahun 2024				RKA K/L (POK) Tahun 2023						
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Output RKA K/L	Target Output	Anggaran (Rp)	Komponen	Anggaran (Rp)	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Rakortek KSPK Tk. Nasional	11.786.000
									Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi	14.000.000
									Dukungan Automatic Adjustment	195.172.000
		Jumlah kelompok BKL yang melaksanakan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia	143 Kelompok BKL	Kelompok BKL yang mendapat fasilitas dan pembinaan pelayanan ramah lansia	143 kelompok	147.840.000	Penguatan pelaksanaan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok BKL	147.840.000	Pengembangan dan Perbanyak Materi dan Media Kelanjutan	4.440.000
									Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh	24.897.000
									Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	24.910.000
									Dukungan Automatic Adjustment	93.593.000
		Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	942 Keluarga	Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	168.420.000	Pengelolaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitas PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan)	168.420.000	Pengelolaan PPKS Provinsi sebagai pusat Rujukan	29.578.000
									Penguatan PPKS di Balai Penyuluhan	68.150.000
									Fasilitas Program Bangga Kencana	2.500.000
									Dukungan Automatic Adjustment	68.192.000
		Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	100%	Kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapat fasilitas pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	10 kelompok	122.460.000	Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan Stunting di Kampung KB	122.460.000	Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	30.950.000
									Implementasi Kebijakan PEK	9.640.000
									Pemetaan Poktan UPPKA	26.635.000
									Monitoring Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	18.465.000
									Dukungan Automatic Adjustment	36.770.000
		Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	100% Prov & 100% Kab/Kota	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	73.500.000	Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter, proyeksi penduduk, serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	24.000.000	Pendampingan Pengolahan Data dan Analisis Pengembangan Kebijakan Dalam GDPK 5 Pilar	15.450.000
									Dukungan Automatic Adjustment	8.550.000
									Koordinasi pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	27.970.000
									Dukungan Automatic Adjustment	15.630.000
									Peningkatan kualitas bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah	21.530.000
									Dukungan Automatic Adjustment	14.450.000
		Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	80%	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	55.850.000	Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan	31.850.000	Sosialisasi Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan	31.850.000
									Penguatan Tata kelola Rumah Data Kependudukan	24.000.000
									Fasilitas Teknis Tata Kelola Rumah Data Kependudukan Berbasis Aplikasi	18.000.000
									Dukungan Automatic Adjustment	6.000.000
				Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB	79 Kelompok Masyarakat	537.689.000	Peningkatan kualitas Rumah Data kependudukan paripurna	537.689.000	Orientasi Pengelola Rumah Data Kependudukan	125.642.000
									Fasilitas Pengumpulan dan Updating Data di Rumah Data Kependudukan	283.060.000
									Dukungan Automatic Adjustment	128.987.000
		Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 prov & 3 kab/kota	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitas dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	30.000.000	Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif	30.000.000	Pengelolaan Forum Komunikasi Kelompok Kerja Bangga Kencana	13.950.000
									Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Bangga Kencana Yang Efektif	5.550.000
									Dukungan Automatic Adjustment	10.500.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2024				RKA K/L (POK) Tahun 2023						
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Output RKA K/L	Target Output	Anggaran (Rp)	Komponen	Anggaran (Rp)	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	45.000.000	Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan kab/kota (formal, non formal dan informal)	45.000.000	Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Sekolah Siaga Kependudukan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	16.235.000
									Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan di Tk Prov dan Kab/Kota	6.390.000
									Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Balai Diklat/ASN Peduli Kependudukan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.970.000
									Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pramuka Peduli Kependudukan di Tingkat Provinsi	4.475.000
									Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pendampingan Perguruan Tinggi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penurunan stunting	5.040.000
									Dukungan Automatic Adjustment	10.890.000
		Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	100% prov & 50% kab/kota	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	79.412.000	Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota	79.412.000	Penyusunan Laporan Kependudukan Provinsi	13.000.000
									Fasilitasi Pembinaan, Pelaporan, dan Evaluasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk untuk OPD Kab/Kota	28.062.000
									Pengembangan Model Tindak Lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	13.900.000
									Dukungan Automatic Adjustment	24.450.000
		Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	60%	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	49.000.000	Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan teknis Kampung KB	49.000.000	Penguatan Program Bangga Kencana di Kampung KB	10.100.000
									Penguatan Data Capaian Kampung KB	8.425.000
									Dukungan Automatic Adjustment	30.475.000
				Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	332.000.000	Fasilitasi Intensifikasi kegiatan Bangga Kencana di kampung KB	233.000.000	Konsolidasi Nasional Pengelolaan Kampung KB	39.720.000
									Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB	60.150.000
									Penguatan Kampung KB	55.650.000
									Dukungan Automatic Adjustment	77.480.000
				Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	125.100.000	Kegiatan Pemberdayaan percepatan penurunan stunting di kampung KB	125.100.000	Orientasi Pengelolaan Kampung KB	44.330.000
									Dukungan Automatic Adjustment	54.670.000
				Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting Provinsi	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000.000	Studi kasus dan pembelajaran (provinsi)	150.000.000	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting	84.042.000
									Dukungan Automatic Adjustment	41.058.000
									Implementasi model kebijakan hasil studi kasus stunting provinsi di Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan	100.770.000
									Dukungan Automatic Adjustment	49.230.000
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	85%	Faskes yang mendapatkan intensifikasi pelayanan KB dalam Percepatan Penurunan Stunting dan Mendukung Penurunan AKI	473 Lembaga	188.013.000	Intensifikasi Pelayanan KB di Fasyankes	188.013.000	Bimbingan Teknis Penguatan Pelayanan KB di Fasyankes	20.600.000
									Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Intensifikasi Pelayanan KB di Faskes	24.540.000
									Koordinasi PKBRS dan Klinik KB Tingkat Provinsi	75.810.000
									Dukungan AA	67.063.000
		Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	78 (Skala 0-100)	Faskes yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan KBKR yang sesuai dengan Standar Pelayanan	473 Lembaga	24.480.000	Penyediaan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi Tenaga Kesehatan KB	24.480.000	Apresiasi Peran Klinik Swasta dalam Peningkatan Pelayanan KB	15.520.000
									Dukungan Automatic Adjustment	8.960.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2024				RKA K/L (POK) Tahun 2023											
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Output RKA K/L	Target Output	Anggaran (Rp)	Komponen	Anggaran (Rp)	Sub Komponen	Anggaran (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	57%	Faskes yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan KBKR yang sesuai dengan Standar Pelayanan	473 Lembaga	61.400.000	Fasilitas Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria	23.400.000	Penyediaan Tim Vasektomi di tiap Kabupaten dan Kota melalui Refreshing Dokter Terlatih MOP	3.120.000					
									Peningkatan Peran Kelompok dan Motivator KB Pria melalui Pemberian Apresiasi	20.280.000					
									Bimbingan dan Fasilitas Ayoman Komplikasi dan Kegagalan KB MKJP serta koordinasi penggerakan KB MKJP di Kab/Kota	38.000.000					
									Koordinasi dan Evaluasi Penggerakan Pelayanan KB MKJP serta Ayoman Komplikasi	8.309.000					
				Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitas Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	536.425.000	Intensifikasi Pelayanan KBKR di wilayah khusus	536.425.000	Fasilitas intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus	375.355.000	Dukungan Automatic Adjustment	161.070.000			
													Fasilitas dan Pembinaan Penggerakan Pelayanan KB MKJP	18.504.000	
				Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	22%	Faskes yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan KBKR yang sesuai dengan Standar Pelayanan	430 Lembaga	47.670.000	Penurunan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) Melalui Promosi dan Koseling Kesehatan Reproduksi	47.670.000	Workshop Fasilitator Kesehatan Reproduksi Kelompok Resiko Tinggi	6.300.000		
														Penguatan Promosi Kesehatan Reproduksi Bagi Generasi Muda (AKUKAMU)	25.180.000
														Perbanyak Materi Alat Permainan Edukatif (APE) Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Resiko Tinggi	1.000.000
														Dukungan Automatic Adjustment	15.190.000
	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	29%	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	81.101.000	Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	81.101.000	Penguatan Pencatatan dan Pelaporan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pascapersalinan	34.815.000					
											Monitoring dan Evaluasi Intensifikasi Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pascapersalinan	14.450.000			
				Faskes yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	473 lembaga	47.670.000	Pembinaan kesertaan KB pascapersalinan di fasilitas kesehatan	47.670.000	Apresiasi Penguatan Pencapaian KB Pascapersalinan dalam Meningkatkan Kesertaan KB (ASIK KBPP)	6.093.000	Penyelarasan Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Reproduksi	8.366.000			
													Pembinaan Peningkatan Kesertaan KB Pascapersalinan	5.850.000	
													Dukungan AA	27.361.000	
													Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	24 Stakeholder/Mitra	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitas pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE , serta penyediaan data dan informasi keluarga
	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana						
										Dukungan Automatic Adjustment	5.664.000				
Fasilitas dan Penguatan Pokja Advokasi dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting										6.101.000					
Dukungan Automatic Adjustment										3.484.000					
Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana							
									Monitoring dan evaluasi sosialisai promosi KIE Program Bangga Kencana	1.490.000					
									Konsolidasi Program Bangga Kencana Tk. Nasional	7.925.000					
Dukungan Automatic Adjustment	5.375.000														

Perjanjian Kinerja Tahun 2024				RKA K/L (POK) Tahun 2023													
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Output RKA K/L	Target Output	Anggaran (Rp)	Komponen	Anggaran (Rp)	Sub Komponen	Anggaran (Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	Presentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana	Presentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana	75%	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dan Kab kota	3 layanan	2.025.000.000	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting	2.025.000.000	KAMPANYE TINGKAT PROVINSI	200.320.000							
										Kampanye PPS melalui kegiatan momentum bersama TNI POLRI dan Mitra Strategis Lainnya	34.315.000						
											Promosi dan KIE Program Percepatan Penurunan stunting di Wilayah Khusus	1.512.500.000					
											Monitoring Evaluasi dan pelaporan	17.289.000					
											Dukungan Automatic Adjustment	260.576.000					
								Penyelenggaraan Koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kab kota	6 kegiatan	825.000.000	Koordinasi SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	825.000.000	SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	774.680.000			
								Laporan Monitoring dan Evaluasi TPKTPPS SATGAS Percepatan Penurunan Stunting provinsi kab/kota	1 laporan	200.000.000	Monitoring dan Evaluasi TPKTPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	200.000.000	Dukungan Automatic Adjustment	50.320.000			
												Monitoring dan evaluasi TPK	45.040.000				
												Monitoring dan evaluasi TPPS	49.611.000				
												Monitoring dan evaluasi SATGAS	48.790.000				
									Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi	24.500.000							
									Dukungan Automatic Adjustment	32.059.000							
		Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	90%	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE , serta penyediaan data dan informasi keluarga	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	18.305.000	Pembinaan dan evaluasi Kinerja Penyuluh KB/PLKB serta Penguatan Kinerja IPeKB	18.305.000	Penyelenggaraan sertifikasi PKB dan PLKB	7.850.000							
	Penilaian Kinerja Penyuluh KB/PLKB								4.075.000								
	Fasilitasi Koordinasi dan Penguatan kinerja IPeKB dalam penurunan AKI DO UN dan stunting								6.380.000								
		Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	1 Layanan	3.733.437.000	Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan serta pemanfaatan basis data keluarga Indonesia	3.733.437.000	OPERASIONAL PENCATATAN DAN PELAPORAN PPK-24	2.520.529.000						
											MONITORING/PENGAMATAN PELAKSANAAN PPK-24	2.954.000					
												POSKO PEMUTAKIRAN PK-24 TK.KAB/KOTA	17.200.000				
												POSKO PEMUTAKIRAN PK-24 TK.KECAMATAN	7.200.000				
												PENGUMPULAN HASIL DAN VERIFIKASI PPK24	750.000				
											OPERASIONAL SUPERVISOR	12.250.000					
											OPERASIONAL MANAJER	18.000.000					
											WORKSHOP PEMUTAKHIRAN PK-24 TK KAB/KOTA	7.000.000					
											WORKSHOP PPK24 BAGI KADER	337.820.000					
											WORKSHOP PPK24 BAGI MANAJER	3.600.000					
								PPK24 KIT	67.750.000								
								Dukungan Automatic Adjustment	738.384.000								
				Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting	1 layanan	503.650.000	Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting	503.650.000	OPERASIONAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA	11.700.000							
									PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA RESIKO STUNTING DI DESA/KELURAHAN	290.100.000							
									MONITORING SIGA-VERVAL	12.551.000							
									REGIONAL DATA DAN INFORMASI SIGA-VERVAL	24.000.000							
									Dukungan Automatic Adjustment	165.299.000							
	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE , serta penyediaan data dan informasi keluarga	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	19.168.000	Peningkatan Kualitas layanan STIK dan pengelolaan PPID	19.168.000	Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung TIK	6.201.000								
Pengelolaan Perpustakaan								6.000.000									
Dukungan Automatic Adjustment								6.967.000									
8	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	80%	SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan progran bangga kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota	85 orang	165.860.000	Pelatihan teknis program bangga kencana	165.860.000	Pelatihan Teknis Bangga Kencana bagi PKB	33.255.000							
															Pelatihan Teknis bagi P3K	26.370.000	
																Penjaminan Mutu Diklat	8.347.000
																Fasilitasi Visitasi Penilaian Akreditasi Balatbang	16.325.000
																Pembinaan SDM Provinsi	10.000.000
																Monitoring/ Evaluasi Kediklatan	11.280.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2024				RKA K/L (POK) Tahun 2023						
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Output RKA K/L	Target Output	Anggaran (Rp)	Komponen	Anggaran (Rp)	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Dukungan Automatic Adjustment	60.283.000
				Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	5576 orang	2.840.054.000	Pelatihan pelayanan kontrasepsi dan orientasi TPK	499.930.000	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	499.930.000
							Pelatihan/Orientasi Tim Pendamping Keluarga	2.340.124.000	Pelatihan/Orientasi Tim Pendamping Keluarga	1.408.010.000
									Dukungan Automatic Adjustment	932.114.000
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12 Bulan	Layanan organisasi dan tata kelola internal	1 layanan	317.000.000	Pengelolaan keuangan dan BMN	139.000.000	Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I dan II (Tk. Pusat dan provinsi)	44.800.000
									PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENELOLA KEUANGAN DAN BMN TK	5.720.000
									AKSELERASI PERCEPATAN PELAPORAN DAN MONITORING DAK, SERTA SOSIALISASI DAK REGIONAL	800.000
									Penatakelolaan Barang Persediaan dan Pengelolaan Gudang Alokon serta Stock Opname	1.144.000
									Distribusi Alokon ke Gudang Kabupaten dan Kota (Distribusi Dinamis dan Buffer)	14.800.000
									Pengelolaan BMN	2.250.000
									Dukungan Automatic Adjustment	69.486.000
							Pengelolaan manajemen kepegawaian	71.000.000	Pengadaan ASN di lingkungan BKKBN	20.487.000
									Assesment ASN	800.000
									Dukungan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	10.080.000
									Fasilitasi Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	4.140.000
									Dukungan Automatic Adjustment	35.493.000
							Pengelolaan perencanaan program dan anggaran	107.000.000	Konsolidasi Perencanaan program Banggakencana Pusat dan Provinsi	45.750.000
									Forum Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koordinasi Lintas Sektor Prov/Kab Kota)	5.040.000
									Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2.720.000
									Dukungan Automatic Adjustment	53.490.000
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	50.118.839.000	Gaji dan tunjangan	47.547.433.000	Pembayaran gaji dan tunjangan	38.625.618.000
									BELANJA PEGAWAI PPPK	8.921.815.000
							Operasional dan pemeliharaan kantor	2.571.406.000	Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telp, PDAM)	327.600.000
									Pembayaran PBB	2.500.000
									Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	23.000.000
									Honorarium Jasa Perorangan Kontraktual/ Outsourcing	730.815.000
									Pemeliharaan gedung dan halaman kantor	280.000.000
									Pemeliharaan kendaraan Dinas	110.000.000
									Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	84.400.000
									Honor Pengelola Satker	117.528.000
									Dukungan Persuratan dan Paket Kedinasan	6.300.000
									Dukungan Layanan Kearsipan	3.600.000
									Keperluan Pokok Perkantoran	92.000.000
									Pembelian ATK	80.500.000
									Layanan Tamu dan Mitra Kerja	88.800.000
									Layanan Radalgram Tingkat Provinsi	42.764.000
									Dukungan Layanan Keamanan, Peningkatan Kinerja dan Daya	46.200.000
									Dukungan Layanan Keprotokol dan Pendampingan	42.700.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2024				RKA K/L (POK) Tahun 2023						
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Output RKA K/L	Target Output	Anggaran (Rp)	Komponen	Anggaran (Rp)	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Layanan sarana internal provinsi	1 unit	383.624.000	pengadaan sarana fasilitas perkantoran	383.624.000	Konsultasi dan Koordinasi Program Banggakencana	75.471.000
									Sewa Jasa Internet (Bandwidth)	417.228.000
									Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kendaraan bermotor roda dua/empat)	324.444.000
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	59.180.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 (Skala 1-4)	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	54.000.000	Pengelolaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	54.000.000	Fasilitasi bantuan hukum	11.365.000
									Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	13.870.000
									Pelaksanaan Pelayanan Publik	1.770.000
									Dukungan Automatic Adjustment	26.995.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	1 Kegiatan	245.525.000	Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	245.525.000	Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi	122.786.000
									Dukungan Automatic Adjustmen	122.739.000
				Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	1 layanan	131.250.000	Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	131.250.000	Liputan Kegiatan Penanganan Stunting	15.300.000
									Media Publikasi (Iklan Layanan Masyarakat)	40.000.000
									Forum Koordinasi Jurnalis	10.338.000
									Dukungan Automatic Adjustment	65.612.000
10	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	Indeks ZI WBK/WBBM	85 (Skala 1-100)	Layanan Audit Internal	1 dokumen	85.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi	85.000.000	Penerapan SMAP ISO 37001:2016	29.048.000
									Fasilitasi Pengawasan Mitra Kerja	11.060.000
									TLHP Internal dan Eksternal	2.400.000
									Dukungan Automatic Adjustment	42.492.000
				Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	1 Layanan	71.437.000	Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	71.437.000	Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi dan Kab/Kota	35.725.000
									Dukungan Automatic Adjustment	35.712.000
TOTAL ANGGARAN										69.654.830.000

Yogyakarta, Januari 2024

Soala Perwakilan BKKBN DIY



Andi Ritamariani

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
- Kolom (4) diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
- Kolom (5) diisi dengan output RKAKL;
- Kolom (6) diisi dengan target output pada RKAKL;
- Kolom (7) diisi dengan total anggaran per target output pada RKAKL;
- Kolom (8) diisi dengan komponen pada RKAKL;
- Kolom (9) diisi dengan total anggaran per komponen sesuai dengan target output pada RKAKL;
- Kolom (10) diisi dengan sub komponen pada RKAKL yang selaras dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja;
- Kolom (11) diisi dengan anggaran masing-masing sub komponen pada RKAKL.

**IMPLEMENTASI CORE VALUE BUDAYA KERJA BERAKHLAK
PERWAKILAN BKKBN DAREERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

BUDAYA KERJA BER	PENJABARAN	NILAI-NILAI	IMPLEMENTASI
Berorientasi Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan Melakukan perbaikan tiada henti 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan KB pada PUS Menetapkan Standar Pelayanan untuk 4 Jenis Pelayanan (Memenuhan Kebutuhan Alkon di faskes, Meksime KIE/Advokasi program Bangkacencana, Penyiapan PUP, SPBE dengan implementasi aplikasi E-Office) Penyediaan Saluran Konsultasi, Konseling dan Pengaduan Pelayanan baik secara langsung maupun melalui nomor aduan Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dan menindaklanjuti hasil survei untuk perbaikan Penandatanganan Pakta Integritas untuk ASN Melaksanakan Tugas sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan Pengelolaan dan Pelaporan penggunaan BMN melalui aplikasi SAKTI
A	Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat serta disiplin, dan berintegritas tinggi Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	

K	<p>Kompeten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Aestmen Kepegawaian dan Talent Pool secara berkelanjutan • Penyediaan media pembelajaran yang mudah diakses masyarakat melalui Portal Bimasakti, dan Aplikasi LMS SINTA • Penyediaan video pembelajaran yang dapat diakses di kanal Youtube • Memperoleh Reward atas Kinerja (ASN Teladan dan PKB Terbaik) • Pembinaan Pegawai dan Kegiatan Keagamaan bersama • Aktifitas Olahraga Hiburan dan Jumat Sharing sebagai wahana membangun lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan wawasan pegawai
H	<p>Harmonis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> • Apel pagi dilakukan secara rutin setiap hari kerja • Pembacaan Pancasila, UUD 1945 dan Janji Korps Pegawai Negeri Sipil di setiap kegiatan Upacara • Mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB.
L	<p>Loyal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang Sah • Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara serta menjaga rahasia jabatan dan negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Penderhanaan jabatan struktural ke jabatan fungsional • Inovasi Program menyesuaikan kearifan lokal masyarakat DIY antara lain: Sekolah Lansia, Penghargaan KBPP melalui Tokoh Ngarso Dalem, dan Geber Tanggul Banting Kalung.
A	<p>Adaptif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi mengembangkan kreatifitas • Bertindak proaktif 	

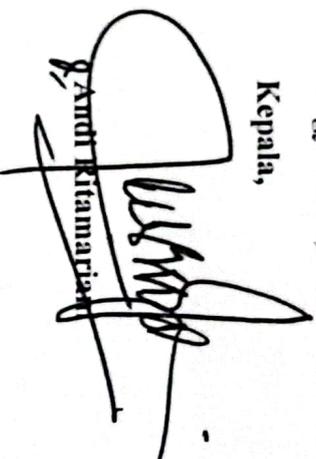
K

Kolaboratif

- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
- MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Kerja
- Berkolaborasi dengan unit kerja lainnya dalam Percepatan Penurunan Stunting melalui Program BAAS
- Bersama tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program Banggakanencana dan Percepatan Penurunan Stunting

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Kepala,


Rizki Khamariyah



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOTULEN RAPAT

Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Senin / 19 Februari 2024	Notulis/ Disiapkan oleh	
Waktu	08.30 – 12.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan		Disetujui oleh	
Narasumber	1. Rohdhiana Sumariati, S.Sos, M.Sc 2. Zainal Arifin, S.Sos, M.Si		
Tempat	DPMKP2KB kab GK		
Peserta	1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajaranya 2. Ketua DPD IPeKB DIY 3. Ketu DPC IPeKB Kab. Gunungkidul 4. Ketua Tim Kerja 5. Satgas PPS		

A. SAMBUTAN KEPALA DINAS PMKP2KB Kabupaten Gunungkidul

- Pelaksanaan program Bangga Kencana dan PPS di Kab GK 2023 telah selesai dan pada prinsipnya berjalan baik tidak ada kendala yang luar biasa dan capaiannya sedang-sedang saja, mohon pengarahannya di titik mana di 2024 dapat mengoptimalkan program
- Masukan untuk pemerintah pusat, dalam rangka optimalisasi dan percepatan Banggakencana dan PPS tidak lepas dari ketersediaan sumber daya yang ada. Anggaran DAK sekitar 6 M di tingkat legislative dan pimpinan yang 6 M seluruhnya untuk PPS → dijelaskan 6 M untuk banggakencana dan PPS. Rekening SPPD (transport kader di BP). Bangga kencana sudah dapat mengcover kegiatan di lapangan tapi untuk PPS baru berproses pada kelembagaan prosedur dan administrasi tetapi eksekusi, intervensinya belum ada
- Surat edaran sekda, seluruh OPD harus berperan dalam stunting, ramah terhadap program stunting. eksekusinya Sasaran belum tentu keluarga resiko stunting.
- Anggaran DAK kesehatan ada yang digunakan untuk PPS intervensi pemenuhan gizi balita, bumil dll terbentur pada prosedur juknis yang terlalu rumit, baru dimulai September.
- Radalgram menjadi bagian penting arus balik komunikasi untuk memproses regulasi agar pelaksanaan tidak terlambat
- Dari segi sarpras, 18 Gedung BP dari DAK. Pemeliharaan sudah diberikan di 11 BP. Namun mulai 2023 pemeliharaan tidak ada. Harapannya tercover di DAK.
- Kendaraan dinas sudah cukup bahkan sisa karena P3K mutase provinsi asal.
- Kelancaran jaringan internet di masing-masing Balai, agar pelaporan SIGA tidak terkendala. Siapkan data manual

- Prosedur kerja yg bangga kencana sudah lancer kecuali perubahan lokasi/cakupan kampung KB. Dulu bisa memilih 1 pedukuhan yang digarap secara maksimal, dengan diperluas menjadi 1 kelurahan menjadi sulit. Mohon kebijakan bisa dipikirkan, meskipun cakupan kelurahan ada titik focus di padukuhan. Garapan terllau luas, sulit diperoleh output dan outcame yang berkualitas.
- Sasaran AKS apakah akan penuh semua, atau ada yang tidak penuh.
- Apabila ada PPPK yang menempatkan dari Prov saja.
- Tahun ini jumlah PKB 39 menurut Analisa kebutuhan mestinya kalau 1:2 ada 72. Purna tahun ini 4
- Agar program banggakencana dapat dicapai maksimal sumber-sumber manajemen harus dipenuhi.
- Harapan PPPK bisa dari pramusaji. Saat ini ada 18 pramusaji.
- Harapanya agar tahun 2024 dapat berjalan baik

B. ARAHAN KAPER

- Dalam perencanaan tentu sudah ada strategi untuk mencapai program.
- Radalgram ini berharap tidak sekedar ceremonial tetapi ada komitmen yang dihasilkan dalam rangka menyusun strategi pencapaian target, bagaimana pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat yang paling penting.
- Radalgram selain masukan kepala dinas , akan mengupas sepertri apa pelaks program bangga kencana tahun 2024. Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan program tahun 2024.
- Sudah dilaksanakan sosialisasi tim kerja. Dengan tim kerja silahkan melakukan koordinasi dengan ketua tim kerja.
- Dengan anggaran, tenaga yang minim strateginya kerucutkan pada sassran yang menjadi prioritas. Kab/Kota yang menentukan yang menjadi prioritas.
- Terkait dengan Verval, kenapa tidak semua agar terupdate terus dengan alasan keterbatasan anggaran. Kalau tidak terakomodir lihat di Pemutakhiran PK
- Lakukan pendampingan dengan TPK
- Revisi maret, sesuaikan kegiatan. Minimalkan sisa.
- AJK dan RPD untuk DAK agar kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.
- BKKBN peningkatan SDM TPK, Ops Yan KB, bukan intervensi langsung seperti PMT.
- Renovasi BP, didukung APBD.
- Seluruh target ujungnya dilombakan. Berharap seluruh kab untuk mengangkat percontohan. Yang akan menjadi focus jika di Tk. Nasional ada lomba.
- 16,4 stunting dari 100 yang melahirkan
- Apa yang menjadi komitmen kita di pertemuan ini untuk disampaikan kepada Kadis untuk di TL di bulan berikutnya untuk menyusun strategi dalam pencapaian program.

C. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Capaian Program Bangga Kencana

Data capaian program per 31 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100% (638 dari target 638)
 - BKB: 100% (1466 dari target 1466)
 - BKR: 100 % (633 dari target 633)
 - BKL: 100 % (785 dari target 785)
 - UPPKA: 100 % (1538 dari target 1538)
 - PIK-R: 100 % (400 dari target 400)
 - Setara POKTAN : Kampung KB 438, RUMAH DATAKU 332, PPKS 65 . Seluruh K0 setara poktan sudah di *update*.

- Cakupan Pelaporan Faskes KB: 97,08 % □ KP 100 %, Bantul 98,82 % GK 95,24 % dan Kota Sleman 95,96% dan Kota Yogyakarta 96,36 %
- Cakupan Laporan Tempat Pelayanan KB:
 - KP: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 100 %
 - Bantul: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 98,04 %
 - Gunungkidul: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 96,05 %
 - Sleman: Yan KB pemerintah 97,05%, Yan KB swasta 94,32 %
 - Kota YK: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 95,35%
- Total pelayanan KB s.d Januari 2024 sejumlah 22.472 akseptor, dengan rincian: 2.326 peserta KB Baru, 19.684 peserta KB ulangan dan 462 peserta KB ganti cara.
- Capaian peserta KB baru s.d Januari 2024 sejumlah 2.326 akseptor atau 5,94 % dari KKP sebesar 39.168 akseptor, sedangkan peserta KB baru MKJP sebesar 1.061 akseptor atau 5,66% dari target KKP 18.754 akseptor. Adapun distribusi per mix kontrasepsinya adalah sebagai berikut :
 1. Suntikan 5,08% (Semua Kab kategori kurang kecuali Kota YK kategori baik)
 2. Pil 12,99% (KP, Sleman dan Kota YK kategori sangat baik, Bantul dan GK kategori kurang)
 3. Kondom 6,56% (kota YK kategori sangat baik, KP dan Sleman kategori baik, Gunungkidul dan Bantul kategori kurang)
 4. Implant 4,68% (Seluruh Kab kategori kurang, kecuali Kota YK kategori sangat baik)
 5. IUD 5,83% (Kota Yk kategori sangat baik, KP cukup, Sleman Bantul dan GK kategori kurang)
 6. MOP 0,80% (Semua Kabupaten/Kota kategori kurang)
 7. MOW 7,39% (Kota YK dan KP kategori sangat baik, Sleman dan Bantul kategori baik, GK kategori kurang)
- Capaian peserta KB aktif per mix kontrasepsi sebesar 345.153 akseptor (114,80%) dari KKP sebesar 307.321 akseptor.
 1. Suntikan 227,88% (Semua Kab kategori sangat baik)
 2. Pil 101,01% (Sleman, Kota Yk dan GK kategori sangat baik, Bantul dan KP kategori baik,)
 3. Kondom 51,99% (Semua Kab /Kota kategori kurang)
 4. Implant 145,30% (Semua Kab/Kota kategori sangat baik)
 5. IUD 106,33% (Sleman, Kota Yk dan Bantul kategori Sangat Baik, GK daan KP kategori baik)
 6. MOP 55,06% (Semua kab/kota pada kategori kurang)
 7. MOW 64,55 % (Semua kab kategori kurang kecuali Kota Yk kategori cukup)
 8. MAL 53,23 % (semua kab/kota kategori kurang)
- Target mCPR DIY 2023 sebesar 58,20% dan target telah tercapai sebesar 66,03%
- Target unmet need DIY sebesar 15,20% sudah mencapai 14,47% atau 76.527 dari target 528.771 PUS
- Cakupan pelaporan BKB 99,11 %, BKR 98,43 %, BKL 96,96 %, UPPKA 96,75 %, PIK R 98,50 %, PPKS 98,46 % dan BP 100%.

7QUICK WINS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DIY

1. Data SSGI tahun 2022
 - DIY 16,40 %
 - KP 15,80 %
 - Bantul 14,90 %
 - Gunungkidul 23,50 %
 - Sleman 15 %

Kota Yk 13,80 %

2. PENDAMPINGAN TPK MELALUI ELSIMIL Capaian Elsimil DIY Bulan Januari

Catin : 262

(Tertinggi di Kab. Kulon Progo : 97)

Bumil : 757

(Tertinggi di Kab. Kulon Progo : 514)

Ibu Pasca Persalinan : 142

(Tertinggi di Kab. Kulon Progo : 91)

Baduta : 2381

(Tertinggi di Kab. Sleman : 1135)

3. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

4. AUDIT KASUS STUNTING

Bulan Januari Proses AKS di kab / Kota adalah :

Pembentukan SK Tim AKS

Koordinasi Teknis berkaitan Lokus Audit Kasus Stunting

5. MINI LOKAKARYA

Kabupaten yang sudah melaksanakan Minlok di Bulan Januari : Kab. Kulon Progo

6. KONVERGENSI

tahapan

Penyelesaian Pelaporan Narasi TPPS Semester 2, upload di Web Bangda Kemendagri

Rapat Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Pengisian Master Ansit Di Web Aksi Bangda

Kemendagri

7. Data BAPAK ASUH ANAK STUNTING: 45 BAAS di DIY

Hasil Pemutakhiran PK 23

- M CPR tercapai 58,2 dari target 56,01
- PA MKJP : 42,3 dari target 46,7
- Unmet Need: 14,2 dari target 19,55
- Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi: 23,1
- mUKP: 23,5 dari target 23,0
- iBangga: 64,12 dari target 67,66
- Persentase masyarakat/keluarga yang terpapar program Bangga Kencana: 79, 49 dari target70
- TFR: 1,81 dari target 1,89
- ASTF 6,7 dari target 13

ANGGARAN DAK

Sumber data yang digunakan dari Morena yang diakses tanggal 17 Februari 2024.

- Anggaran DAK Fisik terealisasi 0% rata-rata nasional 0%.
- Anggaran DAK BOKB secara keseluruhan terealisasi sebesar 0,38% dari anggaran 31.305.702.000 diatas rata-rata nasional 0,01%.
- Realisasi per menu BOKB : balai penyuluhan KB (0,99%), pelayanan KB (0,19%), penggerakan di kampung KB (2,35 %), Penurunan Stunting (0,01%), pembinaan program bangga kencana oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (0,25%)

KETERSEDIAAN ALKON

Sumber data yang digunakan dari aplikasi New SIGA dan aplikasi SIRIKA

- Tingkat ketersediaan alokon sampai dengan Januari 2024 antara lain :

- IUD :12,97 bulan
- Pil Kombinasi :11,12 bulan
- Mini Pil / Pil Progestin : 6,38 bulan
- Suntik Progestin : 9,38 bulan
- Implant 2 batang : 12,30 bulan
- Kondom : 13,15 bulan

D. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

PKB GK

Terkait PPPK yang kembali ke provinsi asal da pernyataan kalua tidak di DIY tidak bisa di terima. Mohon penjelasan

Kaper DIY

- Formasi PPPK DIY belum terisi penuh sementara tidak ada cadangan yang mendaftar di DIY sehingga kekurangan formasi diambilkan dari cadangan provinsi lain. Dengan adanya Surat Menpan diperbolehkan mutase ke provinsi lain.
- Inovasi dari pak Kukuh GK sangat bagus.untuk menampilkan data SIGA

E. DOKUMENTASI



Zoom Meeting

septiana-DIY bkkbn Sri Wahyuningsih

septiana-DIY Sekretariat Perwakilan... Sri Wahyuningsih Febi_BKKBNDIY

Participants (33)

Find a participant

- septiana-DIY (Me)
- DPMKP2KB Gunungkidul (Host)
- Anggoro Irwan Susanto
- arief bagas
- Asteria Heny _ KPM DIY
- Balai KB
- Balai KB Kapanewon Imogiri
- bantunurwendah
- Bantul_Titik Supriyati
- BKKBN DIY
- BKKBN DIY_Diah
- BKKBN DIY_Rachma
- BKKBN DIY-Timja Akses Kualita...

Invite Unmute Me

Slide 41 of 76 English (Indonesia) Notes Comments

Type here to search

24°C Berawan 8:51 19/02/2024

Zoom Meeting

septiana-DIY BPKB Panggang BKKBN DIY_Diah

Febi_BKKBNDIY septiana-DIY DPMKP2KB Gunungkidul BPKB Panggang BKKBN DIY_Diah

Bantul_Titik Supriyati DIY-Ema-Nur-A... BPKB KOKAP Sekretariat Perwakilan B... Rizky Dian

Asteria Heny _ K... Timja Hukum, K... bkkbnDIY_Yuni H BKKBN DIY-Tim... iin_DIY

DIY_Sofia Nur Y... BKKBN DIY arief bagas septiana Balai KB nanggu...

bantul_nurwend... Dee She Sri Wahyuningsih Balai Penyuluha... Balai KB

Unmute Start Video Participants 33 Share Screen Reactions Apps Whiteboards Notes More Leave

Participants (33)

Find a participant

- septiana-DIY (Me)
- DPMKP2KB Gunungkidul (Host)
- Anggoro Irwan Susanto
- arief bagas
- Asteria Heny _ KPM DIY
- Balai KB
- Balai KB Kapanewon Imogiri
- bantunurwendah
- Bantul_Titik Supriyati
- BKKBN DIY
- BKKBN DIY_Diah
- BKKBN DIY_Rachma
- BKKBN DIY-Timja Akses Kualita...

Invite Unmute Me

Slide 41 of 76 English (Indonesia) Notes Comments

Type here to search

24°C Berawan 8:52 19/02/2024

Zoom Meeting

Sign in View

Participants (33)

Q Find a participant

- septiana-DIY (Me)
- DPMKP2KB Gunungkidul (Host)
- Anggoro Irwan Susanto
- arief bagas
- Asteria Heny _ KPM DIY
- Balai KB
- Balai KB Kapanewon Imogiri
- bantul_nurwendah
- Bantul_Titik Supriyati
- BKKBN DIY
- BKKBN DIY_Diah
- BKKBN DIY_Rachma
- BKKBN DIY-Timja Akses Kualita...

Unmute Start Video Participants 33 Share Screen Reactions Apps Whiteboards Notes More Leave

Slide 41 of 76 English (Indonesia)

Type here to search

29°C Cerah 8:52 19/02/2024

Zoom Meeting

View

Participants (48)

Q Find a participant

- septiana-DIY (Me)
- DPMKP2KB Gunungkidul (Host)
- Andi Budi_DIY
- Anggoro Irwan Susanto
- Ardini_Sleman
- Asih Suryanti
- Asteria Heny _ KPM DIY
- Balai KB
- Balai KB Kapanewon Imogiri
- Balai Penyul. KB ngaglik
- bantul_nurwendah
- Bantul_Titik Supriyati
- Beatriks Christma

Unmute Start Video Participants 48 Share Screen Reactions Apps Whiteboards Notes More Leave

Type here to search

29°C 9:13 19/02/2024

Zoom Meeting

septiana-DIY

PowerPoint Presentation - Adobe Reader

TARGET TAHUN 2024

No	Indikator	Target	Capaian Januari
1	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan	1 Prov (100%) 5 Kab/Kota (100%)	
2	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	80%	
3	Jumlah Kelompok Kerja Bangsa Kencana Provinsi dan Kab/Kota Yang Efektif	1 Prov dan 3 Kab/Kota	
4	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal, informal)	
5	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 (100%) Prov dan 3 (50%) Kab/Kota	
6	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	60%	77,62%

Participants (57)

Find a participant

- septiana-DIY (Me)
- DPMKP2KB Gunungkidul
- Andi Budi_DIY
- Anggoro Irwan Susanto
- Ardini_Sleman

Meeting Chat

Suaranya bikin pusing.

DP3AP2KB KOTA YK to Everyone 10:23

Maaf, Suaranya tidak terdengar jelas

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Slide 17 of 76 | English (Indonesia) | 29°C | 10:47 19/02/2024

Recording

Capaian pendampingan sasaran di Elsimil bulan Januari 2024

Kategori Sasaran	BANTUL	GUNUNGKIDUL	KOTA YOGYAKARTA	SLEMAN	D.I. YOGYAKARTA
Catin	43	64	35	97	262
Bumil	70	29	84	60	514
Ibu Pascapersalinan	8	5	20	91	142
Baduta	360	191	118	577	2.381

Sumber: Elsimil. Data ditarik per 16 Februari 2024

Capaian Elsimil DIY Bulan Januari :

- Catin : 262
(Tertinggi di Kab. Kulon Progo : 97)
- Bumil : 757
(Tertinggi di Kab. Kulon Progo : 514)
- Ibu Pasca Persalinan : 142
(Tertinggi di Kab. Kulon Progo : 91)
- Baduta : 2381
(Tertinggi di Kab. Sleman : 1135)

septiana-DIY

Asteria Heny - KPM DIY

Sekretariat Perwakilan BKKBN



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOTULEN RAPAT

Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Selasa / 19 Maret 2024	Notulis/ Disiapkan oleh	Septiana Rakhmawati, S.Far., Apt <i>Septiana</i>
Waktu	08.30 – 12.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan		Disetujui oleh	
Narasumber	1. Zuhdi Astuti, SKM, M.Psi 2. Zainal Arifin, S.Sos, M.Si		
Tempat	Ruang Widya I dan ZOOM (hybrid)		
Peserta	1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajaranya 2. Ketua DPD IPeKB DIY 3. Ketu DPC IPeKB Kab/Kota 4. Ketua Tim Kerja 5. Satgas PPS		

A. ARAHAN KAPER

- Radalgram sebagai evaluasi capaian program s.d february 2024
- Radalgram untuk mengevaluasi langkah dalam capaian program. Eksekusi kegiatan operasional berada di Kabupaten sehingga radalgram ini merupakan hasil kegiatan selama february, kita lihat progress dari program kita
- Radalgram Menjadi komitmen untuk dilakukan setiap bulan. Apakah capain program seperti yang direncanakan. Tentunya di pertemuan ini akan disusun strategi agar capaian program yang akan dilaksanakan 1 tahun akan terlihat progresnya.
- Adabeberapa program yang masih kurang, ada yang di januari bagus, di february kurang bagus.
- Lihat per item untuk menyusun strategi
- Radalgram selain untuk evaluasi,menyusun strategi tentu di dukung oleh kegiatan di DIPA kita.
- AJK disusun dalam rangka mendukung capaian program. Cek kembali sesuaikan dengan kondisi setelah AA. AJK merupakan rencana Penarikan dana yang tidak lepas dari pencapaian program. Dalam capaian program ujungnya layanan dapat diberikan kepada masyarakat.
- Terimakasih dukungan OPD KB, capaian program kita mulai berubah lebih baik.
- Setiap tanggal 13 mulai ditarik data . 14-15 kesempatan untuk melengkapi. Tanggal 8 mulai cek data, kab/kota diharapkan sudah entri data
- Masukan diperlukan untuk memperbaiki kinerja

B. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Capaian Program Bangga Kencana

Data capaian program per Februari 2024 yang diakses tanggal 15 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

- Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100% (638 dari target 638)
 - BKB: 100% (1469 dari target 1469)
 - BKR: 100 % (636 dari target 636)
 - BKL: 100 % (785 dari target 785)
 - UPPKA: 100 % (1524 dari target 1524)
 - PIK-R: 100 % (403 dari target 403)
 - Setara POKTAN : Kampung KB 438, RUMAH DATAKU 333, PPKS 66 . Seluruh K0 setara poktan sudah di *update*.

- Cakupan Pelaporan Faskes KB: 95,92 %: KP dan Kota Yogyakarta 100 %, Bantul 96,47 % GK 92,06 % dan , Sleman 93,94 %
- Cakupan Laporan Tempat Pelayanan KB:
 - KP dan Kota Yogyakarta: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 100 %
 - Bantul: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 94,23 %
 - Gunungkidul: Yan KB pemerintah 93,94%, Yan KB swasta 90,00 %
 - Sleman: Yan KB pemerintah 97,06%, Yan KB swasta 92,31 %

- Total pelayanan KB s.d Februari 2024 sejumlah 40.888 akseptor, dengan rincian: 4.413 peserta KB Baru, 35.515 peserta KB ulangan dan 960 peserta KB ganti cara.
- Capaian peserta KB baru s.d Februari 2024 sejumlah 4.413 akseptor atau 11,27 % dari KKP sebesar 39.168 akseptor, sedangkan peserta KB baru MKJP sebesar 2.200 akseptor atau 11,73% dari target KKP 18.754 akseptor. Adapun distribusi per mix kontrasepsinya adalah sebagai berikut :
 1. Suntikan 1.405 akseptor (9,63 % dari target KKP 14.591 akseptor) → Semua Kab kategori kurang kecuali Kota YK kategori baik
 2. Pil 406 akseptor (18,38% dari target KKP 2.209 akseptor) → KP, Sleman kategori sangat baik, Kota YK kategori baik, Bantul dan GK kategori kurang)
 3. Kondom 402 akseptor (11,12% dari target KKP 3.614 akseptor) → KP dan sleman kategori sangat baik, kota YK kategori cukup, Gunungkidul dan Bantul kategori kurang)
 4. Implant 536 akseptor (11,61 % dari target KKP 4.617 akseptor) → Sleman dan Kota Yk kategori sangat baik, Bantul< KP dan GK kategori kurang.
 5. IUD 1.417 akseptor (11,53 % dari target KKP 12.294 akseptor) → seluruh Kabupaten pada kategori kurang kecuali kota Yk kategori sangat baik
 6. MOP 8 akseptor (6,40 % dari target KKP 125 akseptor) → KP dan Sleman kategori cukup, Bantul, Gk dan Kota YK kategori kurang.
 7. MOW 239 akseptor (13,91 % dari target KKP 1.718 akseptor) → KP, sleman dan Kota YK kategori sangat baik; Bantul dan GK kategori kurang

- Capaian peserta KB aktif per mix kontrasepsi sebesar 324.306 akseptor (105,43% dari target KKP sebesar 307.591 akseptor).
 1. Suntikan 116.177 akseptor (185,10 % dari target KKP 62.763 akseptor) → Semua Kab kategori sangat baik
 2. Pil 23.809 akseptor (87,62 % dari target KKP 27.173 akseptor) → Semua Kab/Kota kategori baik

3. Kondom 52.260 akseptor (58,27 % dari target KKP 89.691 akseptor) → Semua Kab /Kota kategori kurang
4. Implant 27.787 akseptor (143,92% dari target KKP 19.307 akseptor) → Semua Kab/Kota kategori sangat baik)
5. IUD 87.216 akseptor (106,20 % dari target KKP 82.123 akseptor) → Semua kab/Kota pada kategori sangat baik kecuali GK kategori baik
6. MOP 1.515 akseptor (56,74% dari target KKP 2.670 akseptor) → Semua kab/kota pada kategori kurang
7. MOW 15.263 akseptor (65,38 % dari target KKP 23.346 akseptor) → Semua kab kategori kurang kecuali Kota Yk kategori cukup)
8. MAL 279 akseptor (112,50 % dari target KKP 248 akseptor) → semua kab/kota kategori sangat baik kecuali KP kategori kurang.

- Target mCPR DIY 2023 sebesar 58,20% dan target telah tercapai sebesar 64,28%
- Target unmet need DIY sebesar 15,20% sudah mencapai 13,59% atau 68.540 dari target 504.513 PUS
- Cakupan pelaporan BKB 98,98 %, BKR 99,84 %, BKL 95,57 %, UPPKA 97,11 %, PIK R 96,53 %, PPKS 100 %, BP 100% dan PPKBD 98,17 %.

ANGGARAN DAK

Sumber data yang digunakan dari Morena yang diakses tanggal 17 Maret 2024.

- Anggaran DAK Fisik terealisasi 0% rata-rata nasional 0%.
- Anggaran DAK BOKB secara keseluruhan terealisasi sebesar 1.779.847.394 (5,69% dari anggaran 31.305.702.000) diatas rata-rata nasional 0,13%.
- Realisasi per menu BOKB : balai penyuluhan KB (7,44%), pelayanan KB (6,46%), penggerakan di kampung KB (5,85 %), Penurunan Stunting (5,60%), pembinaan program bangga kencana oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (1,48%)
- Kabupaten yang belum ada realisasi anggaran BOKB: Bantul

KETERSEDIAAN ALKON

Sumber data yang digunakan dari aplikasi New SIGA dan aplikasi SIRIKA

- Tingkat ketersediaan alokon sampai dengan Januari 2024 antara lain :
 - IUD :12,69 bulan
 - Pil Kombinasi :15,31 bulan
 - Mini Pil / Pil Progestin : 13,53 bulan
 - Suntik Progestin : 8,12 bulan
 - Implant 2 batang : 10,11 bulan
 - Kondom : 23,02 bulan

C. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

- Aji DP3AP2KB kab. Bantul
 - DAK Fisik sudah Progress, laparotomi sudah datang barangnya, ankas di April
 - Laparotomi sudah proses
 - DAK non Fisik terkendala aplikasi SIPD maintenance

- Ani Nurhayati, DP3AP2KB Kab. Sleman
 - DAK Fisik pengadaan sepeda motor sudah kontrak dan proses pembayaran, lanjut aksesoris
 - Rehab Balai Penyuluhan akan dilaksanakan di April setelah puasa
 - Kegiatan BOKB terkait kegiatan pelayanan KB sudah melaksanakan semua, MOP dan MOW dari januari, capaian MOP dari target 15 sudah tercapai 7. MOW dari 169 sudah tercapai 59 akseptor

- Umamatul Baroroh, DP3AP2KB Kota YK
 - Kegiatan DAK Fisik rencana akan dilaksanakan di bulan April-mei
 - Stunting kegiatan sudah dilaksanakan tetapi belum di realisasi anggaran
 - MOP kota YK saat gerai yansus ada 1 akseptor, namun ditunda setelah lebaran (faskes dan akseptor)
 - Alkon terutama untuk pil progestin ternyata peminat tidak seperti kabupaten lain. Tren saat ini IUD, sehingga ketersediaan berlebih
 - Implan 1 batang sudah di distribusikan sebagian dan dipakai saat baksos, laporan segera diinput
 - Kegiatan s.d bulan juni (baksos momentum) beberapa faskes sdh mendaftar. Setelah pelaksanaan akan segera diinput agar hasilnya baik.
 - Capain yang rendah atau belum terlaksana akan dilakukan setelah lebaran.

- DPMD, Dalduk dan KB Kab KP
 - Kegiatan DAK sudah terlaksana
 - input data BKB, BKR, BKL masih dalam proses

- DPMKP2KB Kab. GK
 - Pelaporan terkendala update aplikasi SIGA, pelaporan masih proses.
 - Untuk update anggaran hingga maret masih menunggu kegiatan berlangsung

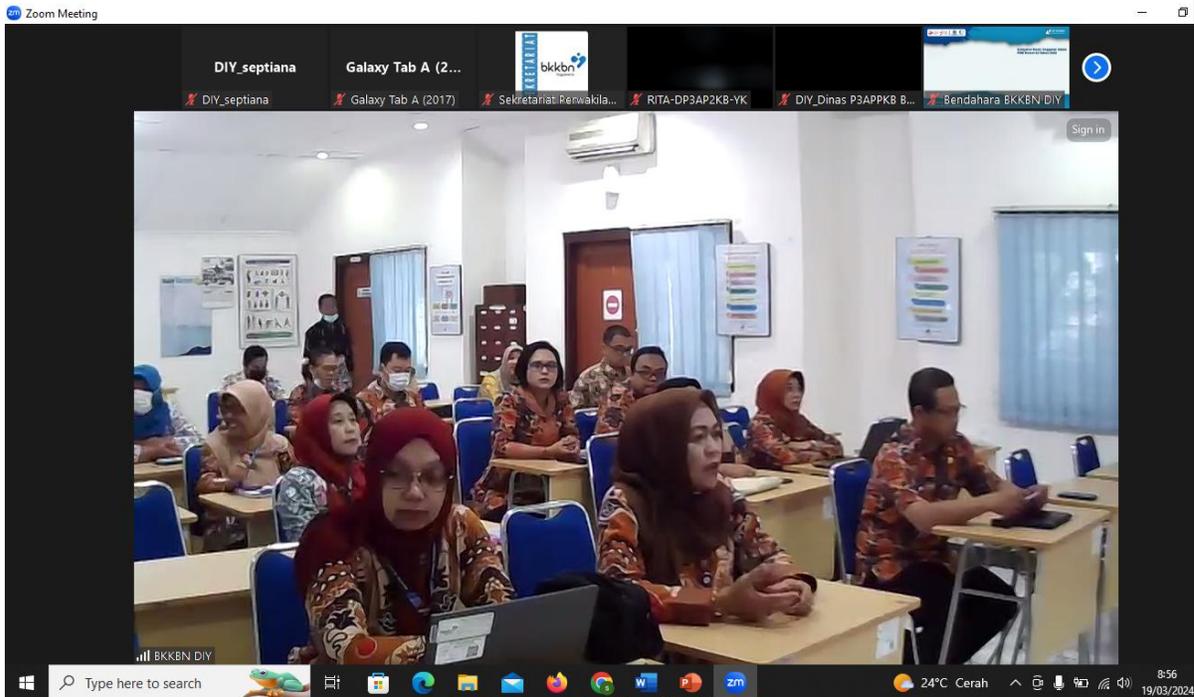
- Faturachman, Akses
 - Ada lomba ASI KKBPP

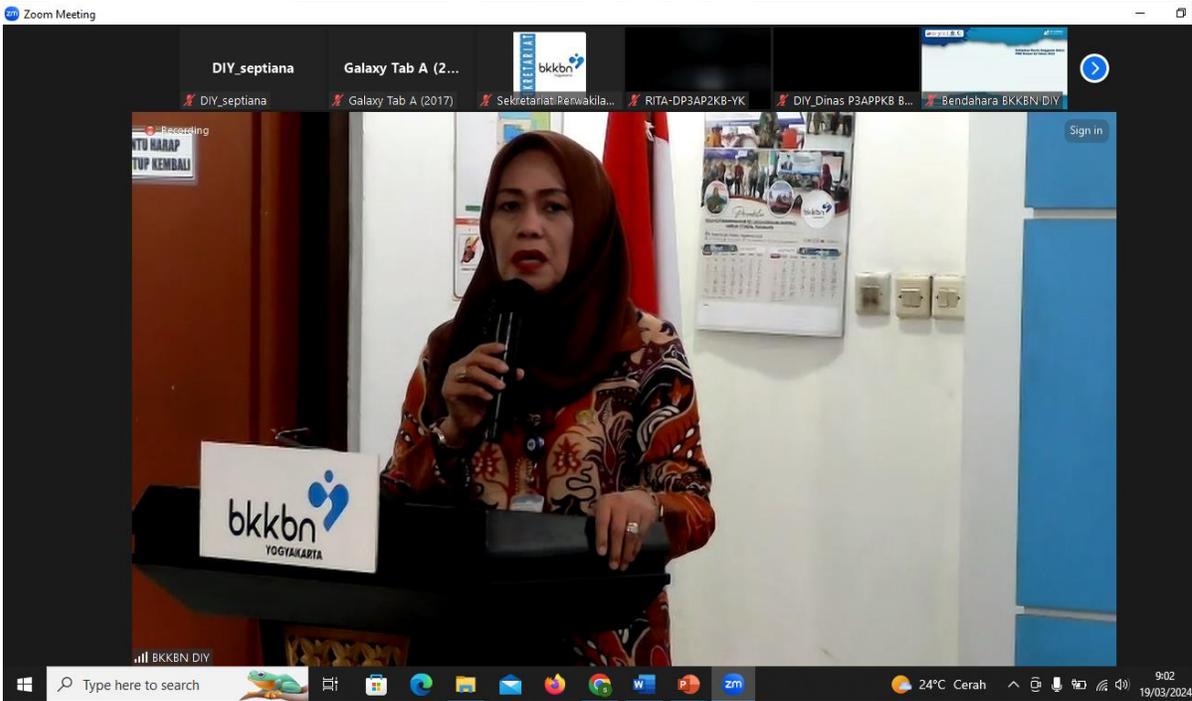
- Eni (Ketahanan dan Pencegahan Stunting)
 - Terimakasih untuk pencatatan dan pelaporan
 - Ada program gak pake lama (program pencatatan pelaporan dalam SIGA), dipantau tribulan
 - Si BIMA belajar mandiri bagi kader BKB akan mendapat sertifikat jika selesai
 - Workshop ini genting: GK sdh melaksanakan, untuk kab lain mhn kabar untuk bisa melaksanakan kegiatan. target Gk 28 , KP 27, slm 55 bantul 40 dan Kota YK 40

- Zuhdi
 - Untuk capaian yang belum 100% karena ada kendala aplikasi. SIGA maintenance selama 2 minggu karena perpindahan server ke VPN.
 - Mengingatkan kedepanya untuk capaian SIGA akan di feedback ke Kab/Kota setiap tanggal 10 kemudian tgl 15 akan ditarik sebagai bahan radalgram.

- Akan melaksanakan rekonsiliasi SIGA, yan KB dan dallap melihat capaian 3 bulan terakhir. Informasikan ke kapanewon akan dilakukan krosscek.
- Kanthi Aryekti, Lini lapangan
 - Sedang seleksi apresiasi tenaga lini lapangan, yang berkasnya belum masuk kami tunggu.
 - Ujikom untuk tahap I tahun 2024 pada bulam Mei, pendaftaran ditutup. Ujikom tahap 2 bulan November agar dipersiapkan. Hasil jaring PKB kedua peserta sudah lulus
- Anggoro, Peningkatan SDM
 - Terimakasih per tgl 15 maret sebanyak 111 angkatan orientasi TPK sudah terlaksana 5.555 kader TPK sudah teorientasi dari target 5.556. Dari kota YK mengundurkan diri sebelum orientasi berjalan. Mohon dapat menunjuk kader TPK pengnti untuk dilakukan orientasi susulan.
- lin Nadzifah, Pelayanan Publik
 - Sehubungan dengan cuti lebaran 6-15 april 2024 , mohon kerjasama terkait tunkin. Bagi yang menjalankan cuti LN periode maret 2024 dapat diajukan max 22 maret 2024.
- Sofia, Perencanaan
 - Pengusulan DAK 2025, terimakasih kepada OPD KB yang telah menyampaikan menu DAK 2025. Menu yang dibuka Pengadaan VTP kit, laparotomy kit, laparoscopi, muyan, implant removal kit, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, BP (pembangunan, rehab dan kelengkapan balai). Usulan sdh di desk dengan pusat sebelum sinkronisasi dengan bapenas dan kemendagri. untuk usulan laparoscopi dengan kamera dan monitor tahun 2025 yang lolos adalah RSUD wates.
- Septiana, Keuangan, Anggaran dan BMN
 - Terkait Salur tahap 1, dari aplikasi MORENA seluruh Kb/Kota sudah terbit surat salur. Bagi Bantul dan Sleman untuk berkoordinasi dengan BKAD
 - Untuk rasio ketersediaan alkon yang tinggi agar memperhatikan masa kadaluarsa.
- Lidwina Daru, ZIWBK
 - Terimakasih pengisian SPT
 - Kuesioner akan dilanjutkan, feedback kegiatan dari semua tim kerja
 - WA pengaduan masyarakat 089526575557

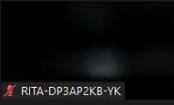
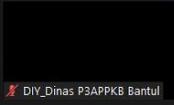
D. DOKUMENTASI





Zoom Meeting

Recording Sign in

 BKKBN DIY	DIY_septiana DIY_septiana	 RITA-DP3AP2KB-YK	 DIY_Dimas P3APPKB Bantul	 Bendahara BKKBN DIY
Satgas PPS DIY_... Satgas PPS DIY_Rahma	 Daryono Daryono	Galaxy Tab A (2... Galaxy Tab A (2017)	ZUHDI ASTUTI_... ZUHDI ASTUTI_DATIN DIY	Sasa Sasa
 Sekretariat Perwakilan BKKBN	Balai KB Sentolo Balai KB Sentolo	Anjar Purbaning... Anjar Purbaningsih	DP3AP2KB Slem... DP3AP2KB Sleman BidK3	DPMKP2KB GK DPMKP2KB GK
DPMDPPKB DPMDPPKB	Ummatul Baror... Ummatul Baroroh_DP3AP2...	Windaningrum ... Windaningrum Distyavi	KB KB	P3AP2KB Slema... P3AP2KB Sleman_Ani
BP KB MG BP KB MG		DP3AP2KB Slem... DP3AP2KB Sleman		

Unmute Start Video Participants 22 Chat Share Screen Record Reactions Apps Whiteboards Notes

Type here to search

26°C Cerah 9:17 19/03/2024

Zoom Meeting

Recording

DIY_septiana BKKBN DIY DPC IPeKB GK RITA-DP3AP2KB-YK Bendahara BKKBN DIY

Participants (28)

Find a participant

- erni
- KB
- Kepegawaian Jogja
- P3AP2KB Sleman_Ani
- PKB KOTA YK
- RITA-DP3AP2KB-YK
- Sasa
- Satgas PPS DIY_Rahma
- Tu rosod
- Ummatul Barroh_DP3AP2KB ...
- user
- YULIA SURYANI DEWI PKB KOT...
- ZUHDI ASTUTI_DATIN DIY
- Windaningrum Distyavi

Invite Unmute Me

Type here to search

26°C Cerah 10:15 19/03/2024

Zoom Meeting

Recording

DIY_septiana DPC IPeKB GK bkkbn Sekretariat Perwakilan RITA-DP3AP2KB-YK DIY_Dinas P3APPKB B...

Type here to search

UV tinggi 9:48 19/03/2024



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOTULEN RAPAT

Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Kamis / 18 April 2024	Notulis/ Disiapkan oleh	Septiana Rakhmawati, S.Far., Apt 
Waktu	13.00 – 16.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan		Disetujui oleh	
Narasumber	1. Zuhdi Astuti, SKM, M.Psi 2. Zainal Arifin, S.Sos, M.Si		
Tempat	Ruang Kencana		
Peserta	1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajarannya 2. Ketua/ Pengurus DPD IPeKB DIY 3. Ketua/ Pengurus DPC IPeKB Kab/Kota 4. Ketua Tim Kerja Perwakilan BKKBN DIY dan jajaran		

A. ARAHAN KAPER

- Radalgram menjadi kegiatan strategis yang berkesinambungan dengan tujuan untuk bersama evaluasi pelaksanaan program Bangsa Kencana, perkembangan pelaksanaan DAK dan pelaksanaan PPS triwulan I.
- Beberapa capaian yang jika ditarik ke desa masih rendah / merah, apa kendala dan bagaimana strateginya.
- DAK diskusikan kendalanya dan mencari strateginya. DAK fisik untuk dapat segera dilaksanakan agar mampu dimanfaatkan
- Operasional TPK, Minilokakarya, AKS agar segera dilakukan.
- Forum ini menjadi sarana diskusi agar capaian berikutnya menjadi lebih mudah.
- Angka stunting SKI ada kenaikan 1,6 % (16,4 menjadi 18%) . angka ini secara resmi belum dilaunching. SKI tidak ada by name by address beda dengan e-PPGBM. Rencana penimbangan serentak bulan April.

B. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Capaian Program Bangsa Kencana

Data capaian program per Maret 2024 yang diakses tanggal 16 April 2024 adalah sebagai berikut:

- Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100% (640 dari target 640)
 - BKB: 100% (1473 dari target 1473)
 - BKR: 100 % (635 dari target 635)
 - BKL: 100 % (786 dari target 786)

- UPPKA: 100 % (1520 dari target 1520)
 - PIK-R: 100 % (404 dari target 404)
 - Setara POKTAN : Kampung KB 438, RUMAH DATAKU 335, PPKS 66 . Seluruh K0 setara poktan sudah di *update*.
- Cakupan Pelaporan Faskes KB: 97,38 %: KP 100 %; Kota Yk 98,18 %; Bantul 98,85 %; GK 96,83 % dan Sleman 94,90 %
 - Cakupan Laporan Tempat Pelayanan KB:
 - KP: Faskes pemerintah 100 %, Faskes swasta 100 %
 - Bantul: Faskes pemerintah 100 %, Faskes swasta 98,15 %
 - Kota Yk: Faskes pemerintah 95,65 %, Faskes swasta 100 %
 - Gunungkidul: Faskes pemerintah 96,97%, Faskes swasta 96,67 %
 - Sleman: Faskes pemerintah 94,12%, Faskes swasta 95,31 %
 - Total pelayanan KB s.d Maret 2024 sejumlah 64.993 akseptor, dengan rincian: 6.707 peserta KB Baru, 56.737 peserta KB ulangan dan 1.549 peserta KB ganti cara.
 - Capaian peserta KB baru s.d Maret 2024 sejumlah 6.707 akseptor atau 17,12% dari KKP sebesar 39.168 akseptor, sedangkan peserta KB baru MKJP sebesar 3.507 akseptor atau 18,70% dari target KKP 18.754 akseptor. Adapun distribusi per mix kontrasepsinya adalah sebagai berikut :
 1. Suntikan 2.064 akseptor (14,15 % dari target KKP 14.591 akseptor) → Semua Kab kategori kurang kecuali Kota YK kategori baik
 2. Pil 658 akseptor (29,79% dari target KKP 2.209 akseptor) → KP, Sleman dan kota YK kategori sangat baik, Bantul dan GK kategori kurang
 3. Kondom 478 akseptor (13,23% dari target KKP 3.614 akseptor) → KP kategori sangat baik, kota YK kategori cukup, Sleman, Gunungkidul dan Bantul kategori kurang
 4. Implant 856 akseptor (18,54 % dari target KKP 4.617 akseptor) → Sleman dan Kota Yk kategori sangat baik, Bantul kategori cukup, KP dan GK kategori kurang.
 5. IUD 2.250 akseptor (18,30 % dari target KKP 12.294 akseptor) → seluruh Kabupaten pada kategori kurang kecuali kota Yk kategori sangat baik
 6. MOP 12 akseptor (9,60 % dari target KKP 125 akseptor) → KP kategori baik, Sleman kategori cukup, Bantul, Gk dan Kota YK kategori kurang.
 7. MOW 389 akseptor (22,64 % dari target KKP 1.718 akseptor) → sleman dan Kota YK kategori sangat baik; Kp kategori baik, Bantul kategori cukup, dan GK kategori kurang
 - Capaian peserta KB aktif per mix kontrasepsi sebesar 329.443 akseptor (107,10% dari target KKP sebesar 307.591 akseptor).
 1. Suntikan 120.336 akseptor (191,78 % dari target KKP 62.763 akseptor) → Semua Kab kategori sangat baik
 2. Pil 24.036 akseptor (88,46 % dari target KKP 27.173 akseptor) → Kota Yk kategori sangat baik, Sleman, GK, KP kategori baik dan Bantul kategori cukup
 3. Kondom 52.195 akseptor (58,19 % dari target KKP 89.691 akseptor) → Semua Kab /Kota kategori kurang
 4. Implant 28.132 akseptor (145,71% dari target KKP 19.307 akseptor) → Semua Kab/Kota kategori sangat baik)
 5. IUD 87.616 akseptor (106,69 % dari target KKP 82.123 akseptor) → Semua kab/Kota pada kategori sangat baik kecuali GK kategori baik
 6. MOP 1.508 akseptor (56,48% dari target KKP 2.670 akseptor) → Semua kab/kota pada kategori kurang

7. MOW 15.315 akseptor (65,60 % dari target KKP 23.346 akseptor) → Semua kab kategori kurang kecuali Kota Yk kategori cukup)
8. MAL 275 akseptor (110,89 % dari target KKP 248 akseptor) → semua kab/kota kategori sangat baik kecuali KP kategori kurang.

- Target mCPR DIY 2023 sebesar 58,20% dan target telah tercapai sebesar 65,65%
- Target unmet need DIY sebesar 15,20% sudah mencapai 13,30% atau 67.542 dari target 507.999 PUS
- Cakupan pelaporan BKB 94,70 %, BKR 94,95 %, BKL 94,66 %, UPPKA 89,52 %, PIK R 89,83 %, PPKS 98,48 %, BP 93,85% dan PPKBD 93,61 %.

ANGGARAN DAK

Sumber data yang digunakan dari Morena Triwulan I yang diakses tanggal 16 April 2024.

- Anggaran DAK Fisik terealisasi sebesar Rp. 615.340.000 atau 16,37% dari anggaran Rp.3.759.905.000; sedangkan rata-rata nasional 0,16%.
- Anggaran DAK BOKB secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp.3.609.687.073 (11,53% dari anggaran Rp.31.305.702.000) diatas rata-rata nasional 1,27%.
- Realisasi per menu BOKB : balai penyuluhan KB (13,48%), pelayanan KB (12,71%), penggerakan di kampung KB (12,01 %), Penurunan Stunting (10,99%), pembinaan program bangga kencana oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (8,31%)

KETERSEDIAAN ALKON

Sumber data yang digunakan dari aplikasi New SIGA dan aplikasi SIRIKA

- Tingkat ketersediaan alokon sampai dengan Maret 2024 antara lain :
 - IUD :12,34 bulan
 - Pil Kombinasi :18,11 bulan
 - Mini Pil / Pil Progestin : 10,01 bulan
 - Suntik Progestin : 9,63 bulan
 - Implan 1 batang : 3,32 bulan
 - Implant 2 batang : 10,88 bulan
 - Kondom : 19,43 bulan

C. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

➤ Ninik (Bantul)

- Realisasi keuangan DAK Fisik (Laparoskopi) sudah proses pengadaan (triwulan I) tinggal menunggu pencairan krn omspan belum dibuka. Laparoskopi di RS Panembahan senopati.
- Mini laparotomy sedang proses pengadaan
- BOKB kendala pada PPTK di Sekretariat beberapa kali ganti (3 bulan 3x ganti), kendala di SIPD. Kegiatan sudah berjalan sesuai jadwal.
- Capaian program secara sekilas sudah lebih baik dari kemarin.

➤ Titik Chom (DPC IPeKB Kab Bantul)

- Klinik swasta ada yang sudah mendapatkan honor untuk operatornya, sudah dilepas dari PKB. Ada yang belum entri
- Setelah libur lebaran mau dikejar tetapi data sudah ditarik

- Ambar (Kulonprogo)
 - Terimakasih karena radalgram dilakukan setiap bulan, sehingga lebih terkendali.
 - Kegiatan sudah berjalan
- Mardiyono (Kulonprogo)
 - Akan koordinasi dengan lapangan agar hasil lebih baik
 - Di Kulonprogo tahun ini akan dilaksanakan HARGANAS tk Prov. Agar segera dilakukan koordinasi.
 - Capaian KB capaian masih perlu digenjot
 - Regulasi Bangsa Kencana di kulonprogo sudah ada beberapa:
 - Perda ttg pembangunan keluarga Perbup nomor 61 tahun 2021.
 - Perda pengendalian penduduk proses harmonisasi di kemenkumham.
 - Perbup kampung KB
 - Perbup GDPK
 - Perbup KIE berbasis Komunitas
- Hilda (Kulonprogo)
 - Terkendala di SIPD. Akhir maret baru mulai
 - Implan 1 batang karena ED duluan implant 2 batang maka dikeluarkan yang 2 batang. Jika dikeluarkan implant 1 batang ada kekhawatiran tidak laku.
- Sarmin (Kota Yogyakarta)
 - Kegiatan DAK fisik belum saatnya partus Juknis masih ditunggu. Tahap pembayaran di TW III.
 - Pengadaan kendaraan roda 2 dan 4.
 - Pemkot ada 5 OPD yang ditunjuk sebagai piloting. 40 % system non tunai menyangkut ketersediaan dana BOKB. Baru akan dilaksanakan bulan April.
- Hayu (Kota YK)
 - Capaian kota Yogyakarta terkait data sudah koordinasi.
 - Pentingnya RDK. Kota YK sudah sosialisasi dengan pemangku data dan merespon dengan baik.
 - Kegiatan kampung KB direncanakan bulan mei
 - Inovasi Kampung KB: KKB level kelurahan, ada forum KKB kemantren melibatkan KKB di kemantren sbg solusi koordinasi lintas sektor
- Amirudin (Gunungkidul)
 - Bulan ini PB terendah. PKB GK 1:3,5
 - Sarana prasarana dituntut serba online dan cepat. Mulai 2016 diberi laptop dan sudah rusak.
 - Input tidak ada tapi dituntut output. Dua tahun berturut-turut tidak mendapat DAK Fisik.
 - Tahun 2025 ditawarkan tapi tidak sesuai (laparotomi dan laparotomi)
 - Stunting: angka naik meskipun mengikuti RAN PASTI. Apakah Road Map salah?
 - Stunting kegiatan jangan terlalu banyak rapat, menu yang ada pertemuan/rapat. Yang langsung ke stunting belum tersentuh.
 - Kegiatan POKTAN laporan sudah biru. Menjadi catatan kegiatan mau yang aplikasi tapi harus melihat kenyataan. Seleksi aplikasi yang akan digunakan.
 - Elsimil dari kader diminta menghitung tinggi fundus. Kenapa tidak pertanyaannya apakah sudah memeriksakan kesehatan? Tidak Problem solving di masyarakat.
 - Komitmen kader dan PKB jangan disalahgunakan.

➤ Niken (Sleman)

- Apabila data SKI sudah release agar dapat diberikan data dalam kabupaten. Ada kenaikan ASFR 15-19 th yang signifikan
- Cakupan pelayanan akan dikoordinasikan karena faskes banyak.
- BOKB pembinaan bangga kencana oleh kader karena AJK di bulan Juni.
- Tahjun ini di sleman diharapkan semua non tunai kecuali transport. Akan dilakukan mei. Pendampingan dilakukan akhir bulan ini. Pelaksanaan MBIS konsekuensinya banyak diusahakan penyerapan tetap baik.
- Implan 1 batang permintaan cukup besar, tetapi persediaan terbatas.

➤ Sofia

- Terdapat menu yang dikunci yang diprioritaskan kendaraan antar jemput akseptor.
- Penilain langsung dari bapenas. Provinsi hanya bisa memberikan usulan semoga usulan di ACC. Usulan pengadaan laparoskopis dari Kota Yogyakarta tdk di ACC. Yang di ACC hanya dari Kulonprogo
- Apresiasi DAK Kab/kota masuk 2 kategori kurang dari 2 M dan kategori 5-10M. Kriteria antara lain ada peningkatan capaian baik kegiatan dan anggaran. Provinsi hanya boleh mengirimkan masing-masing kategori 1 kabupaten/kota.

➤ Uma (Kota Yogyakarta)

- Terkait dengan pelayanan, untuk MOP baru pelayanan hari kemarin dan hari ini (3 akseptor). MOW (5 akseptor) lainnya berikutnya.
- Implan 1 batang sudah digunakan. Kota YK yang diberikan 1 batang penduduk kota yang akseptor baru. Saat diberikan kepada ulangan lepas.
- Pil Progesterin masih banyak karena peminatnya banyak MKJP. Capaian KB PP sudah 70 % mayoritas MKJP sehingga pil progesterin masih banyak.

➤ Zuhdi

- Pelaksanaan verval KRS serentak tgl 23 april-31 mei 2024. Ada kegiatan pra pelaksanaan dari kab GK tanggal 17-22 april 2024. Sampai hari ini sudah ada 6 kecamatan yang melaksanakan verval.

➤ Septiana

Data ketersediaan alkon diperoleh dari SIGA. Data tersebut menjadi bahan evaluasi apakah alkon sudah terdistribusi, dimanfaatkan dan pelaporan sudah sesuai.

D. DOKUMENTASI





BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOTULEN RAPAT

Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Rabu/ 29 Mei 2024	Notulis/ Disiapkan oleh	Septiana Rakhmawati, S.Far., Apt 
Waktu	13.00 – 16.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan	Dra. A. Ritamariani	Disetujui oleh	
Narasumber			
Tempat	Ruang Kencana		
Peserta	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajarannya2. Ketua/ Pengurus DPD IPeKB DIY3. Ketua/ Pengurus DPC IPeKB Kab/Kota4. Ketua Tim Kerjadan jajaran5. Satgas PPS		

A. ARAHAN KAPER

- Radalgram merupakan kegiatan strategis untuk mengevaluasi program Bangga Kencana dan penurunan stunting
- Radalgram kali ini dilaksanakan evaluasi langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY

B. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Capaian Program Bangga Kencana

Data capaian program per April 2024 yang diakses tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

- Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100%
BKB: 100%
BKR: 100 %
BKL: 100 %
UPPKA: 100 %
PIK-R: 100 %
 - Cakupan K/0 : 100% baru aspek kuantitas belum dikupas dari aspek kualitas
- Cakupan Pelaporan Faskes KB: 98,44 %, KP dan GK 100 %, Bantul 98,19 % Sleman 97,10 % dan Kota Yogyakarta 98,51 %
- Cakupan Laporan Tempat Pelayanan KB:
KP dan GK: Yan KB pemerintah 100 %, Yan KB swasta 100 %
Bantul: Yan KB pemerintah 96,97%, Yan KB swasta 96,53 %
Kota Yogyakarta: Yan KB pemerintah 100%, Yan KB swasta 98,51 %
Sleman: Yan KB pemerintah 100%, Yan KB swasta 98,51 %

- Untuk pelayanan KB pemerintah untuk pengurus ketua DPD/DPC PKB untuk di cek dimana yang kurang dan kenapa tidak 100% supaya bulan depan bisa 100% juga untuk pelayanan KB Swasta. Andaikan ada faskes yang tidak melapor tapi melakukan pelayanan maka harusnya dicatat supaya dapat 100% dan memiliki hasil yang bagus. Jika dilaporan sudah 100 % maka pelaporanya juga bagus. Kepada PLKB untuk memenuhi target pelaporan. Dengan kabupaten kota : kesepakatan kerja bukan kontrak kerja
- Capaian peserta KB Baru per mix kontrasepsi sebesar 9.290 akseptor (23,72% dari target KKP sebesar 39.168 akseptor.
 - Setiap bulan 8.33 dikali 12 maka akhir tahun dapat tercapai 100%. Jika ada 1 kecamatan yang belum melapor sama sekali maka akan menumpuk di akhir bulan. Jika menggunakan 8.33 seharusnya tercapai 32% saat ini tercapai 23%.
- Capaian peserta KB Ulangan per mix kontrasepsi sebesar 334.692 akseptor (108,91% dari target KKP sebesar 307.321 akseptor.
 - Jangan pernah terlena dengan non MKJP. Tidak semua calon aseptor memakai MKJP
 - Pil, kondom, suntik 1 bulan adalah tingkat DO nya tinggi. Banyak yg lupa suntik lalu hamil.
 - Jika ulangan berarti dia masih mau untuk memakai alat kontrasepsi. Tugasnya untuk memotivasi menggunakan MKJP. Untuk suntikan di usia sangat muda harus berhati hati. Seharusnya di arahkan ke MKJP. Lakukan pemetaan usia untuk penggunaan suntik
 - PB berkontribusi 100% ke PA. harus berhati hati : Ulangan dianggap baru, padahal ganti cara.
 - DATIN : untuk dilihat apakah masing2 kabupaten punya kontribusi PB ke PA
 - Per mix masih di dominasi suntik
- Target mCPR DIY 2024 sebesar 58,20% dan target telah tercapai sebesar 65,43%
 - Harus dilakukukan Pemetaan dimana titik unmeet need tinggi dan dilihat posisi umur. Dilakukan pemetaan sampai ke kecamatan. Pokja KB harus kerja cerdas dan intens untuk koordinasi dengan lini lapangan
- Target unmet need DIY sebesar 15,20% sudah mencapai 13,02% atau 66.577 dari target 511.489 PUS.
- Cakupan pelaporan BKB 98,78 %, BKR 98,74 %, BKL 98,86 %, UPPKA 99,67 %, PIK R 97,28 %, PPKS 100 %, BP 100% dan PPKBD 97,03 %.
 - Baru cakupan laporan belum bicara isi. Harus dilihat kenapa tidak 100% jika memang kelompok tidak aktif bisa di lakukan centang tidak aktif. Harus dilihat kualitas pelaporan dan kenyataan di lapangan harus sesuai.
 - Ada kecamatan yang 0 (pajangan, tegalrejo dan gedong tengen)
 - Memang berat sekali di lapangan tapi kalo kita intens maka akan mudah
- Keikutsertaan Keluarga anggota BKB hadir pertemuan bulan april 10.979 anggota (42,1 % dari total 26.049 anggota). Persentase menurun disbanding bulan Maret 12.449 anggota (47,8% dari total 26.017 anggota).
 - Karena kita akan mendongkrang pencapaian program bangga kencana dan percepatan stunting. Kenapa bisa pecapaian turun, jika dalam puasa, covid. Itu bisa dimaklumi. April ada apa? Lebaran ya. Semoga April ke mei bisa naik. Pergerakan dalam anggota terjadi kenaikan tapi kehadiran terjadi menurun.

- Jumlah anak hadir pertemuan BKB menggunakan KKA bulan April 11.578 KKA (95,2 % dari total 12.161 yang hadir). Persentase ini meningkat jika dibanding bulan maret 12.899 KKA (93,6% dari total 13.779 yang hadir)
 - Sampai saat ini belum dicabut KKA (Kartu kembang anak). KKA untuk memantau 7 aspek perkembangan anak. Seharusnya semua anggota BKB memiliki KKA.
 - Bu Eni : jangan sampai KKA tidak disupport perwakilan. Harusnya ada versi cetak dari provinsi.
 - Seharusnya DPC langsung mencari daerah binaan mana yang % menurun, langsung dilakukan pembinaan
 - GDPK untuk lebih dipantau karena tahun ini adalah tahun pilkada
 - BKR udah tercapai PIK belum
 - Untuk disusun ulang target pro PN agar tercapai dan kualitasnya bagus

- 7 Quick wins
 1. EPPGBM tugas di Dinkes, bagaimana untuk pelayanan 1 juni bisa dapatkan data
 2. Elsimil jangan mencari data di KUA krn data KUA adalah SIMKAH
 3. Pasca salin lakukan pendampingan, bisa di arahkan ke KBPP
 4. PMT: BKKBN hanya diberikan tugas untuk memantau bukan melakukan intervensi. Tugas dinkes.
 5. AKS: 2024 akan berproses di semester I
 6. Minlok sedang berproses
 7. BAAS: mitra BAAS 38 mitra. Ada perlambatan sudah tidak masiv lagi.

C. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

Moderator: ibu Rohdhiana

Ibu Ninik (Kadis DP3AP2KB Kab. Bantul):

1. Terkait dengan intervensi serentak, persiapan belum maksimal sedang menyusun untuk SE Bupati/Sekda. Untuk disampaikan point-poin penting yang harus disampaikan ke pada bupati
2. Dari Informasi dari beberapa Lembaga berbeda tentang waktu, dari lintas sector pelaksanaan hanya bulan juni, BKKBN 3 bulan.
3. Pelaksanaan pengukuran akan dilaksanakan 2 minggu pertama untuk 2 minggu berikutnya untuk proses penyusunan data dan pelaporan. Ini agak teknis jika tidak seragam antar kabupaten/ nasional akan berpengaruh pada updating data pelaporan dsb

Pak sarmin (Sekdis DP3AP2KB Kota YK)

1. Terkait dengan pelayanan KB di satukan dengan momentum menyampaikan suara dari kader di lapangan untuk pelayanan KB momentum 2024 jaraknya terlalu dekat. Contoh hari kartini, ultah IBI, harganas. Teman-teman di lapangan setelah selesai belum di evaluasi sudah disusul lagi. Terkait waktu yang terlalu dekat untuk menggerakkan kader dan mencari akseptor takutnya ada titik jenuh. Harapannya ada titik momentum tertentu dan bisa mencari akseptor dengan baik
2. Terkait Langkah serentak untuk mengatasi stunting ini kick off nya di mulai kapan? Terkait tanggal mulai posyandu dan akhir harap di seragamkan
3. Kampung KB tingkat kemantren sudah terbentuk 14, wirobrajan awal juni akan dibentuk. 2023 dilanjutkan 2024 akan ada 10 SSK total dengan 10 yang sudah ditetapkan ada 43. Dari sisi pendanaan akan ada sharing dari APBD dan BOKB.

Pak Wildan (DP3AP2KB Kab. Sleman) :

1. Menyoal agenda pusat launching RAN PASTI (Sepuluh aksi) faktanya kami sudah mengevaluasi dan hanya perlu penguatan dengan surat edaran bupati dan juknis TPS akan dengan SK bupati dan akan kami sinkronkan dengan dinas kesehatan. Kami belum tau kick off nya kapan.
2. Capaian2 tidak maksimal akan kami evaluasi di internal dengan teman2 PKB dan PLKB
3. Kita tidak dapat memaksa kinerja teman2 PLKB PKB untuk kencang di awal karena yang penting gol tercapai. Kita akan tetap push apa yang menjadi target/agenda bulanan.
4. Memang betul yang disampaikan bu kaper kami mengadopsi sekolah lansia. Walaupun faktanya lansia kami sudah pandai. Dan ternyata diajak wawancara apa yang disampaikan itu semua berkualitas, akan kami mapping mana yang perlu kami buat sekolah dan mana yang tidak. Jika sudah pandai sepertinya tidak perlu dibuat sekolah.

Ibu Parjiah (DPMDDaldukkab. KP) :

1. Pembentukan SSK ada 4 dan ada 4 PIK R dibentuk di sekitar bulan April
2. Barangkali ada Informasi terkait harganas tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di KP yang akan dilaksanakan di taman budaya KP yang sudah di lihat oleh bu yuni, mohon jika ada Informasi lebih lanjut untuk di berikan

Pak Mugiyadi (DPC KP)

1. Terkait PPM sungguh tidak masuk akal jika disandingkan dengan New SIGA, data jauh sekali dengan unmet need
2. Di aplikasi new siga PUS hamil tidak bisa dilihat
3. Target PB Pasca Persalinan perkecamatan jika target domisili tidak tercapai karena semua berdasarkan pelayanan. Jika diambil domisili hanya dapat PB tidak dapat PA. mohon untuk di evaluasi
4. Target BKB PIK R. kendala PIK R untuk keluar dari SMA sudah bekerja, menikah atau keluar daerah
5. BKB yang menjadi hambatan bahwa di aplikasi SIGA jika BKB umur 5 tahun masih masuk dalam register. Padahal batas posyandu 5 tahun. Tapi di New SIGA tidak ada filter
6. BKR ada masalah ketika orang tua yang punya anak remaja punya kesibukan sendiri
7. Terkait di panjatan kader semangat tidak berkurang tapi kembali lagi aplikasi error. Mudah mudahan aplikasi tidak error lagi dan dalam 2 hari ini dapat berjalan lancarkembali

Nurhadi Yuwono (DPD DIY)

1. PPM tumpuk undung rekan di lapangan tergap gagap
2. Kami berharap teman provinsi melakukan break down data satgas di kabupaten kota. Jika tiap bulan punya progress data akan lebih mudah Ketika melakukan minlok, dll dan data2 tersebut harusnya dikawal dan disandingkan.

Fatur

1. Klarifikasi tayangan. Faskes yang tertayang adalah capaian bulanan jika diakumulasi 279 sudah 58%. Dengan dua target lainnya juga sudah tercapai. Tadi hanya tertayang bulanan.
2. Tim kerja Akses juga kaget karena dalam 5 tahun terakhir yang paling besar hanya PSA menjelang harganas dan serentak se Indonesia. Beberapa tahun ini ada kegiatan WCD (*word contraception day*). Kami juga menyampaikan hal serupa ke deputian KB Pusat. Jawabn pusat malah setelah PSA akan banyak momentum lagi.

Heni (Satgas PPS) :

1. RAN PASTI produk dari BKKBN. Dari satgas memang petunjuk jelas mengawal 7 quick win di sinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Konvergensi, Audit kasus stunting. AKS di sleman agak beda sendiri karena Informasi dari satgas sleman akan di pergubkan. Sleman lokus 1 dan 2 akan di bulan juni. Di Sleman AKS tidak hanya di lokus tapi di masing- masing kalurahan.
2. Minlok di sleman bulan mei juni.
3. Berkaitan dengan yang tidak kalah penting adalah penguatan dari TPK, capain yg harus dilakukan oleh TPK yang harus disampaikan di aplikasi elsimil
4. Untuk pemberian makanan tambahan harus dikawal oleh dinas, PKB dan satgas.

Sofia :

1. Terkait PPM terlalu tinggi memang target yang disampaikan oleh pusat based line nya adalah PK21. Ada perubahan target penyesuaian setelah hasil PK 21 launching antara lain unmet need, PPM, PB mengalampi perubahan. Menghitung target seluruh provinsi berdasarkan PK21 dan provinsi membreakdown lagi ke kabupaten berdasarkan PK23 yang sudah launching data disampaikan melalui rakerda. Sambil menunggu data dari pusat. Setelah di breakdown disesuaikan data dari pusat. Harapan kami adalah breakdown level kecamatan dan desa dengan menghitung data yang ketesediaanya didapatkan. Jika menggunakan data PK tidak semua data bisa menghitung di level kecamatan dan kelurahan.
2. Untuk kab kota memang koordinasi data dengan tim datin atau perencanaan. Memang ada beberapa hal yang memang menjadi kendala/ keluhan teman pkb. Sudah ada yg menyamoaiakn target kabuoaten jika di creakdown di level desa akan menjadi snagat tidak logis.
3. Kami kembalikan penghitungan PPM untuk melibatkan 4 tim (dalduk, KB, laptik,Perencanaan)

Irfan :

1. pada aplikasi terkait data balita jika umur balita sudah lulus dari balita akan out dari keanggotaan dari BKB
2. terkait hadir bukan anggota (BKB) bisa jadi orang setempat tapi belum dimasukan di anggota karena harus di input kan di K/O .bisa dimasukan di aplikasi BKB
3. kita perlu meng update di data keluarga yang anggota hamil
4. semoga setelah ada verval tiap tahun semoga data lebih akurat

Kaper

- Intervensi serentak. Sampai saat ini belum ada perubahan. Intervensi serentak merupakan hasil pertemuan tim PPS tingkat nasional. Arahan kemenko PMK. Dengan kenaikan 21,5 ke 21,6 (0,1 %) dan untuk DIY kenaikan 1,6 % (16,4 menjadi 18) artinya ada 4 % yang akan diupayakan untuk turun. Arahan pimpinan angka kenaikan SKI dikoreksi melalui angka EPPGBM dengan melakukan intevensi seretak tgl 1-15 juni sehingga didapatkan angka pada juni. Akan berlanjut juli agustus September, dilakukan pengukuran lagi untuk melihat apakah memang angka di SKI bisa dibuktikan sehingga sasaran yg ditimbang 98-100%. EPPGBM 80,3 % artinya masih ada 17 % yang belum ditimbang. Kalaupun yang ditimbang pindah maka lakukan sweeping, kita ajak penimbangan.
- Sasaran catin (TPK hadir saat itu).
- Bumil (penimbangan seperti sebelumnya). Yang diburu persentase yang ditimbang, naik/turun. Baduta (ini yang akan dilakukan intervensi) 0-2 th, 2-3 th. Pemberian telur yang diberikan 0-18

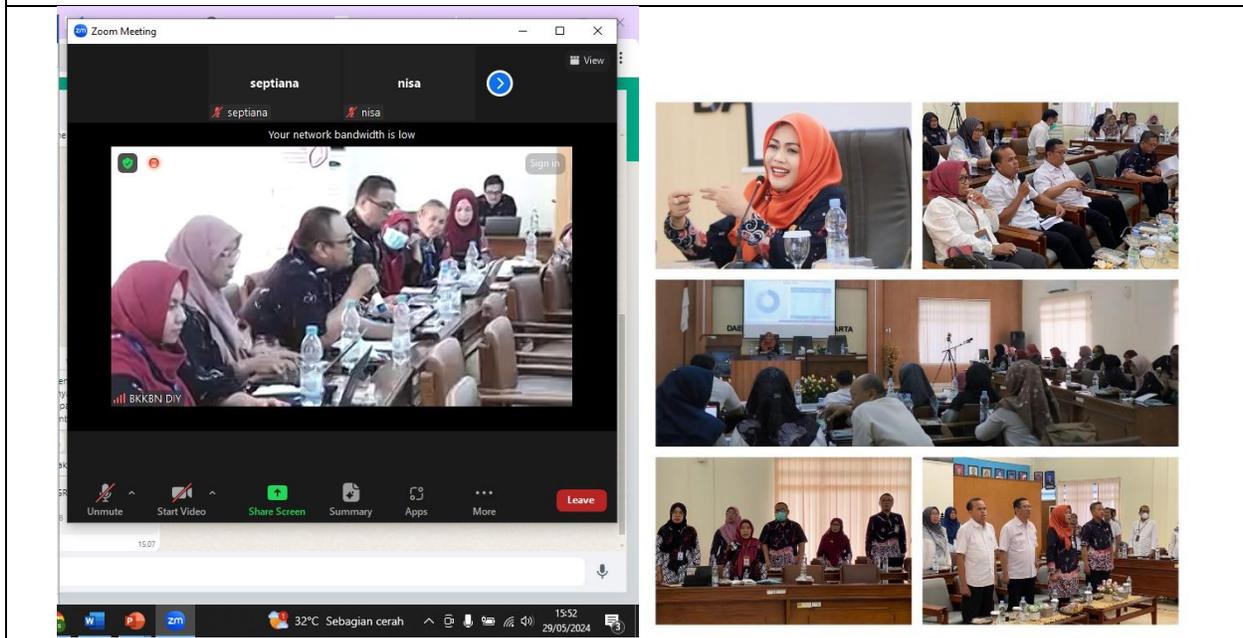
bulan selama 3 bulan. Intervensi tetap dilakukan untuk diatas 2 tahun. Andaikan saat intervensi ada yangmnta rujukan diberikan tindak lanjut ke fasyankes.

- Penjelasan dr Dinkes dimulai tgl 6 tapi dari BKKBN tanggal 1 juni (serentak artinya harus ada pelayanan di bulan itu pada posyandu tersebut)
- Posyandu pembinaan dibawah puskesmas dibawah naungan lurah.
- Data BKKBN sebagai back up data meskipun mentah.
- Lengkapi data, kunjungi posyandu. Launching dokumentasi posyandu agar kelihatan BKKBN bergerak.
- Surat dari kemendagri, PDT , kemenkes, bapenas sudah turun. Surat dari PDT konsultasikan dengan lurah.

Kesimpulan

1. Target kabupaten dijabarkan sampai kecamatan dan kalurahan, cantumkan setiap desa penanggungjawab PKB/ PLKB. Tim Kerja Provinsi silahkan difasilitasi OPD KB. Harus ada batas waktu agar di bulan juni dapat dievaluasi berdasarkan Target.
2. Dari target ada pemetaan, suntik usia berapa? Kalau PUS MUPAR tidak tepat tetapi harusnya MKJP.
3. Kalau tidak ada yang bergerak silahkan dilakukan pembinaan dan rekomendasi ke prov untuk pembinaan.
4. Seluruh target agar direalisasikan
5. IBI capaian sementara 85 %

D. DOKUMENTASI



Zoom Meeting

septiana nisa BKKBN DIY - Ra... Tiya_BKKBN DIY

Participants (63)

- septiana (Me)
- BKKBN DIY (Host)
- BKKBN DIY (Co-host)
- 3S 32_Fitri Susilowati DIY
- aji
- Ana Anisa
- ANDINI_PKB TEMON_KULONP...
- Balai KB
- Balai KB Banguntapan
- balai kb bantu
- Balai KB Nanggulan_KP
- Balai KB Tempel Sleman
- Balai Penyuluhan KB Depok
- BKKBN_dwirahayu

Unmute Start Video Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes More Leave

Type here to search 32°C Sebagian cerah 15:47 29/05/2024

Zoom Meeting

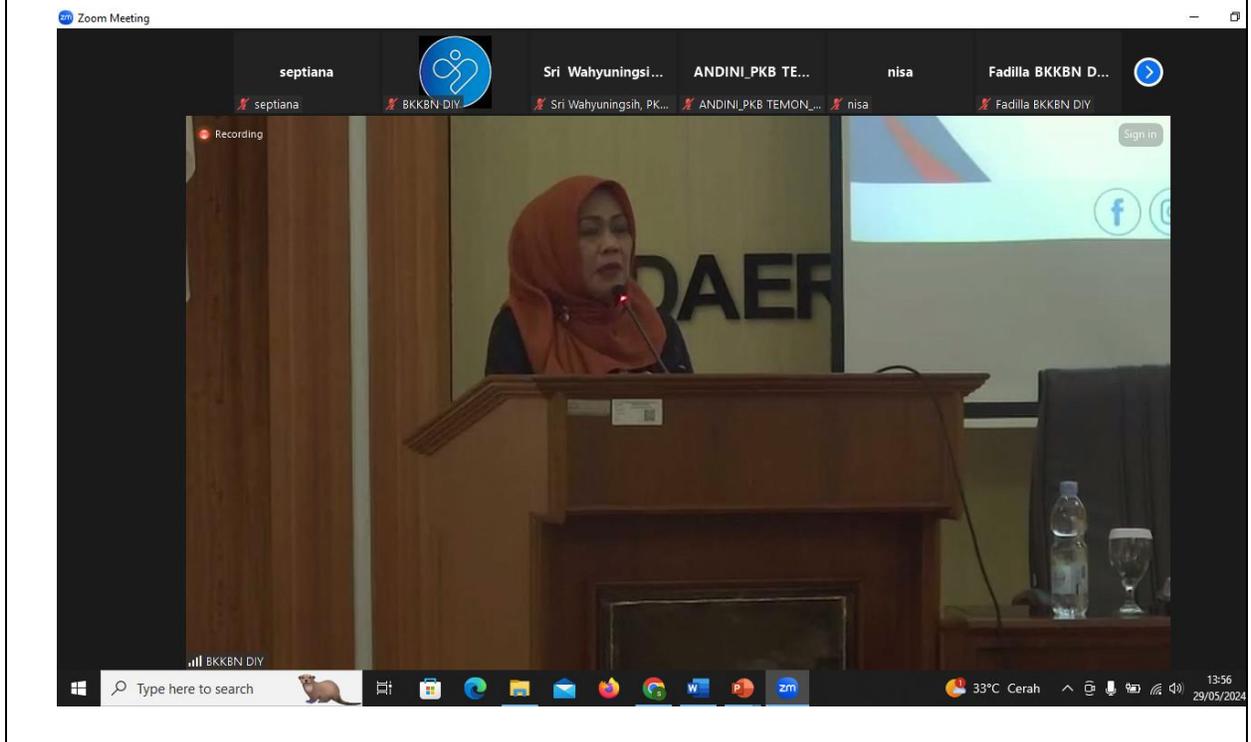
septiana nisa BKKBN DIY - Ra... K BKKBN DIY

Recording

Unmute Start Video Participants 65 Chat Share Screen Summary AI Companion Record Reactions Apps Whiteboards Notes

Type here to search LQ45 +1,24% 15:32 29/05/2024





Zoom Meeting

Recording

septiana

Sri Wahyuningsi...

BKKBN DIY

ANDINI_PKB TEMON...

Wadhikhal

CAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI APRIL 2024

JENIS ALOKON	KKP DIY 2024	CAPAIAN	%
SUNTIK	62.763	124.460	198,30%
IMPLAN	19.307	28.380	146,99%
MAL	248	272	109,68%
IUD	82.123	87.847	106,97%
PIL	27.173	24.500	90,16%
TUBEKTOMI	23.346	15.347	65,74%
KONDOM	89.961	52.396	58,24%
VASEKTOMI	2.670	1.490	55,81%
TOTAL	307.591	334.692	108,81%

berencana itu keren

yogya.bkkbn.go.id

14:15 29/05/2024

Zoom Meeting

You are viewing BKKBN DIY's screen

View Options

septiana

nisa

BKKBN DIY - Ra...

ANDINI_PKB TEMON...

BKKBN DIY - Rachma

Tiya_BKKBN DIY

Recording

7 QUICK WINS
Percepatan
Penurunan
Stunting yang
dilaksanakan oleh
BKKBN

1. Pemantauan Status Gizi (data EPPGBM) → berkoordinasi dengan Dinkes Kab / Kota untuk pelaporan Quick Wins ke Pusat.
2. Pendampingan TPK melalui pemanfaatan Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil , data dari Januari sampai April)
 - 454 : rata-rata jumlah calon pengantin yang didampingi/ bulan
 - 1511 : rata-rata ibu hamil didampingi
 - 314 : rata-rata jumlah ibu pasca persalinan yang didampingi/bulan
 - 5870 : rata-rata jumlah baduta yang didampingi/bulan
3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) → berkoordinasi dengan Dinkes Kab / kota untuk data PMT
4. Audit Kasus Stunting → berkoordinasi dengan TPPS Kabupaten, kegiatan AKS ini sudah selesai dilaksanakan di 5 Kab / Kota untuk tahun 2023, dan untuk tahun 2024 baru berproses semester 1
5. Penguatan TPPS Kapanewon melalui Mini Lokakarya → kegiatan Mini Lokakarya ini sudah selesai dilaksanakan di 5 Kab / Kota di tahun 2023, dan ber proses di tahun 2024
6. Konvergensi → sudah dilaksanakan di DIY, melalui koordinasi TPPS di masing masing wilayah dari tingkat kalurahan sampai Provinsi
7. Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) → sampai akhir bulan Desember, untuk penerima BAAS yang diperuntukan kepada Keluarga Resiko Stunting sebanyak 12.279 KRS dengan mitra BAAS sebanyak 38 mitra.

Unmute

Start Video

Participants 67

Chat

Share Screen

Summary

AI Companion

Record

Reactions

Apps

Whiteboards

Notes

Leave

15:11 29/05/2024

Zoom Meeting

You are viewing BKKBN DIY's screen

View Options

septiana

nisa

BKKBN DIY - Ra...

Recording

septiana

BKKBN DIY

nisa

ANDINI_PK8 TEMON...

BKKBN DIY - Rachma

Tiya_BKKBN DIY

Sign In

Untuk mendukung Intervensi Serentak Juni 2024:

- 1) Sebagai cut off, data akan ditarik pada 1 Juni.
Selanjutnya verval dapat di teruskan
- 2) Minggu I Juni: Proses Pengolahan dan distribusi data
BNBA sasaran prioritas hasil verval ke propinsi

Optimalisasi waktu sampai dengan 31 Mei. Mohon dapat di **UTAMAKAN DAN DIPRIORITASKAN** untuk menverval sasaran prioritas:

- Ibu Hamil
- Keluarga memiliki balita

Unmute

Start Video

Participants 67

Chat

Share Screen

Summary

AI Companion

Record

Reactions

Apps

Whiteboards

Notes

Leave

Type here to search

33°C Cerah

15:07
29/05/2024



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOTULEN RAPAT

Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Jum'at/ 14 Juni 2024	Notulis/ Disiapkan oleh	- Wahyu Ari Safitri - Septiana Rakhmawati, <i>Wahyu Ari Safitri</i>
Waktu	13.00 – 16.00 WIB	Diperiksa oleh	Septiana Rakhmawati, <i>Wahyu Ari Safitri</i>
Pimpinan	Dr. Iln Nadzifah Hamid	Disetujui oleh	Zainal Arifin
Narasumber	1. Zuhdi A, SKM, M.Psi 2. Septiana Rakhmawati, S.Far., Apt		
Tempat	Ruang Kencana		
Peserta	1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajarannya 2. Ketua/ Pengurus DPD IPeKB DIY 3. Ketua/ Pengurus DPC IPeKB Kab/Kota 4. Ketua Tim Kerja dan jajaran 5. Satgas PPS		

A. SAMBUTAN KAPER

- Tahun 2024 adalah tahun transisi politik. Kepala BKKBN dr. (HC) Hasto Wardoyo, Sp Og (K) ingin menutup pemerintahan dengan RPJMN 202-2024 dengan sangat baik. agar kita semua dengan semangat yang sama mengawal program Bangga kencana dan penurunan Stunting.
- Kepada bapak inspektur disampaikan Ada kegiatan-kegiatan momentum/serentak di lapangan mengikuti pola yang diberikan pusat. termasuk dengan kaitan durasi waktu dan besaran target. setelah dihitung dan ditelaah kembali target yang diberikan melebihi kemampuan provinsi.
- terkait dengan percepatan penurunan stunting, diharapkan ada aksi door to door sehingga mampu menurunkan angka penurunan SKI.
- untuk memastikan cakupan kehadiran di posyandu maksimal, dengan minimal kehadiran 95%.
- catatan per hari ini DIY masih dibawah angka nasional, saat ini DIY 21,58% stunting

- mari kita gerakan posyandu yang ada, pastikan kehadiran minimal 95%, libatkan mitra yang ada.
- untuk dapat dikawal setengah bulan juni ini sambil menyusun rencana aksi yang akan dilakukan di triwulan 3 dan 4
- terimakasih atas kinerja dan waktu yang diluangkan oleh bapak ibu dilapangan dan mari kita maksimalkan usaha kita dari tempat kerja kita masing-masing.

B. ARAHAN INSPEKTUR WILAYAH I

- Evaluasi harus dilakukan terhadap program bangga Kencana dan PPS.
- BKKBN berkoordinasi dengan Pemda yang memiliki masyarakat.
- Target Indonesia emas kalau tidak dimulai dari sekarang akan sama kondisinya.
- Jika berbicara angka, itulah angka yang diinfokan. Jangan berlarut dengan pendapat tetapi rencana aksi agar tidak ada lagi stunting baru.
- Mohon kerjasama antar pihak, jangan sectoral
- Berdasarkan data untuk DAK Fisik baru sleman yang sudah realisasi.. yang non fisik sudah on the track meskipun dalam 1 semester belum ada yang 50 %. Untuk dapat dioptimalkan baik fisik maupun BOKB.
- kepada bapak ibu OPD mohon untuk dioptimalkan tenaga kami PLKB dan PKB, harapan kami jika terdapat masalah langsung dilaporkan

C. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Capaian Program Bangga Kencana

Data capaian program per Mei 2024 yang diakses tanggal 12 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

- Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100%
 - BKB: 100%
 - BKR: 100 %
 - BKL: 100 %
 - UPPKA: 100 %
 - PIK-R: 100 %
- Cakupan Pelaporan Yan KB: 99,06 %, KP dan Bantul 100 %, GK 99,08% Sleman 98,07 % dan Kota Yogyakarta 98,51 %. Seluruh yan KB Pemerintah 100%. Yan KB swasta yang belum 100% : saptosari (66,7%); Kalasan(82,4%); Ngaglik (94,4%) dan Jetis (50%)
- Total Pelayanan KB s.d Mei: 117.946 akseptor
- Capaian peserta KB Baru per mix kontrasepsi s.d Mei 2024 sebesar 11.631 akseptor (29,70% dari target KKP sebesar 39.168 akseptor.
- Capaian peserta KB Aktif per mix kontrasepsi sebesar 339.012 akseptor (110,31% dari target KKP sebesar 307.321 akseptor.
- Target mCPR DIY 2024 sebesar 58,20% dan target telah tercapai sebesar 65,95%
- Target unmet need DIY sebesar 15,20% sudah mencapai 12,80% atau 65.808 dari target 514.061 PUS.

- Cakupan pelaporan BKB 99,60 %, BKR 98,27%, BKL 99,37 %, UPPKA 99,14 %, PIK R 97,08 %, PPKS 100 %, BP 98,46% dan PPKBD 97,03 %.
 - Bantul: Pajangan (BKR 0%, BKL 77,8%, PIK- R 66,7 %)
 - Sleman: Cangkringan (UPPKA 75 %), Seyegan (PPKBD 0%), Gamping (BP 0%), Kalasan (BP 75 %)
 - Kota Yogyakarta: Tegalrejo (PIK-R 33,3 %), Gondomanan (PPKBD 0 % dan PIK R 25 %).
- Jumlah anak hadir pertemuan BKB 46,4 %, Hadir BKB menggunakan KKA bulan Mei 12.384 KKA (92,1 % dari total 13.440 yang hadir). Persentase ini menurun jika dibanding bulan April 11.578 KKA (95,2 %% dari total 12.161 yang hadir)

REALISASI ANGGARAN DAK

- Realisasi DAK fisik dan BOKB per 13 Juni 2024
 DAK Fisik: 19,45 % (urutan 4 nasional → Nasional: 2,6 %). Baru sleman yang sudah realisasi anggaran. Bantul dan Kota YK belum realisasi anggaran
 BOKB: 32,14 % (urutan 1 nasional → Nasional 9,55 %)
 Realisasi Kabupaten/Kota: Sleman (37,16 %), KP (33,02 %), Bantul (31,51%), GK (31,46), kota YK (92,82%)

KETERSEDIAAN ALKON

- Ketersediaan alkon di Gudang provinsi per 31 mei 2024
 IUD: 7,64 bulan
 Pil Kombinasi: 13,17 bulan
 Pil Progestin: 2,43 bulan
 Kondom: 9,85 bulan
 Suntik Progestin: 2,89 bulan
 Implan 1 batang: 11,10 bulan
 Implan 2 batang: 6,94 bulan

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

- Berdasarkan dashboard kemenkes untuk intervensi pencegahan stunting
 GK : 39,6 %
 Kota 28,8%
 bantul 28,5%
 sleman 7, 84 %
- audit kasus stunting DIY BOKB 15,1%, 75%kabupaten telah melaksanakan desiminasi AKS kecuali sleman (baru kajian kasus) karena sudah masuk semester 2.
- semester 1 AKS akan closing
- konvergensi pelaporan tpps bulan juli (semester 1)
- pendampinganTPK melalui elsimil telah berkoordinasi melalui gform, semoga elsimil memberikan tingkat yg bagus.

D. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

Wildan (Sleman)

- Intervensi serentak koord dg Dinkes sehingga mengikuti ritme kerja mereka. Sampai kemarin masih 6. Jawaban dinkes akan tercapai sesuai target.
- DAK dibawah kewenangan OPD KB sehingga dapat dikondisikan
- Ada keuntungan karena DAK fisik utk pengadaan kendaraan bermotor, mudah untuk belanja.

Wiwik (Sleman)

- DAK Fisik memang sebentar lagi 100%. 21 juli 2024 harus sudah selesai karena hanya 1 salur. Kurang BP . Terkendala juknis krn menunggu ttd presiden. Sleman berani merealisasikan anggaran karena punya dasar sudah punya pagu dari BKKBN dan kemenkeu. Yakin spek motor tidak akan berubah.

Radiyanto (Bantul)

- PSA terbaik tetapi stok alkon masih banyak. Akan dilakukan kroscek Pelaporan, masih perlu diperbaiki.

Reni (Bantul)

- Terkait anggaran BOKB khusus point penggerakan kampung KB kebetulan masih belum ada serapan di pembekalan dan penguatan kampung KB, sudah dilaksanakan namun belum pembukuan di SIPD
- Dukungan KIE terjadwal di bulan juli dan Agustus

Amirudin (GK)

- Untuk kegiatan gertak stunting di GK penimbangan dilaksanakan s.d tgl 15. Sesudah tanggal 15 akan ada penyisiran. Tgl 29 insyaalloh laporan bisa di rekap.
- Untuk bulan juli akan di TL dengan 7 pasti.
- Untuk kegiatan PSA tidak bisa evaluasi krn besarnya blm mendapat informasi yang jelas. Misal PB dan Unmet Need tidak seimbang.hanya disodori target. Ada beberapa masukan bidan: untuk implant saat cabut banyak yang patah saat dilepas. Implant baru sesudah bbrp bulan pemasangan banyak yang mengalami spotting. Kelengkapan implant untuk plester tidak lengket.
- Gertak stunting dari 6 kementerian, untung saja permintaanya sama. Tolong Bersama maintenance PKB/kader.
- Infantometri , kader tidak tega menekan bayi supaya lurus. Panjang badan harus diukur tanpa pempers
- Mengumpulkan catin dan manten baru tidak perlu krn hasil kurang efektif. Kalau mau melihat ke KUA atau BP.

Herristanti (Kota YK)

- Realisasi anggaran belum ada untuk DAK Fisik tetapi sudah berkontrak untuk kendaraan roda 2 dan roda 4
- BOKB on the track sesuai tatakala Kota YK
- PSA capaiannya masih belum optimal karena banyak event yang berurutan. Untuk momentum dengan banyak akseptor kota sudah tergopoh-gopoh. Strategi yang dipetakan adalah ngopeni yang kecil2 yang sifanya rutin (tiap minggu pelayanan) kalau dijumlah lumayan. Seperti di

PMB IBI melati setiap minggu ada layanan (5-10). Dari hasil rekapan yang paling tinggi untuk serapan BOKB.

- Kondisi alkon khususnya pil progestin, stock berlebih dan akan ED di akhir tahun ini. Saat permohonan tidak terlalu banyak, diberi secara berlebih sehingga menumpuk di Gudang. selain itu permintaan faskes sangat sedikit, bahkan yang menerima masih menumpuk. Pil kombinasi ED April 2026
- Gertak stunting sudah koordinasi secara intens dg TPPS tk kota. Agar diberikan akses/feedback pelaporan.

Hayu (kota Yogyakarta)

- Penggerakan Kampung KB realisasi masih sedikit karena kegiatan di KKB untuk tata kala di kota mulai mei-okt.
- Kegiatan KKB melibatkan fapsedu tidak hanya pokja di KKB.
- Uma (kota Yogyakarta)
- Pelayanan MKJP di kota Yk sudah berjalan lancar meskipun secara capaian paling rendah tetapi targetnya bukan tidak terpenuhi tetapi karena besaran anggaran yang untuk MKJP berbeda dengan besaran di kab lain.
- Untuk MOP sudah mencapai target, sudah inden 5-7, MOW insyaalloh bulan ini selesai. Mungkin di perubahan akan melakukan revisi penambahan MOW dan MOP
- AKS akan selesai bulan ini tetapi narsum baru di LN sehingga insyaalloh juli yang tahap 2 dengan beda lokasi. 4 kalurahan yang akan di audit di semester 2 shg sbm dana perubahan diketok kegiatan sudah selesai.

Witriastuti

- Bapanas PIC gertak di DIY dan jabar .Banyak K/I yang turun langsung
- Terkait capain siga 1000 HPK masih rendah.
- Kehadiran ke BKB dan pemakaian KKA juga harap diperhatikan

Kanthi

- Pendampimngan catin dan pasangan pengantin baru merupakan TL dari surat deputi adpin dan VM. Untuk 1 prov diambil 2 kab yang angka stuntingnya masih tinggi. Akan dilakukan tanggal 21 juni

Fathurachman

- Terimakasih banyak kepada OPDKB dan PKB bahwa sampai sekarang telah melalui kegiatan momentum.
- Pengadaan selesai hari ini dengan barang as.mefenammat
- Tentang implant terimakasih masuknya. Implant perlu penanganan yang spesifik, Penyimpanan memang lebih spesifik. ketika sampai faskes FKTP/jejaring penyimpanan kurang memadai.
- BOKB pelayanan KB agar laporan bulanan manual capaian akseptor KB secara rutin dikirim ke bidang KB. Laporan yang lengkap baru sleman dan GK. Minggu depan akan ada monev triwulanan oleh dityansus.
- Dasar breakdown target adalah mou PPM semua pencapaian. Yang sudah breakdown sampai kalurahan adl kota Yogyakarta.

Yuni

- Acara sleman tgl 15 Juni 2024 merupakan Internal kegiatan pembinaan terkait TPK
- Menunggu jumlah peserta harganas untuk LO
- Terkait golantang untuk kembali mengingatkan kader dan lansia untuk memanfaatkan.
- Harganas provinsi menunggu alternative 21-22 juni, menunggu jadwal taman budaya.

Ita suryani

- Terimakasih GDPK DIY sudah 5 pilar, mendorong Bantul dan GK untuk bisa melengkapi dengan payung hukum
- Sleman kota KP telah membentuk SSK. Di GK blm ada SSK tk SMP yang terbentuk.
- SSK Bantul telah terbentuk namun blm ada SK sehingga belum dapat terlapor/diakui, mhn bantuanya
- Pengumuman RDK masih menunggu hasil lomba RDK yang digital dan konvensional, akan diberikan tanggal 26 juni malam.

Sofia

- Terimakasih sleman dan kota Yk untuk 2024 blm ada yang lolos Apresiasi DAK karena penilaian yang digunakan dengan membandingkan capaian 2022 dan 2023. Jika capaian turun otomatis nilai "0".

Nurhadi

- PSA kalau dianalisa dari tahun ke tahun. PSA hanya tercatat di 1 hari saja sehingga menyusahkan pelaksana

KESIMPULAN

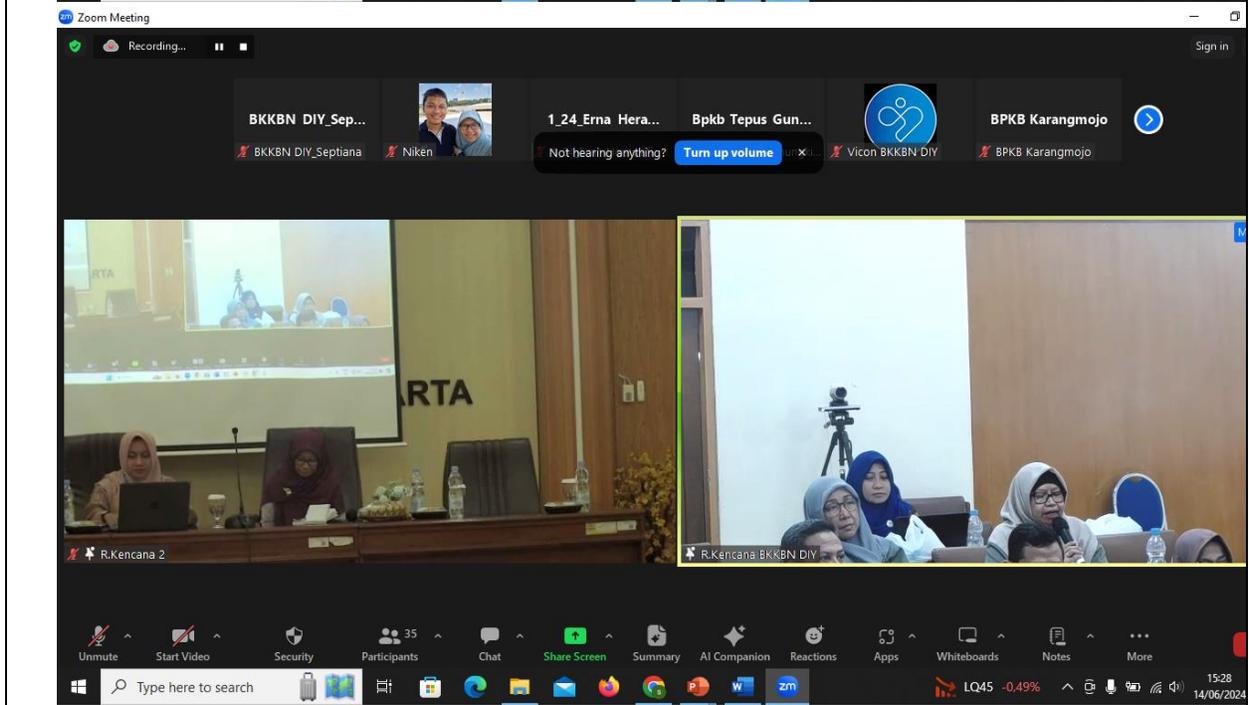
- intervensi serentak sudah semua bergerak di kab/kota. Agar dimaksimalkan, monev dari berbagai K/L
- Kegiatan DAK Fisik dan BOKB telah terlaksana tinggal pelaporan/ adm keuangan yang belum selesai
- Mohon perhatian terkait pelayanan KB untuk alkon yang stock out karena pelayana tetap harus berjalan.
- Pencatatan siga agar diperhatikan.

E. DOKUMENTASI











Zoom Meeting

Recording... Sign in View

BKKBN DIY_Sep... Jumadal, Patuk BPKBPaliyan Seno Latbang

BKKBN DIY_Septiana Jumadal, Patuk Not hearing anything? Turn up volume x Latbang Datin BKKBN DIY

Participants (16)

Find a participant

- BD BKKBN DIY_S... (Co-host, me)
- Vicon BKKBN DIY (Host)
- RB R.Kencana BKKB... (Co-host)
- Vicon BKKBN DIY (Co-host)
- LB Latbang BKKBN Jogja

Invite Mute All

Radalgram DIY

Who can see your messages? Recording

To: Meeting Group Chat

Message Radalgram DIY

Unmute Start Video Security Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes More Leave

Type here to search

Rekor tertinggi 13:19 14/06/2024

Zoom Meeting

Recording... Sign in

BKKBN DIY_Sep... Jumadal, Patuk BPKBPaliyan Seno Latbang Datin BKKBN DIY

BKKBN DIY_Septiana Jumadal, Patuk Not hearing anything? Turn up volume x Latbang Datin BKKBN DIY

Participants (16)

Find a participant

Waiting Room (3) Message Adm

- BT BPKB Tanjungsari
- WN warti ningsih
- BT Bpkb Tepus Gunungkidul DIY

Invite Mute All

Radalgram DIY

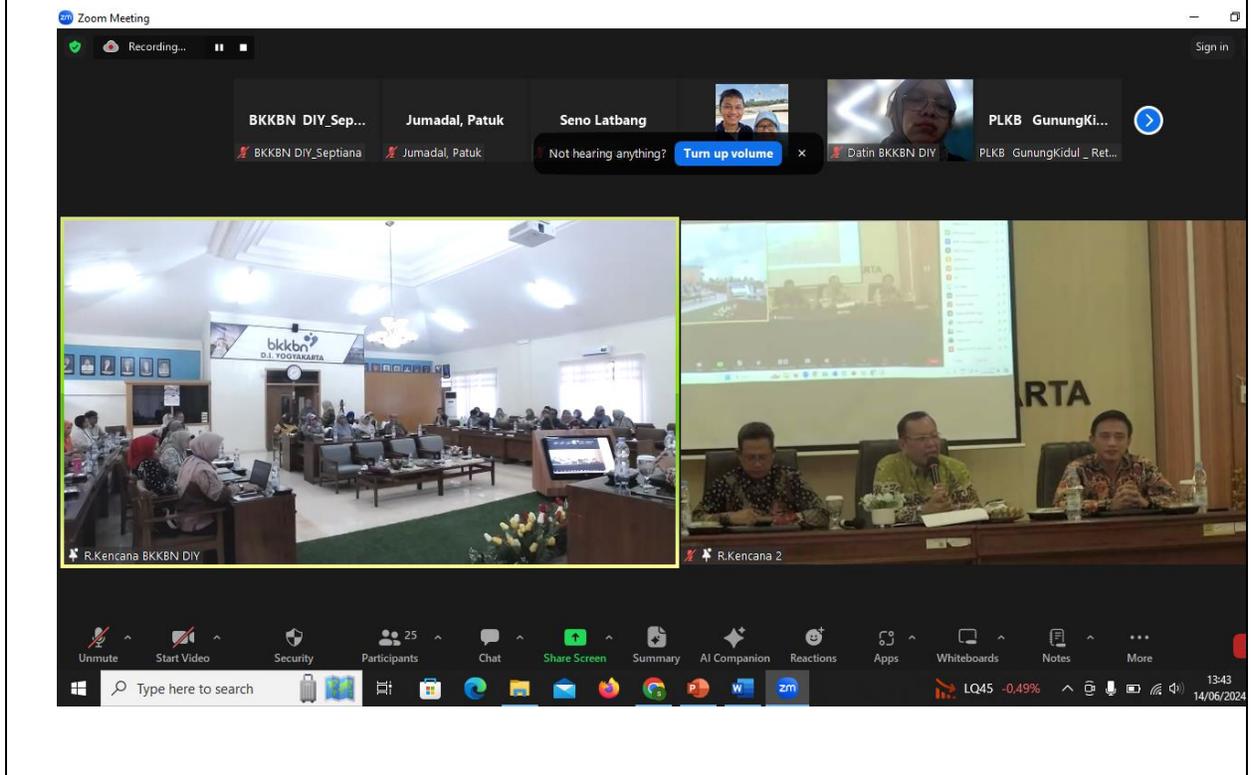
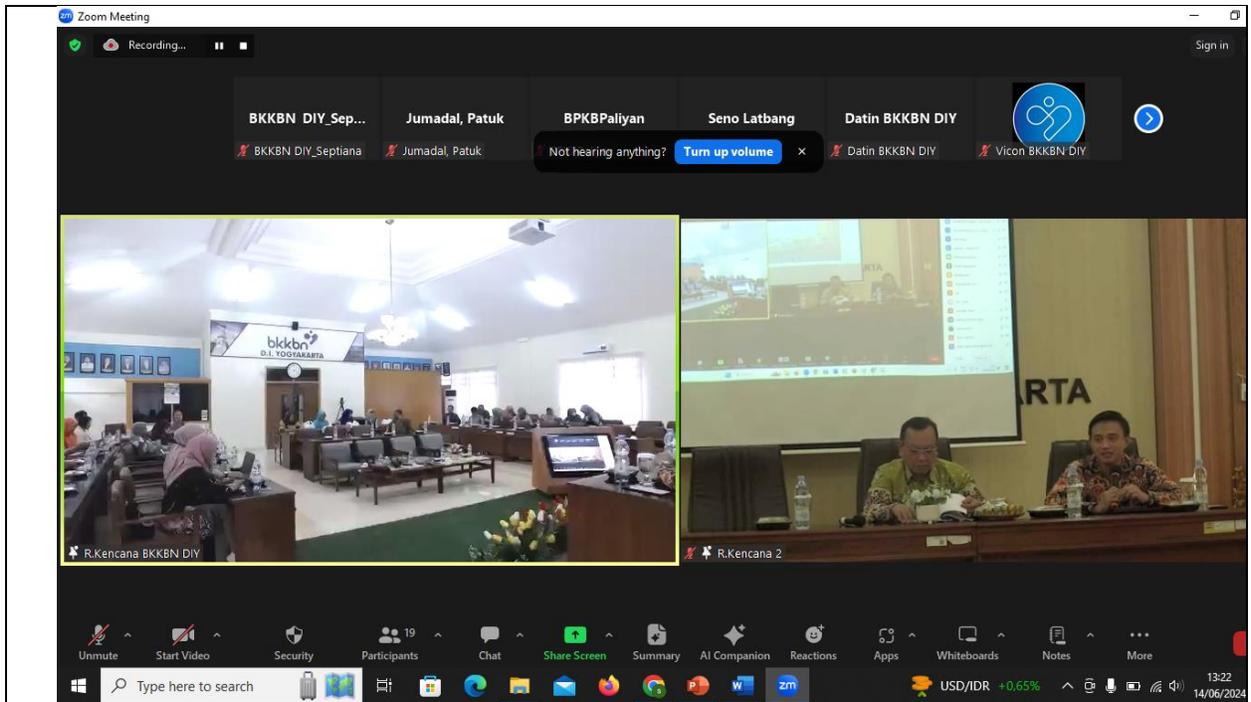
Who can see your messages? Recording

To: Meeting Group Chat

Message Radalgram DIY

Type here to search

USD/IDR +0.65% 13:22 14/06/2024



Zoom Meeting

Recording... Sign in View

BKKBN DIY_Sep... 1_24_Erna Hera... PLKB GunungKi...

BKKBN DIY_Septiana Niken Not hearing anything? Turn up volume PLKB GunungKidul_Ret...

Participants (27)

Find a participant

- BD BKKBN DIY_S... (Co-host, me)
- Vicon BKKBN DIY (Host)
- RB R.Kencana BKKB... (Co-host)
- 1H 1_24_Erna Herawati
- 2P 2_17_Doni Prawoto
- A Ana Anisa
- A- Anjania - Dalduk DIY
- BK BPKB Karangmojo
- BT Bpkb Tepus Gunungkidul DIY
- B BPKB_Tanjungsari
- B BPKBPaliyan
- Dalduk DIY
- DB Datin BKKBN DIY
- D diy

Unmute Start Video Security Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes More Leave

Type here to search 32°C Sebagian cerah 13:59 14/06/2024

Recording... You are viewing R.Kencana BKKBN DIY's screen View Options Sign in View

Not hearing anything? Turn up volume

bkkbn
Yogyakarta

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Data s.d. Mei 2024

Tiker Plastik
Tim kerja pelaporan dan statistik dan penge...

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Ask to Unmute

BKKBN DIY_Sep...

BKKBN DIY_Septiana

R.Kencana BKKBN DIY

Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Summary AI Companion Reactions Apps Whiteboards Notes More Leave

Zoom Meeting | You are viewing R.Kencana BKKBN DIY's screen | View Options

Participants (30)

Find a participant

BD BKKBN DIY_S... (Co-host, me) [Mute] [Video Off] [Share Screen]

Vicon BKKBN DIY (Host) [Mute] [Video Off] [Share Screen]

RB R.Kencana B... (Co-host) [Mute] [Video Off] [Share Screen]

DB Datin BKKBN DIY [Mute] [Video Off] [Share Screen]

EG Erlando_TA Gunungkidul [Mute] [Video Off] [Share Screen]

1H 1_24_Erna Herawati [Mute] [Video Off] [Share Screen]

2P 2_17_Doni Prawoto [Mute] [Video Off] [Share Screen]

3 373762 [Mute] [Video Off] [Share Screen]

A Ana Anisa [Mute] [Video Off] [Share Screen]

A- Anjania - Dalduk DIY [Mute] [Video Off] [Share Screen]

BK BPKB Karangmojo [Mute] [Video Off] [Share Screen]

BT Bpkb Tepus Gunungkidul DIY [Mute] [Video Off] [Share Screen]

B BPKB_Tanjungsari [Mute] [Video Off] [Share Screen]

B BPKBPaliyan [Mute] [Video Off] [Share Screen]

Invite | Mute All

YAN-KB, POKTAN, SETARA POKTAN, SARANA & SDM MEI 2024

KABUPATEN	YAN-KB	BKB	BKR	BKL	UPPKA	PIK-R	KAMPUNG KB	RUMAH DATAKU	PPKS	BP	PPKBD
KULON PROGO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BANTUL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
GUNUNG KIDUL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
SLEMAN	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
KOTA YOGYAKARTA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DIY	100,0%										

UPDATE K/0
SUDAH 100%!!

Reminder!!
 Seluruh K/0 (Kartu Pendaftaran) wajib dilakukan updating/ pemutakhiran setiap awal tahun.

Unmute | Start Video | Security | Share Screen | Summary | AI Companion | Apps | Whiteboards | Notes | More | Leave

Type here to search | 32°C Sebagian cerah | 14:06 14/06/2024

Zoom Meeting | You are viewing R.Kencana BKKBN DIY's screen | View Options

Participants (30)

Find a participant

BD BKKBN DIY_S... (Co-host, me) [Mute] [Video Off] [Share Screen]

Vicon BKKBN DIY (Host) [Mute] [Video Off] [Share Screen]

RB R.Kencana B... (Co-host) [Mute] [Video Off] [Share Screen]

DB Datin BKKBN DIY [Mute] [Video Off] [Share Screen]

EG Erlando_TA Gunungkidul [Mute] [Video Off] [Share Screen]

1H 1_24_Erna Herawati [Mute] [Video Off] [Share Screen]

2P 2_17_Doni Prawoto [Mute] [Video Off] [Share Screen]

3 373762 [Mute] [Video Off] [Share Screen]

A Ana Anisa [Mute] [Video Off] [Share Screen]

A- Anjania - Dalduk DIY [Mute] [Video Off] [Share Screen]

BK BPKB Karangmojo [Mute] [Video Off] [Share Screen]

BT Bpkb Tepus Gunungkidul DIY [Mute] [Video Off] [Share Screen]

B BPKB_Tanjungsari [Mute] [Video Off] [Share Screen]

B BPKBPaliyan [Mute] [Video Off] [Share Screen]

Invite | Mute All

CAKUPAN LAPORAN YAN KB MEI 2024

No	KABUPATEN	%YAN KB PEMERINTAH	%YAN KB SWASTA	TOTAL YAN KB
1	KULON PROGO	100,00%	100,00%	100,00%
2	BANTUL	100,00%	100,00%	100,00%
3	GUNUNG KIDUL	100,00%	98,68%	99,08%
4	SLEMAN	100,00%	97,69%	98,07%
5	KOTA YOGYAKARTA	100,00%	97,73%	98,51%
	DIY	100,00%	98,78%	99,06%

CAKUPAN YAN KB

LAPOR 99,06%

Ket.

80 – 100 %

50 – 59,9 %

79,9 %

< 50 %

HOSPITAL

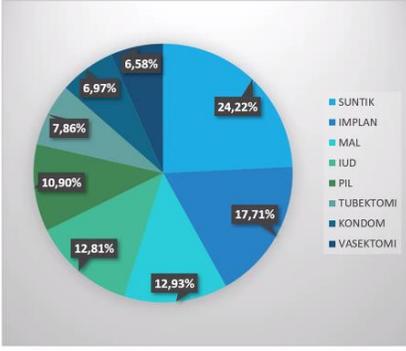
Unmute | Start Video | Security | Share Screen | Summary | AI Companion | Apps | Whiteboards | Notes | More | Leave

Type here to search | 32°C Sebagian cerah | 14:06 14/06/2024

Zoom Meeting | You are viewing R.Kencana BKKBN DIY's screen | View Options

Participants (31)

CAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI MEI 2024



JENIS ALOKON	KKP DIY 2024	CAPAIAN	%
SUNTIK	62.763	127.511	203,16%
IMPLAN	19.307	28.680	148,55%
MAL	248	269	108,47%
IUD	82.123	88.260	107,47%
PIL	27.173	24.844	91,43%
TUBEKTOMI	23.346	15.392	65,93%
KONDOM	89.691	52.582	58,63%
VASEKTOMI	2.670	1.474	55,21%
TOTAL	307.321	339.012	110,31%

System tray: Unmute, Start Video, Security, Share Screen, Summary, AI Companion, Apps, Whiteboards, Notes, More, Leave. Taskbar: Windows search, LQ45 -0,49%, 14:12 14/06/2024.

Zoom Meeting | You are viewing R.Kencana BKKBN DIY's screen | View Options

Participants (33)

KEIKUTSERTAAN KELUARGA ANGGOTA BKB DAN BUKAN BKB HADIR DALAM PERTEMUAN BKB

KABUPATEN/KOTA	SASARAN ANGGOTA BKB 2024	BKB						HADIR TAPI BUKAN ANGGOTA BKB	
		Apr-24			May-24			Apr-24	May-24
		ANGGOTA	HADIR	%	ANGGOTA	HADIR	%		
KULON PROGO	25.416	6.773	2.071	30,6%	6.773	2.739	40,4%	0	1
BANTUL	59.466	5.785	2.097	36,2%	5.786	2.289	39,6%	1	2
GUNUNGKIDUL	41.615	5.310	3.039	57,2%	5.311	3.155	59,4%	39	34
SLEMAN	59.368	3.690	1.362	36,9%	3.727	1.434	38,5%	163	194
KOTA YOGYAKARTA	13.959	4.491	2.410	53,7%	4.567	2.527	55,3%	310	292
DIY	199.824	26.049	10.979	42,1%	26.164	12.144	46,4%	513	523

System tray: Unmute, Start Video, Security, Share Screen, Summary, AI Companion, Apps, Whiteboards, Notes, More, Leave. Taskbar: Windows search, USD/IDR +0,74%, 14:19 14/06/2024.

Zoom Meeting | You are viewing R.Kencana BKKBN DIY's screen | View Options

Recording... | Not hearing anything? Turn up volume

TARGET KEMERDEHAAN 2024

KELUARGA DENGAN BADUTA YANG MENDAPATKAN FASILITASI DAN PEMBINAAN 1000 HPK

NO(KAB/KOTA	PUS HAMIL*	KELUARGA* PUNYA BADUTA	TOTAL*	Capaian Kumulatif 2024
					s.d. Mei 2024
1.	BANTUL	5.659	11.171	16.830	991 (5,89%)
2.	SLEMAN	5.294	11.393	16.687	181 (1,08%)
3.	GUNUNG KIDUL	3.967	7.836	11.803	827 (7,01%)
4.	KULON PROGO	2.528	4.745	7.273	1.184 (16,28%)
5.	KOTA YOGYAKARTA	1.272	2.857	4.129	1.938 (46,94%)
TOTAL		18.720	38.002	56.722	5.121 (9,03%)

Sumber Target* : Keputusan Deputi Bidang KSPK No: 1/KEP.KSPK/F1/2024
 Sumber Capaian : Tabel 3D SIGA

Zoom Meeting | Participants (34)

Unmute | Start Video | Security | Share Screen | Summary | AI Companion | Apps | Whiteboards | Notes | More | Leave

32°C Sebagian cerah | 14:29 | 14/06/2024

Zoom Meeting | Recording... | Sign in | View

BKKBN DIY_Sep... | Datin BKKBN DIY | 1_24_Erna Hera... | Bpkb Tepus Gun... | bkkbn D.I. YOGYAKARTA

Zoom Meeting | Participants (36)

Unmute | Start Video | Security | Share Screen | Summary | AI Companion | Apps | Whiteboards | Notes | More | Leave

32°C Sebagian cerah | 14:50 | 14/06/2024



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOTULEN RAPAT

Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Rabu/ 24 Juli 2024	Notulis/ Disiapkan oleh	Septiana Rakhmawati, 
Waktu	13.00 – 16.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan	Rohdhiana	Disetujui oleh	Zainal Arifin
Narasumber	1. Zuhdi A, SKM, M.Psi 2. Septiana R		
Tempat	Ruang Kencana		
Peserta	1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajaranya 2. Ketua/ Pengurus DPD IPeKB DIY 3. Ketua/ Pengurus DPC IPeKB Kab/Kota 4. Ketua Tim Kerja dan jajaran 5. Satgas PPS		

A. SAMBUTAN SEKBAN

- Radalgram kali ini untuk melihat sejauh mana capaian yang sudah dicapai s.d bulan Juni
- Dengan melihat dan mengevaluasi, diharapkan masukan terkait kendala untuk mencari solusi.
- Plt. Kaper belum dapat bergabung karena masih ada acara dengan BKKBN Pusat, akan bergabung nanti. Terima kasih atas kehadiran bapak/ibu sekalian.

B. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Capaian Program Bangga Kencana

Data capaian program per Juni 2024 yang diakses tanggal 16 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

- Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100%
 - BKB: 100%
 - BKR: 100 %
 - BKL: 100 %
 - UPPKA: 100 %
 - PIK-R: 100 %

- Cakupan Pelaporan Yan KB: 99,53 %, Bantul, GK dan Kota YK 100 %, KP 97,80% Sleman 99,51 % Yan KB Pemerintah yang belum 100%: Sleman 97,06→ depok. Yan KB swasta yang belum 100% : Kulonprogo (96,97)→ wates
- Total Pelayanan KB s.d Juni: 151.389 akseptor
- Capaian peserta KB Baru per mix kontrasepsi s.d Juni 2024 sebesar 15.202 akseptor (38,81% dari target KKP sebesar 39.168 akseptor.
- Capaian peserta KB Aktif per mix kontrasepsi sebesar 313.181 akseptor (101,91% dari target KKP sebesar 307.321 akseptor.
- Target mCPR DIY 2024 sebesar 58,20% dan target telah tercapai sebesar 61,02%
- Target unmet need DIY sebesar 15,20% sudah mencapai 12,90% atau 66.216 dari target 513.209 PUS.
- Cakupan pelaporan BKB 99,73 %, BKR 98,59%, BKL 99,12 %, UPPKA 99,87 %, PIK R 98,31 %, PPKS 98,48 %, BP 98,46% dan PPKBD 97,72 %.
 - Bantul: Pajangan (BKR 50%)
 - Sleman: Kalasan (PPKBD 75 %)
 - Kulonprogo: Kokap(PPKS 0 %), Kalibawang (PPKBD 0 % dan BP 0%).
 - Kota YK: Tegalrejo (BKR 57,14 %; PPKBD 50 %); Wirobrajan (BKR 70%; PPKBD 0 %); Ngampilan (BKL 50 %), Gondomanan (PIK R 75 5)
- Jumlah anak hadir pertemuan BKB 46,9%, Hadir BKB menggunakan KKA bulan Juni 13.237 anak (96,0 % dari total 13.787 yang hadir). Persentase ini meningkat jika dibanding bulan Mei 11.578 anak (92,1 % dari total 13.440 anak yang hadir)

REALISASI ANGGARAN DAK

- Realisasi DAK fisik dan BOKB per 23 Juli 2024
 DAK Fisik: 19,68 % (urutan 5 nasional→ Nasional: 6,86 %). Baru sleman dan Kota YK yang sudah realisasi anggaran. Bantul belum realisasi anggaran
 BOKB: 42,02 % (urutan 1 nasional → Nasional 22,47 %)
 Realisasi Kabupaten/Kota: Sleman (49,88 %), KP (44,01 %), Bantul (37,44%), GK (42,19), kota YK (31,42%)

KETERSEDIAAN ALKON

- Ketersediaan alkon di Gudang provinsi per 30 juni 2024
 IUD: 18,64 bulan
 Pil Kombinasi: 8,53 bulan
 Pil Progestin: 1,06 bulan
 Kondom: 5,24 bulan
 Suntik Progestin: 21,86 bulan
 Implan 1 batang: 3,81 bulan
 Implan 2 batang: 16,03 bulan

C. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

MZ faturahman

- Telah berkoordinasi dengan Kab/kota, satgas PPS, PKB, IBI dan timja linlap dan Statistik terkait dengan pelayanan KB serentak Pekan pelayanan KB Pasca Salin dalam rangka hari kependudukan sedunia, 100.000 akseptor 19 Juli – 5 agustus 2024. Target KBPP DIY ibu bersalin 19 juni- 5 agustus, agar bisa dilayani pada 19 juli – 5 agustus. Mohon pemenuhan alkon jika masih kurang agar segera mengajukan ke provinsi.

Yuni Hastutiningsih

- Terimakasih atas partisipasi dan bantuan dalam Harganas 31. Harganas tahun 2025 penyelenggaranya adalah sleman
- Sekolah lansia. Untuk sleman krn sudah ada sekolah lansia S1 maka akan meminta S2. Mhn untuk disiapkan anggaran melalui APBD
- Kelompok UPPKA yang belum mempunyai NIB agar mendaftar.

Rohdhiana Sumariati

- Terkait pelaksanaan harganas, giliran berubah sejak pandemic covid. Tahun 2019 ada pandemic, tahun 2020 ada harganas virtual, yang mestinya menjadi tuan rumah harganas prov adalah GK. Yang menjadi lokus kelima kab adalah kab GK. Tahun 2021 virtual di pracimosono, karena tidak ada perayaan secara nasional. Harganas tahun 2022 di Kota YK. Tahun 2023 di Bantul. Tahun 2024 di KP sehingga urutan berikutnya Sleman

Witriastuti

- Target ketahanan keluarga dan pencegahan stunting, mohon kerjasama untuk melaporkan setiap bulan.
- Kerabat (Kelas Orang Tua Hebat) sebagai pembelajaran bagi kader, TPK, PKB agar dapat diikuti. Saat ini sudah seri ke-5 dari 11 seri. 29 juli akan offline dari GK. Untuk yang online agar dapat disebarluaskan. Target 300 peserta baru sekitar 100.
- Pemilihan dugen. Tanggal 17-21 september akan diadakan apresiasi dugen dan ajang jambore nasional, untuk menyemarakkan kegiatan ada surat ke Gubernur, Bupati/walkota di Sanur Denpasar, Bali. DIY akan mengirinkan 1 pasang (dari PIK R UII dan UAD).
- Mengadakan pembekalan terkait modul tentang kita bagi dugen kalurahan. Dilaksanakan secara online, tetapi kehadiran dugen masih rendah hanya 60-70%. Apakah di OPD KB /APBD ada dukungan untuk penyelenggaraan secara luring.
- Apakah forum anak bisa dikaitkan dengan dugen? Karena forum anak ada dukungan APBD.
- BKB Kit masih belum ada realisasi.

Sofia

- DAK TA. 2025 yang mendapat DAK Fisik Bantul, KP, GK. Usulan DAK fisik pada aplikasi Krisna. Untuk kab. KP dan Bantul usulan diatas 5 M, menjadi sorotan agar menurunkan usulan dibawah 5 M.
- Menu yang dibuka di KP menu VTP kit, Laparoskopi dengan kamera dan monitor, implan removal kit,. IUD kit, Rehab Balai. Koordinasi dan negosiasi rehab balai yang lolos 10 BP, sedangkan BP yang perlu rehab malah tidak mendapatkan usulan. Lokus pada KRISNA sudah dikunci. Girimulyo tdk mendapat rehab.

- Bantul masih tetap dengan usulan 5,1 M untuk menu VTP, minilaparotomy, Implan, IUD kit, rehab dan kelengkapan balai. Hasil penilaian PU semua balai di rehab dengan 350juta
- GK 394.500.0000 untuk Implan removal kit dan IUD Kit. Belum ada pengadaan sarana pengolahan data.
- BOKB usulan 2025 akan ditutup 31 Juli 2024.
- Usulan BOKB baru pertama input pada KRISNA, untuk OPD tk prov DP3AP2 akan mendapat BOKB stunting sebesar 200 juta untuk koordinasi TPPS.
- Bantul pagu yang tersedia 7M, GK 7,4 M, KP 5,7 M, Sleman 8,7 M dan kota YK 3,3M.
- Pengisian usulan BOKB di Krisna sangat rigid.

Lidwina

- KP dan GK untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Penurunan stunting BPKP, koordinasi dengan tim ZIWBK

Ambar Jazil KP

- Terkait harganas, atas nama pemerintah KP khususnya PMD dalduk KB KP menghaturkan terimakasih atas dukungan kerjasama sehingga pelaksanaan berjalan lancar, dan mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kedepan lebih baik
- IKU sudah tercapai, nyicil ayam tetapi tidak boleh terlena.
- Terkait stunting evaluasi BPKP akan dicermati kembali.
- Di KP ada 3 OPD yang mengampu stunting Dinkes, OPD KB, bapeda. Di KP koordinatornya malah di OPD KB, sementara amanat tim penurunan stunting bukan OPD KB sehingga akan dikoordinasikan.
- Intervensi kehadiran anak 100 % dari hasil itu terkoreksi 10,37 % yang stunting semoga dapat diakui sebagai koreksi

Wildan

- Tahun ini rehab BP di Godean, secara fisik 100 % selesai tinggal penyelesaian pembayaran.
- Harganas 2025 di sleman akan dikomunikasikan
- Progres pengukuran balita 96 % menyelesaikankn 23 balita yang tidak terukur, semoga bulan agustus bisa dimaksimalkan pengukuran.
- Melaksanakan rapat kerja dinkes tentang stunting ada hal yang perlu disikapi bahwa pembicaraan stunting di hotel tetapi yang dibicarakan anak yang kurang gizi. Hendaknya pembicaraan tidak di hotel tetapi mungkin bisa di balai yang stuntingnya tidak banyak.
- Tanggal 1 agustus akan menyelenggarakan peringatan Harganas dan hari anak nasional, mengundang kaper dan jajaran 15 orang. Di joglo serbaguna dan melibatkan UMKM.

Sarmin Kota Yk

- Capaian untuk DAK Fisik s.d juli belum, karena di design di bulan agustus menunggu perubahan karena pada setting anggaran keliru rekening. Kontrak sudah dilaksanakan.
- Kegiatan bulan juli, agustus, September akan mengadakan survey ketahanan keluarga sebagai amanat perda/perwali. 89ribu KK s.d update 23 juli data keluarga yang disurvei 3182 KK. Sosialisasi sudah dilakukan secara masiv, jumpa pers, RRI, greeting walikota, Surat edaran pemkot. Pengambilan video ketika survey ke ngarso dalem dan paduka paku alam. Amanat

perwal sekaligus bahan RPJMD 2025. Agar diberikan data sesuai kondisi riil yang ada. Agar dokumen administrasi kependudukan dipersiapkan.

Amir GK

- BOKB memang belum terealisasi pelayanan MOP. Tidak diTL setelah di meja operasi karena ketakutan
- BKB Kit agustus
- Intervensi stunting 100% dari hasil evaluasi angka 17,2 % stunting. Hasil evaluasi sangat dimungkinkan karena masalah teknis pengukuran. Rencana bulan agustus dilakukan gertak bersamaan dengan bulan vit. A
- Terkait dengan 7 permasalahan stunting hasil verval, diantara keluarga resiko stunting ada permasalahan kesertaan KB. Agustus dan September diadakan baksos untuk keluarga rawan stunting bermasalah kesertaan KB sebagai sasaran utama. Untuk menysasar KRS yang belum JKN
- Akan menindaklanjuti hasil evaluasi BPKP.
- Harganas 31, ada salah satu PKB yang ikut di lomba Nasional ketika di Harganas DIY tdk mendapat apresiasi.
- Kegiatan banyak tetapi rapat butuh 2 hari, jika dianggap baik silahkan diteruskan tetapi jika kab tidak dapat menanggapi dengan baik kami mohon maaf.

Rohdhiana Sumariati

- Mohon maaf atas nama panitia harganas, sebagai evaluasi bersama.

Wulandari Bantul

- Capain kinerja bagaimanapun akan menerima sebagai bahan evaluasi bersama lini lapangan capaian layanan KB maupun poktan
- Terkait serapan anggaran untuk TPK honor dan pulsa tidak bisa lancar setiap bulan, 2 bulan keg baru di SPJkan, mei, juni, juli belum bisa dibayarkan. Teman lapangan belum lengkap SPJ nya.
- Ketersediaan alkon bulan juli sudah aman
- Kegiatan stunting diakhir intervensi 99,26 % dengan balita stunting 9,24 %.
- Genre dari APBD untuk 2024 terbatas sehingga ada 2x pertemuan untuk edukasi gizi remaja(mengundang semua PIK R) sekitar April akhir. Kegiatan untuk dugen kalurahan untuk 50 Orang sehingga tdk bisa semua dihadirkan, hanya perwakilan kapanewon. Langsung dikawal oleh bunda genre/ibu bupati sehingga makin mantap sebagai motiovator.

Asih IPeKB Kab. Bantul

- Capaian akan disampaikan ke PLKB untuk dapat ditindaklanjuti terutama untuk kegiatan tribina sehingga bulan berikutnya bisa 100 %
- IPeKB bakti social dengan memberi bingkisan kepada warga di kampung KB dengan mengundang difabel dan warga kampung KB
- IPeKB Bantul melaksanakan road show ke srandakan dalam rangka ultah IPeKB kab Bantul pada tanggal 26 Juli 2024

Ardini IPeKB Sleman

- Apresiasi lomba masukan dari wilayah, tidak sebanding dengan effortnya.

Nurhadi IpeKB

- DPC IPeKB kab Bantul mengadakan rangkaian kegiatan ultah IPeKB ke-17 tanggal 26 Juli
- PIT (Pertemuan Ilmiah tahunan) tanggal 30 Juli 2024 teman-teman yang lolos akan presentasi di Jakarta namun sampai sekarang surat belum turun yang ikut 2 orang yang lolos 1 Chalimah Candra Dewi.

D. ARAHAN KAPER

- Setiap bulan data dilaporkan , bentuk kerjasamaa di prov adalah belanja masalah dan belanja solusi.
- Bulan juli adalah data bulan juni termasuk mempersiapkan prosesi tutup buku dengan capaian yang terpantau.
- DAK fisik semoga segera bergerak.
- BOKB juga harus diperhatikan, pastikan menu belanja sesuai dengan juknis.
- Apresiasi dalam gertak stunting DIY 99,84 %
- Menunggu surat pusat untuk kegiatan IPeKB.
- Intervensi serentak, BOKB harapannya kita memposisikan diri sebagai sekretaris TPPS prov/kb. Evaluasi semester I sudah belum, apa rencana semester II. Sudah adakah rembuk stunting? Pertemuan dengan OPD lain.
- Pastikan semua OPD terlibat dalam intervensi baik sensitive maupun spesifik
- Lokus stunting di DIY harapannya menemukan kasus unik yang akan dinaikan dalam forum AKS nasional. Semua memantau ke DIY meskipun hanya 5 kab/kota pastikan TPK, satgas punya data akurat.
- Sleman sebagai tuan rumah akan permintaan resmi, dan akan koordinasi lebih awal termasuk dukungan anggaran.
- Laporan harganas sebagai dasar pelaksanaan kedepan.
- Evaluasi bulanan sebagai momen instrospeksi, untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan dan pencapaian program.

E.DOKUMENTASI



	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
	NOTULEN RAPAT		
Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Selasa/ 27 Agustus 2024	Notulis/ Disiapkan oleh	Septiana Rakhmawati, 
Waktu	08.30 – 12.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan	Rohdhiana	Disetujui oleh	
Narasumber	1. Zuhdi A, SKM, M.Psi 2. Septiana R		
Tempat	Ruang Kencana (hybrid)		
Peserta	1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajaranya 2. IPeKB DIY 3. Ketua Tim Kerja dan jajaran 4. Satgas PPS		
A. SAMBUTAN DAN ARAHAN KEPALA			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Radalgram kali ini memantau apakah capaian on the track. ➤ Terimakasih atas dukungan kinerja dan kontribusi semua pihak. Angka PPK s.d saat ini sudah 87%. Tgl 18-25 agustus siga error. Lokus ICDI sdh 100 %. ➤ Terimakasih atas dukungan, sudah terlaksana roadshow baksos racing se-Jawa, yang berkumpul di DIY. ➤ Direncanakan di semua kabupaten akan melaksanakan TNI manunggal air kerjasama BKKBN pusat dg KASITER/KASAD. Besok rapat dengan korem, kodim, OPD dan PKB yang menjadi lokus. DIY mencanangkan di 4 titik (Kaliagung, margoagung, selopamioro, desa serut gedangsari). Harapanya dapat dibantu semua pihak. ➤ Tahun 2024 adalah masa transisi pemerintahan dan program. Ada slogan baru mengingat TFR dibawah 2 khususnya DIY. DIY bukan banyak capaian KB tapi focus stunting. Arahnya “meningkatkan kualitas, menjaga kuantitas”. Mohon support kreatifitas/ide dari masing-masing pihak ➤ Sisa tahun Anggaran sudah 4 bulan lagi, harapanya kegiatan selesai di November, Desember untuk memperbaiki administrasi. ➤ Sudah harus mulai mitigasi dan identifikasi kegiatan agar dapat melakukan optimalisasi. ➤ Progress OPD KB, PKB/PLKB menjadi cerminan kerja di Provinsi. 			

B. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Capaian Program Bangga Kencana

Data capaian program per Juli 2024 yang diakses tanggal 19 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

- Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100%
BKB: 100%
BKR: 100 %
BKL: 100 %
UPPKA: 100 %
PIK-R: 100 %
- Cakupan Pelaporan Yan KB: 98,27 %, KP dan Kota YK 100 %, Bantul 99,39% Sleman 95,59 % Yan KB Pemerintah yang belum 100%: Sleman 97,06→ depok. Yan KB swasta yang belum 100% : Bantul 99,24 % → Imogiri, GK 98,68 %--> wonosari dan sleman 95,29 % → depok, ngaglik, kalasan, pakem
- Total Pelayanan KB s.d Juli: 173.790 akseptor
- Capaian peserta KB Baru per mix kontrasepsi s.d Juli 2024 sebesar 18.418 akseptor (47,02% dari target KKP sebesar 39.168 akseptor.
- Capaian peserta KB Aktif per mix kontrasepsi sebesar 317.489 akseptor (103,31% dari target KKP sebesar 307.321 akseptor.
- Target mCPR DIY 2024 sebesar 58,20% dan target telah tercapai sebesar 61,72%
- Target unmet need DIY sebesar 15,20% sudah mencapai 12,61% atau 64.883 dari target 514.401 PUS.
- Cakupan pelaporan BKB 99,80 %, BKR 99,53%, BKL 99,75 %, UPPKA 99,54 %, PIK R 99,76%, PPKS 100,00 %, BP 98,46% dan PPKBD 99,77 %.
 - Bantul: Pajangan (BKR 50%), Imogiri (BP 0 %)
 - Sleman: Kalasan (PPKBD 75 %)
- Jumlah anggota BKB hadir pertemuan BKB 47,0%, Hadir BKB menggunakan KKA bulan Juli 13.817 anak (95,1 % dari total 14.535 yang hadir).

REALISASI ANGGARAN DAK

- Realisasi DAK fisik dan BOKB per 26 Agustus 2024
DAK Fisik: 67,33 % (urutan 1 nasional→ Nasional: 18,53 %).
BOKB: 55,65 % (urutan 1 nasional → Nasional 32,04 %)
Realisasi Kabupaten/Kota: Sleman (61,43 %), KP (58,63 %), Bantul (51,00%), GK (60,62), kota YK (40,10%)

KETERSEDIAAN ALKON

- Ketersediaan alkon di Gudang provinsi per 31 Juli 2024
IUD: 21,58 bulan
Pil Kombinasi: 8,94 bulan
Pil Progestin: stock out
Kondom: 5,39 bulan
Suntik Progestin: 20,80 bulan
Implan 1 batang: 3,15 bulan
Implan 2 batang: 15,81 bulan

C. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

Sarmin

- Belanja DAK Fisik di Kota Yogyakarta, riil barang sudah datang (kendaraan roda 2 sudah dipakai), roda 4 masih proses kelengkapan aksesoris. Proses pembayaran keduanya, sedang persiapan proses pembayaran harapannya agustus atau awal September sudah terbayarkan.
- BKB kit stunting sudah sampai lokasi, diterima kelompok. Proses pembayaran sudah selesai dan sudah dicairkan sekitar awal minggu kemarin sehingga proses sudah selesai.
- Kegiatan Dalduk beberapa bulan intens mendamping kelompok KKB kegiatan maraton di banyak kelurahan, yang dipastikan semua dapat berjalan, baik kepada masyarakat langsung maupun pengurus
- Dalam 2 bulan terus menerus penguatan kepada SSK. Pastikan sekolah ketika dicanangkan menjadi SSK tidak hanya formalitas tetapi ada action nyata, dituangkan dalam mata pelajaran. Dukungan pengajar/kepsek harapannya benar terbangkitkan sehingga peduli masalah kependudukan dan ada sumbangsih buat kota Yogyakarta.

Herristanti

- Baru 25 unit BKB kit stunting, 5 unit tambahan, optimalisasi di September. Usulan DAK Non fisik TA. 2025 untuk kota YK ada penurunan signifikan. Tahun ini 3,9 M hasil exercise 3,36 m. Mohon konfirmasi ada info turun menjadi 3,06 M

Amirudin, GK

- KKB giritirto mewakili DIY untuk lomba desa berkinerja baik dengan focus penanganan stunting.
- AKS best practice mewakili DIY. Padahal dari konvergensi stunting DIY, GK poinnya terendah. Kenapa menjadi best practice selain Surabaya, wonosobo, pangkal pinang?
- Terimakasih IPeKB yang mendukung all out kegiatan Roadsos bahkan mau memberikan dana.
- PB di GK paling rendah 37 %. Patokanya target PB tidak jelas asal usulnya. Sandingkan unmeet need dengan target PB, tidak match. Berapa dukungan PB terhadap PA? perlu penajaman ke sasarnya.
- MOP untuk GK baru 1. Ketika akan pembayaran ada miss terkait aturan ternyata untuk di RSUD GK, pelayanan mengupayakan pelayanan terbaik yang berdampak (pada anestesi general), pemulihan sehingga ada biaya tambahan → mencoba nego agar RSUD terima dengan biaya paket yang sudah ditentukan dengan BOKB. Tindakan medis operatif agar hati-hati, jangan asal melaksanakan kegiatan.
- Pengadaan BKB Kit sudah nego, sedang proses. Insyaallah bulan September sudah beres
- Terkait stunting bahwa sebagai tindak lanjut (GERTAK) di GK dari lintas OPD mengadakan gertak yandu dengan kegiatan penimbangan. Angka stunting juni antara SSGI dan EPPGBM meskipun turun, karena permasalahan teknis penimbangan. Hasil beberapa daerah telah terkoreksi. Juni diangka 17, agustus bisa dikisaran 15. Ketika pengukuran benar selisih 1-2 cm. Sebagai pembanding meskipun sudah masuk EPPGBM. Data offline tetap dilaporkan ke kemenkes, bupati, TPPS, BKKBN sebagai pembanding data stunting di GK.
- Sebagai upaya penanggulangan stunting, tanggal 29 mengumpulkan tokoh agama dan CSR dengan pembicara PSKK UGM diharapkan sumbangsih pemikiran.
- Pelaporan akseptor baru yang membeli di apotek, contoh kondom itu bagaimana?
- Pembaharuan data IMP untuk GK sudah kumpulkan. Berkembang dan mandiri sudah 77,7 % dari target 60%

Dr. Suprabandari

- BKB Kit stunting sudah pelaksanaan, tinggal pembayaran

- Piyungan masih 56 %. Ada salah entri dan sudah dilakukan pendampingan, semoga bisa di kejar
- Bagi yang belum melapor data SIGA akan ditindaklanjuti
- SI BIMA sudah memberikan arahan agar PKB bisa mengikuti

Hilda P, KP

- DATA PIK R, posisi sudah agak rasional diangka 2.000 tetapi di SIGA kalau dilihat tidak rasional. Ada kalurahan yang kesertaanya 0 dan ada yang kesertaan 2.000. Kapanewon yang dekat pelaksanaan harganas.
- Baduta yang terpapar 1000HPK. Belum menemukan formula perhitungan yang masuk akal. Target bulanan atau tahunan. Kalau perbulan tidak akan tercapai.
- Alkon sudah kirim permohonan. Untuk implant 1 batang selektif, mekanisme rutin dan diskusi dengan dinkes. Akan dilakukan distribusi tahap 2. Implan 1 batang Khusus PB dan warga kulonprogo.
- Kondom pasti akan tercatat sebagai stok menipis saat event. Di bulan tidak ada event, tidak ada pengeluaran.

Niken, Sleman

- TFR target menjadi 1,8-2,1 sesuai dengan tumbuh kembang seimbang.
- Semua kalurahan sdh menjadi KKB (86). Yang dibiayai tahun depan 53 KKB. SK bupati 86 tahun lalu. Mohon sounding ke pusat. Juknis tidak hanya berkembang, mandiri berkelanjutan tetapi yang dasar yang dibantu.
- Cakupan pelayanan yang rendah di PAKEM, mhn perhatian mgkn karena banyak kegiatan. Pakem belum mempunyai Balai penyuluhan. Dibantu sounding agar punya balai sendiri karena fasilitas berbeda. Kondisi kapanewon pakem ada diruangan sangat kecil dengan sarpras kurang memadai. Tidak ada dalam Morena karena belum punya balai.

Ani Nurhayati

- Distribusi alkon untuk implant 1 batang, tidak sesuai permintaan, banyak peminat karena praktis, banyaknya kejadian implant 2 batang. Kasus terakhir implant 2 batang di cabut yang ketemu cuma 1 (ada 3 kasus).
- Permintaan suntik banyak sekali di sleman. Kualitas alkon bagus yang dulu 3 cc sekarang 1 cc, akseptor suka karena tidak sakit.
- Suntik sudah mulai membatasi dengan melihat SIGA. Dulu yang penting SIGA biru, mungkin permintaan 100 yang diinput 10. Sekarang SIGA dilihat misal permintaan 100, minta 100 lagi apakah pengeluaran sudah masuk SIGA semua/belum. Melihat sisa alkon yang ada di SIGA
- Klinik yang siap MKJP, di SIGA tdk ada MKJP tapi pelayanan suntik lumayan banyak. Untuk menganjurkan MKJP, tidak bisa memaksa. Penyuluh lebih suka mengarahkan ke baksos karena ada transport, konsumsi, datang bersama. kalau regular ke puskesmas harus antri. Pembinaan 85 faskes pelayanan non MKJP juga mendukung pelayanan sehingga tidak bisa di non aktifkan.
- Distribusi alkon di krisna ada 110 faskes dimana diantara 110 ada beberapa tercantum yang tidak aktif minta alkon. Sedangkan yang mnta sekarang tidak muncul di krisna tahun 2025.
- DAK Fisik beberapa kali untuk usulan mendapatkan penugasan, IUD Implan dan removal kit. Beberapa faskes untuk baksos tidak mendukung sehingga harus pinjam beberapa faskes. Kalau bisa diusulkan mohon fasilitasi IUD kit tidak penugasan tapi untuk OPD untuk baksos. IUD kita yang ada tidak sesuai ukuran.

Nurhadi, IPeKB

- Terimakasih dan apresiasi bagi teman2 se-DIY yang sudah mendukung acara Roadsos Racing.
- Undang pengelola data di BP/kapanewon, bawa database untuk praktek enum sehingga langsung terlihat progresnya.

- Terkait dengan elsimil, tanggal 29 akan dikumpulkan terkait elsimil versi 3. Dibeberapa tempat telah tersosialisasi

Sofia, Perencanaan

- DIY mengajukan usulan BOKB untuk 2025. Dari pusat sudah memberikan exercise, harapannya usulan sesuai, setelah exercise, diharapkan melakukan penginputan di krisna. Setelah itu usulan kab/kota dinilai/dihitung ulang BKKBN Prov atau pusat. Setelah hasil penilaian keluar ada kebijakan semua usulan dipotong 10 %. Ada kebijakan dilihat perolehan di 2023. Capaian 2023 MCPR , unmeet need dan realisasi BOKB.

Kab/Kota	MCP	UnMet Need	Realisasi Anggaran
KP	63,56	9,22	95,71
Sleman	55,54	15,36	93,45
Bantul	55,87	15,49	94,17
GK	62,81	13,15	92,53
Kota YK	57,07	15,63	94,59

Hasil akhir yang disampaikan pengurangan d 3 kabupaten dengan rincian, sbb:

Bantul dikurangi 737.891.652

Sleman dikurangi 731.027.000

Kota YK 336.904.000

- Alasan capaian di 2023, karena unit cost di DIY lebih rendah di banding kabupaten lain. Dari pusat tidak ada surat dan langsung excel exercise.
- Pagu usulan Kota YK ada kelebihan 18 M, sudah di lock ada selisih. Pagu ditetapkan oleh pusat 3,2 M yang diinput baru 2,9 M sehingga ada selisih 36.200.000. apabila tidak mengambil submenu agar ada surat walikota. Jika menu SIGA tidak direject ada selisih 24.200.000. apakah ada tambahan waktu untuk mengusulkan 36.200.000. Penilaian prov dan BKKBN Pusat s.d 29 agustus 2024, untuk dokumen yang belum lengkap dapat diusulkan.
- Pagu berkurang hasil pembahasan 3 kementerian.

Witriastuti

- Target 1000 HPK: 18.720 , Gak pake lama, fas pembinaan tumbang karakter:181.269, SI Bima bagi kader 576
- Dalam 3 tahun hanya kisaran 50-60 %. Definisi operasionalnya adalah keluarga. Jika 1 keluarga hadir dan mendapatkan info 1000 HPK, kehadiran hanya dihitung 1 kali. Di SIGA bisa beberapa keluarga masuk. Jika 1 keluarga mempunyai 2 balita hadir 1x berarti dihitung 1.
- Di Januari 85 %, february 88 %, maret 82 %, April 44 %, juli hanya 37 % padahal kalau dilihat ada target tribulanan. Tidak pernah tercapai hanya sekitar 12/13 ribu.
- Target untuk 1 tahun. Sudah breakdown ke kabupaten/kota. Apakah sudah di breakdown ke tingkat dibawahnya.
- Apakah dimungkinkan BKB terintegrasi dengan posyandu. Kalau berdiri sendiri susah dijalankan. sasaran posyandu berbeda. Kota Yogyakarta sudah terintegrasi dengan SK kepala dinas.

Zuhdi

- Pelaksanaan PPK. Dikapanewon piyungan capaian rendah ternyata ada kekeliruan penghitungan di target awal KK. Mhn perhatian untuk penyesuaian target KK. Sampai hari ini masih diberi kesempatan penyesuaian target KK. Target KK yang ada dan KK baru, koordinasi MP dan MD.
- Target PB memang belum pernah melakukan analisis apakah PB berkontribusi ke PA, pengaruh unmet need.

- R1 laporan dari faskes. Akseptor kondom yang beli di apotek, bisa dilaporkan melalui SIGA dengan mengupdate di rekap data keluarga.
- Akan kita cek kembali laporan kapanewon pengasih terkait jumlah PIK R.

Ratna

- Ketersediaan implant 1 batang akan disegerakan. Tahun depan akan mengadakan implant 1 batang. Tahun ini persentase 10 % dari perkiraan kebutuhan 1 tahun. Untuk tahun depan hasil kuantifikasi yang akan diusulkan ke KOREN II, persentase menjadi 70 %. Karena produsen Cuma 1 kemungkinan kewalahan. Kalau memaksakan diri khawatir tidak dapat disediakan.
- Sleman ingin melakukan dropping alkon ke faskes, dilihat laporan SIGA.
- Kesiapan faskes dalam melayani KB MKJP memang menjadi indikator, yang diharapkan mampu mencapai target . indikator SDM yang mampu melayani IUD dan implant, memiliki sarpras yang memadai, ketersediaan alkon dan MKJP. → FKTP melayani KB MKJP.--> alat evaluasi, FKTP dapat melayani MKJP.
- Vm dengan BKKBN Pusat, rapat persiapan Hari kontrasepsi sedunia→ pelayanan KB serentak akan dilaksanakan mulai 10-20 September 2024. Puncak acara di tanggal 26 september yaitu pemberian penghargaan prov yang hasil layanannya paling tinggi. Target DIY sekitar 15.800. cek ketersediaan alkon

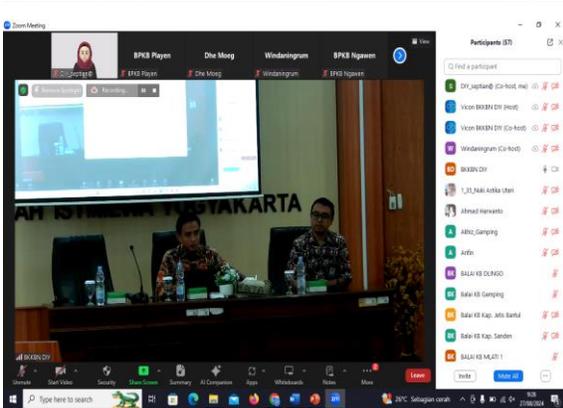
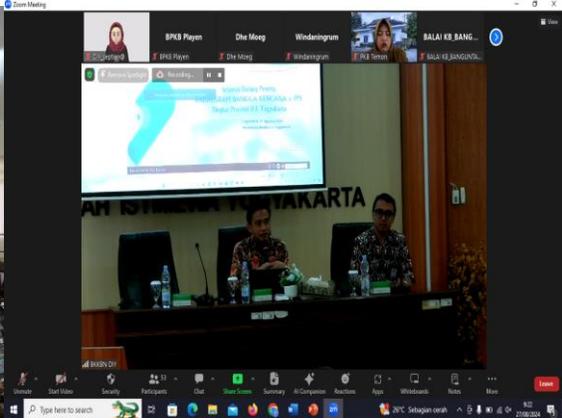
Kurnia

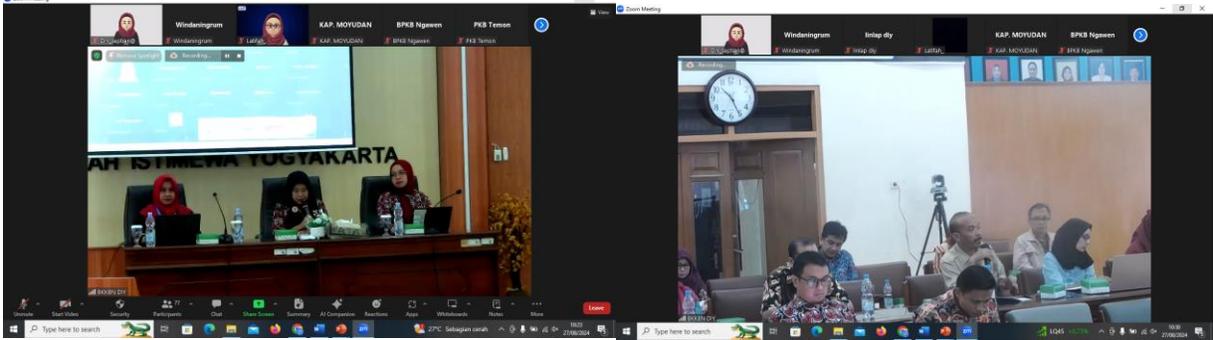
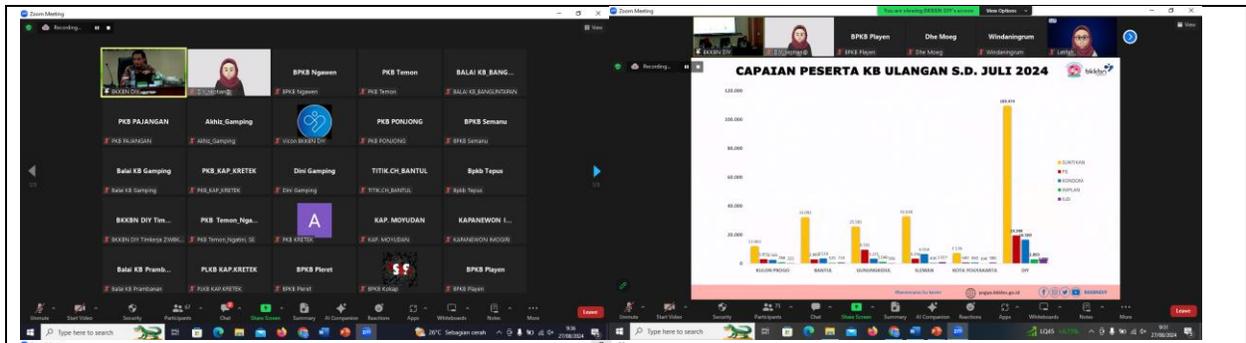
- KB pria agar bisa dicatitkan agar dapat menurunkan unmet need
- Anggaran MOP sudah banyak yang dimanfaatkan. GK tahun kemarin 3 akseptor, tahun ini baru tercapai 1. Terimakasih sudah melakukan koordinasi dengan RSUD wonosari. Mungkin opsi jika tidak bisa, bisa melakukan pelayanan KB bergerak bisa di Puskesmas/fasyankes dengan dokter sardi, jasa medis tidak banyak.

Kanthi

- KLasifikasi IMP sudah disampaikan ke kab/kota. GK sudh diatas 70 %, menjadi semangat kabupaten lainnya.
- Tanggal 2 Sseptember 2024 dilakukan pendampingan catin/elsimil akan difasilitasi oleh direktorat bina lini lapangan: FGD kepada 4 kelompok.

D.DOKUMENTASI





	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
	NOTULEN RAPAT		
Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Jumat/ 27 September 2024	Notulis/ Disiapkan oleh	Septiana Rakhmawati, 
Waktu	13.00 – 16.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan	Rohdhiana	Disetujui oleh	
Narasumber	1. Zuhdi A, SKM, M.Psi 2. Septiana R		
Tempat	Ruang Widya I (hybrid)		
Peserta	1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajaranya 2. IPeKB DIY 3. Ketua Tim Kerja dan jajaran 4. Satgas PPS		

A. SAMBUTAN DAN ARAHAN KEPALA

- Radalgram rutin minggu ketiga dan keempat terkait capaian, info terkini, kebijakan terbaru.
- PPK 2024 sudah selesai, tinggal pembayaran.
- Apresiasi dari BPS. Terimakasih bapak/ibu termasuk kader pendata PLKB dan semua pihak. Apresiasi ini membuktikan bahwa apa yang kita lakukan betul terpantau tidak hanya tingkat provinsi tetapi juga tingkat nasional.
- DIY luas wilayah kecil tetapi menjadi tolak ukur, mata tertuju ke jogja. mari sama-sama menjaga jogja tetap istimewa dengan capaian.
- BKKBN dengan 2 fungsi bangga kencana dan PPS. Khusus stunting akan ada sebuah diskusi, apakah stunting 14 % di Tk nasional. DIY optimis akan ada pergerakan angka yang signifikan melihat pergerakan kab/kota.
- Oktober akan reviu tingkat prov termasuk kunjungan lapangan dengan ketua TPPS. Kab mana yang menjadi lokus akan di komunikasikan.
- Penghargaan atas capaian WCD.
- Terdapat paradigma capain KB sangat tinggi, TFR kita sudah sangat rendah. Perlu strategi yang tidak disamaratakan dengan prov lain. TFR tinggi, MCPR rendah. DIY bagaimana meningkatkan kualitas menjaga kuantitas menjadi semangat baru.
- Dari tahun ketahun menjadi patokan standar provinsi lain. Biasanya akhir tahun banyak yang menerima tamu. Harapanya jaga capaian

- Radalgram apabila berkenan bergantian ke OPD KB. bisa lebih kenal tidak hanya membahas program.
- Apakah ada update nomenklatur untuk pemerintahan yang baru.
- Bagaimana tren itu berjalan tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan.

B. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Capaian Program Bangsa Kencana

Data capaian program per Agustus 2024 yang diakses tanggal 19 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

- Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100%
BKB: 100%
BKR: 100 %
BKL: 100 %
UPPKA: 100 % PIK-R: 100 %
- Cakupan Pelaporan Yan KB: 98,58%, KP,Bantul, GK dan Kota YK 100 %, Sleman 95,54 %
- Total Pelayanan KB s.d Agustus: 194.846 akseptor
- Capaian peserta KB Baru per mix kontrasepsi s.d Agustus 2024 sebesar 21.357 akseptor (54,53% dari target KKP sebesar 39.168 akseptor)
- Capaian peserta KB Aktif per mix kontrasepsi sebesar 324.626 akseptor (105,63% dari target KKP sebesar 307.321 akseptor.
- Target mCPR DIY 2024 sebesar 58,20% dan target telah tercapai sebesar 62,89%
- Target unmet need DIY sebesar 15,20% sudah mencapai 11,69% atau 60.326 dari target 516.209 PUS.
- Cakupan pelaporan BKB 99,13 %, BKR 98,74%, BKL 98,25 %, UPPKA 99,54 %, PIK R 98,33%, PPKS 98,48 %, BP 100% dan PPKBD 99,77 %.
 - Kota YK: Gondokusuman (BKB 75,9%); Gondomanan (PIK-R 60%); Umbulharjo (PPKS 0 %)
- Jumlah anggota BKB hadir pertemuan BKB 47,0%, Hadir BKB menggunakan KKA bulan Agustus 14.555 orang (94,4 % dari total 15.414 yang hadir).

REALISASI ANGGARAN DAK

- Realisasi DAK fisik dan BOKB per 24 September 2024
DAK Fisik: 72,63 % (urutan 2 nasional → Nasional: 29,43 %).
BOKB: 66,62 % (urutan 1 nasional → Nasional 39,55 %)
Realisasi Kabupaten/Kota: Sleman (72,24 %), KP (65,24 %), Bantul (62,71%), GK (70,88), kota YK (56,86%)

KETERSEDIAAN ALKON

- Ketersediaan alkon di Gudang provinsi per 31 Juli 2024
IUD: 20,89 bulan
Pil Kombinasi: 8,47bulan
Pil Progestin: stock out
Kondom: 5,56 bulan
Suntik Progestin: 20,56 bulan
Implan 1 batang: 2,33 bulan
Implan 2 batang: 14,36 bulan

C. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

Muhadi KP

- KP berada di tengah2 secara capaian program, bukan mencapai tertinggi tapi saling support. Secara rentang kendali, DIY diuntungkan karena hanya 5 kab/kota, secara semangat ingin diatas rata2. Komitmen, fungsi pimpinan mampu melakukan monev/pengendalian dibawah lingkup koordinasinya. Dengan waktu yang tdk terlalu lama, komitmen mendongkrak program termasuk DAK dan ketersediaan alkon.
- Masih beradaptasi dan mohon bimbingan agar mampu bersinergi.

Sarmin, Kota YK

- Capaian DAK fisik memang masih sangat kecil tetapi tidak usah khawatir, tipikal diesel. Untuk DAK fisik SPJ sudah masuk minggu ini.
- Prakteknya untuk survey ketahanan keluarga tidak mudah, capaian 72rb KK baru 20 %. Permasalahannya banyak sekali, sudah diundang koordinator, akhir nov semoga sudah diatas 90%.
- Radalgram bisa dibuat bergantian, sepakat. 2023 awal sempat muter.

Ninik, Bantul

- 26 september kolaborasi KB nusantara dalam rangka PPS 500 peserta, lintas sector, kapanewon.
- Sepakat untuk ada safari radialgram di kab/kota. Perlu ada komitmen, pimpinan bisa hadir, ada topic lain selain yang rutin. Ada hal yang spesifik yang trending topic sehingga ada kesepakatan yang ada tindak lanjutnya.
- Terkait paparan, Bantul setelah radialgram prov di TL dengan radialgram kab.
- Kehadiran 1000 HPK, saat penimbangan posyandu akan mengikuti.
- BOKB masih tertinggi yang belum terealisasi, gaspool di triwulan IV.

Amirudin, GK

- BKB kit sudah ada, minggu depan proses pembayaran sebanyak 30 unit
- Kegiatan dari stunting kedepan masih jadi perhatian, GK masih 17 %, diadakan kegiatan serentak di bulan agustus. Hasilnya EPPGBM 95 % cakupan, stunting sebanyak 14,5 %. Akan coba diperbaiki, agar akhir tahun harapanya 14 %.
- 30 september mengadakan baksos untuk KRS di 4 kapanewon (KRS umur 1-5 tahun, sekitar 120an). Stunting ko susah sekali, apakah tdk bisa diatasi? Mencoba intervensi lebih spesifik untuk pertumbuhanya.
- Keberadaan satgas dikawal agar stunting tetap rendah
- Safari radialgram, 1 kali saja, agar lebih efektif.
- Hasil WCD terimakasih, GK bisa 142 %
- TFR rata2 DIY 1,8, tolong menjadi perhatian serius dan ada perubahan mindset. Tantanganya lebih berat. Pakar kependudukan TFR dibawah 1,6 tidak bisa naik cenderung ke punah.

Wiwik, Sleman

- BOKB insyaallah 99 % yang dikembalikan hanya distribusi alkon. BOKB untuk baksos sudah habis, hanya dengan BPJS untuk advokasinya.
- DAK Fisik tahun 2025 tidak dapat, alasanya apa?
- TFR 1,77, MUKP 23,5 permasalahanya focus di kualitas penduduk dan pembangunan keluarga. Mohon ditindaklanjuti dengan penyesuaian PPM . permasalahan banyak infertilitas. Infertile tidak diampu siapapun, child free, LGBT.
- Sleman ada PLKB non ASN yang membantu di SIGA, meskipun BKB BKR belum 100 %. SIGA di lapangan ruwet, harus pakai NIK, perlu waktu.
- Penata KKB 9, CPNS baru 4 disetujui anjab 20 di Sleman

- Okt akan ada sharing dari Jateng, membawa seluruh OPD kab . sharing terkait GDPK, KKB dan RDK.

Uma Kota YK

- PMB Ummatul Barorol belum memasukan SIGA karena bidan melahirkan.
- DAK fisik dan non fisik, selalu nomor 5. DAK fisik sdh selesai, insyaallah 99,99%
- MKJP di bulan ini baru menyelesaikan kegiatan, belum masuk sistem, MOP melalui APBD sudah 100%
- BKB kit sudah selesai, masih ada kekurangan 3 unit yang akan diselesaikan bulan ini.
- Untuk WCD kota paling rendah, yg dimasukan tgl 10-23 september. Kedepan akan berkoordinasi dengan fasyankes. Kualitas layanan tetap terjaga.
- Ada beberapa kasus dilapangan.
- 85 % MKJP tetap terpenuhi.

Isna, KP

- Bokb : baksos, rsud mop, mow rencana tgl 1
- Ada kegagalan MOP, tindakan pada feb 2023
- Implan pelayanan tahun okt 2021

Nurhadi

- Cakupan laporan poktan ppks: cek lagi
- Ketersediaan alkon, apakah dimungkinkan distribusi dinamis antar kabupaten?

Eni W

- Untuk yang belum menjadi kelompok BKB yang hadir bisa dmasukkan capaiannya
- Capaian rendah, sudah bersurat terkait target pro PN ke Kab/Kota di 16 april 2024.
- Si BIMA diangka 583 (100%). Apresiasi dari BKKBN pusat.
- LGBT, permasalahan remaja perlu perhatian, melalui paniradyo pati, dinkes akan membuat podcast series silahkan dimanfaatkan semoga pesanya sampai kepada remaja. Di oktober mengumpulkan teman forum genre diy dan kab/kota, bisa dimanfaatkan. Mohon dukungan untuk menggerakkan duta genre kalurahan, blm tersentuh, hanya 30% mll daring
- Edukasi gizi blm bs terpantau.
- PIK R baru untuk masuk siga
- Apresiasi kota yk utk BKB terintegrasi dg posyandu, sbg jawaban permasalahan.

Sofia

- Arah kebijakan DAK fisik tahun 2025, surat sestama tgl 14 juni 2024. Sleman dan kota YK tdk mendapat DAK Fisik tahun 2025, hasil pertemuan trilateral meeting, kemenkeu, bapenas dan BKKBN Mempertimbangkan capaian DAK, Indek fiscal, Meningkatkan PPS
- Alokasi DAK 2025 : Bantul 5.143.000.000 (rehab 15 BP, 2 BP tidak lolos. Data yang digunakan adalah data awal tahun yang biasanya diperoleh dari linlap); Gk: 421.000.000 (IUD Kit dan Implan Kit) dan KP: 3.356.000.000(1,7 M untuk laparoscopi, sisanya rehab balai)
- Anggaran DP3AP2 DIY BOKB khusus utk TPPS tk prov (pertemuan TPPS, rebug stunting)
- Kegiatan stunting masih ada di BOKB
- Duk anggaran utk PPS tdk ada d prov.

Fatur

- WCD mendapat apresiasi sebagai provinsi dengan capaian tertinggi

- Untuk pelayanan Kb yang sudah 100 % seperti di KP dan Sleman harapannya pelayanan rutin tetap dilaksanakan. Sleman akhir okt pelatihan TOT 2 angkatan di RSUP Dr. Sardjito. Agar bisa memanfaatkan pelayanan.
- Kegagalan MOP d lendah, sangat sensitif. standarnya kegagalan harus dipastikan analisis sperma (azoosperma).
- Pil progestin dismis kewenangan kabupaten.
- Implan 1 batang banyak di kabupaten, tahun depan implan 2 batang dan 1 batang, silahkan di distribusikan

Yuni

- NIB bagi kelompok yang belum UPPKA

Kaper

- Dengan melihat cpaian sampai dengan Agustus 2024 diharapkan masing-masing tim kerja dan OPDKB Kab/kota dapat menyusun strategi terbaik untuk menyelesaikan Tahun Anggaran 2024 dengan baik
- Terimakasih kehadiran semua pihak, jadwal safari akan disusun.

D.DOKUMENTASI



CAPAIAN PESERTA KB AKTIF S.D. AGUSTUS 2024

No	KAB./KOTA	PESERTA KB AKTIF		
		KKP 2024	PA MODERN	% THD KKP
1	KULON PROGO	40.511	41.179	101,65%
2	BANTUL	86.809	93.766	108,01%
3	GUNUNG KIDUL	73.784	74.751	101,31%
4	SIEMAN	85.748	93.065	108,53%
5	KOTA YOGYAKARTA	20.469	21.865	106,82%
D.I.YOGYAKARTA		307.321	324.626	105,63%

TARGET TAHUN 2024

No	Indikator	Target	Capaian Kumulatif 2024	
			s.d. Agustus	Rat
1	Jumlah Pemerintah Daerah yang membaratkan GDP dalam penyesuaian parameter kependudukan pada perencanaan	1 Prov (100%) 5 Kab/Kota (100%)	1 Prov (100%) 5 Kab/Kota (100%)	
2	Persentase Rumah Data Kependudukan Partipura yang terbentuk di Kampung KB	80%	81,09%	
3	Jumlah Kelompok Kerja Bangsa Kemana Provinsi dan Kab/Kota yang Efektif	1 Prov dan 3 Kab/Kota	1 Prov (GDPK dan TPFS) 5 Kab/Kota (Kampung KB dan TPFS)	
4	Calon implementasi pendekatan kependudukan di provinsi	3 Jalur (Formal, nonformal, informal)	3 Jalur	
5	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 (100%) Prov dan 3 (50%) Kab/Kota	1 Prov dan 3 Kab/Kota	
6	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	50%	88,13%	









	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
	NOTULEN RAPAT		
Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Kamis/31 Oktober 2024	Notulis/ Disiapkan oleh	Septiana Rakhmawati, 
Waktu	08.00 – 11.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan	Rohdhiana	Disetujui oleh	
Narasumber	1. Zuhdi A, SKM, M.Psi 2. Septiana R		
Tempat	Ruang Widya I (hybrid)		
Peserta	1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajaranya 2. PKB/PLKBDIY 3. Ketua Tim Kerja dan jajaran 4. Satgas PPS		

A. SAMBUTAN DAN ARAHAN KEPALA

- Radalgram ini memantau Capaian program dan anggaran s.d september
- Kepada PKB/PLKB untuk betul-betul melihat lokasi kerja masing-masing baik bangga kencana maupun PPS. Apa yang dilakukan lapangan butuh dikumpulkan cakupan data. Kinerja dilihat berdasarkan data yang ada.
- Provinsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa kab/kota baik pencapaian program dan anggaran
- Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kinerja bukan hanya kehadiran.
- Terimakasih atas kegiatan forum koordinasi TPPS berjalan lancar. Gerakan yang ada di provinsi seiring dengan kab/kota s.d kecamatan.
- Gudang alkon terdapat beberapa aspek terkait distribusi masuk/keluar (FIFO/FEFO). Bagaimana mekanisme permintaan dari OPD ke prov dan faskes ke OPD. Memastikan bahwa tidak terlalu banyak yang tidak melaporkan dalam SIGA. SIRIKA akan uji coba di akhir bulan ini. Google excel sebagai alat memantau stock alkon. Jangan sampai ED di lapangan, permintaan mengikuti tren konsumsi/layanan. Perhitungan distribusi alkon ke fasyankes menjadi perhatian. Rata-rata permintaan apakah sesuai dengan konsumsi. Fasyankes yang belum lengkap data stok alkon. Naskah hibah dan bast sebagai kelengkapan administrasi. Anomali data pelayanan dan konsumsi, ada beberapa data pelayanan yang belum dilaporkan. Pemutakhiran data alkon di masing-masing Gudang di SIGA dapat dilaksanakan bersama-sama.

- Permintaan alkon tergantung momentum, masih ada 1 momentum hari vasektomi dan hari ibu. Pastikan target sesuai data terakhir.
- Kondisi Gudang pastikan menjaga kualitas alkon, perhatikan suhu dan penyimpanan, pintu teralis menjaga keamanan. Kota renovasi ulang pantau standar Gudang. Penyimpanan yang terpisah antara alkon dan arsip.
- Agar bisa merawat BP baik sisi keamanan dan keselamatan, memastikan semua benda/barang terpantau, apakah posisinya aman tidak membahayakan. Mari kita jaga rumah kita. Kebakaran BP kasihan menjadi pelajaran bagi kita semua.
- Semangat sudah mulai bulan November, mari susun kegiatan secara nyata sambil melihat data capaian program dan anggaran.

B. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Capaian Program Bangga Kencana

Data capaian program per September 2024 yang diakses tanggal 21 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

- Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100%
 - BKB: 100%
 - BKR: 100 %
 - BKL: 100 %
 - UPPKA: 100 % PIK-R: 100 %
- Cakupan Pelaporan Yan KB: 98,58%, KP,Bantul, GK 100 %, Sleman 97,04%, Bantul 99,39 %, kota YK 97,06 %
- Total Pelayanan KB s.d September: 229.258 akseptor
- Capaian peserta KB Baru per mix kontrasepsi s.d September 2024 sebesar 24.585 akseptor (62,77% dari target KKP sebesar 39.168 akseptor)
- Capaian peserta KB Aktif per mix kontrasepsi sebesar 331.202 akseptor (107,77% dari target KKP sebesar 307.321 akseptor.
- Target mCPR DIY 2024 sebesar 58,20% dan target telah tercapai sebesar 63,89%
- Target unmet need DIY sebesar 15,20% sudah mencapai 11,26% atau 58.354 dari target 518.428 PUS.
- Cakupan pelaporan BKB 99,07 %, BKR 99,53%, BKL 99,62 %, UPPKA 99,51 %, PIK R 99,29%, PPKS 98,48 %, BP 98,46% dan PPKBD 99,54 %.
 - Mlati (PIK -R 66,7 %), Gondomanan (PPKBD 60 %), Kalasan (PPKS 0 %) Berbah (BP 0 %)
- Jumlah anggota BKB hadir pertemuan BKB 56,1%, Hadir BKB menggunakan KKA bulan September 19.420 orang (98,4 % dari total 19.733 yang hadir).

REALISASI ANGGARAN DAK

- Realisasi DAK fisik dan BOKB triwulan III TA. 2024

DAK Fisik: 98,41 % (urutan 1 nasional → Nasional: 47,17 %).

BOKB: 69,55 % (urutan 1 nasional → Nasional 50,46 %)

Realisasi Kabupaten/Kota: Sleman (79,32 %), KP (65,24 %), Bantul (62,25%), GK (70,88), kota YK (66,32%)

KETERSEDIAAN ALKON

- Ketersediaan alkon di Gudang provinsi per 30 September 2024

IUD: 22,64 bulan

Pil Kombinasi: 6,64 bulan

Pil Progestin: stock out

Kondom: 5,56 bulan

Suntik Progestin: 16,90 bulan

Implan 1 batang: 2,16 bulan

Implan 2 batang: 15,45 bulan

C. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

Sarmin, Kota YK

- DAK fisik Kota sudah terealisasi baik fisik dan anggaran
- DP3AP2KB kota YK telah menandatangani mou dg 10 sekolah untuk SSK. Total s.d hari ini sudah ada 45 SSK yang 42 sekolah regular, 2 MTS 1 dari muallimin
- Gudang alkon tahun 2025 ada rehab total. Fungsi sekarang untuk UPT PPA, Gudang alkon dan fungsi teknis. Tahun 2025 mendapat DAK dari PPA 5 M, seluruh Gedung dirobohkan. Gudang alkon di realokasi, standar penyimpanan lebih bagus, ada akses tersendiri. Secara fungsi tidak digabung dengan barang lain, meskipun dalam tapak yang sama ada Gudang arsip. Pengamanan ada security (pihak ketiga), CCTV. Selama proses pembangunan perkiraan 5 bulan, alkon di titipkan di Gudang farmasi Dinas Kesehatan, umbulharjo yang tentunya standar memenuhi syarat.
- Bulan November untuk kader posyandu kota YK, dalam menyemangati pelayanan balita, bumil dan catin serta menggerakkan agar termotivasi dalam penanganan stunting, akan di cover dengan BPJS ketenagakerjaan dari dana APBD pemkot Yogyakarta.
- Terkait radargram, mengusulkan kalau jam 09.00 untuk kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat. Usul agar dihadiri kab/kota pelaksanaan di jam kembali ke siang saja.

Heristanti, Kota YK

- DAK Fisik, 10 juta untuk rebranding di Oktober. Untuk penganggaran terdapat kekeliruan kode rekening. Pembayaran setelah anggaran perubahan di tetapkan. Sedang reviu yuntuk penyaluran sekaligus.
- Pelayanan KB masih ada catatan, akan dikonfirmasi kepada PKB setempat apakah tidak ada pelayanan atau belum melaporkan.
- Pelaporan Poktan di SIGA, meskipun belum 100 % sudah di zona biru akan melakukan monev agar bisa laporan 100 % → konfirmasi dengan PKB setempat.
- BOKB 66,32 % akan meningkatkan lagi di triwulan terakhir.

Rusdi Suwarno, Sekdin KP

- Baru bergabung di DPMDDalduK KB Kab. Kulonprogo
- Masih ada catatan untuk KP, mhn bimbingan agar bs tercapai target.
- Besok kaper akan monev alkon di KP.

Isna, Kulonprogo

- BKB Kit stunting proses
- Pelayanan KB tinggal MOP. MOW dari target 42, terealisasi 40 karena 2 ada miom
- Pelayanan KB dalam rangka hari ibu 12-19 Nov, karena anggaran sudah habis, kemungkinan yang bisa dilakukan pembagian kondom.

Niken, Sleman

- Sleman sedang banyak audit selain join audit. Menginginkan peraturan yang ada dan pelaksanaannya di kab/kota. Join audit yang hari ini penyukuh KB semua dikumpulkan, ada pemeriksaan pengadaan DAK Fisik motor dan kelengkapannya. Pemeriksaan rehab balai dan pelaksanaan KKB
- Target yang belum tercapai akan dikomunikasikan.
- Kenaikan BKB yang signifikan karena setelah beberapa waktu yang lalu ada radalgram, di tindaklanjuti dengan pertemuan sehingga kenaikan signifikan.
- Kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk advokasi dan KIE, sudah terlaksana beberapa kali ranah public di TVRI terkait chid free (TFR 1,77). Grand design sampai diseminasi disampaikan ke OPD sleman dan KKB.
- KKB kegiatan sudah selesai termasuk monev
- Penurunan stunting masih ada pendampingan.

Andi, GK

- Pemeriksaan terkait stunting dan BOKB dari inspektorat
- Terimakasih pak kaper yang telah melakukan monev Gudang alkon di kab.GK
- Terkait capaian belum optimal di triwulan III. BKB kit belum entri Morena, pembayaran selesai oktober, barang sudah di distribusikan. Yang menjadi PR adalah pemanfaatannya, memerlukan pelatihan.
- Untuk pelayanan KB masih ada sekitar 50an persen sudah disampaikan ke PKB/PLKB untuk meningkatkan pelayanan KB MKJP.
- Kegiatan stunting sudah berupaya dari jan-nov. Optimalisasi kegiatan stunting beriringan dalam pemberian intervensi karena dinas mengelola kalurahan. Pendampingan TPK masih dibawah capaian, setelah dievaluasi dalam entri terkendala aplikasi. Bisa menjadi masukan untuk BKKBN Pusat. Kader bekerja pagi-siang, aplikasi elsimil terkendala. Agar ada timbalbalik dalam meminta bantuan.
- Setuju Radalgram agar dilaksanakan siang.

MZ. Fathurachman

- KP, insyaalloh kaper bersama tim akan melaksanakan monev Gudang alkon.
- Kota, yang belum melapor pelayanan, Happy land, akan di ingatkan

- 12-19 november 2024 akan ada pelayanan serentak hari vasektomi dan hari ibu, jika yang sudah tidak ada anggaran BOKB agar dengan pelayanan regular BPJS dan non MKJP
- Sleman, setuju terhadap kampanye child free, ada fenomena married is scary. DIY dengan kondisi TFR rendah harus melakukan tindak lanjut.
- GK, harapanya dana BOKB masih bisa dimanfaatkan secara optimal.
- Implan 1 batang, yang berlebih agar di distribusikan, karena akan ada pengadaan implan 2 batang dan 1 batang.

Mustika

- Apresiasi kepada OPD KB Kab/Kota atas peningkatan capaian.
- 1000 HPK sudah membreakdown target per kab. 60.132 dari target 56.322. agar diikuti dengan definisi operasional (1 keluarga hanya 1).
- Surat pertengahan oktober untuk mendata by name by address dilaporkan sesuai target kapanewon masing-masing. Data dikumpulkan 10 November. Berkaitan dengan reward : petugas yang mencatat @ Rp. 200,-.
- Ga Pake Lama target saat ini 52 dan 53 %.
- Target si BIMA per bulan ini sudah mencapai target 753 peserta 130 % --> yang akan dihitung dan dianggap yang sudah selesai mendapat sertifikat (187 sedang proses pelatihan, 121 yang sudah mendapat sertifikat) → bantuan follow up
- Pembentukan kelompok BKR dan PIK R target 172, tercapai 182 --. Upaya meningkatkan pencapaian target yang kurang.
- Apresiasi yang mungkin dapat diraih:
 - 12 Desember ada wisuda kerabat yang diikuti provinsi (1 orang) dengan kriteria minimal 8 kali mengikuti kerabat.
 - Kades/lurah cinta BKB yang diundang kepala daerah (4 kepala daerah)
 - AKS ditentukan di bulan November.
 - Poster AKS bisa diikuti oleh OPD KB. Pengumpulan poster 5 November 2024.
 - Gerakan Ayo ikut BKB: capaian gak pake lama → apresiasi, jadwal penarikan data di 16 november 2024.
 - Si BIMA kelas BKB emas: kriteria prov 90% telah mendapatkan sertifikat → mohon bantuan, data ditarik per 30 November 2024.

Yuni H

- Terkait TL zoom tentang pengurusan penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA. Upload data 1-15 November 2024. Harapanya UPPKA yang terdaftar dalam SIGA wajib daftar NIB → mohon bantuan untuk mengingatkan PKB/PLKB.

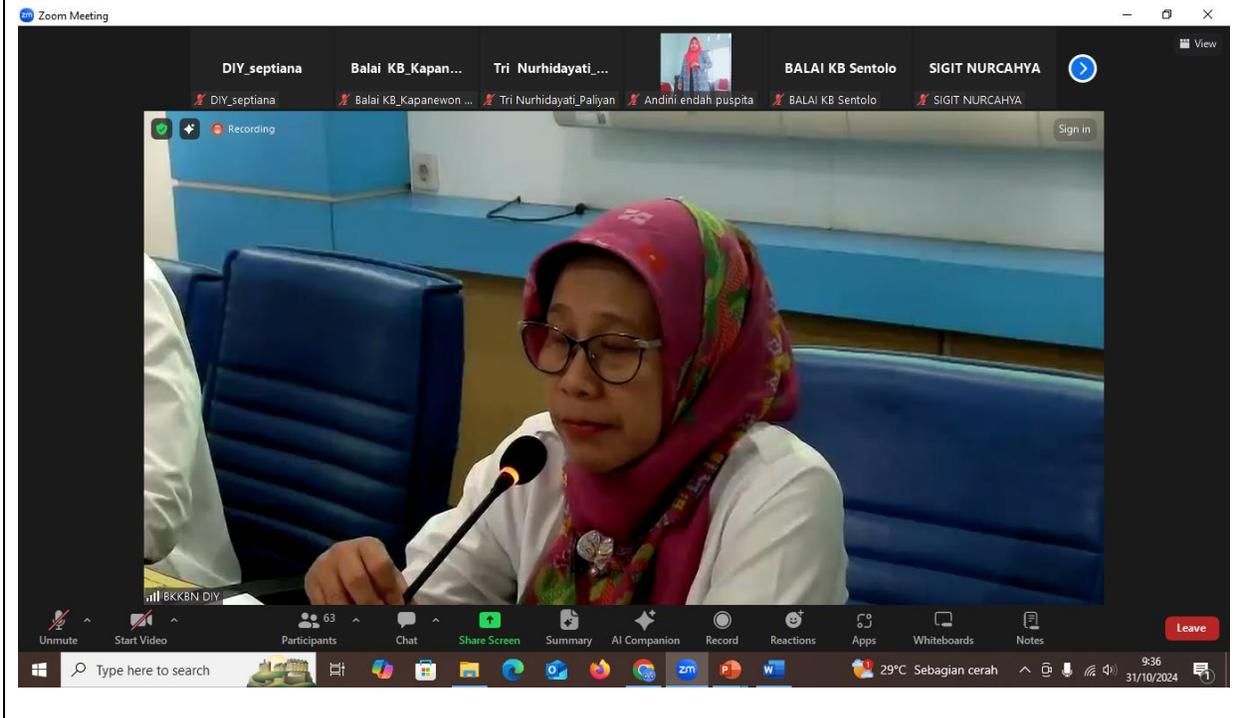
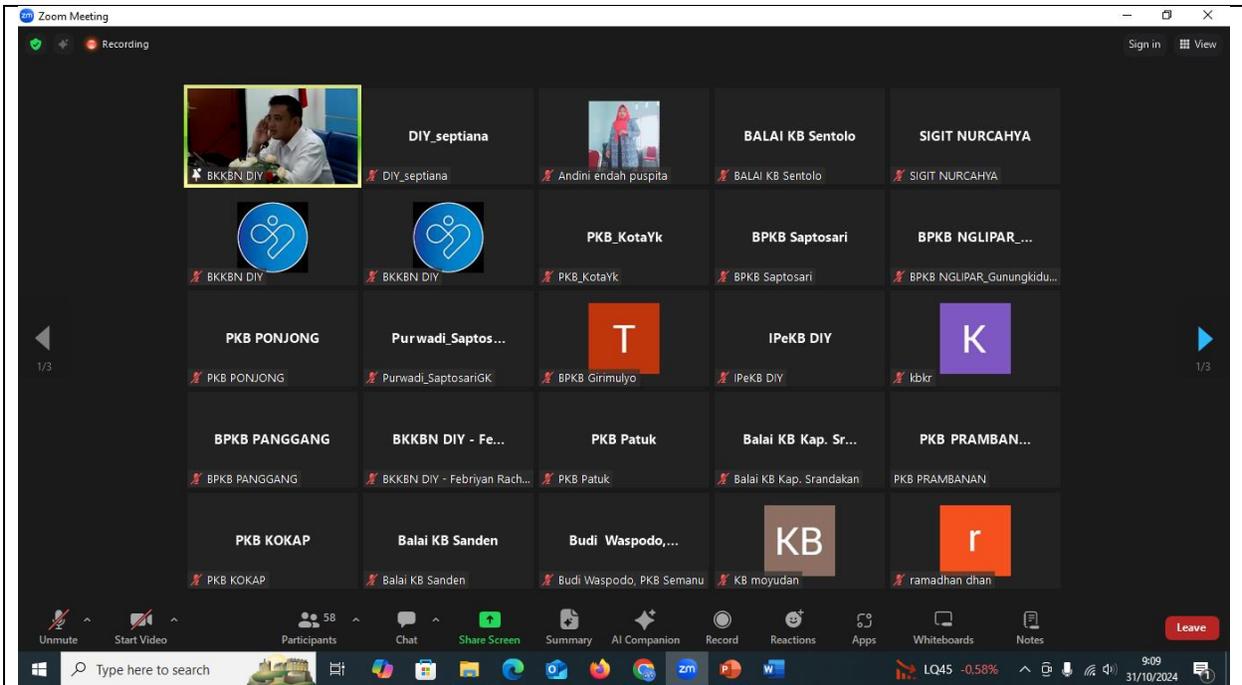
Kaper

- Semoga BOKB bisa tercapai lebih dari realisasi tahun lalu, bersiap. Berapa target yang akan dicapai?
- Terimakasih kader sudah difasilitasi BPJS. Semoga bisa di tiru kab/kota lain.
- Pelaksanaan Radalgram tahun 2025 akan dirotasi ke kab/kota.

- Terkait dengan renovasi Gudang Kota Yogyakarta, semoga terlaksana dengan baik
- Sesuai arahan wagub pelaksanaan program melibatkan 4K : kantor, kampus, keluarga, Kraton
- Terimakasih semuanya mari sama2 kuatkan barisan untuk menutup buku dengan baik

D.DOKUMENTASI





Zoom Meeting

Recording

DIY_septiana Balai KB_Kapan... Tri Nurhidayati... BALAI KB Sentolo

CAKUPAN LAPORAN
POKTAN, PPKS, BALAI PENYULUHAN, & PPKBD
SEPTEMBER 2024

Ket.

80 – 100	50 – 59,9
60 – 79,9	< 50

KABUPATEN	BKB	BKR	BKL	UPPKA	PIK-R	PPKS	BALAI PENYULUHAN	PPKBD
KULON PROGO	97,38%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
BANTUL	100,00%	100,00%	99,30%	99,69%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
GUNUNG KIDUL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SLEMAN	99,52%	99,32%	99,43%	98,53%	98,55%	93,75%	93,75%	100,00%
KOTA YOGYAKARTA	98,71%	98,23%	99,41%	99,46%	98,57%	100,00%	100,00%	95,56%
DIY	99,07%	99,53%	99,62%	99,51%	99,29%	98,48%	98,46%	99,54%

#berencana itu keren yogya.bkkbn.go.id

Zoom Meeting

Recording

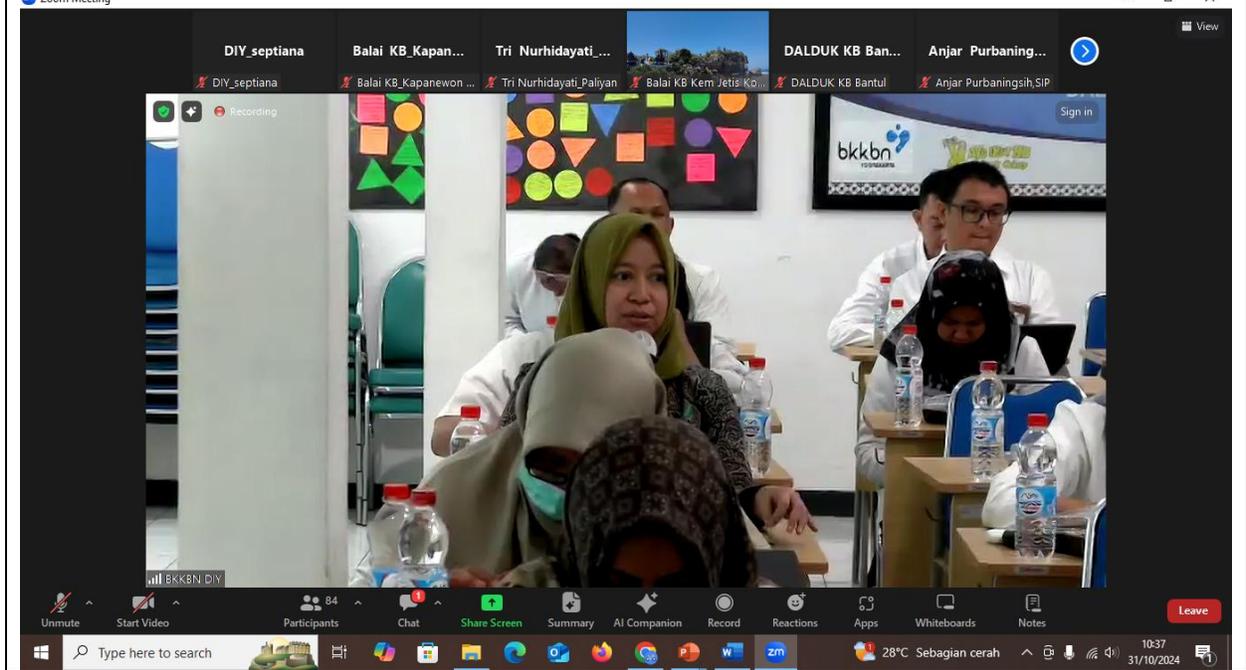
DIY_septiana Balai KB_Kapan... Tri Nurhidayati... Anjar Purbaning...

BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

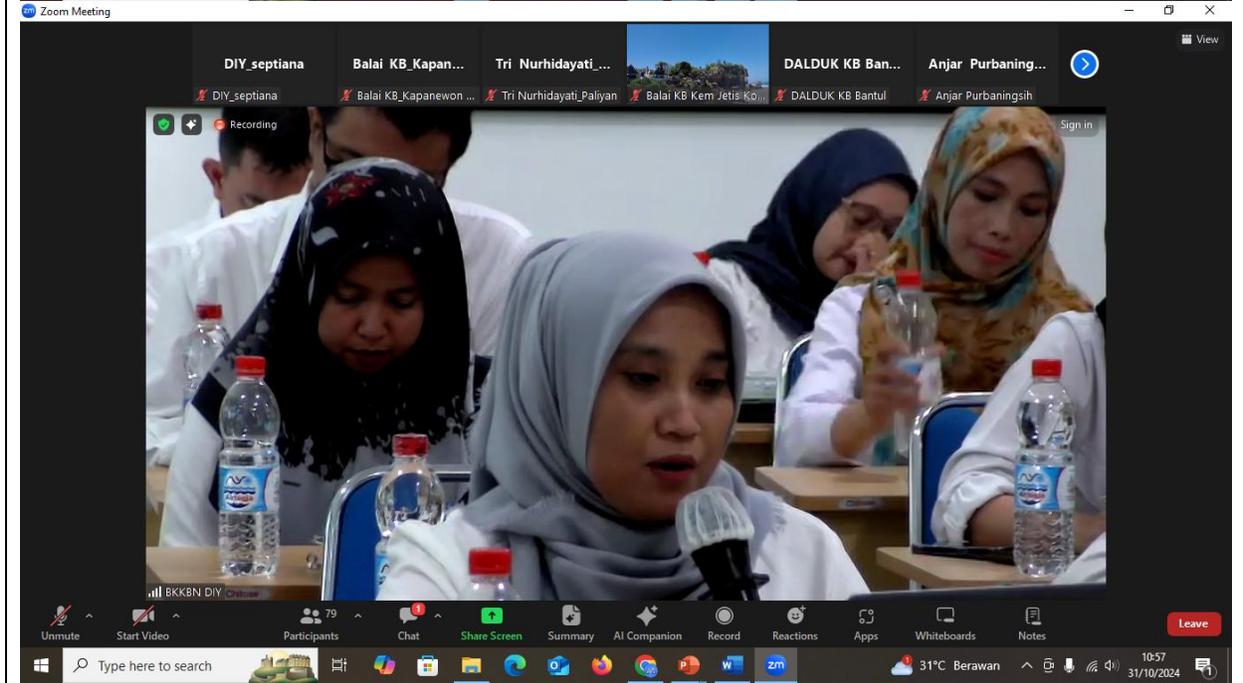
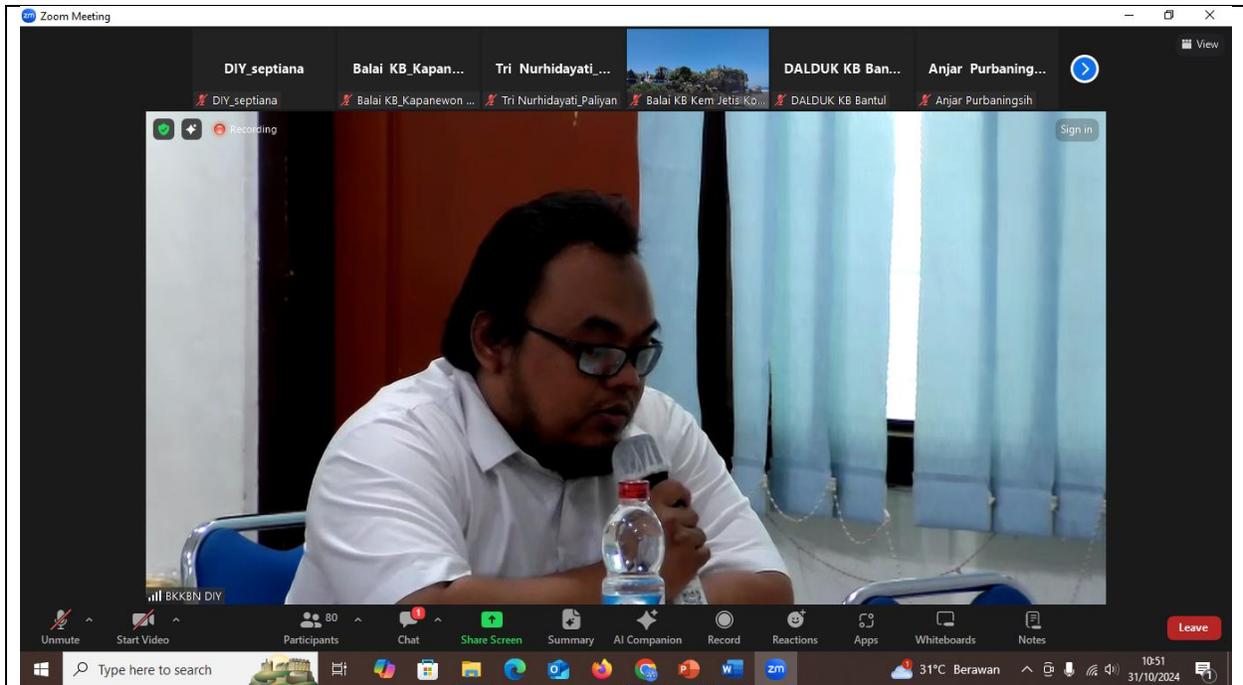
Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Summary AI Companion Record Reactions Apps Whiteboards Notes

Hasil pertandingan 10:16 31/10/2024











	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
	NOTULEN RAPAT		
Subyek	RADALGRAM		
Hari/Tanggal	Jum'at/ 20 Desember 2024	Notulis/ Disiapkan oleh	Septiana Rakhmawati, 
Waktu	13.00 – 16.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan	Novitrisia Widowati	Disetujui oleh	
Narasumber	1. Zuhdi A, SKM, M.Psi 2. Septiana R		
Tempat	Ruang Widya I (hybrid)		
Peserta	1. Kepala OPD KB se-DIY dan Jajaranya 2. PKB/PLKBDIY 3. Ketua Tim Kerja dan jajaran 4. Satgas PPS		
A. SAMBUTAN DAN ARAHAN KEPALA			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terimakasih atas kontribusi dan dukungan selama tahun 2024. kinerja, waktu dan tenaga untuk pencapaian program. Banyak prestasi yang ditorehkan. Inshaallah akan dimulai dengan baik tahun 2025 ➤ Secara program dan kelembagaan bahwa BKKBN sudah berganti logo, tadi pagi ada rebranding di BKKBN Pusat. Menjadi sebuah semangat yang akan diteruskan ke prov dan kab/kota. Nomenklatur dan logo berubah. Seluruh identitas organisasi akan menyesuaikan. Dalam waktu dekat akan disampaikan renstra 2025-2029. Karena penyerahan DIPA sudah diberikan, indicator target provinsi akan diberikan. ➤ Menteri memiliki program andalan Quick Wins <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman Asuh Anak ▪ Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Target sekitar 6.700 anak asuh, bisa dibagi kelompok, perorangan. Intervensi yang harapannya sampai 1.000 HPK (usia anak 24 bulan). Estimasi 15.000/anak/hari, atau menu 			

lain. Bapak /ibu kami mengundang pihak-pihak potensial menjadi orang tua asuh. Harapannya di masing-masing kab/kota bisa mereplikasi kegiatan tersebut.

Masing-masing kab/kota sudah ada wali data, donator bisa diantarkan ke sasaran. Mohon dukungan satgas dan TA , PKB/PLKB dan TPK di lapangan

- Gerakan Ayah Siaga (GAS)
Gerakan Ayah Teladan, kehadiran ayah dalam peran pengasuhan.
- Al-SuperApps Tentang Keluarga

- Lansia Berdaya
Sekolah lansia dilanjutkan di tahun 2025

- Pola kinerja di 2025, akan dibentuk tim Pembina wilayah per kapanewon. Akan mulai mengaktifkan komunikasi dengan grup perkadis, untuk saling komunikasi. Permasalahan dilaporkan, informasi tidak hanay top down tapi bottom up.
- Materi yang disampaikan adalah potret capaian per 16 Desember, data yang dicermati dan susun kembali langkah yang baik di 2025.
- Ajang evaluasi di tahun 2024 harapannya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik di 2025

B. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Capaian Program Bangga Kencana

Data capaian program per November 2024 yang diakses tanggal 16 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Cakupan kartu pendaftaran atau K/0 secara keseluruhan sudah 100%
BKB: 100%
BKR: 100 %
BKL: 100 %
UPPKA: 100 % PIK-R: 100 %
- Cakupan Pelaporan Yan KB: 98,26%, KP,Bantul, GK 100 %, Sleman 95,02%, Kota Yogyakarta 98,53 %,
- Total Pelayanan KB s.d September: 274.974 akseptor
- Capaian peserta KB Baru per mix kontrasepsi s.d November 2024 sebesar 29.117 akseptor (74,34% dari target KKP sebesar 39.168 akseptor)
- Capaian peserta KB Aktif per mix kontrasepsi sebesar 339.562 akseptor (107,77% dari target KKP sebesar 307.321 akseptor.
- Target mCPR DIY 2024 sebesar 58,20% dan target telah tercapai sebesar 65,06%
- Target unmet need DIY sebesar 15,20% sudah mencapai 10,92% atau 58.354 dari target 521.920 PUS.
- Cakupan pelaporan BKB 99,14 %, BKR 98,29%, BKL 98,88 %, UPPKA 99,51 %, PIK R 100,00%, PPKS 100,00 %, BP 100,00% dan PPKBD 97,49 %.

- Girimulyo (BKR 82,4 %),
 - Jetis (BKB 94,7%), Banguntapan (BKR 93,8 %), Piyungan (BKR 87,5%), Sanden (BKL 80,00%)
 - Cangkringan (BKB 88,9%), Sleman (BKL 80,00%), Pakem (BKL 90,00 %) Gamping (PPKBD 60,0 %), Seyegan (PPKBD 0%).
 - Tegalorejo (BKB 95 %, PPKBD 0 %) gondomanan (BKB 80 %, UPPKA 90,9 %), pakualaman (BKB 64,3 %, BKR 57,1, BKL 50 %, UPPKA 45,5), Gedongtengen BKR 86,7 %), Umbulharjo (BKR 92,3%),
- BKB menggunakan KKA bulan November 25.333 orang (99,2 % dari total 25.547 yang hadir).

REALISASI ANGGARAN DAK

- Realisasi DAK fisik dan BOKB triwulan s.d 19 Desember 2024

DAK Fisik: 98,67 % (urutan 1 nasional → Nasional: 73,22%).

BOKB: 92,72 % (urutan 2 nasional → Nasional 72,18 %)

Realisasi Kabupaten/Kota: Sleman (95,62 %), KP (99,58 %), Bantul (85,74%), GK (94,49), kota YK (87,92%)

KETERSEDIAAN ALKON

- Ketersediaan alkon di Gudang provinsi per 30 November 2024

IUD: 23,05 bulan

Pil Kombinasi: 2,65 bulan

Kondom: 4,35 bulan (sudah ada distribusi dari jabar 660 gross)

Suntik Progestin: 13,10 bulan

Implan 1 batang: 0,97 bulan

Implan 2 batang: 12,64 bulan

C. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

Muhadi, KP

- Monev agar selalu dilakukan berkala.
- Close aplikasi kapan agar bisa menyesuaikan. Mudah mudahan di tahun 2025 meskipun penyesuaian kelembagaan, mhn dilakukan pendampingan dan support dalam program pemerintah di bidang kependudukan dan KB
-

Wildan, Sleman

- Sisa anggaran DAK sebagai suatu efisiensi
- Tanggal 23 memberikan reward bagi kalurahan
- Tahun 2025 bagaimana mekanisme pemberian makanan bergizi, dan kaitanya dengan program stunting, berharap ada argumentasi yang seragam terutama dalam menghadapi media.

- Quick win Menteri yang baru, kita menggaet mitra, akhir tahun harus ada laporannya. Ketika berhadapan dengan mitra, terkait pemberian makanan bergizi program pemerintah ko masih diminta menggaet mitra.
- Anggaran di TNI dapur umum setiap 2.000 anak.

Dwi Wiharyanti, Sleman

- Capaian DAK fisik memang 2 juta berupa efisiensi karena pengadaan melalui ecatalog
- DAK non fisik untuk pelaksanaan rutin seperti listrik dan wifi masih proses untuk dilaporkan. Inshaallah di desember masih bertambah.
- Faskes yang masih belum dilaporkan. Beberapa faskes tidak melapor karena memang pelayanan Kb sedikit. Untuk PMB yang pelayanan banyak bisa masuk setara faskes melaporkan sendiri. Faskes Dokkel akan dilihat karena pelayanan sedikit, akan di non aktifkan. Sudah banyak yang masuk MoU yang masuk dari PMB. Akan di verifikasi, pelayanan banyak. Sebelumnya jejaring dokkel, pelaporanya menjadi ribet.

Ardini, Sleman

- Faskes di gamping biasanya untuk mutase alkon diisi PKB karena tidak melaporkan di SIGA. Untuk poktan mungkin terlewat
- Terkait genting ketika diundang perwakilan, tindak lanjutnya apa yang bisa digunakan terutama untuk TPK. Quick win untuk cantolan anggaran tidak terlihat.
-

Radianto, Bantul

- Capaian BOK masih rendah karena belum dilaporkan pada Morena, saat ini di angka 96 %
- Pelkon dan dallap Bantul sudah lebih baik (hamper 100% melapor, tetapi tingkat kehadiran hanya sekitar 50 %)

Ahmad Harwanto, DPC IPeKB GK

- Untuk 2025 kegiatan TPK sangat banyak, TPPS kalurahan dan kabupaten masih ada. Bagaimana kelanjutan satgas stunting. PKB sebagai motor penggerak stunting, satgas mengambil data.

Heristanti, Kota YK

- Capaian PB dan PA cukup bagus diatas 100 %, ada capaian yang masih perlu di push terutama laporan poktan. Masih ada yang belum 100 %.
- Realisasi DAK fisik sesuai dengan sisa anggaran adalah sisa pengadaan, efisiensi. Secara output sudah 100 %.BOKB masih di optimlakan untuk pelayanan KB MKJP dan stunting.
- Stock alkon masih kurang memadai, akan disampaikan setelah stock opname akan mengajukan permintaan alkon.
- Adanya quick win terkait PPS, genting → untuk kota YK sudah bergerak, tahun 2025 kerjasama dengan baznas ada 500 sasaran yang akan diberikan. Data bekerjasama dengan dinkes selaku

tim PPS tk kota. Agar tidak duplikasi baduta dengan kategori tidak naik BB, sasaran lain dari BOK.

- Tahun 2025 akan mendapatkan danais 1kalurahan 100 juta, 40 juta per kemantren di luar BOK, mohon arahnya agar pelaksanaanya tidak duplikasi karena untuk genting mengarah ke CSR bukan dari BOK/Danais. Secara anggaran sudah mencukupi. Dari 500 yang kita sisir, yangmemenuhi 8 asnaf baru 73 sasaran dari 600 yang sudah dilakukan penyisiran.harus mencari lagi sasaran yang sesuai asnaf (salah satunya muslim).dilakukan bapeda, dengan DTKS (apakah masuk/tidak). TPPS kemantren sudah bergerak, kemantren geding tengen sudah luar biasa kiprahnya 1 hotel meraih 100 juta. Tahun ini dari hotel patra memberikan 100 juta tetapi dalam bentuk sanitasi di kelurahan sosoro menduran. Untuk kemantren lain sudah bergerak melalui hotel sekitarnya meskipun cakupanya sedikit, secara rutin CSR dilakukan bekerja sam denganbabinsa dan babinkamtibnas.

Hayu, kota YK

- Terkait capaian kampung KB, sudah 100%. RDK mohon arahan pengembangan selanjutnya. Arti pentingnya RDK sudah dirasakan masyarakat. Evaluasi data setiap bulan terkait data banggakencana dari SIGA BKKBN dan sistm informasi keluarga. PKB bergerak di KKB menggunakan data SIGA dan data kekerasan. Permaslaahan stunting terjadi karena adanya kekerasan, perceraian dll. Data kekerasan yang sudah dianalisis 258.

Kaper

- Terimakasih komitmen untuk penyerapan DAK fisik dan non Fisik/BOKB.
- Pendampingan perlu secara berkesinambungan baik dari provinsi
- Terkait dengan kampanye makanan bergizi gratis, pemerintah diminta bergerak.di kabupaten 9% dialokasikan untuk makanan bergizi. Seluruh elemen masyarakat diminta bergerak salah satunya pak Menteri dengan quick win. Nutrisi sampai 1000HPK, menu melibatkan tim DASHAT.
- Keberadaan satgas stunting, dalam proses diskusi antara bapenas dan kementerian keuangan. Peran satgas kita maksimalkan di akhir Desember.
- Terimakasih untuk kota sudah mulai bergerak terkait genting dan dukungan dana.Panduan terbaru sebagai pedoman, genting sebagai Gerakan empati bersama.

Ita Suryani

- RDK adanya di kampung KB. target paripurna tercapai 79. KKB sekarang di level kalurahan bisa dintegrasikan dengan data sid. Dapat diintegrasikan dengan data apa saja sepanjang memberikan support penyelesaian masalah yang akan dilaksanakan di Kampung KB.
- KKB target 60 % KKB menerapkan penanganan isu terpadu penangan isu kependudukan, bisa mencapai 85,9 % (diatas 150 %)
-

Septiana

- Terkait batas waktu pelaksanaan anggaran mengikuti kabupaten/kota untuk pelaporan tahun 2024 sebagai syarat dikeluarkannya rekomendasi salur tahap I. Biasanya paling cepat februari

Faturachman

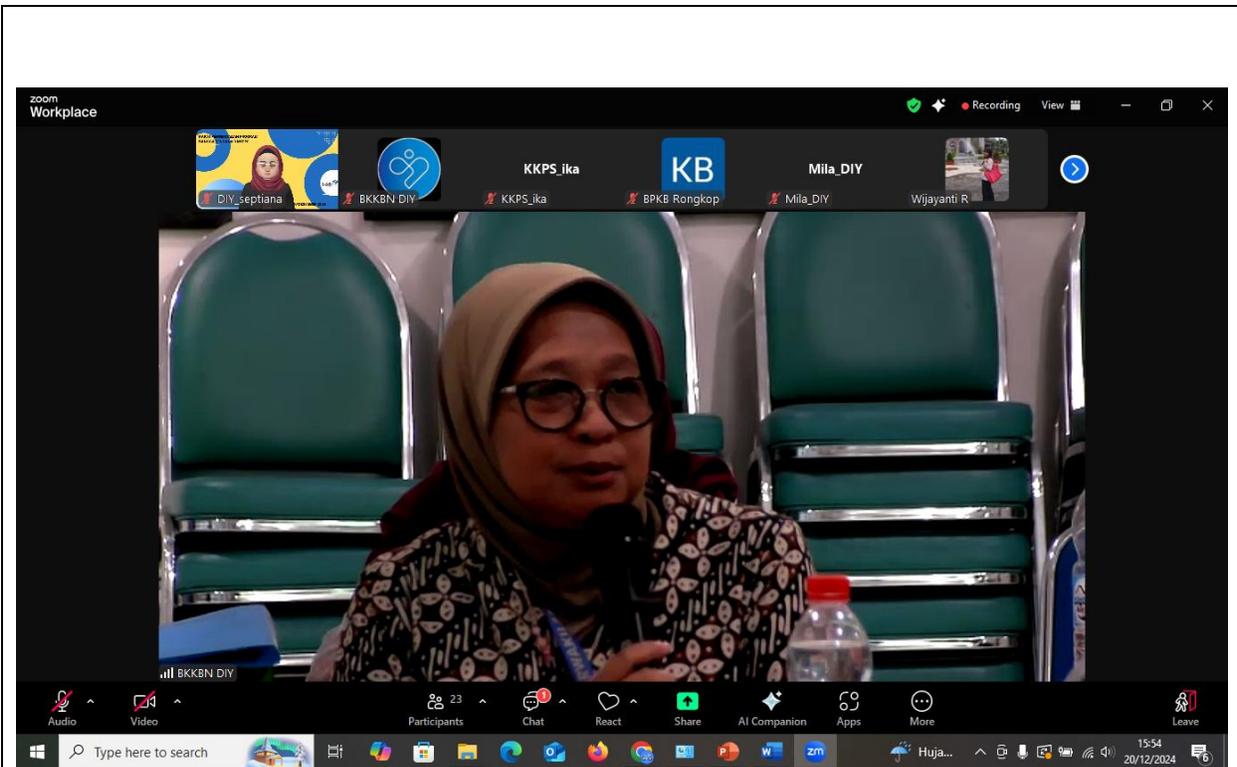
- Terimakasih kontribusi, banyak momentum berimbas pada capaian program, konsekuensi terlihat dalam PK, MKJP mengalami penurunan untuk mengejar kuantitas, bermain volume di non MKJP sehingga potensi DO lebih besar.
- Tahun 2025 kebijakan akan berubah pelayanan KB asimetris, jika TFR rendah, kebijakan berbeda. Ada amunisi baru implant 1 batang.

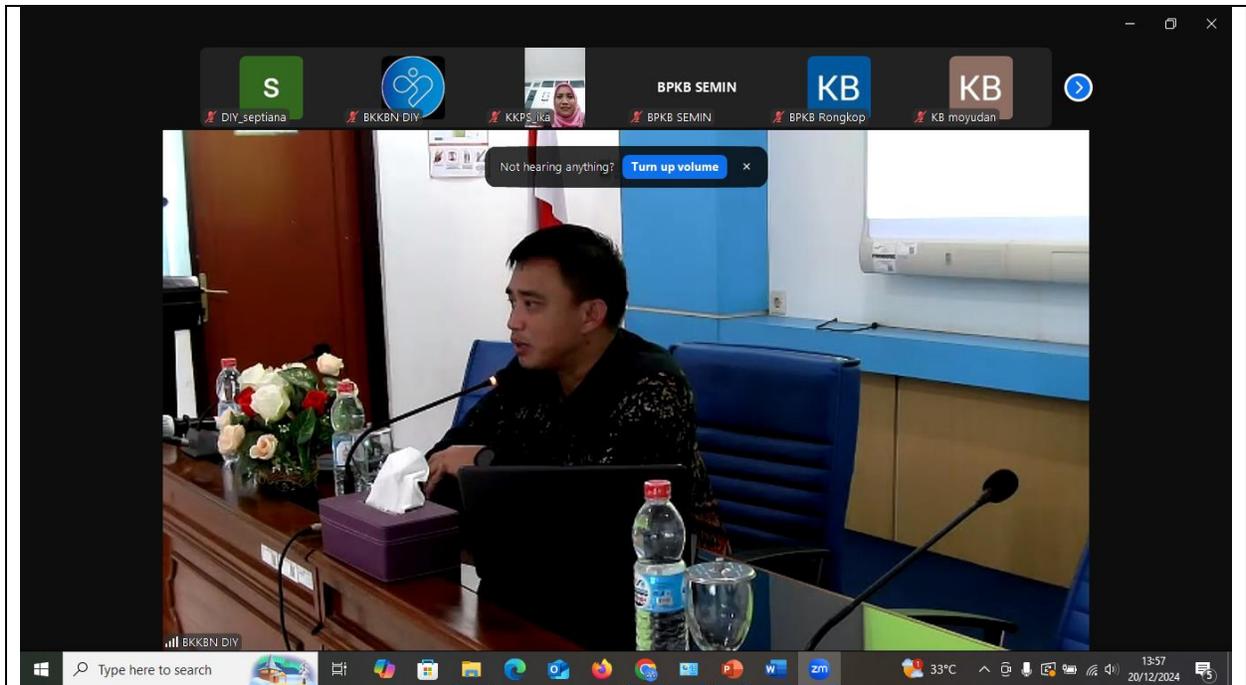
Sofia

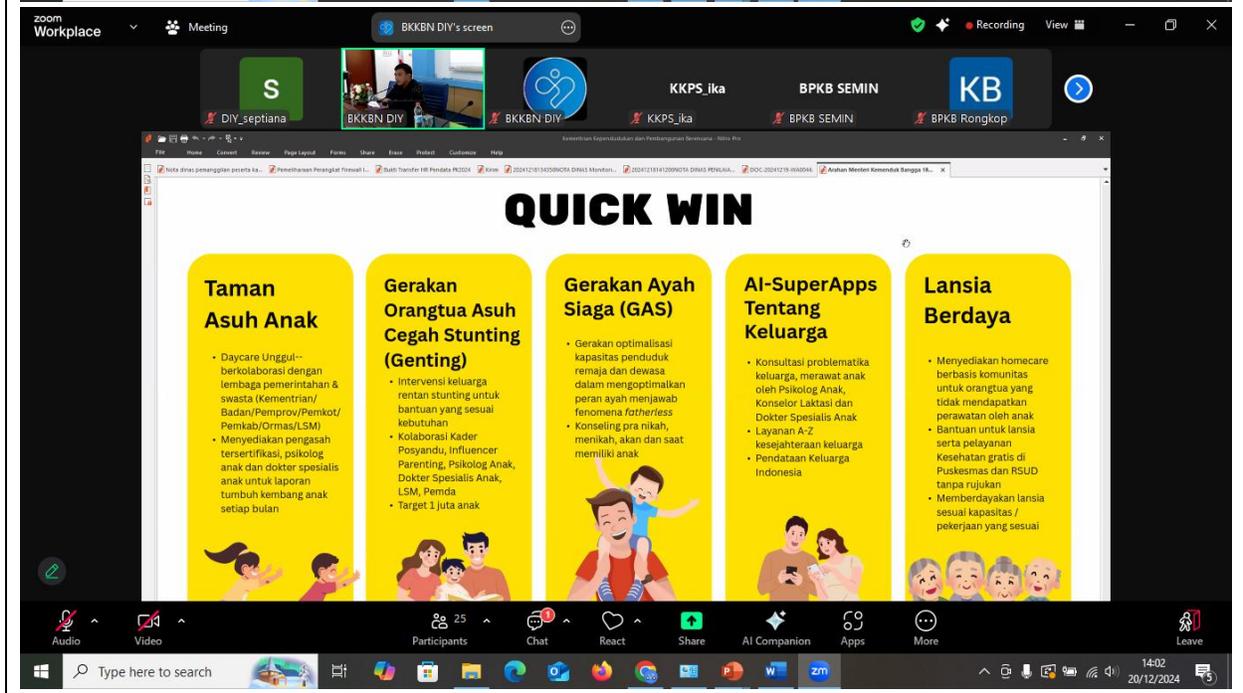
- Terimakasih untuk OPD Kb kab/kota yang bekerjasama dalam penginputan RPD DAK di aplikasi KRISNA, semoga pelaksananya semakin lebih baik tahun 2026 akan ada sinkronisasi SIPD, aladin dan krisna. Perubahan anggaran tidak akan semudah tahun sebelumnya, perencanaan di plot dari awal.
- Mohon maaf, Bantul dan Sleman terkena Join audit DAK. Ada pelajaran yang bisa diambil.
- Ada Monev dari BKKBN Pusat, Kemendagri dan DJA di kabupaten Kulonprogo dan Bantul.

D.DOKUMENTASI











zoom Workplace Meeting BKKBN DIY's screen Recording View

DIY_septiana BKKBN DIY BKKBN DIY KKPS_ika BPKB SEMIN BPKB Rongkop

HIGHLIGHT CAKUPAN LAPORAN YAN KB NOVEMBER 2024

SLEMAN

YAN KB SWASTA



80,0

■ MINGGIR

Belum Melapor

PMB WIDYA PURI

YAN KB SWASTA



66,7

■ SEYEGAN

Belum Melapor

- BPM Silvia Harasbitara
- RS.At.Turots Al-Islamy

Ket.

80 – 100 %	50 – 59,9 %
60 – 79,9 %	< 50 %

Participants: 25 Chat React Share AI Companion Apps More Leave

Type here to search 31°C 14:23 20/12/2024

zoom Workplace Meeting BKKBN DIY's screen Recording View

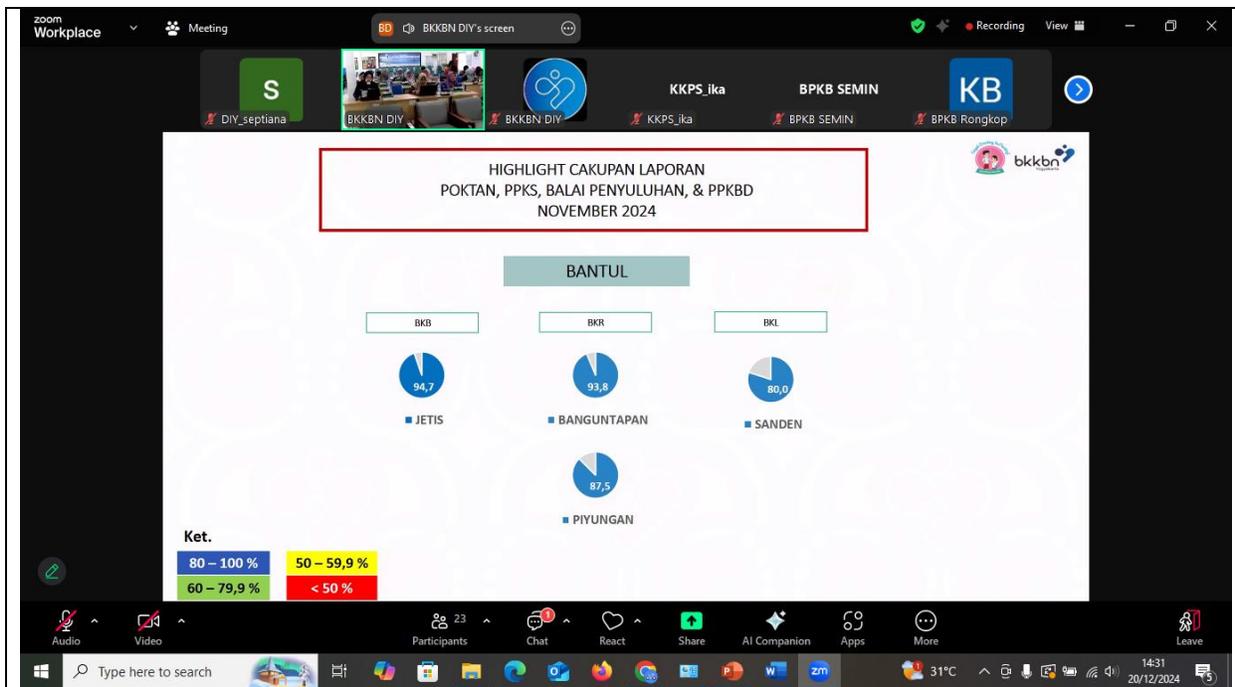
DIY_septiana BKKBN DIY BKKBN DIY KKPS_ika BPKB SEMIN BPKB Rongkop

CAPAIAN PESERTA KB BARU S.D. NOVEMBER 2024

No	KAB./KOTA	PB			PB MKJP		
		KKP 2024	PB	% THD KKP	KKP 2024	PB MKJP	% THD KKP
1	KULON PROGO	5.359	3.737	69,73%	3.156	2.133	67,59%
2	BANTUL	10.697	7.060	66,00%	4.841	3.753	77,53%
3	GUNUNG KIDUL	10.920	6.674	61,12%	4.767	2.454	51,48%
4	SLEMAN	10.167	9.000	88,52%	4.877	3.794	77,79%
5	KOTA YOGYAKARTA	2.025	2.646	130,67%	1.113	1.686	151,48%
D.I.YOGYAKARTA		39.168	29.117	74,34%	18.754	13.820	73,69%

#berencana itu keren yogya.bkkbn.go.id BKKBN DIY

Type here to search 31°C 14:25 20/12/2024



CAPAIAN HASIL PK-24

	TARGET NASIONAL DIY 2024	CAPAIAN DIY 2024	Status
1 Angka Kelahiran Total/TFR	Belum Rilis	Belum Rilis	
2 Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	Belum Rilis	Belum Rilis	
3 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	58,2	63,1	TERCAPAI
4 PA MKJP	43,2	41,8	
5 Unmet Need	15,2	11,4	TERCAPAI
6 Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	20,4	23,1	
7 Median Usia Kawin Pertama (mUKP)	23,5	23,0	TERCAPAI
8 i-Bangga	70,0	64,8	
9 Persentase Masyarakat Terpapar Bangga Kencana	80,6	79,5	

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK-24

#berencana itu keren | yogya.bkkbn.go.id | [f](#) [@](#) [v](#) [y](#) [BKKBN DIY](#)

zoom Workplace Meeting BKKBN DIY's screen Recording View

DIY_septiana BKKBN DIY BKKBN DIY KKPS_ika BPKB SEMIN BPKB Rongkop

SASARAN GENTING

Kabupaten/Kota	Keluarga Sasaran	Keluarga Sasaran Bumil	Keluarga Sasaran Baduta	Sasaran Keluarga Baru	Total Sasaran
KULON PROGO	1.701	274	1.430	247	1.948
BANTUL	2.300	295	2.014	334	2.634
GUNUNG KIDUL	3.812	644	3.187	554	4.366
SLEMAN	2.358	323	2.044	342	2.700
KOTA YOGYAKARTA	535	58	480	78	613
DIY YOGYAKARTA	10.706	1.594	9.155	1.555	12.261

PRIORITAS 1

- ✓ KELUARGA PUNYA BADUTA/BUSUI
- ✓ KELUARGA BUMIL
- ✓ DESIL 1,2,3
- ✓ KELUARGA **BERISIKO** STUNTING

PRIORITAS 2

- ✓ KELUARGA PUNYA BADUTA/BUSUI
- ✓ KELUARGA BUMIL
- ✓ DESIL 1,2,3
- ✓ KELUARGA **TIDAK BERISIKO** STUNTING

Participants: 23 Chat React Share AI Companion Apps More Leave

Type here to search Hujja... 14:41 20/12/2024

DIY_septiana BKKBN DIY BKKBN DIY KKPS_ika BPKB SEMIN BPKB Rongkop

PELAPORAN 9

ALUR KOORDINASI DATA

```

graph TD
    A["1. Data Sasaran GENTING (Rekap dan BNBA)  
Tim Pengendali Pusat  
DASHBOARD"] --> B["2. PROVINSI  
Kab/Kota  
Tim Pengendali Prov  
Tim Pengendali Kab/Kota  
1. Data mitra  
2. Data sasaran"]
    B --> C["3. Kecamatan  
PKB/PLKB"]
    C --> D["PKB/PLKB dan TPK melakukan verifikasi dan penetapan sasaran"]
    D --> E["4. Input data ke SIGA  
Desa  
TPK  
BB, TB (Elsimil)  
Pendampingan/ Jenis Bantuan Genting (Verbal)"]
    E --> A
  
```

Participants: 23 Chat React Share AI Companion Apps More Leave

Type here to search 14:45 20/12/2024







Rapim -

Senin, 22 Januari 2024 -

Jam : 08.45 WIB -

Pembahasan -

1. Cek yg belum hadir. - RPKB, hadir lengkap.
2. SOP. Keg Sama - Pertemuan - Sosialisasi ada RTL.
- Workshop dan rumusan

Setiap keg ada RTL.

SOP Pembentukan. BKR, BKD, PK, BKL, UPPKA

3. Mekanisme Pelayanan KB.

- SOP sampai pada monov-dan perkembangannya.
- Humas - Setiap kegiatan hrs ada rincian di edit oleh tim

Layanan Publik. - ke BPS. DJPB., migrasi Pakai Dagan.

- Struktur organisasi diganti. dg 11 Pokja.

- Apa yg ada di SOP. itu yg dijalankan.

- membuat tik tok. - (2 menit)

- Pembentukan Sekolah Lansia. (Pimpinan)

- nas kah nya di buat. oleh masing2 pokja.

- Semua layanan. ada di PPKS → Kespro. Bisa online & luring.

→ Jadwal PPKS. Tok. ke dokteran. dg dr Prima.

→ B layanan. di PPKS.

- SOP. PPKS.

SOP Pencairan anggaran. → AJK. → lembar 3. Dipo

- Penyelesaian SPJ.

- Semua krstandart.

Uslan Januari sudah masuk. penyelesaiannya harus.

masuk minggu ini. 19. Jan. 2024 selesai?

- Kegiatan BU Roh&bi ada 5. keg.

- Yang sudah dilaksanakan segera diselesaikan.

KB. 29 Jan 2024 keg fullboard. pakai KKP.

- U/ Penjalanan dinas dg KKP. & keg di hotel dg KKP.

- UP yg diberikan 300 juta → 1-2 minggu bisa kah.

- SPJ hrs tepat waktu.

- format laporan seperti pusat.

→ Kolase → dicek / koreksi oleh humas.

I W + 1 H

→ setiap keg.

→ yg turun hrs ada fotonya bukan org lain / keg.

→ Inventarisir semua target sesuaikan dg dipa / anggaran.

SSK → - OPDKE yg menangani SSK.

- gurunya dipanggil ke Prov.

- monev & evaluasi setelah pembentukan.

- Kabupaten yg bertanggung jawab thd target ketualiti & kebersamaan. dg momentum strategis.

- mapping kab/kota sem 1 bulan yg sama.

- 1 kali turun 2 kab/kota bisa v/ pengembangan.

- dilihat mana yg hrs diusulkan jadi percontohan.

- Pembinaan yg baru & lama.

- Kab diikuti pada monev - transport lokal. 100.000.

- PLKE sekali = dilibatkan. Dpt transport lokal - " -
Koordinasi sebelumnya.

- Bu Heni v/ diberitahu manajemen keg 1 tahun

Thema. Program Bangsa Kencana

- Renov sementara ditunda v/ diutamakan. ruang rapim
diperluas. (jangka panjang.

- Bu Daru diatur. dg ruangan ks.

- Perpustakaan online → manual.

- Prakom. → Data Center. → Pajak Kependudukan.

→ Capaian PB.

→ pakai aplikasi

→ distribusi buku = yg ada ke pes pustakaan lain.

→ MPC SK. SOP pemanfaatan MPC.

akreditasi → MEC.

→ studio. audiovisual > integrasi

Kalau ada tamu es I & II. v/ live.

akan koordinasi dg Bu Rohdhi.

v/ live GDRK. talkshow & Sulsel.

ada dialog dg Genre.

Surat ijin broadcast. jangka Panjang.

ruangan. v/ penilaian.

⇒ Pembagian tugas : terserah ketua pokja. (empati)
tlk ada staf yg tlk kebagian tugas. dievaluasi.

- Kalau keluar tanpa ijin hrs dicek. w/ promosi dan panesmen. /rolling.

- Setelah rapim dilanjutkan. Koordinasi dg tim. mental disorder 5%.

④ Target, Realisasi anggaran - disampaikan pd Tim. supaya semua aktif.

⑤ ada makan &

Rabulgram 23 Januari 2024

1. Capaian Program 2023. 2. target 2024. 3. DAK. revisi & pelaksanaan. (Bu Hon di undang)

Peserta:

1. Kepala

2. Sekretaris Badar

3. Witriastuti

4. Ronni

5. Yuni Hastuti

6. Iin Nadai tab

7. Poppy

8. Ita Suryani

9. Anggoro

10. Fathur

11. Septi

12. Zuhri

13. Daru A

Rapim

Hari Senin, 5 Februari 2024.

Jam. 8.20' -

1. Senin - Siang, Kalau mau kegiatan.
2. Masuk minggu I. evaluasi keg. Januari Konsisten tkk
3. Target Pro PN (banyak. yg org atas tdk paham Stunting) kegiatan 1000HPK. pas. kemitraan.
4. Rabadgram. waktu dekat.
Baker nas - sudah siap rakerdo.

rabadgram - semua pakja internal. Feb. tkk.

Siap v/ rabadgram pusat.

- Bln Feb Strategi v/ Bln Februari.

- anggota v/ di minta v/ inovasi / inisiatif v/ Capaian target / program. arahkan staf. sesuai

integrasi kar kegiatan.

1. Kepala Hadir ada kegiatan lain.

2. Target deputi Balduk v/ KSPK. v/ Desember sudah tkk.

Bersiap? v/ buat KAK. Gila-ada keg. tkk. lepas.

3. Cek. SPJ triwulan 1. 2024.

5. Pengadaan - Fathur. Dly sudah pengadaan jangan lewat maret kecuali ada prototipe dr pusat.

6. Pemeliharaan motor yg hrs diperbaiki / panther. yg gunakan supir hrs ada serah terima dg yg bertanggung jawab mobilnya.

7. Tg driver v/ dibetikan TV. v/ ditata. Simpan alat kebersihan.

8. Linlap berdiri sendiri

Dr. Fathur - 1

rohdi - 1

Kepeg - 1

tgl 7/ ketemu jam 8. tim perjamib mutu diklat.

2 → pagi g. Kota.

→ 5,6,7 → 10B. fitik. → 23 Feb mulai

TOF.

- maksimalkan Daring Kelapangan dioptimalkan
- Berbag persiapkan org tua Hebat → hrs Daring.
- untuk Hal 2 Baru Kabupaten / Kota hrs diinjeksi melalui Daring.

- tgl 12 Feb 2024 rencana.
- 200 org Bangga Kencana.

UU.52 → tugas. & Program. Bangga Kencana

- visi & misi

- 7 Prioritas Pembangunan.

Semua Per temuan hrs menyempatkan. Program.

- video Bangga Kencana.

- Target.

- Survei

- Kepala BPKP. U/ Pembinaan M. 20. Feb 2024.

- Ketua Pokja- hybrid. MK

- minimal 3 Keg. U/ hadirnya es I. talkshow.

Yuni

- Launching - 8 Sekolah Lansia

- 8 x 15. GK. Player.

19 Berbag Sleman

12 ganti 16.

- Nama Kegiatan ?

- Tujuan ?

- Sasaran ?

- yg hadir ?

Laporan untuk Deputy

22.
- Somasi selesai DiY. 67% → 33 proses → selesai.
Surat Keterangan yg diusahakan. tergantung
kondisi lapangan. tgl. sebelum selesai pemilu.
45 x 10.000,- dari ATK.

→ Februari 2024 Deputi KSPK & Jalurk. hadir di DiY.

1. Dipisah → amanah Perka.
2. SKP.

- Lin lap → - Bo Kanthi Ketua.
- Wawan → noui
- amisty
- surti

Sebelum tgl 12. Feb 2024.
revisi ajk.

Triwulan 1 15 % hrs masuk.

- Deviasi 3 Dpa. perlu komitmen.
- Target output disesuaikan anggaran.

peserta .

1. Yuni

2. Eni

3. Sofia

4. Bu lin.

5. Rohdi

6. Sekban

7. ~~Septa~~ Fathur.

8. Septa

9. L. Darv A

10. Anggoro

11. Ita

12. Kaper.

Rapat 18 Maret 2024

Pokok Pembahasan.

1. Pertemuan Rakoraker KB, KSPK, Dalbuk, Adpin dll sdt selesai dilaksanakan maka rencana aksi 2024 sesuai kesepakatan dimasing-masing keputahan agar ditindak lanjut, diurai dan di sosialisasikan kepada anggota peja
Lihat kembali ikunya kita, di breakdown, dipilah target dan strategi
2. Dalam Rangka HARBANAS yang akan dilaksanakan di awal Juni, untuk lomba segera disiapkan Rancangan strategi untuk memenangkan lomba
Lihat profilnya, 3 tim di masing-masing kab/kota agar bisa diseleksi
3. Rakerda tidak menunggu Rakernas, Arahan Kepala BKKBN RI dilaksanakan, sekan jadi ketua, susun kepanitiaan, Tim Perumus sesuai Tema. Rabu Rapat khusus persiapan (Tanggal 13) Rapat persiapan sore hari, Target 18 Maret 2024 (Kamis) Segera Andarsani, langsung ke Seksi Gubernur.
Tim perumus dipilih yang paham utk strategi th 2024.
Keynote speaker → Kepala BKKBN RI
Evaluasi, strategi → Kepala Perwakilan BKKBN DIY.
"Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM menuju Indonesia Emas 2045"
Mengenai Bonus Demografi → UGM.
Strategi → Bappeda
MC → Mrs Ewang
Moderator →
Anggaran disiapkan
Akara penghargaan, capaian DAK, penandatanganan kesepakatan kerja, Apresiasi pengelolaan DAK (DAK Fisik maupun non fisik)
Inventarisasi MoU dengan Mitra, Evaluasi dan ditindak lanjut
Seluruh febra peja (Maksimalkan seluruh staf)
Selama bulan puasa April Senin & Jumat
Pasar Murah Harganias (Sth Rakerda)

Rapat TPPS (Tim Percepatan penunahan stunting)
26, 27 Maret (Rencana Rapat evaluasi 2023 & strategi 2024)

Rapat Evaluasi TPPS

1. Tingkat Propinsi

- Materi → Apa saja yg sdh dilakukan Kab/kota
- Interview security, Sportik.
- Data EPP6BM (5 Kab/kota)
- Komunikasi dg TPPS

Materi

- Evaluasi TPPS - Bappeda.
- Adut dikari yg tepat → BTKBM Pusat.
- Angkat Indikator penentu sign

Ketua Panitia B.Emi

Disusun panitia, jadwal, undangan.

Undang Pak Wagub.

Undang wakil Bupati

Penyajian harus menarik.

Panitia kolaborasi dengan 4 bidang

Bast Kepanitiaan 2 versi

1. Internal
2. Kolaborasi lintas sektor (Efektive)

Konsumsi (Bual/Kue) yang bisa dibawa pulang.

Jadwal. Evaluasi 2023, strategi 2024

Dua kegiatan Besar ini harus masuk di MPC.

Apakah urgensinya terkait dan TPPS.

Ketua PKK, PKK Bantul (Podcast)

Target MPC tiap bulan 5 Slogan Podcast

Dan Pembentahan (media cetak, elektronik dll)

Kalau ada 2 agenda besar, Pelebaran POKJA tetap berjalan sesuai

Usulan ASK.

Tgl 19 Maret di Radalgram (Apabila Kab/kota mendapat krm
bukan pusa → Lakukan daring no penyelenggara Propinsi)

Seluruh usulan Maret harus jalan

Paparan Radalgram yang bagus
Format Pengumuman, Apa yang masuk ke bendahara masuk ke Kaper.

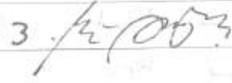
Peserta Rapat.

1. Kaper

1.  2. 

2. Sekretaris Badan

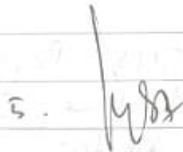
3. Itta Suncahi

3. 

4. do. Iin

4. 

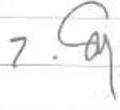
5. Widiyaningsih

5. 

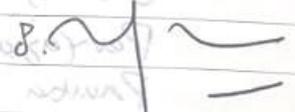
6. do. Fatun

6. 

7. Poppy

7. 

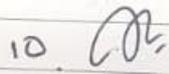
8. Yuni H

8. 

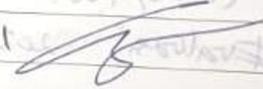
9. Luluwa Dan Andani

9. 

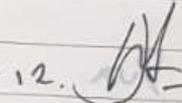
10. Septi

10. 

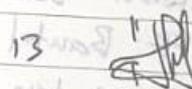
11. Fuzang Sewako

11. 

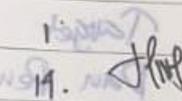
12. Aji

12. 

13. Tia

13. 

14. Anis

14. 

Agenda April

Tanggal 1 April 2024. → Mengunjungi Panti Asuhan / KRS
Tanggal 2 April 2024. Panti Jowo, Jember Anak

Sosialisasi "Pasar Murah" dan Rangkai Harganes
"Se teman" Anggota Petja Warku 15 Maret
Rapat online tel 15 Maret 2024

Papim : Selasa, 16 April 2024

Jam : 13.00 WIB - selesai

Agenda Rapat :

1) BEM untuk ke K26 K27 :

- KP, ATK : 150.000

- BTL, 5 km : 100.000

2) UH untuk driver 160.000

3) Mirzsa ke 3 → permintaan pelatihan, biaya mandiri > P. Anggoro.
Perwakilan pelatihan 140 rmlan

Key. dr Pttur

B. Zuhdi

B. Yuni

B. Ndaru

4) Ralatgram mirzsa ini bisa daring klo tdk ada Kab yg sdg menyelenggarakan

5) Rapat persiapan Harzans di Kulon Progo → akan diselenggarakan di mana?
dr KP mengajukan tgl : 22 April → strong, setelah acara dr Pttur.
Lokasi ke Kulon Progo? → Daring

Siapa yg akan hadir? Intend dulu

Yg akan disampaikan (Matri) : Kegetannya Sprti p-9 det.

2024 → stand nya hrs bagus tdk sprti tahun sebelumnya

Yg akan dihadirkan siapa saja

harzans prior :

- pememer UPPICA

- Konsehar Pranata, kespro.

- Foto bath.

- Merchandise - utk yg bertanding dca

6) Inovasi & harzans → ada 2 kelompok UPPICA yg berseda

7) Nama tim kerja wgrb beli tdk @ 250.000

- anggota tim kerja beli yg @ 150.000

- VIP : 3 meter sub.

- (12 ms) 2,5 meter : wgrb, hemes, putri

8) Seram → dipertahankan → Konsumsi : 200 ms (dukungan dr 002)

9) → ada lomba yg keluaran → sama persisnya siapakan

harzans → 5 Juni 2024 & Seram

10) wakil : Pranata harzans & perwakilan

11) perwakilan harzans & KP

- 4 PKB akan akomodasi di perwil atau di KP? → 78 PKB Grund & KP + Koord. DPC, DPP, PKB.
- Rapat Persiapan: 2 Fkx: 50 Konvensi, 20 UH.
- 4 Genam: Konvensi 200 org. & halaman perantara → Mei.
- 23, 24 Juni 2024. → kongres & KP.
 - 23 → Panitia dan jalan sehat. → lomba memviri 4 unca.
 - 24 → pameran dan puncak.
- Penyerahan hadiah: di lomba: talk hus semua nanti ke pengurus.
 - Sibukkan Pragam yg dibantu & atas pengurus. (juma 1-3)
 - 4 uang pembinaan dibantu & bawahi.
 - Hd So pragam → kaper. Sub.
 - keguruan provinsi → sub
 - keguruan pas → p. hest.
- Seragam & pita di hangat tsb 5/6 Juni 2024.
- Lomba:
 - Kelorng.
 - Merzsambor

7) Podalgram: 18 April 2023. Gany: 13.00 wib. di P. Lancor

75 di und: OPD KB: @3 org. → 15 org.
 1 PKB: 6 org
 Tim kgr + argstka:
 Sekeloa hal-hal blud ds OPD KB.

- Semua lomba-lomba harus di selesakan ~~kan~~ bulan ini.
- Capaian target sampai bulan ini?
- Pengadaan implan 1 Btng dan BMHP (DPPK) bulan ini dtng.
 - Pengadaan alokasi selesai di bulan Mei
 - Pengadaan ATTB: ditrepta selesai di bln April / Mei.
 - Anggaran per 5 April: 30,34 % (solut).

1. Daldut: 16 %
2. KB: 8. 57.
3. Krtsh: 15,76 %
4. : 31 : 32,6
5. : 54,47 %
6. : 0,05 %
7. : 18,26 %

7) Peserta untuk keluar III DIPA : → syen & gya

- B. Eri

- B. Xuri

- B. Ndam

- B. Rohdi

- B. Isanthi

- B. Septi

- P. Ansyara

target anggaran :

target KB :

- B. Iin → sisa belanja Modal : aku d'bolak

- B. Ita

- dr Fathur

8) acara kunjungan jawa Barat :

tgl 26 → Narasumber ke K6 Ibu belk G5 & workshop ke plh.

tgl 24 → Sambutan

9) anggaran internet perlu perbaikan.

10) Anggaran dengan mfn.

11) Laporan hasil TKK 2023 oleh perantara.

Peserta.

1. Eri

2. Selaban

3. B. Rohdi

4. B. Zuhdi

5. B. Eri

6. B. Septi

7. P. Fathur

8. B. Xuri

9. B. Isanthi

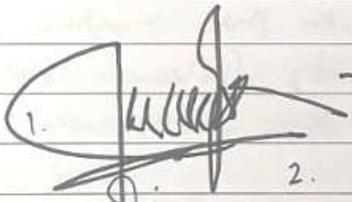
10. B. Ita

11. B. Ndam

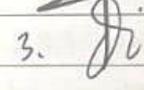
12. Sofia

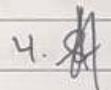
13. P. Ansyara

14. B. Iin

1. 

2. 

3. 

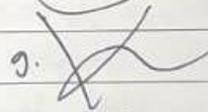
4. 

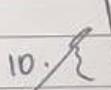
5. 

6. 

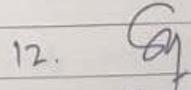
7. 

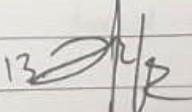
8. 

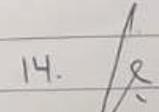
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Rapim

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Mei 2024.

Tempat : Ruang Rapim

Ditimpin : Ketua Pokja Pengendalian Penduduk

Agenda : Membahas tentang masukan Issue? Strategis -
untuk rekomendasi BKKBN Pusat dalam
Pengambilan kebijakan.

1. Kelambananaan : Pengendalian Penduduk dan KB, masih
digabung (merger), sehingga tidak fokus.
Idealnya merujuk kepada UU No 23 / 2014 tentang Pemerintahan -
Daerah.

2. Monev. Kinerja PKB / PLKB : Agar ada alat (tools) untuk
menilai kinerjanya. Idealnya : Adalat (tools).

3. Dari Masukan \geq tiga kerja membangkitkan Issue? Strategis.

- Identifikasi :

a. Rentang kendali antara Provinsi ke PKB / PLKB terlalu
jauh.

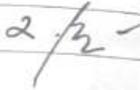
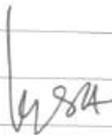
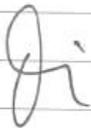
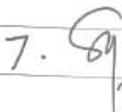
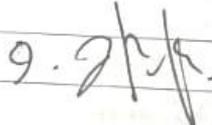
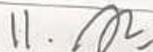
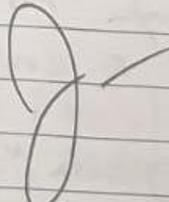
idealnya : Di OPD-KB sebaiknya pembantu kinerjanya -
PKB / PLKB ditangani oleh oleh tenaga yang mampu -
memahami tugas / Fungsi PKB / PLKB.

b. Untuk PKB / PLKB sebaiknya ada alat (tools) yang bisa -
memonitoring kinerja PKB / PLKB, secara terukur /
terstruktur dan dapat dibandingkan antar wilayah
dalam pelaksanaan evaluasi.

c. Konsolidasi internal antar direktoratan di BKKBN -
Pusat dalam penerapan / kebijakan terkait PKB / PLKB
dan kebijakan lainnya agar lebih solid sebelum di -
terapkan di tingkat Provinsi.

4. Pelaksanaan Perencanaan lumbx dan kebratan momentum strategis - agar diinternalisasikan dan direncanakan tahun sebelumnya sehingga dukungan anggaran dapat disiapkan; tahun berjalan.
5. Dalam penetapan target IKK agar mempertimbangkan faktor pendukung (SDM, sarana prasarana, ketersediaan akses); khususnya IKK-fasilitas yang siap melayani KB MKJP.
6. Sistem Informasi keluarga (SIGA), bersifat dinamis dan terdapat akses sehingga user dapat melakukan pelaporan setiap saat; ini berdampak pada analisis data (contoh: rasio ketersediaan akses).
7. SIGA belum mendukung evaluasi IKK
8. Perlu adanya tools untuk evaluasi kinerja tim kerja (ser. Nasional).
9. Perlunya fokus dan juklak pengalihan P3K dari yang semula PPNPN. (ser. Nasional).
10. Perlu ada ~~pedoman~~ review pedoman pelaksanaan orientasi Perawat-an Jangka Panjang (PJP) bagi lansia, agar pelaksanaan di lapangan tidak terpacu terdih dengan instansi.
11. Perlu ada review kebijakan pada pembentukan Seberes Lani, khususnya ruang lingkup kewenangan dan pembentukan, pengelolaan & evaluasi
12. Pengketa ^{kapasitas} sdm Lini Layanan Terlewat dan pengelolaan Satya Gatra di Balai Penyuluhan.
13. Dalam SIGA perlu perubahan menu jenis usaha & klp UPAS yg dapat direkap.

Peserta

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Sekretaris Badan | 1.  |
| 2. Bu Ita suryani | 2.  |
| 3. Bu Erri | 3.  |
| 4. Bu Kanthi | 4.  |
| 5. Bu Rohdi | 5.  |
| 6. Bu Iim | 6.  |
| 7. Bu sofia | 7.  |
| 8. Pak Fathur | 8.  |
| 9. Pak Anggoro | 9.  |
| 10. Bu yuni | 10.  |
| 11. Bu Septi | 11.  |
| 12. Bu Lidwitra Daru | 12.  |
| 13. Pak Infani | 13.  |

Rapim
Hari/tgl : Senin 1 Juli 2024

empat : R. Rapim.

memeriahkan Harganias ProV 2024 DIY.

Berkas tgl 21 Juli 2024.

Peserta.

1. Yuni

8. Utomo

2. Daru

9. Yurni

3. Emo

10. Festi

4. Novi

11. Ratna

5. Ita

12. Septi/Tyas

6. Ewang

13. Budi

7. Uniek

14. Sofia

1. Kepanitiaan antara panitia prov & intern inline

2. format Daru & lintas sektor. & komunikasikan & aktif.

3. Hari keluarga - 1000 konsumsi di KP.

- 200 - " - di BKKBT DIY.

Publikasi Kominfo KP

tiap kapanewon di KP & buat umkolz.

talk show rangkaian dari awal sd. akhir.

anggaran 14.000.000 dari Tim kerja Bu Eri

anggaran dari sponsorship. & Operational panitia.



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
UNIT KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOTULEN RAPAT

Subyek	RAPIM		
Hari/Tanggal	Senin, 05 Agustus 2024	Notulis/ Disiapkan oleh	Septiana Rakhmawati, S.Far., Apt 
Waktu	08.00 – 15.00 WIB	Diperiksa oleh	
Pimpinan	M. Iqbal Apriansyah	Disetujui oleh	
Narasumber			
Tempat	Ruang Rapim		
Peserta	1. Sekretaris Badan 2. Ketua Tim Kerja Perwakilan BKKBN DIY dan jajaran		

A. ARAHAN KAPER

1. Pertemuan dengan GKR mangkubumi
Perubahan perilaku remaja: edukasi gizi → poscast series misal tema mental health.
Narsum bisa dari berbagai sumber, seperti Disdikpora, Badan POM (tema: kadar gula dalam minuman/teh (pencegahan penyakit degenerative), Pramuka, Remaja genre .
Undang dinas terkait, diskusikan mau dimana podcastnya, sesuaikan tema dan siapa yang mengisi, perhatikan disabilitas.
2. Evaluasi Koordinasi TPPS
Apa aksi nyata TPPS, saat ini belum terlihat nyata masih bergerak sendiri-sendiri. Kumpulkan perwakilan masing-masing OPD, laporkan ke wagub/ketua TPPS. Selain dilaksanakan juga perlu di dokumentasikan dengan baik.
3. Lansia DIY paling tinggi (16,6 %) → potensi program
RRI tertarik program lansia → lansia Tangguh, mandiri.
4. TNI manunggal air. Dari 34 provinsi baru 2 provinsi yang telah menyetorkan ke mabes TNI AD.
5. Population clock
Jajaki kerjasama dengan diskominfo
6. TA sleman per 1 Agustus 2024 diterima sebagai CPNS di Universitas Mulawarman, akan ada kekosongan sehingga silahkan diproses rekrutmen untuk penggantian.
7. Realisasi anggaran → Agendakan pertemuan dengan pengelola keuangan.
8. Pemantauan DAK fisik dan Non fisik, tiap submenu cari kendala dan solusinya.
9. Beberapa agenda yang akan dilaksanakan di DIY, antara lain:
 - 8-10 agustus 2024: Jateng, jabar, jatim, DIY akan hadir ke -DIY untuk touring IPeKB
 - 10 Agustus 2024 pertemuan pesantren lansia di kaliurang bersama Pak Hasto
 - 11-14 Agustus 2024 : kuantifikasi alkon dan pertemuan dari jalsus
 - 15 Agustus 2024 :harganas internal
10. Slogan semangat Jumat tuntas: tuntaskan semua pekerjaan

B. Tim Kerja Keuangan, Anggaran dan Pengelolaan BMN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan data perhitungan kebutuhan Belanja Pegawai sampai dengan akhir tahun 2024. Perkiraan belanja pegawai di Perwakilan BKKBN DIY tidak maencukupi untuk pembayaran Belanja Pegawai PNS di bulan Desember 2024. 2. Persiapan kuantifikasi alkon bersama tim KBKR 3. Mengingatkan tim kerja untuk pelaporan data capaian output bulan Juli 2024, pastikan data yang dilaporkan sudah divalidasi.
C. Tim Kerja ZIWBK
<ol style="list-style-type: none"> 1. e learning KPK sampai saat ini sudah 80 %, kendala aplikasi. 2. Deadline SPIP: mohon bantuan kepada tim SPIP 3. Monev SOP deadline tanggal 14 Agustus 2024 4. Penilaian ZI: 89. Sebagai bukti komitmen, misal mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia raya pada pukul 10.00 WIB
D. Tim Kerja Pelaporan Statistik dan Pengelolaan TIK
<ol style="list-style-type: none"> 1. penarikan data SIGA setiap tanggal 12 untuk feedback ke kabupaten/kota. 2. Pemutakhiran PK 24 sudah dimulai 1 Agustus 2024, proses pengadaan PPK kit akan di distribusikan tanggal 9 Agustus 2024, dari penyedia langsung ke OPD KB 3. Monev Pemutakhiran PK di 2 kapanewon berubah 8 Agustus 2024 dan sedayu 9 Agustus 2024 (lokus ICDi). Harus selesai 17 Agustus 2024, diolah data untuk ditentukan 10 sampel keluarga focus ICDI. 4. Pembayaran Pemutakhiran PK24 hasil evaluasi dg BRI jangan dipakai lagi. Penjajakan dengan BPD. Sekitar 300 an yang belum mempunyai rekening BPD.BPD membuat rekening tanpa saldo awal. 5. Setiap jumat diadakan rapat posko prov dan pusat. SK tim posko provinsi belum disosialisasikan.
E. Tim Kerja Hukum Kepegawaian dan Pelayanan Publik
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan rutin. 2. Rangkaian harganas, ada donor darah dari PMI sleman → ruang asrama 3. ND presensi jika dibandingkan dengan TW I lebih baik
F. Tim Kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja
<ol style="list-style-type: none"> 1. Per tanggal 1 agustus 68 M realokasi PBDKI 2. Revisi POK max kamis jam 10.00 WIB-> KB minus KKP 3. DAK 2025 → penilaian DAK fisik melalui krisna. usulan belum sesuai → penelaahan bapenas. Rehab balai permintaan pusat pagu 350.000.000. nilai laparoskop RSUD 2,5 M. surat dari pusat 1,5 M. 4. DAK Non Fisik → input usulan dr kab/kota, tanggal 7 ada VM dengan biren. Pagu usulan tidak ada perubahan. 5. Kendala penginputan krisna : lokus dikunci di krisna, berdasarkan data SIGA Desember 2023 6. Pelatihan MR : pusdiklat, 19 agustus 1 minggu. 7. Koordinasi TPPS DIY, sudah di diskusikan dengan KPM terkait kegiatan monev TPPS → anggaran dari sekretariat stunting

G. Tim Kerja Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

1. Pelatihan kontrasepsi 30 Juli-16 Agustus 2024 dengan tahapan 8-16 Agustus 2024 tahapan luring. Dari peserta 25 orang, harus diskualifikasi 1 orang dari Bantul dengan alasan menggunakan joki kehadiran. Tanggal 29 Agustus 2024 evaluasi pelatihan.
2. Pelatihan internasional, hasil rapat rapat dilaksanakan di semester II, sekitar September. Kespro remaja – Malaysia akan meninjau PKBI,PIK-M, BKR Demangan, fakultas psikologi UGM. Pemasangan implant 1 batang- india

H. Tim Kerja Pengelolaan Tenaga Lini Lapangan

1. Hasil bimtek kapanewon (tim kerja linlap dan kepeg): ada 7 permasalahan yang perlu ditindaklanjuti.
 - Aplikasi PKB sering error
 - Mekop rakorcam dan minlok banyak yang dilakukan bergabung karena anggaran tidak tersedia.
 - Dukungan anggaran terbatas (BOKB/APBD tidak ada anggaran koordinasi dengan TPK)
 - 1 kemantren 1 PKB (3 kelurahan) Keterbatasan jmlh PLKB
 - IMP yang ada sudah tua, terkendala IT (bagaimana cara yang tepat dan bijak mengganti).
 - Terkait presensi, tdk boleh dari rumah.(penitikan dari rumah hanya mengukur jarak rumah ke tempat kerja)
 - Pembinaan terpadu → purwosari UPPKA punya pinjaman modal tidak bisa kembali
2. Pendampingan pengambilan video kegiatan TPK Bausasran (bawa alat sendiri), jadwal belum ditetapkan.

DOKUMENTASI



NOTULENSI KEGIATAN
RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM BANGGA KENCANA
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dikenal dengan Program Bangga Kencana berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 52 tahun 2009, meliputi berbagai aspek program yaitu program peningkatan ketahanan keluarga balita dan anak, ketahanan remaja dan ketahanan lanjut usia serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Di bidang kependudukan meliputi kegiatan tentang kerjasama pendidikan kependudukan, pemaduan kebijakan pengendalian penduduk, perencanaan pengendalian penduduk serta analisis dampak kependudukan. Sementara itu dibidang keluarga berencana meliputi program dan kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang merata di seluruh wilayah dan fasilitas kesehatan, penggerakan pelayanan keluarga berencana.

Guna mengimplementasikan berbagai program tersebut, maka BKKBN menetapkan visi dan misi sebagai penjabaran visi, misi dan janji Presiden RI masa bakti 2019 — 2024, serta berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2020 - 2024, telah ditetapkan visi dan misi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Nasional yaitu “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Secara umum BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang” dengan sasaran strategis yaitu pada tahun 2024 : 1) menurunkan Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) ditargetkan menjadi 2,1; 2) meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 63,41%; 3) menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need menjadi 7,40%; 4) menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun menjadi 18 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun, 5) meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 61, serta 6) meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan 22,1 tahun.

Dalam upaya pencapaian tercapainya target tersebut, BKKBN setiap tahun menjabarkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BKKBN dengan wilayah yang diwakili oleh Kepala Perwakilan BKKBN di Provinsi. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta target yang harus dicapai tertuang dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya antara Kepala BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN DIY, dan untuk Tahun 2024 adalah : 1) menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate

(TFR) ditargetkan menjadi 1,82; 2) meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 58,20%; 3) menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need menjadi 15,20%; 4) menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun menjadi 10 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun, 5) meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 69,95, serta 6) meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan 23,50 tahun.

Program pengendalian penduduk berjalan dengan efektif di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuktikan dengan menurunnya angka kelahiran dan melambatnya laju pertumbuhan. Secara demografis, pertumbuhan penduduk DIY semakin melambat, piramida penduduk berbentuk stasioner, populasi penduduk umur 60+ tahun semakin meningkat, tercapainya rasio ketergantungan yang optimum, dan angka kelahiran semakin turun dari tahun ke tahun. Perubahan struktur penduduk juga telah menghasilkan penduduk usia kerja dalam jumlah melimpah, sehingga apabila keberadaannya dioptimalkan, maka momen bonus demografi dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan.

Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai rasio ketergantungan terendah, namun Daerah Istimewa Yogyakarta masih kesulitan mewujudkan kesejahteraan penduduknya. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka kemiskinan yang tinggi, bahkan melebihi angka nasional dengan perbandingan 6 persen:9 persen, sehingga kemajuan pengelolaan kuantitas belum diikuti oleh kemajuan kesejahteraan. Padahal, secara teori apabila suatu negara/wilayah telah mencapai rasio ketergantungan terendah dan memperoleh bonus demografi, maka akan memasuki tahap berikutnya dengan tantangan yang berbeda, seperti perawatan penduduk lanjut usia (lansia), pelayanan dan jaminan kesehatan penduduk lansia.

Dengan kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut maka perlu penguatan komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam pengelolaan program sebagai upaya dalam pencapaian target sasaran. Untuk itu perlu dilaksanakan Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2024.

B. TEMA

Tema Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana Tahun 2024 adalah ***“Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045”***.

C. TUJUAN

- a. Meningkatkan komitmen dan dukungan operasional stakeholder serta mitra kerja dalam pengelolaan Program Bangga Kencana di wilayah DI. Yogyakarta melalui sinergitas program dan anggaran.

- b. Pemanfaatan bonus demografi untuk peningkatan SDM melalui sinergitas program.

D. LAPORAN PENYELENGGARAAN DAN EVALUASI CAPAIAN PROGRAM

- **Dra. Andi Ritamariani, M.Pd**

- Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dikenal dengan Program Bangga Kencana berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 52 tahun 2009, meliputi berbagai aspek program yaitu program peningkatan ketahanan keluarga balita dan anak, ketahanan remaja dan ketahanan lanjut usia serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Di bidang kependudukan meliputi kegiatan tentang kejasama pendidikan kependudukan, pemaduan kebijakan pengendalian penduduk, perencanaan pengendalian penduduk serta analisis clampak kependudukan. Sementara itu dibidang keluarga berencana meliputi program dan kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang merata di seluruh wilayah dan fasifitas kesehatan, penggerakan pelayanan keluarga berencana.
- Target Kinerja Perwakilan BKKBN DIY
 - o menurunkan Angka Kelahiran Totalfrotal Fertility Rate (TFR) ditargetkan menjadi 1,82
 - o meningkatnya Angka Prevaiensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 58,20%
 - o menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need menjadi 15,20%;
 - o menurunnya Angka Ke(ahiran Menurut Kelompok Umur 15-19tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun menjadi 10 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun,
 - o meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 69,95, serta 6) meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan 23,50 tahun.
- Secara demografis, pertumbuhan penduduk DIY semakin melambat, piramida penduduk berbentuk stasioner, populasi penduduk umur 60+ tahun semakin meningkat, tercapainya rasio ketergantungan yang optimum, dan angka kelahiran semakin turun dari tahun ke tahun. Perubahan struktur penduduk juga telah menghasilkan penduduk usia kerja dalam jumlah melimpah, sehingga apabila keberadaannya dioptimalkan, maka momen bonus demografi dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan.
- Apabila suatu negara/wilayah telah mencapai rasio ketergantungan terendah dan memperoleh bonus demografi, maka akan memasuki tahap berikutnya dengan tantangan yang berbeda, seperti perawatan penduduk lanjut usia (lansia), pelayanan dan jaminan kesehatan penduduk lansia.

- Perlu penguatan komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam pengelolaan program sebagai upaya dalam pencapaian target sasaran.
- Capaian Indikator IKU tahun 2023 yaitu MCPR 58,2, unmet need 14,2 MUKP 23,5, iBangga 64,12 TFR 1,81, ASFR 6,7

- Penandatanganan MOU

E. SAMBUTAN

• Wakil Gubernur DIY

- Kesempatan mengoptimalkan bonus demografi, harus dijadikan momentum investasi SDM yang masif dan berkelanjutan. Untuk secara bersama-sama, merancang dan melaksanakan rencana aksi yang komprehensif, yang tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, tetapi juga menempatkan negara kita pada lintasan yang benar menuju 'Indonesia Emas 2045'.
- Peserta Rakerda diharapkan menjadi peserta aktif, menyelaraskan pemahaman, meningkatkan komitmen, dan memperkuat kerja sama untuk melahirkan cara-cara inovatif untuk memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki, sebagai katalis utama dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, melalui Bangga Kencana,

• Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) Kepala BKKBN DIY

- Roadmap stunting kabupaten/Kota harus melaksanakan sesuai inpres no.3 Tahun 2022
- Sasaran dan Dukungan daerah dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting
- Implementasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2023-2024 meliputi 5 pilar Strategi nasional PPS dan RAN PASTI indikator spesifik dan sensitif terus dipantau dan hasil pemantauan telah turun
- Penurunan 14% merupakan target yang ambisius
- Keluarga menjadi unit analisis terkecil, maka keluarga harus menjadi focus perhatian
- WHO mengadopsi Growth Standar yaitu menghitung stunting dengan Panjang badan dan tinggi badan. World Bank menilai stunting kaitan dengan intelegensia anak. Saat ini penting menilai Human Capital Index yang turunannya high scale dan low scale yang dibandingkan antara negara
- Stunting pasti pendek, pendek belum tentu stunting (lahir normal Panjang lebih dari 46 cm, internasional 48 cm). Indonesia tidak masuk standar internasional.
- Hasil Survei Kesehatan Indonesia prevalensi stunting di DIY tahun 2022 16,4% naik menjadi 18% di 2023 atau naik 1,6%. Nasional hanya turun 0,1%

- Hasil EPPBGM belum final masih 50%
- TFR di DIY 1,89. Dan ASFR 11,54 hasil SP2020. Angka Nasional TFR 2,18 dan ASFR 26,64
- Angka Kematian Ibu tahun 2022 di DIY 58 per 100.000 dari target 70. Nasional 189
- Angka Kematian Bayi Tahun 2022 di DIY 10,9 Target 2024 16 per 1000, tahun 2030 12 per 1000. Indonesia capaian 16,85
- Indonesia meninggalkan puncak bonus demografi ditunjukkan dengan angka ketergantungan yang meningkat. DIY akan berakhir pada 2033/2034
- 16% di DIY lansia. Pendidikan rendah, ekonomi rendah sehingga sandwich generations mengemban beban yang berat. Apakah setelah DIY melewati bonus demografi telah mengalami kaselerasi pendapatan perkapita.
- Hasil PK2023 unmed need masih tinggi 14,2%
- Pernikahan ideal sesuai MUKP 23 tahun, melahirkan idealnya maksimal 35 tahun
- Diharapkan data konkret bisa digunakan terutama dalam pemantauan catin terutama catin anemia, terlalu kurus, waspadai rokok
- Apresiasi untuk capaian relaisasi dana DAK

F. MATERI

- **Prof. Dr. Sukamdi Bonus Demografi : Merespon Tantangan Bonus Demografi di DIY**
- Sejak 2017 Angka ketergantungan di DIY sudah rendah. Tahap I Bonus demografi dimana angka ketergantungan menurun dibawah 50%. Menggelembungnya penduduk usia produktif 2. Angka ketergantungan meningkat (di DIY sebelum 2020) Konsep Pembangunan Kependudukan, meningkatnya penduduk non produktif yaitu lansia.
- Konsep Pembangunan kependudukan
 - Pengelolaan kuantitas penduduk
 - Pengembangan kualitas penduduk
 - Pemanfaatan produktifitas penduduk
- Bagaimana mengelola jumlah dan komposisi penduduk. Tugas BKKBN mewujudkan penduduk yang ideal dan mewujudkan bonus demografi (PP No 6). Jumlah penduduk apakah terlalu besar, pas atau terlalu kecil sesuai dengan daya dukung dan daya tamoung lingkungan (Kemen LHK)
- Kebijakan mobilitas belum ada instansi yang menjadi penanggungjawab di tingkat nasional
- Hasil SP LF 2020 Piramida Penduduk Konstruktif
- CPR sering tidak konsisten dengan TFR. Beberapa provinsi CPR tinggi TFR tidak rendah dan sebaliknya.
- Dari sisi kuantitas penduduk di DIY sudah tidak menjadi masalah sehingga kebijakan kependudukan diarahkan untuk peningkatan kualitas penduduk

dalam mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi bagi kesejahteraan masyarakat

- Konsep hubungan penduduk dan Pembangunan memberi ilustrasi bahwa seharusnya keberhasilan pembangunan kependudukan memberikan kontribusi terhadap Pembangunan ekonomi.
- Kebijakan dalam merespon bonus demografi yaitu Empowerment, Educate, employment
- 5 Kunci pemanfaatan demografi
 - o Investment
 - o Improving health and education
 - o Promoting open stable ekonomi
 - o Good governance
 - o Penelitian kebijakan yang diterapkan terhadap bonus demografi
- **Nuriyatul Masiyah Bappeda DIY : Program Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Bonus Demografi**
 - Arah Kebijakan kependudukan dengan membangun data sektoral yang terintegrasi dengan instansi lain. Sejalan dengan RPJPD pada periode I pelaksanaan menyediakan pelayanan adminduk dan data kependudukan
 - Disparitas data usia produktif di Kabupaten/Kota Nampak dalam angka ketergantungan
 - Peran Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi dampak bonus demografi dalam RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2022-2027
 - o Rekayasa pengendalian penduduk dengan mengoptimalkan penduduk usia lansia
 - o Mempertahankan penduduk lansia tetap sehat dan produktif
 - o Mempertahankan dan memperpanjang produktifitas penduduk usia produktif
 - o Meminimalkan pengurangan bonus demografi dengan mempertahankan angka harapan hidup yang bermanfaat bagi eksistensi kualitas penduduk usia produktif
 - o Mempertahankan IPM dengan cara peningkatan kualitas kesehatan secara holistic, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan pemanfaatan generasi milenial dan generasi Z dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi
 - o Pembangunan pengendalian penduduk berpijak pada tiga pilar, yaitu : pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahannya mobilitas (migrasi).
 - Program Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Bonus Demografi
 - o Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, misalnya dengan mengefektifkan program pendidikan kejuruan sehingga semakin banyak penduduk usia produktif yang siap kerja

- Optimalisasi sekolah-sekolah kejuruan khususnya dalam memenuhi keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja/ Link and match lulusan SMK dengan dunia kerja
 - Meningkatkan investasi dalam hal infrastruktur yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi
 - Memperkuat kesetaraan gender sehingga laki-laki dan perempuan bisa sama-sama berpartisipasi aktif dalam pembangunan
 - Pengelolaan layanan kesehatan yang memadai
 - Fasilitasi pemberdayaan kewirausahaan pemuda baik melalui pembinaan maupun bantuan modal
 - Pemenuhan sarana prasarana pendidikan melalui bantuan operasional sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu
 - Menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat membuka peluang investasi sehingga bisa meningkatkan produktifitas pembangunan
 - Peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing
 - Perluasan kesempatan kerja
 - Penyediaan pilihan konsumsi makanan harian
 - Pelibatan anak muda sebagai agen kekayaan wisata sehingga muncul destinasi wisata baru dan promosi wisata (media social)
 - Pemenuhan pangan
- **Susilo Nugroho : Pemanfaatan budaya lokal dalam mewujudkan keluarga berkualitas**
 - Kebersamaan dan tradisi masyarakat di Yogyakarta berbasis budaya
 - Rumah sebagai pusat kegiatan, tempat bermain, belajar dan bermasyarakat
 - Memasukkan isi pesan informasi program dalam kemasan yang mudah diterima dan mengikuti perkembangan zaman.

G. DISKUSI

- Bpk Wildan Solihin DP3AP2KB Sleman

- Bapak Sukamdi : DIY wilayah yang unik, nyaman, lansia nyaman tapi kemiskinan di Yogyakarta tinggi namun kebahagiaan tinggi. Apakah salah, harus bagaimana?

Jawaban : isu ketenagakerjaan untuk mengatasi pengangguran dan mempertahankan setengah pengangguran rendah. Sektor yang berperan pertanian dan jasa. Belum ada linkage antar sektor misalnya pertanian dan perdagangan atau pertanian dengan sektor industry atau sektor pariwisata dan industri. Tidak bisa kebijakan

kependudukan langsung menurunkan kemiskinan. Ada proksi kebijakan di bidang lainnya.

- Drs. Susilo : Rumah dengan fungsinya sangat menarik tapi harga rumah sangat mahal. sehingga rumah hanya berfungsi sebagai tempat tidur. Bagaimana ?

Jawaban : Public space sebagai solusi /pekarangan untuk berbagi

1. Sumur didepan rumah dipakai bersama
2. Pemanfaatan lahan sempit untuk tanaman pangan dibagikan ke tetangga

Tergantung pada pemilik lahan bersedia atau tidak

- **Muh. Amirudin DPMKPPKB Gunungkidul**

- Penanda pertumbuhan anak sesuai umur. Bagaimana cara membudayakan tradisi jawa yang luhur

Jawaban : - zaman dulu belum ada BKKBN sehingga memungkinkan.

Penyampaian yang halus

Di Jawa banyak tradisi nonverbal : prajurit Daeng mempunyai slempang tempat makanan di bajunya. Nonverbalnya : biarkan tetap menjadi orang sesuai asalnya. Orang jogja menyesuaikan diri.

- **Sri Rahayu DWP Pusat**

- Fungsi rumah untuk keluarga. Jika diterapkan KB bisa gagal karena rumah nyaman segala sesuatu bisa dilaksanakan dirumah. Rumah sekarang minimalis. Bagaimana supaya rumah seperti zaman dulu..ombo dan anak banyak.

Jawaban : konsep berbagi tidak harus menunggu ada sesuatu. Telur dibagi 10, Konsep lingkungan dalam pembagian makanan menggunakan kreweng.

- Kinerja kebijakan kependudukan di DIY perlu di follow up agar memberikan kontribusi pada pembangunan sektor lain
- Apapun tujuannya apapun programnya yang disasar adalah manusianya maka yang diperhatikan manusianya bukan penghargaannya. Maka harus memperhatikan budaya lokalnya.
- Terkait pelaksanaan program pemda terkait dengan stakeholder harus bekerjasama tidak bisa kerja sendiri sendiri

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Arahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengingatkan kepada kita semua bahwa bonus demografi harus dijadikan momentum investasi SDM yang masif dan berkelanjutan. Saatnya untuk bersama-sama, merancang dan melaksanakan rencana aksi yang komprehensif, menyelaraskan pemahaman, meningkatkan komitmen, dan memperkuat kerja sama dengan cara inovatif untuk memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki,

sebagai katalis utama dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga menempatkan negara kita pada lintasan yang benar menuju 'Indonesia Emas 2045'.

- Capaian Target Program Banggakencana pada Tahun 2023 yang terdiri dari 6 Indikator Utama, yaitu mCPR, Unmet Need, MUKP, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) TFR dan ASFR sebanyak 5 Indikator telah tercapai. Namun terdapat 1 target program banggakencana yang belum tercapai optimal, yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dari target 67,66 baru tercapai pada 64,12; maka kita perlu bekerja sama dengan lebih baik sehingga diharapkan semua target program bangga kecana di tahun 2024 dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terwujud.
- Prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut SKI (Survey Kesehatan Indonesia) tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,6%, dari sebelumnya 16,4% di tahun 2022 menjadi 18% di tahun 2023. Akan tetapi masih terdapat disparitas antara hasil SKI 2023 dan EPPGBM 2023 (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana prevalensi stunting menurut EPPGBM tahun 2023 jauh lebih rendah, yaitu 10,3% dibandingkan prevalensi stunting menurut SKI 2023. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu kerja kolaboratif yang sinergis antar stakeholder, sehingga akan memberikan daya ungkit dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- Trend penurunan TFR di DIY menimbulkan situasi dimana angka ketergantungan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia dan angka harapan hidup, namun angka kemiskinan di DIY masih tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan, baik dari perbaikan angka tingkat kemiskinan maupun kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah, serta kesejahteraan yang inklusif bagi kelompok rentan diantaranya meliputi difabel, anak, perempuan dan Lanjut Usia.
- Perlu pendekatan berbasis budaya lokal masyarakat dalam setiap program pemerintah termasuk dalam program Banggakencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Program pemerintah dikatakan berhasil jika peran pemerintah semakin sedikit dan masyarakat semakin mandiri.

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana Tahun 2024 untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL D.I. YOGYAKARTA**

NOTULEN

Kegiatan	Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting DIY
Hari/Tanggal	Rabu, 30 Oktober 2024
Waktu	08.00 - selesai
Tempat	Hotel Grand Rohan Jogja

Laporan Penyelenggaraan

Oleh: Mohamad Iqbal Apriansyah, SH., M.P.H

Menyampaikan laporan kepada Bapak Wakil Gubernur DIY sebagai Ketua TPPS DIY, mengenai tujuan kegiatan hari ini untuk meningkatkan kualitas pembangunan keluarga dengan harapan dapat meningkatkan upaya kolaborasi dalam lintas sektor dalam penguatan kolaborasi Pentahelix untuk percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi DIY.

Peserta berasal dari TPPS Kabupaten Kota dan mitra kerja dilingkungan DIY, disampaikan juga laporan di Semester 1:

- Audit kasus stunting telah selesai di Siklus 1
- Pemanfaatan Elsimil juga telah dilaksanakan
- Kegiatan minilokakarya untuk memantau kondisi di wilayah masing masing telah dilaksanakan
- Kegiatan BAAS telah berjalan 1033 KRS telah diintervensi
- Dapur Sehat 438 DASHAT telah tersebar di seluruh DIY

BKKBN telah pula mengeluarkan BNBA Keluarga Resiko Stunting yang bisa dimanfaatkan oleh TPPS di tingkat Kabupaten Kota dan lintas sektor untuk melakukan intervensi atau strategi yang dapat dieksekusi dilapangan. Disampaikan pula bahwa akan dilaksanakan kegiatan panel antara lain:

Panel 1

- Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting oleh Ketua Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Pusat
- Strategi Pencapaian Target Percepatan Penurunan Stunting di DIY oleh Bappeda DIY

Panel 2

- Evaluasi Pelaksanaan Intervensi Spesifik Percepatan Penurunan Stunting di DIY oleh Dinas Kesehatan DIY
- Program CSR dalam Percepatan Penurunan Stunting di DIY oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) DIY

Adapun Inovasi di DIY mengenai digitasi stunting seperti , Gerai mami gisela, Bantu Banting. Selain itu pada kesempatan kali ini akan disampaikan penghargaan kepada kabupaten kota terkait Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

Sesi Penyampaian Penghargaan kepada kabupaten kota terkait Program PPS

Berikut kami sampaikan 8 aksi konvergensi tahun 2023:

- Kabupaten Sleman dengan skor total 194,9
- Kota Yogyakarta dengan skor total 193,6
- Kabupaten Kulon Progo dengan skor total 189,2
- Kabupaten Gunungkidul 188,2
- Kabupaten Bantul dengan skor total 186,1

Arahan sekaligus membuka Kegiatan Forum Koordinasi

Oleh : Sri Paduka Paku Alam X

Kenaikan angka prevalensi stunting dengan dasar hukum yang kuat maka DIY mengikuti penetapan target penurunan stunting sebesar 14%. Harapan sesuai dengan peras yang dikolaborasikan bersama sesuai dengan ketugasan. sehingga upaya-upaya penurunan stunting yang dilakukan olah lintas sektor dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mendekati target yang telah di tentukan oleh pemerintah.

Merubah mindset merubah local wisdom memiliki deviasi, terbukti ada keluarga yang mampu namun pemenuhan gizi kurang kepada anak dari keluarga tersebut. Dalam upaya ini, TPPS DIY terus melakukan monitoring yang berkelanjutan untuk mencapai indikator indikator yang diharapkan. Akhir kata penurunan stunting bukan pekerjaan ringan, namun melalui komitmen yang kuat akan membawa harapan besar sehingga anak di DIY bisa sehat cerdas dan kuat.

Population Clock Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Jumlah penduduk saat ini 3.766.588
- b. Jumlah kelahiran tahun ini 39.241
- c. Jumlah Kematian tahun ini 26.719

Keynote Speech

Oleh : Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Penanganan stunting tidak berhenti di seremonial maupun kegiatan koordinasi, tetapi lebih ke intervensi yang harus dilakukan di lapangan. DIY pada tahun terakhir salah satu daerah yang mengalami kenaikan angka stunting. Presiden komitmen dalam tata kelola yang baik, hal hal yang bisa dilaksanakan secara daring pesan juga bisa disampaikan.

Isu bonus demografi, kita sudah pada fase secara bertahap meninggalkan bonus demografi itu. Stunting menurut Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo saat ini menjadi fundamental, kedepan akan menjadi Indonesia apakah akan memiliki daya saing atau tidak. Jumlah Usia Kerja meningkat pesat dan menghasilkan Bonus Demografi (2010-2041). Sedangkan puncak Bonus antara 2020-2028. Dimana Beban Ketergantungan semakin meningkat seiring penuaan penduduk. Tahun 2045 jumlah lansia sekitar 19,9% atau 1 lansia dari 5 penduduk. Tahun 2045 diharapkan dapat memperoleh Bonus Demografi Tahap Kedua.

Data BNBA e-ppgbm sudah baik namun beberapa alat belum terkalibrasi dengan baik, kapasitas kader yang belum merata, variasi antar Provinsi tidak berimbang. Sehingga melalui SKI dan SSGI menjadi standar yang dipakai dan negara lain juga digunakan metode survey. Interval kenaikan dan penurunan kisaran 4 sd 5 % bagi negara negara lain, berhubung saat ini SSGI tengah dilakukan, maka perlu mengawal jalannya SSGI tahun 2024 menjadi perhatian khusus, sehingga tujuan survey untuk mendapatkan hasil data yang akurat dapat terwujud.

Dari grafik perbandingan SKI dan e-PPGBM berbeda, dan Kepala Daerah cenderung menggunakan e-PPGBM karena lebih rendah. Trend angka prevalensi yang terjadi di 5 Kabupaten di DIY yakni Kabupaten Sleman memiliki trend yang baik dengan konsistensi penurunan sesuai dengan yang di harapkan. Kunci peningkatan kualitas pengukuran pencegahan stunting:

- a. SDM kompeten/terlatih dan pengukuran sesuai SOP
- b. Alat ukur/Antropometri Standar
- c. Cakupan tinggi (95%)

Intervensi sudah dilakukan secara teknis. Database e-PPGBM dan KRS bisa digunakan dalam intervensi secara optimal dengan menggunakan BNBA yang ada. Kalo pelaksanaan imunisasi dilakukan maka dapat menurunkan angka stunting dengan signifikan.

Paparan Materi secara panel dan diskusi

Panel 1

1. Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting oleh Ketua Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Pusat (Dr. Sudibyo Alimoeso, MA)

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Sestama, ada kenaikan sedikit tetapi posisi nasional lebih baik, dan di tahun 2024 sepertinya target tidak tercapai. Target 2025 menurut Bappenas diangka 18%, nampaknya DIY sesuai target Bappenas. DIY sudah rendah dan secara absolut pun tidak diperhitungkan sebagai penyumbang kejadian stunting di Indonesia, tetapi penting untuk tetap diselesaikan. Jika ada kejadian stunting baru maka segera di intervensi jangan menunggu lagi. Daerah dimana angka remaja tinggi, angka stunting cenderung tinggi. Data yang diperoleh pada sasaran catin yang mengisi elsimil di DIY ada 13.997. Ketika bayi lahir harus dijaga gizinya, ditimbang sebulan sekali, jangan menunggu bayi menjadi stunting. Untuk Kabupaten GunungKidul dan Kabupaten Kulon Progo dilaporkan ketinggalan dalam pelaksanaan tatalaksana stunting di Provinsi DIY.

Capaian layanan intervensi spesifik sudah baik, namun indikator seperti remaja putri yang mengkonsumsi Tablet tambah darah dan beberapa indikator lain perlu ditingkatkan. Pencegahan jauh lebih penting terutama di 1000 HPK. Mencegah terjadinya stunting yang baru. Remaja perlu disiapkan agar siap nikah dan siap hamil

Pentahelix penting, karena stunting itu dalam penanganannya multi sektor. Misal ketika penanganan remaja putri investasinya lama kisaran 5 thn, catin intervensi lebih pendek, ibu hamil lebih pendek lagi sedangkan untuk ibu pasca salin sifatnya segera termasuk balita. Di Kemendagri, konvergensi tingkat keluarga baik dari remaja, ibu hamil, balita bisa dilakukan intervensi secara signifikan dan penting agar tidak muncul stunting baru. Fokus point pada layanan spesifik yang ada perlu sosialisasi edukasi perubahan perilaku, edukasi pendampingan melalui TPK, pemberian PMT lokal dan berbagai upaya lain.

Untuk menyelesaikan koordinasi di daerah penting, koordinasi intervensi masing masing lintas sektor harus ditingkatkan. Perlu memperkuat data e-PPGBM dan data rutin lainnya. Stunting terjadi bukan secara tiba tiba, sehingga stunting perlu dicegah jangan sampai terjadi. Faktor prenatal mempengaruhi angka stunting Pemberian makan bayi dan anak (PMBA) juga penting. Dampak stunting tidak hanya berputar di tataran individual, tetapi tataran keluarga dan negara. DIY lansia diatas 10 %, DIY sudah menua. Pencegahan di hulu menjadi penting dan penguatan komitmen kepala daerah akan disampaikan oleh Bappeda DIY

2. Strategi Pencapaian Target Percepatan Penurunan Stunting di DIY oleh Bappeda DIY

Kemiskinan dan stunting tidak bisa dipisahkan. Stunting telah dilakukan intervensi dilapangan, tetapi yang terjadi angka stunting tetap mengalami kenaikan. Kondisi di 2045 golongan lansia banyak dibanding generasi mudanya. Biaya hidup juga tinggi termasuk tingkat kelahiran kita semakin menurun. Dalam pengentasan stunting tidak hanya dari sisi bayinya/1000 HPK nya saja tetapi dari hulu hingga hilir. Intervensi yang diberikan dengan pemberian tablet tambah darah, kemudian dilakukan pula pendampingan dan edukasi kepada sasaran catin.

Dalam 5 pilar stranas sudah holistik integratif. Pilar 2 peningkatan komunikasi dan perubahan masyarakat ketika di evaluasi di Kabupaten/Kota belum semuanya mendapatkan hasil yang bagus. Pilar 3 intervensi sensitif dan spesifik gambaran dari hulu dan hilirnya gambaran, apakah

semua sudah berperan dalam pelaksanaannya. Salah satu arah kebijakan ini sudah ada semua tertuang dalam dokumen perencanaan. Untuk-untuk data-data yang ada menjadi sangat penting jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Satu data Indonesia sedang digalakkan, sehingga penguatan komitmen di tiap lintas sektor sangat diharapkan.

Sejauh mana intervensi yang sudah dilakukan di tiap Kabupaten Kota perlu dimonitoring, karena terdapat pula anggaran namun beberapa serapannya masih kurang sehingga ukuran penanganan stunting bisa dilihat ketercapaiannya. Pilar pertama tentang komitmen dari perpres 72 sudah ditindaklanjuti dengan SE Gubernur DIY Nomor 400.7/1287 tertanggal 22 Februari 2024 tentang penurunan stunting. tadi dikatakan oleh Pak Sestama semakin turun kunjungan di posyandu, apakah ini memang benar. Visi RPJPD DIY 2025-2045 sudah selesai dikoordinasikan di Dewan dan target ditentukan target penurunan stunting untuk Provinsi DIY di Tahun 2025 dari RPJPM 16,1%.

Strategi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam penurunan stunting tahun 2024:

- a. Koordinasi dan kolaborasi kegiatan antar OPD Pemda DIY dengan BKKBN dan pihak lain untuk percepatan penurunan stunting.
- b. Penguatan dan optimalisasi tugas dan fungsi TPPS
- c. Optimalisasi peran pemerintahan Kelurahan dalam PPS (pembinaan kepada pemerintahan Kelurahan terkait PPS di Kelurahan) dalam hal perencanaan dan penganggaran.
- d. Materi penurunan stunting masuk ke dalam kegiatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi Kelurahan, mengingat di dalam RBKAL terdapat SAKIP Pemerintah Kelurahan
- e. Perbaikan dan publikasi data dalam rangka pensasaran percepatan penurunan stunting.

Trend status gizi mengalami kenaikan sebesar 1,6% dari 16,4% menjadi 18%. Komitmen Pemda DIY dalam upaya PPS, setiap pokja punya koordinator harapannya bisa. Signifikan membantu penurunan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pokja:

- a. Menyusun SK Tim Panelis Penilai Kinerja Kabupaten Kota Dalam Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting
- b. Melaksanakan rembuk stunting pada tanggal 3 April 2024
- c. Melaksanakan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 Mei 2024 dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 195/KEP/2024.
- d. Melalui Bappeda Bidang Sosbud telah mengkoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di D.I.Y yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategis nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting.
- e. Memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan stunting dilokasi intervensi prioritas di Kabupaten/Kota.
- f. Mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
- g. Melaksanakan Rapat Kerja Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa "Dukungan Keuangan Desa dalam Penanganan Stunting" pada tanggal 28 Agustus 2024 bersama Narasumber dari BKKBN DIY dan Balai Pemdes Yogyakarta.

Diskusi:**Pak Kabid KB dan Dalduk Gunungkidul (Moh. Amirudin S.Sos)**

1. Peran TA dan Satgas Stunting diupayakan tetap ada untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting terutama dalam pendampingan TPPS dan TPK
2. Gunungkidul masalah entri data tahun 2025 merancang dengan sinergi dengan KPM lebih berkiprah di pos yandu termasuk kesiapan termasuk entri data tersebut. KPM diambil karena sudah terbiayai oleh desa, kader sudah difasilitasi android, kedepan Gunungkidul sudah diterjemahkan dilapangan
3. PPM 1 daerah mulai di pikirkan, jika DIY ditekan terus apakah akan ada genosida masal?
4. Dari Pemprov masih sangat minim, kalau kabupaten dan pusat sudah ada
5. Untuk segmentasi sasaran KRS sudah diintervensi dan menggunakan data

Jawaban:

1. Masih dalam proses koordinasi dan negosiasi dengan pemerintah pusat. untuk mencari satu kompromitas. Mentri telah berkoordinasi dan saat ini segera akan dilakukan high level meeting, mudah mudahan dalam waktu dekat ini satgas dapat berlanjut.
2. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Dalam Perpres yang baru kemungkinan akan ada kalimat pencegahan dan penanganan stunting
3. Semua intervensi yang dilakukan perlu dilakukan dengan baik, di Gunungkidul intervensi nya tidak optimal, maka perlu ditingkatkan, maksud kami intervensi menjadi penting bukan tentang angka nya saja. Yang tidak bermasalah jangan jatuh jadi masalah.
4. Untuk anak, menurut saya pro natalis, kalo sudah mendekati 2 tetap dipertahankan tetapi kualitas ditingkatkan, kuantittas dijaga.
5. Kadang kita punya program tetapi orang tidak tahu kalo itu pemiliknya kita. DAIS, RTLH sudah banyak dilakukan dari tingkat provinsi serta kegiatan sarana dan prasarana. Lain kali dari sisi koordinatif perlu diinsentifkan. Harapannya nanti program memiliki perencanaan yang baik dan dapat di ukur nantinya.
6. Akan menjadi evaluasi kami agar Gunungkidul lebih diperhatikan

Kanwil DJPP DIY (Ibu Asri)

Terkait tagging data, Kanwil sudah melakukan tagging. Serapan sudah diatas 80 %.

Jawaban:

1. Bahwa ini PR besar dan merupakan PR besar dan perlu kolaborasi secara bersama
2. Untuk kemiskinan bisa dikolaborasikan, bisa nggak kalo kita memetakan kebutuhan kebutuhan yang ada, dan mungkin kedepan program program ini lenih bisa memfasilitasi kebutuhan daerah

Tim Penggerak PKK DIY (Ibu Nana)

Setelah melihat data data tadi kita punya PR besar, bagaimana strategi membuat posyandu agar menarik didatangi. Yang datang hanya sedikit. Perlu dilakukan perubahan beberapa hal. Kader rutin dilakukan pelatihan. Apakah bisa variasi tidak hanya kacang hijau terus bisa variasi lainnya.

Jawaban:

1. Saat di Kulon Progo, pos yandu ujuk tombak dalam hal ini, kami belum tahu soal kapasitas maupun sarana prasarananya, akan menjadi refleksi bagi kita untuk titik perhatian kita juga
2. Terimakasih tadi usulan pos yandu agar lebih menarik, menarik untuk menjadi bahan diskusi kita bersama, sehingga ibu dan balita update hadir di posyandu

Panel 2

1. **Evaluasi Pelaksanaan Intervensi Spesifik Percepatan Penurunan Stunting di DIY oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY (Ibu Drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes)**

Untuk angka prevalensi stunting di Provinsi DIY berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yakni 18 %. Dari data stunting Dashboar Kemenkes RI, ternyata yang datang ke posyandu lebih sedikit. Perlu dilakukan intervensi serentak tetapi hasilnya tidak bisa dibandingkan dengan SKI, semua diukur. Stunting 18 % berdasar SKI sedih tapi bukan berarti kita patah semangat.

Trend balita yang dipantau memiliki trend yang naik turun dari tahun 2016-2024. Sedangkan pada tahun 2024 naik turun yang datanya baik ada di Juni dan Agustus. Kondisi yang terjadi sekarang di posyandu yaitu kader jarang yang milenial. Harapan kedepan anak anak kita yang milenial bisa tertarik. Ada program kesehatan 6 pilar salah satunya layanan pilar. Pos yandu ketika datang ke pos yandu tidak hanya anak tetapi juga ibunya. Di Pos yandu tidak saja seminggu sekali tetapi setiap hari. Pustu yang ideal ada 2 nakes yang bertugas disana termasuk kader dari masyarakat setempat.

Pertumbuhan secara rutin menjadi faktor krusial, D/S menjadi data untuk intervensi. Perlu upaya bersama untuk pembiasaan gerakan pengukuran serentak setiap bulannya. Yang menjadi catatan prosentase anak usia dibawah 5 thn yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya baru mencapai 79,64 % dari target nasional 90 %.

Kami sepakat dengan narasumber dan bapak ibu semua, catatan stunting tidak datang dengan ujuk ujuk, maka ada satu kebijakan manakala anak datang ke pos yandu beratnya tidak naik menjadi warning kita semua. Harus kita intervensi. Kalo sudah terjadi stunting diintervensi bukan di Puskesmas tetapi di Rumah Sakit. Untuk penanganan lokus, tidak cukup satu sektor tapi banyak sektor. Kader perlu peningkatan kapasitas dan ketrampilan. Kemudian ada PMT lokal yang sekiranya dapat dimaksimalkan dalam program PMT yang di berikan kepada sasaran dalam perbaikan gizi dan strategi penurunan stunting di kabupaten. Tahun 2024 DInkes DIY menganggarkan PMT Lokal dengan sasaran balita T bersumber anggaran dari DBH-CT.

Pemantauan PMT Lokal tidak bisa dilakukan harian, maka upaya yang dilakukan kader perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Sumber dari Kementrian Kesehatan RI, pentingnya gizi pada masa remaja. 65 % anak sekolah tidak sarapan, dari 65 % itu, 35 % yang sarapan nya tidak berkualitas. 90 % sarapan dengan kualitas rendah. 97 % kurang makan sayur dan buah. 57 % kurang aktifitas fisik. Ruang Hijau kita semakin habis. anak anak memainkan gadget. Disampaikan pula pentingnya isi piringku.

Untuk program makan sehat juga perlu didukung dari berbagai pihak ditingkat pemerintah provinsi maupun ditingkat Kabupaten Kota. 6 Prinsip Hygine dan sanitasi makanan dan minuman

- a. Pemilihan bahan makanan
- b. Penyimpanan bahan makanan
- c. Pengolahan makanan
- d. Penyimpanan makanan jadi
- e. Pengangkutan makanan
- f. Penyajian makanan

2. **Program CSR dalam Percepatan Penurunan Stunting di DIY oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) DIY - CSR DIY**

Kondisi terkini bahwa program dari masing masing perusahaan belum terpadu. Belum ada informasi atau kegiatan yang khusus penanganan stunting di lingkungan CSR. Untuk stunting kami mohon masukan kira kira apa, sehingga kami bisa berperan dalam percepatan penurunan

stunting. Di tahun 2027 jika diimungkinkan konseptor terpadu sehingga antara CSR dan Pemerintah bisa berkolaborasi dengan baik. Berencana itu keren tetapi action itu lebih keren, pendampingan dan keberlanjutan perlu ditingkatkan. Usul dibentuk jembatan antara Pemerintahan dan CSR apa yang kira kira bisa dilakukan untuk penanganan stunting.

Diskusi :

Sekretaris Bappeda Gunungkidul - Bapak Hadi

1. Bagaimana baiknya untuk memperoleh informasi lebih detail dalam meraih penganggaran untuk strategi penurunan stunting sampai dengan tingkat desa, baik pada sasaran ibu hamil, baduta balita, ibu nifas, catin.

Jawaban:

1. Kegiatan yang telah dilakukan di seperti pembinaan desa wisata, air bersih. Kemudian dikarenakan informasi terpadu masih kurang dimiliki, maka harapannya jika diperlukan pengajuan dana maka dapat dibuat proposal yang ditunjukkan kepada Bappeda yang kemudian akan ditindaklanjuti segera dalam forum dengan memfasilitasi pencarian dana.
2. Untuk proposal sampai tuntas, kontinuitas lebih diutamakan

Kepala Dinas OPD KB Kabupaten Sleman - Bapak Wildan

1. Kader kesehatan menjadi ujung tombak dalam berbagai program tetapi kurang mendapatkan apresiasi terutama soal instentif, mereka didorong dengan bekerja secara ihklas. Kader bekerja lebih real dibanding pamong. Kami studi banding di Surabaya, kader semua di data karena masuk di kota. Kalo di kabupaten, kader posyandu masuk ranah kalurahan bukan kabupaten. Jika kami menganggarkan akan terjadi duplikasi anggaran.

Jawaban:

1. Apresiasi dari kami tidak dalam bentuk honor tapi seperti jambore kader, bersama diskusi, itu cara kami mengapresiasi. Pada saat kader berprestasi maka ada apresiasi hadiah dari kemenkes. Kami juga suport jumentik di Kulon Progo. Kami juga melakukan peningkatan kapasitas kader termasuk bagaimana cara penggunaan alat yang baik. Alokasi untuk kader bisa juga melalui anggaran desa

Baznas DIY - Pak Lutfi

1. Bagaimana proses kolaborasi diantara lembaga Baznas bersama dengan CSR?

Jawaban:

1. Desa binaan dengan kampung berkah dapat diusulkan jika memang dibutuhkan untuk kolaborasi bersama dengan pengajuan proposal terlebih dahulu kepada CSR DIY.

Rumusan

1. Untuk menyelesaikan koordinasi di daerah penting, koordinasi intervensi masing masing lintas sektor harus ditingkatkan. Perlu memperkuat data e-PPGBM dan data rutin lainnya. Stunting terjadi bukan secara tiba tiba, sehingga stunting perlu dicegah jangan sampai terjadi.
2. Penanganan stunting menggunakan data e-PPGBM dan keluarga Resiko Stunting sehingga sama sama terukur dan terstruktur
3. Kemiskinan dan stunting tidak bisa dipisahkan. Stunting telah dilakukan intervensi dilapangan namun tetap membutuhkan konsistensi dalam melakukan intervensi
4. Dalam pengentasan stunting tidak hanya dari sisi bayinya/1000 HPK nya saja tetapi dari hulu hingga hilir.

5. Catatan stunting tidak datang dengan tiba tiba maka ada satu kebijakan manakala anak datang ke posyandu beratnya tidak naik menjadi warning kita semua. Harus kita intervensi. Kalo sudah terjadi stunting diintervensi bukan di Puskesmas tetapi di Rumah Sakit.
6. Adanya konseptor secara terpadu dalam intervensi yang bersumber dari CSR dan lintas sektor
7. Intervensi bisa dilakukan secara kontinuitas secara bersama-sama antar lintas sektor
8. Kolaboratif dengan CSR dalam penggalangan dana yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh sasaran yang membutuhkan guna percepatan penurunan stunting di DIY.

Dokumentasi Kegiatan





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN
Perwakilan BKKBN
D.I.Yogyakarta

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL D.I. YOGYAKARTA

NOTULEN

Kegiatan	Pembahasan LKIP Tahun 2024
Hari/Tanggal	Selasa, 21 Januari 2025
Waktu	13.00 - selesai
Tempat	Ruang Widya 1, Kantor Perwakilan BKKBN DIY
Peserta	Tim Penyusun LKIP Tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY

Arahan Kaper

- Substansi dalam LKIP merupakan gambaran kinerja kita selama Januari-Desember 2024, termasuk adanya pergantian pimpinan
- Capaian-capaian selama 2024 diharapkan tercatat dengan baik dan masuk ke dalam LKIP
- LKIP menjadi history/patokan kinerja di tahun mendatang
- Bab III menjadi gambaran apa saja yang telah kita capai
- Menjadi penting untuk menyajikan LKIP bukan hanya sebagai dokumen tahunan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi di tahun mendatang dari sisi program, kegiatan dan anggaran
- Diskusi ini merupakan pertemuan yang membahas sistematika dan isi LKIP. Semoga LKIP kita yang tersusun sistematis dan lengkap akan meningkatkan nilai SAKIP

Diskusi

- Tahun lalu capaian IKK tidak ada yang kurang (merah), untuk tahun ini capaian yang merah adalah Jumlah Keluarga yang Melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter
- Pada IKK, terdapat capaian baik (biru) sama seperti tahun lalu yaitu Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)
- Pada indikator kinerja Stunting terdapat 6 indikator yang capaiannya kurang (merah)
- Terdapat kendala data Elsimil pada awal tahun 2024 (sekitar 1 semester) menyebabkan tidak semua data terinput ke dalam SIGA
- Untuk data capaian yang kurang (merah) bias diganti dengan data capaian yang sumber datanya valid dan dapat dipertanggungjawabkan kemudian narasinya disesuaikan
- Kita menggunakan data capaian sesuai di lapangan saja

- Mendiskusikan poin-poin permasalahan dan tantangan
- Jangan lupa melihat temuan tahun lalu
- Perbandingan capaian program dibuat grafiknya
- Narasi capaian kinerja menampilkan sumber datanya
- Realisasi anggaran lebih informatif

Dokumentasi Kegiatan





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN
Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL D.I. YOGYAKARTA**

NOTULEN

Kegiatan	Pembahasan LKIP Tahun 2024 (Finalisasi)
Hari/Tanggal	Rabu, 19 Februari 2025
Waktu	13.00 - selesai
Tempat	Ruang Widya 1, Kantor Perwakilan BKKBN DIY
Peserta	Tim Penyusun LKIP Tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY

Diskusi

- Capaian indikator kinerja yang kurang (merah) diganti perhitungannya menggunakan data capaian lain dengan sumber data lain yang valid. Kemudian uraian/narasi capaiannya disesuaikan dengan hasil perhitungan yang baru
- Definisi operasional indikator kinerja stunting ada di lampiran Perkin
- Data capaian timja linlap yaitu Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan tidak menggunakan data dari Pusat. Timja linlap menggunakan data dari SIGA sehingga data capaiannya menjadi baik (biru) sebesar 88,89%
- Capaian indikator kinerja Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan tidak ada sanggahan dari Timja KB. Capaian tetap kurang (merah) dikarenakan tidak ada data lain sebagai pembanding. Sealin itu, capaian indikator ini secara nasional memang kurang (merah) yaitu sebesar 28,84%
- Capaian merah menjadi evaluasi kita ke depan, bagaimana membagi tugas kita dengan PKB dan TPK di lapangan
- Arahan kepala: yang perlu kita cermati adalah apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk memperbaiki kinerja yang kurang maksimal
- Informasi dari timja Datin: data jumlah KRS yang mendapatkan pendampingan itu baru rilis yang semester 1 (SIGA), sedangkan data yang ada di aplikasi Elsimil adalah data jumlah keluarga secara keseluruhan.
- Pada rapat finalisasi ini, teman-teman pelaksana diharapkan dapat memperbaiki narasi capaian kinerja dan menambahkan tabel/grafik trend capaian kinerja beberapa tahun terakhir
- Perbaiki narasi ditunggu paling Kamis, 27 Februari 2025

Dokumentasi Kegiatan





Kementerian PPN/
Bappenas



2024

DESEMBER

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#017972

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL D.I. YOGYAKARTA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

DESEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2024

K/L : 068 - BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

UK. Eselon I : 01 - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3331.BDB.001 - Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan														
1	260 Pengelolaan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan KB di fasyankes	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Fasilitas Kesehatan	473	474		15,495,000	15,495,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
2	265 Penurunan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) Melalui Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kabupaten/Kota	4	4		32,841,000	32,714,500	99.61%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3	266 Pembinaan kesertaan KB pascapersalinan di fasilitas kesehatan	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Peserta KB baru PP	6,639	14,363		19,948,000	19,268,200	96.59%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
4	263 Bimbingan dan Fasilitasi Ayoman Komplikasi dan Kegagalan KB MKJP serta koordinasi penggerakan KB MKJP di Kab/Kota	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kab/kota	5	5		27,283,000	27,278,800	99.98%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
5	264 Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja di Wilayah Khusus	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Laporan	2	2		11,290,000	11,251,200	99.66%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
6	262 Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	kegiatan	2	3		23,010,000	23,010,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
7	261 Penyediaan fasilitas peningkatan kompetensi bagi Tenaga Kesehatan KB	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Tenaga Kesehatan (Kumulatif)	313	320		43,095,000	43,004,600	99.79%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.DCJ.001 - SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota														
8	288 Pelatihan Teknis Program Bangga Kencana	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Orang	85	90		105,577,000	92,206,400	87.34%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.FBA.001 - Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga														
9	233 Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kab/Kota	5	5		62,700,000	59,392,275	94.72%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
10	234 Pengelolaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan)	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	PPKS	1	1		119,428,000	113,001,950	94.62%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.FBA.002 - Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk														
11	252 Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan teknis Kampung KB	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kab/Kota	5	5		17,425,000	17,325,000	99.43%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
12	251 Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota	Selesai	sudha tahap selesai	100.00	Kab/Kota	3	3		50,462,000	50,397,000	99.87%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
13	250 Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan kab/kota (formal, non formal dan informal)	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kab/Kota	5	5		27,950,000	25,430,000	90.98%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
14	249 Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kelompok Kerja Bangga Kencana	4	4		16,505,000	12,715,000	77.04%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
15	248 Penguatan Tata kelola Rumah Data Kependudukan	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Rumah DataKu di Kampung KB	96	98		17,141,000	17,140,500	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
16	247 Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Rumah DataKu di Kampung KB	350	353		66,318,000	66,318,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
17	246 Peningkatan kualitas bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kab/Kota	5	5		5,980,000	5,980,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
18	245 Koordinasi pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kab/Kota	5	5		1,876,000	1,876,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
19	244 Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter, proyeksi penduduk, serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kab/Kota	5	5		8,160,000	8,160,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3331.FBA.003 - Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders) KIE serta penyediaan data dan informasi keluarga														
20	279 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Promosi KIE Program Bangga Kencana	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Provinsi	1	1		9,415,000	8,129,700	86.35%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
21	271 Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Program Bangga Kencana	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Jumlah Mitra Aktif	10	10		11,059,000	11,058,500	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
22	280 Peningkatan Kualitas layanan STIK dan Pengelolaan PPID	Selesai	sudha tahap selesai	100.00	Laporan	2	2		12,201,000	12,181,000	99.84%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
23	276 Pembinaan Peningkatan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD)	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Provinsi	1	1		9,786,000	9,775,900	99.90%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
24	275 Pembinaan dan evaluasi Kinerja Penyuluh KB/PLKB serta Penguatan Kinerja IPeKB	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Provinsi	1	1		17,405,000	17,405,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
25	274 Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Tim Advokasi provinsi dan Kab/Kota	4	4		6,101,000	5,421,000	88.85%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
26	273 Peningkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak Media Elektronik Media Online serta Media Luar Ruang	Selesai	sudha tahap selesai	100.00	Frekuensi	5	5		9,920,000	9,920,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
27	272 Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Provinsi	1	1		10,051,000	10,051,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
28	270 Peningkatan Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Penggerakan Program Bangga Kencana	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Jumlah Mitra Aktif	5	5		18,326,000	18,322,100	99.98%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
29	277 Pembinaan Penguatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Provinsi	1	1		10,687,000	10,666,000	99.80%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.PBG.001 - Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi														
30	259 Studi kasus dan pembelajaran (provinsi)	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Laporan	1	1		100,770,000	100,379,600	99.61%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.PEA.001 - Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota														
31	285 Koordinasi SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	provinsi dan kab/kota	6	6		774,680,000	774,400,000	99.96%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.QDB.001 - Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI														
32	268 Intensifikasi pelayanan KB di fasyankes	Selesai	sudha tahap selesai	100.00	Faskes	473	474		137,271,000	135,417,500	98.65%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.QDD.001 - PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu														
33	238 Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	PIK Remaja dan BKR	488	488		454,828,000	450,250,646	98.99%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3331.QDD.002 - Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia														
34	239 Penguatan Pelaksanaan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di Kelompok BKL	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kelompok BKL	143	143		218,107,000	217,595,000	99.77%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.QDD.004 - Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga														
35	241 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan Stunting di Kampung KB	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kelompok UPPKA	10	10		85,690,000	84,451,900	98.56%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.QDD.006 - Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB														
36	253 Peningkatan kualitas Rumah Data kependudukan paripurna	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kelompok Masyarakat	79	79		408,702,000	407,231,500	99.64%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.QDE.001 - Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK														
37	237 Peningkatan komitmen dengan pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Provinsi	1	1		20,212,000	20,090,000	99.40%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
38	236 Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE 1000HPK	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Provinsi	1	1		15,728,000	15,669,000	99.62%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
39	235 Promosi dan KIE 1000 HPK	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Keluarga	56,722	56,722		130,701,000	130,581,300	99.91%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.QEI.001 - Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
40	267 Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi faskes yang teregister (termasuk pembinaan, evaluasi dan ketersediaan alokon)	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Fasilitas Kesehatan	473	474		3,579,109,000	3,570,821,270	99.77%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.QMA.001 - Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)														
41	281 Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan serta pemanfaatan basis data keluarga Indonesia	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	kab/kota	5	5		1,625,416,000	1,622,764,800	99.84%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.QMA.002 - Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting														
42	282 Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Layanan	1	1		338,351,000	334,399,900	98.83%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.QMB.001 - Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota														
43	284 Kampanye Percepatan Penurunan Stunting	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Layanan	15	15		1,631,924,000	1,626,424,507	99.66%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.SCM.001 - Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting														
44	401 Pelatihan/Orientasi Tim Pendamping Keluarga	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	orang	5,556	5,556		1,461,850,000	1,453,127,400	99.40%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
45	290 Pelatihan pelayanan kontrasepsi dan orientasi TPK	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Orang	20	25		446,090,000	444,232,600	99.58%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.UAE.001 - Laporan Monitoring dan evaluasi TPK TPPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
46	287 Monitoring dan Evaluasi TPKTTPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Provinsi	1	1		167,941,000	160,910,800	95.81%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.UBA.001 - Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)														
47	255 fasilitasi ekstensifikasi kegiatan bangga kencana di kampung KB	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kampung KB	86	105		42,910,000	42,870,000	99.91%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
48	254 Fasilitasi Intensifikasi kegiatan Bangga Kencana di kampung KB	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kampung KB	95	155		156,940,000	153,747,722	97.97%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.UBA.002 - Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting														
49	256 Kegiatan Pemberdayaan percepatan penurunan stunting di Kampung KB	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kab/Kota	5	5		84,042,000	83,652,000	99.54%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.UBA.005 - Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan														
50	269 Penguatan peran pemerintah daerah dalam pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kab / Kota	5	5		65,164,000	64,314,000	98.70%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
3331.UBA.006 - Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus														
51	402 intensifikasi Pelayanan KBKR di wilayah khusus	Selesai	sudha tahap selesai	100.00	kab/kota	5	5		375,355,000	374,687,000	99.82%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
5297.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal														
52	296 Pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	kegiatan	1	1		53,510,000	50,654,000	94.66%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
53	293 Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Kegiatan	1	1		27,005,000	26,954,500	99.81%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
54	294 Pengelolaan Keuangan dan BMN	Selesai	sudha tahap selesai	100.00	Kegiatan	1	1		69,514,000	69,512,889	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
55	295 Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	Selesai	sdua tahap selesai	100.00	kegiatan	1	1		35,507,000	35,052,500	98.72%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
5297.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
56	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Layanan	1	2		2,571,406,000	2,554,146,400	99.33%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
57	001 Gaji dan Tunjangan	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	Layanan	2	2		48,125,241,000	47,870,841,942	99.47%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
5297.EBB.951 - Layanan sarana internal provinsi														
58	297 Pengadaan sarana Fasilitas Perkantoran	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	unit	1	1		383,624,000	382,890,000	99.81%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
5297.EBD.965 - Layanan Audit Internal														
59	302 Pelaksanaan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi	Selesai	sudha tahap selesai	100.00	Dokumen	1	1		42,508,000	42,507,500	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
5297.PEA.001 - Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi														
60	299 Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	Selesai	sudha tahap selesai	100.00	kegiatan	1	1		122,786,000	122,785,700	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
5297.QAH.001 - Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
61	300 Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	layanan	1	1		65,638,000	65,638,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
5297.QIF.001 - Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi														
62	303 Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	Selesai	sudah tahap selesai	100.00	dokumen	1	1		35,725,000	35,705,000	99.94%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL D.I. YOGYAKARTA

[masih kosong]



Kementerian PPN/
Bappenas



2024

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN
Berencana Itu Keren

